

**ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN PERADABAN
ISLAM DI KAWASAN INDONESIA TIMUR**

*Maluku
dan Luwu*



ktorat
yaan

**ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN PERADABAN
ISLAM DI KAWASAN INDONESIA TIMUR:**

*Maluku
dan Luwu*

PENULIS

AMRULLAH AMIR

BAMBANG BUDI UTOMO



**ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN PERADABAN
ISLAM DI KAWASAN INDONESIA TIMUR:**

Maluku dan Luwu

Pengarah

Hilman Farid

Penanggung jawab

Triana Wulandari, Agus Widiatmoko

Editor

Kasijanto Sastrodinomo, Jajat Burhanudin

Penulis

Amrullah Amir, Bambang Budi Utomo

Pengumpul Data

Agus Widiatmoko, Dwiana Hercahyani, Budi Karyawan S., Devi Kusumastuti P.,
Fider Tendiardi, Restuwati, Dede Sunarya, M. Hafiz Wahfiuddin, Euis Sulastri,
Nurwahyudi, Slamet Sungkono

Tata Letak dan Grafis

Dipa Sandi Dewanty, M. Hafiz W

Penerbit

Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

ISBN: 976 - 602 - 1289 - 44 - 0

SEKAPUR SIRIH

*S*lam sebagai salah satu ajaran keagamaan hadir di nusantara telah memberi sumbangan besar terhadap peradaban Indonesia. Islam yang mula-mula disebarkan lewat media dakwah damai dan akomodatif terhadap budaya lokal diterima dengan mudah oleh masyarakat sebagai agama yang membawa kedamaian. Dalam perkembangannya Islam juga memberi warna dan memperkaya corak peradaban di nusantara.

Peradaban Islam di Indonesia secara kultural menunjukkan jati diri dan kepribadian. Berbeda dengan kultur Islam di negeri asalnya Timur Tengah, ataupun di Afrika dan Eropa. Hal ini tidak lepas dari proses awal masuknya Islam yang diterima secara damai oleh masyarakat dan dikembangkan secara akomodatif dengan unsur-unsur budaya lokal. Kultural Islam yang berbasis lokalitas inilah yang membentuk landasan peradaban Islam di Indonesia, baik yang ada di wilayah barat seperti di Pulau Sumatera dan Jawa, maupun di wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku.

Di Kawasan Timur Indonesia pemikiran dan praktik kehidupan kaum muslim, khususnya di daerah Sulawesi dan Maluku juga mengalami perkembangan yang

kurang lebih sama dengan Islam di wilayah Indonesia lainnya. Ini menandakan peradaban Islam di wilayah timur juga dibangun dengan adanya jaringan penyebaran Islam di wilayah bagian barat yang lebih dulu menerima kedatangan Islam. Secara historis ini terlihat dari perkembangan Islam yang ada di Luwu-Sulawesi Selatan dan Maluku.

Kajian tentang peradaban Islam di wilayah timur Indonesia yang mengambil lokus Luwu-Sulawesi Selatan dan Maluku yang disusun dalam judul Aspek-Aspek Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Indonesia Timur : Luwu-Sulawesi Selatan dan Maluku, sedikitnya memberi inspiratif bahwa peradaban Islam di wilayah timur yang sampai saat ini kurang banyak dibahas perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam.

Harapan kami dengan terbitnya buku yang membahas peradaban Islam di daerah Luwu-Sulawesi dan Maluku dapat mengungkapkan fakta-fakta sejarah tentang dinamika Islam di Kawasan Timur Indonesia. Bagaimanapun juga membicarakan peradaban Islam di nusantara baik di timur maupun di barat sama halnya menggali kembali peradaban Islam dalam kontribusinya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya selamat membaca, semoga bermanfaat.

Direktur Sejarah

Dra. Triana Wulandari, M.Si.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

*I*slam sebagai ajaran agama yang semula berpusat di Mekah dan Madinah dalam perkembangannya juga meliputi jazirah Arab, Afrika, dan hampir sebagian besar Asia dan Eropa. Para pemeluk agama Islam dalam penyebaran selain mengajarkan Islam sebagai ajaran, juga memperkenalkan nilai-nilai budayanya yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai dalam agama Islam. Kebudayaan Islam sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat dan boleh dikatakan telah memunculkan sebuah peradaban tersendiri terutama pada masa-masa kejayaan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Islam sebagai sebuah peradaban dan memberi sumbangan besar terhadap kemajuan umat manusia, pada gilirannya juga mempengaruhi wilayah nusantara seiring dengan masuknya agama Islam dan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara.

Peradaban Islam di Kawasan Indonesia bagian timur juga merupakan hal yang menarik untuk dibahas karena belum banyak karya akademik yang secara komprehensif sebagaimana bahasan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, seperti Sumatera dan Jawa. Ada sebuah ketimpangan ketika membicarakan peradaban Islam di Indonesia yang masih terfokus di Pulau Jawa dan Sumatera

dan sedikit sekali menyinggung keberadaan Islam yang ada di wilayah timur. Padahal pemikiran dan praktik keagamaan kaum Muslim di wilayah timur juga mengalami corak perkembangan yang kurang lebih sama dengan Islam yang ada di wilayah Indonesia lainnya.

Dalam mengisi kesenjangan kajian tentang Islam di barat dan timur wilayah Indonesia menjadi Sejarah Peradaban Islam Indonesia yang utuh dan komprehensif sudah sepatutnya dilakukan. Oleh karena itu penulisan buku Sejarah Peradaban Islam di Wilayah Indonesia Timur yang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan awal yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kami menyambut gembira dengan terbitnya buku kajian tentang peradaban Islam di wilayah Indonesia bagian timur yang berjudul "Aspek-Aspek Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Indonesia Timur: Luwu dan Maluku". Semoga terbitnya buku ini dapat menjadi inspirasi dan menggugah para peneliti dan pemerhati sejarah dalam memperdalam kajian-kajian Islam di wilayah timur. Akhirnya selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid

PRAKATA EDITOR

*H*ingga saat ini, tidak banyak karya akademik yang secara komprehensif membahas sejarah peradaban Islam di kawasan timur Indonesia. Kajian Islam Indonesia-bahkan kajian keIndonesiaan secara umum-baik oleh sarjana Indonesia maupun asing. Sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Sumatera dan Jawa, kawasan barat Indonesia. Kepentingan VOC dan kemudian pemerintah colonial, yang lebih tertarik membangun pusat kekuasaannya di Batavia, telah berperan besar bagi kelangkaan kajian tentang sejarah dan budaya masyarakat di kawasan timur. Akibatnya kajian tentang Islam Indonesia-mulai dari islamisasi, perkembangan kerajaan, kolonialisme, pergerakan dan kebangkitan nasional, hingga lahirnya negara-bangsa Indonesia- memuat gambaran timpang ketika dilihat dari perspektif sejarah kawasan bagian barat Indonesia, khususnya Sumatera dan Jawa mendapat porsi yang besar dan bahkan menyita hamper seluruh pembahasan. Sementara kawasan timur Indonesia, yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali, belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai.

Kenyataan ini jelas perlu diberi perhatian. Dilihat dari sudut pandang sejarah, kawasan timur jelas mengalami satu dinamika dan perkembangan yang relatif

sejajar dengan kawasan barat Indonesia. Kawasan tersebut mulai menjalin kontak dengan kekuatan dagang Islam sedini abad ke-14. Satu abad kemudian, di Maluku Islam telah hadir sebagai kekuatan politik dan social, dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Begitu pula halnya dengan daerah lain. Kita bisa mencatat di sini Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan dan Kerajaan Islam di Buton. Meski tentu tidak bisa dipisahkan dari perkembangan di kawasan Barat-bahwa proses Islamisasi sebagian berlangsung atas jasa para ulama baik dari Sumatera maupun Jawa-berdirinya kerajaan-kerajaan Islam tersebut menjadi penanda tampilnya Islam sebagai satu kategori penting dalam dinamika social-politik dan budaya masyarakat kawasan tersebut.

Demikian halnya dengan pemikiran dan praktek keagamaan. Kaum muslim di Timur Indonesia juga mengalami satu corak perkembangan yang kurang lebih sama dengan Islam di kawasan lain baik di Indonesia maupun di dunia muslim secara umum. Dinamika intelektual dan konstitusi keagamaan, termasuk perjumpaan Islam dengan adat local, bisa ditemukan dalam corak yang sama dengan perkembangan Islam secara umum. Bahkan, Islam di kawasan timur Indonesia selangkah lebih maju menyangkut pergumulan dengan dunia barat Kristen. Sedini abad ke-14, masyarakat kawasan tersebut harus berhadapan dengan arus kristenisasi yang intensif.

Bertolak dari pemikiran tersebut, buku tentang sejarah peradaban Islam di kawasan Indonesia timur yang utuh dan komprehensif sudah semestinya ditulis. Buku ini diharapkan bisa mengungkap fakta-fakta sejarah tentang dinamika Islam di kawasan tersebut, sejak awal proses Islamisasi sampai terbentuknya Negara Indonesia yang selama ini relative terabaikan dalam kajian Islam Indonesia.

Sejumlah istilah kunci perlu dijelaskan disini sehingga kekaburan makna dan batasan wilayah bisa dielakkan. Istilah terpenting dalam hal ini adalah "kebudayaan". Banyak definisi telah diberikan menyangkut istilah tersebut, mulai dari yang sederhana-bahwa kebudayaan sebagai seni-hingga yang kompleks dan menyeluruh, bahwa istilah tersebut meliputi hamper semua aspek dalam kehidupan manusia.

Dalam studi Indonesia, kebudayaan telah diadopsi beberapa sarjana sebagai satu pendekatan untuk menjelaskan subyek yang dikaji. Beberapa diantaranya bisa disebut di sini, yaitu Anderson (1972) dan Moertono (1968) tentang politik di Jawa, Milner (1982) tentang politik dunia Melayu, Mulder (1970) tentang

sistem social di Jawa, Castle (1976) tentang ekonomi kaum santri, dan Abdullah (1971,1972) serta Hefner (1985) tentang pergeseran dan perubahan social masing-masing di Sumatera Barat dan Jawa Timur. Meski dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, semua kajian para sarjana tersebut bertolak dari sebuah perspektif yang menekankan pentingnya budaya dalam perkembangan dan perubahan sosial-politik kaum Muslim.

Sarjana lain yang sangat penting disebut disini adalah Clifford Geertz. Dalam konteks spesifik, pengertian budaya sebagaimana diketengahkan Geertz sangat relevan untuk dipertimbangkan. Geertz memaknai budaya sebagai sistem makna yang tampil “menjadi sumber, secara individu maupun kelompok, bagi konsepsi umum, tetapi distinktif, tentang dunia, diri, dan hubungan diantara mereka” (Geertz, 1973). Pemikiran Geertz dibangun melalui studinya di Jawa, dan terefleksikan pada karyanya yang sangat seminal, *The Religion of Java* (1960). Dalam buku ini, Geertz membagi masyarakat Jawa kedalam tiga orientasi agama dan sosio-politik yang berbeda. *Santri*, Muslim taat dan ortodok, *priyayi*, elite ningrat yang dalam batas tertentu dipengaruhi tradisi Hindu-Jawa, dan *abangan*, sebagian besar masyarakat desa yang percaya kepada praktik pra-Islam dan praktik-praktik animism.

Memang, karya ini masih menjadi sasaran kritik. Beberapa sarjanamempertanyakan teori Geertz, terutama berkenaan dengan pencampuradukan kategori sosial-vertikal priyayi dengan kategori religio-budaya bersifat horizontal antara santri dan abangan (Koentjaraningrat, 1963, Bachtiar, 1973). Kritik atas Geertz juga disuarakan beberapa sarjana lain yang tampil sebagai pembela Islam Jawa (Woodward,1988,1989, Pranowo,1991, Muhaimin,1995). Mereka berangkat dari pemikiran Marshal Hodgson (1974) yang mengkritik Geertz atas pemahaman Islamnya yang “hanya berdasar cara pandang kelompok modernis, seraya menganggap segala hal yang lain berasal dari latar belakang pribumi dan Hindu-Budha”.

Lepas dari itu semua, poin penting untuk ditekankan adalah bahwa Geertz telah meletakkan dasar kuat tradisi kulturalis dalam studi ini Indonesia, dimana sistem budaya memiliki posisi sentral dalam kehidupan. Tiga kelompok masyarakat Jawa (santri, abangan, dan priyayi), tidak hanya bisa dilihat dari sisi pengelompokan social (*social grouping*), tapi juga pada sistem pengetahuan, pemaknaan dan praktik-praktik ritual keagamaan, dan bahkan afiliasi politik, semua itu melahirkan

apa yang kemudian disebut sebagai politik aliran dalam sejarah Indonesia.

Dengan demikian, istilah kebudayaan Islam dalam konteks ini mengacu pada kondisi dimana Islam berfungsi sebagai sistem makna yang sangat berarti menentukan kehidupan kaum Muslim, mulai dari pemikiran, sikap social politik dan keagamaan, praktik-praktik ritual, institusi dan gerakan, cita rasa (bahasa, sastra, dan seni), hingga benda-benda peninggalan yang terkait dengan konsepsi dan pemaknaan keagamaan. Semua itu menjadi elemen utama dari kebudayaan Islam. Dengan demikian, istilah tersebut mengacu pada dimensi keislaman yang sudah terinstitusionalisasi sedemikian rupa dalam kehidupan kaum Muslim. Islam yang telah berfungsi sebagai sumber makna bagi kaum Muslim untuk memaknai dunia, diri, dan hubungan sesama mereka.

Dalam sejarah Indonesia, tampilnya Islam sebagai sumber makna sebagaimana dikatakan Geertz berlangsung dalam proses yang panjang, dan melalui berbagai lapisan pengamanan sejarah yang bertingkat-tingkat, mulai dari konversi keagamaan-ketika seseorang memutuskan untuk beralih menjadi muslim-hingga periode ketika Islam menjadi satu kekuatan social-politik dan selanjutnya gerakan untuk revitalisasi praktik-praktik Islam sehingga sesuai sejalan dengan tuntutan-tuntutan baru yang muncul dalam perkembangan sejarah. Semua unsur kebudayaan Islam akan dikaji dari sudut pandang sejarah, dimana perubahan dan kesinambungan akan menjadi satu tema penting dalam pembahasan. Dengan demikian, semua hal yang termasuk dalam kebudayaan Islam tidak dilihat secara statis dan berdiri sendiri, semua memiliki kaitan satu sama lain dan terus menerus berubah sejalan dengan konteks sosiologis kaum Muslim dalam sejarah Indonesia.

Penelitian tentang sejarah peradaban Islam di kawasan Indonesia Timur ini diarahkan pada tujuan sebagai berikut. Pertama, melakukan kajian dan penulisan sejarah perkembangan dan dinamika masyarakat Muslim di kawasan Indonesia Timur. Kedua, menyediakan bahan informasi tentang Islam di kawasan Indonesia Timur yang selama ini belum tersedia. Ketiga, menyelenggarakan sosialisasi hasil penelitian dan penulisan tentang sejarah kebudayaan Islam di kawasan timur Indonesia. Terakhir, keempat, merumuskan proyeksi pengembangan kebudayaan Islam di kawasan timur Indonesia.

Tentang Buku Ini

Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan buku ini. Pertama, aspek pelayaran dan perdagangan dipandang penting untuk melihat awal terbukanya wilayah Indonesia bagian timur dengan “dunia luar.” Melalui kegiatan itulah kontak-kontak antara masyarakat di kawasan itu terjalin dengan masyarakat lain di Kepulauan Nusantara, bahkan dengan komunitas internasional. Selanjutnya, perlu ditilik bagaimana proses peralihan religi dan praktik keagamaan pada masyarakat kawasan Indonesia Timur. Seperti diketahui, jauh sebelum terjadi kontak dengan kebudayaan luar, masyarakat lokal telah melaksanakan praktik religinya sendiri, sementara “agama modern”—termasuk Islam—dibawa oleh kaum saudagar dan kolonialis.

Aspek berikutnya yang perlu disingkap adalah pembentukan kerajaan lokal di kawasan timur Indonesia. Pada awalnya, pembentukan kerajaan bisa dilihat sebagai proses sosial ketika suatu masyarakat mencoba mengorganisasikan diri sebagai suatu entitas. Kerajaan diperlukan untuk menata dan mengatur segala proses sosial dalam kehidupan mereka. Dengan sistem kerajaan pula suatu masyarakat menegaskan wilayah kekuasaan dan kedaulatan serta meniti pengembangan kebudayaannya. Seiring dengan kedatangan para saudagar dan kolonialis serta pendatang lainnya, institusi kerajaan berperan penting. Kerajaan merupakan agency yang bernegosiasi dengan sesama kerajaan maupun dengan unsur asing yang berdatangan tersebut. Tidak jarang, negosiasi mengalami kebuntuan sehingga terjadi peperangan. Dengan kata lain, pembahasan tentang pembentukan kerajaan ini akan berimplikasi pada aspek dinamisnya, baik dalam hubungan antar-kerajaan, politik, perdagangan, dan tentu saja kebudayaan.

Seperti diketahui, Islam merupakan aspek yang menonjol dalam perkembangan keagamaan dan kebudayaan di pelbagai kerajaan di timur Indonesia. Selain menjadi pilihan keyakinan “baru” pada umumnya masyarakat kerajaan di Indonesia Timur, Islam telah meneguhkan pelbagai konsep dan jatidiri pada sebagian besar masyarakat di wilayah itu. Demikianlah, Islam menjadi orientasi relasi masyarakat kerajaan Indonesia Timur baik secara vertikal dan horisontal. Islam menjadi syariat, identitas kultural, gagasan politik, ekonomi, dan artikulasi keintelektualan. Pada saat bersamaan, Islam tak luput bernegosiasi dengan adat masyarakat setempat yang pada dasarnya telah berakar pada masa sebelum kedatangan agama samawi itu. Hubungan Islam vis-a-vis adat

menunjukkan situasi yang berbeda-beda dari satu ruang dengan ruang lain. Yang sering terjadi memunculkan keharmonisan, namun tak jarang ketegangan, bahkan konflik. Namun, pada akhirnya secara relatif menampilkan kestabilan—bukan saja di Indonesia Timur melainkan pada sebagian besar wilayah Nusantara.

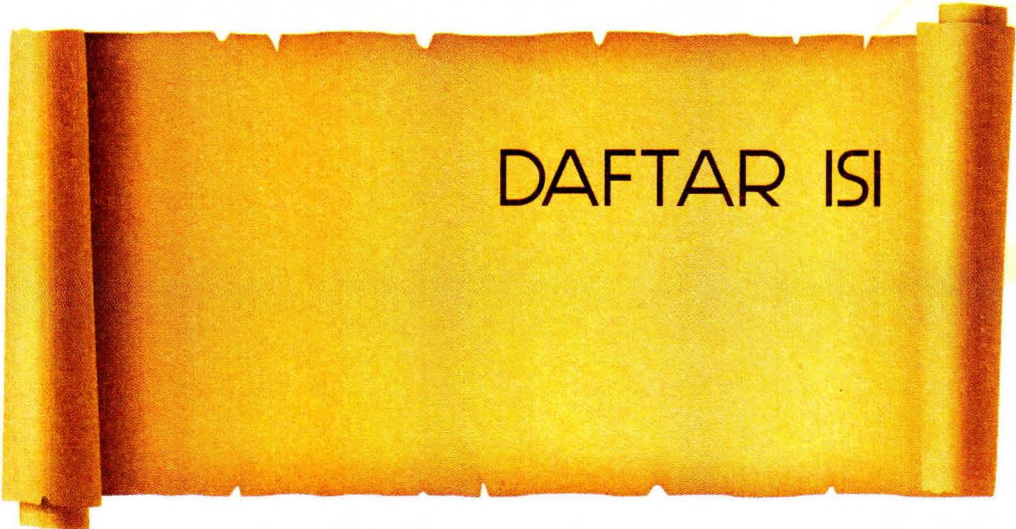
Seiring perkembangan zaman, Islam pun mengalami proses modernisasi. Aspek ini tak bisa diabaikan sebagai substansi pertumbuhan dan perkembangan sejarah kebudayaan di timur Indonesia. Tanda-tanda kemodernan Islam itu bisa dilihat pada berdirinya institusi pendidikan Islam, reformasi pesantren, tampilnya intelektual Islam, dan sebagainya. Patut dicatat bahwa proses modernisasi ini juga memakan waktu yang panjang, tidak jarang memunculkan konflik internal Islam. Hal itu menyiratkan bahwa terdapat keragaman mazhab atau sekadar pandangan dalam Islam yang masuk ke Kepulauan Nusantara.

Akhirnya, sejarah kerap menyimpan tragedi. Perkembangan masyarakat di timur Indonesia tak luput dari letusan senapan dan ledakan meriam yang dilancarkan bangsa Barat. Hal itu membuat masyarakat di sana bahu-membahu meladeni peperangan melawan penjajah baik Belanda maupun Portugis. Para sultan di pelbagai kerajaan di timur Indonesia telah tampil sebagai panglima perang yang gagah berani dan pahlawan bagi rakyatnya. Barangkali benar adagium yang menyatakan bahwa perang, pada masa lalu, bersanding dengan ekonomi dan budaya.

Dengan rendah hati, buku ini belum memenuhi harapan “ideal” atas kerangka isi yang telah disebutkan. Masih ditemukan rumpang di sana-sini. Kendala waktu penelitian yang terbatas serta kesulitan menemukan sumber baru belum memungkinkan hasil yang optimal. Namun, tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya penulisnya, buku ini dapat dipandang sebagai rintisan untuk melanjutkan program penelitian dan penulisan sejarah peradaban serupa pada edisi mendatang. Kritik dan saran pembaca sangat diharapkan sehingga dapat memacu kinerja yang lebih baik.

Jakarta, November 2016

Editor



DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	v
PRAKATA EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
1. PENDAHULUAN	1
2. MASUKNYA ISLAM, KEHIDUPAN DAN ADAT ISTIADAT DI SULAWESI SELATAN.....	15
2.1 Sulawesi Selatan Sebelum Penyebaran Agama Islam.....	15
2.2 Kehadiran Orang Melayu.....	20
2.3 Kedatangan Tiga Mubalig dari Minangkabau	29
2.4 Ajaran Islam dalam Kehidupan dan Adat Istiadat	37

3. KEDATUAN LUWU	41
3.1 Luwu Dalam Tradisi Lisan, Catatan Naskah . Tradisional, dan Sejarah.....	41
3.2 Ikatan Kekerabatan antara Luwu dan Gowa	49
3.3 Keadaan Geografi Kedatuan Luwu.....	51
3.4 Struktur Sosial dan Kehidupan Sosial di Kedatuan Luwu	55
 4. DATUK SULAIMAN DAN PENYEBARAN ISLAM DI LUWU	61
4.1 Penerimaan Islam di Luwu.....	61
4.2 Konsep Ajaran Datuk Sulaiman.....	72
4.3 Keadaan Negeri Luwu Setelah Kematian Datuk Sulaiman	76
4.4 Masa Pemerintahan Datu Luwu XVI Sultan Abdullah.....	77
 5. PENINGGALAN ISLAM DI LUWU	85
5.1 Kota Palopo	85
5.2 Masjid Jami' Palopo.....	88
5.3 Kompleks Makam Raja-raja di Lokko'e.....	89
 6. PERADABAN ISLAM DI MALUKU	93
6.1 Pengertian Maluku	93
6.2 Lingkungan Alam	95
6.3 Daya Tarik Maluku	101
6.4 Cengkih Hanya ada di Maluku.....	103
6.5 Era Perdagangan Rempah.....	107

7. AWAL MASUKNYA PERADABAN ISLAM DI MALUKU	115
7.1 Masuknya Islam	115
7.2 Islam di Maluku	121
8. KERAJAAN ISLAM DI MALUKU	131
8.1 Kerajaan Islam di Maluku.....	131
8.2 Kerajaan Hitu	135
8.3 Penggabungan Empat Hitu.....	140
8.4 Pemerintahan di Tanah Hitu	142
8.5 Kesultanan Ternate	144
8.6 Sistem Pemerintahan di Ternate.....	146
8.7 Persekutuan Moloku Kie Raha	148
8.8 Awal dan Perkembangan Islam	149
8.9 Kesultanan Tidore	151
8.10 Awal Institusi Kerajaan	152
8.11 Struktur Pemerintahan di Tidore	153
8.12 Kehidupan Sosial Budaya	155
9. WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN ISLAM	157
9.1 Wujud Kebudayaan di Maluku.....	157
9.2 Masjid Wapauwe.....	160
9.3 Warisan Ternate	164
9.4 Masjid Sultan Ternate	165
9.5 Masjid Kesultanan Tidore.....	168
9.6 Islam dan Arsitektur Masjid	170

9.7 Jejak Persia di Maluku	172
9.8 Wali Sanga, Orang Suci dan Tasawuf	174
9.9 Tradisi	175

DAFTAR PUSTAKA	179
-----------------------------	------------

BIODATA PENULIS	189
------------------------------	------------

1 PENDAHULUAN

*P*eradaban Islam dipandang sebagai salah satu peradaban dunia yang memberikan sumbangan luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Peradaban tersebut telah memberikan landasan bagi perkembangan dan kemajuan dalam sejarah manusia hingga masa kini. Melalui pengkajian tentang peradaban Islam memungkinkan bagi berbagai kalangan untuk dapat belajar, memahami dan mengambil pengalaman melalui perjalanan sejarah umat manusia dalam mengembangkan Islam di setiap negeri yang menjadi bagian peradaban tersebut.

Peradaban atau dalam bahasa Arab disebut *hadharah* secara etimologi berasal dari kata *hadhara* yang berarti 'ada', 'daerah perkotaan'. Kata *hadhar* atau daerah perkotaan merupakan kebalikan dari kata *al badwu* atau pedalaman. Bahasa Arab juga menyebutkan kata *al-hadharah* sebagai 'menetap di suatu tempat secara permanen'. Sementara, definisi *hadharah* secara terminologi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan tetap manusia yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial, pemikiran, dan kesenian (Mahasnah 2016: 10–1). Sejumlah sarjana menyamakan *hadharah* dengan *civilization* yang berakar dari bahasa Latin '*civities*' yang bermakna kota dan kata '*civis*' yang berarti penduduk kota (Mahasnah 2016: 12).

Menurut Ibnu Khaldun, *hadharah* atau peradaban adalah puncak peradaban sedangkan *badawah* atau nomadik atau pola hidup yang berpindah-pindah merupakan asal-muasal peradaban yang muncul lebih dahulu dibandingkan *hadharah*. Ibnu Khaldun mendefinisikan peradaban sebagai 'suatu kondisi yang merupakan hasil dari suatu adat dan melebihi batas dari kondisi yang dibutuhkan atas suatu peradaban'. Batasan ini bisa memiliki konteks yang berbeda sesuai dengan perbedaan yang tidak terbatas dalam kemakmuran serta sedikit banyaknya bangsa-bangsa (Mahasnah 2016: 11). Adapun Arnold Toynbee berpendapat bahwa peradaban merupakan hasil aktivitas manusia di ranah sosial dan moral yang merupakan gerakan yang terus maju dan bukan realita yang statis dan kaku. Peradaban adalah perjalanan kehidupan yang terus berlangsung (Mahasnah 2016: 12).

Adapun pengertian Islam secara etimologi berasal dari kata *as-salamu* yang berarti 'ketundukan' (*as-salam*) dan 'kepatuhan' (*al-istislam*). Adapun definisi Islam secara syara' adalah meng-Esakan Allah SWT dengan cara tunduk dan patuh kepada-Nya, keikhlasan hati, serta iman dan percaya kepada dasar-dasar agama yang datang dari sisi-Nya yaitu agama para Rasul yang dimulai dari Nabi Adam hingga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup dari agama-agama samawi. Islam merupakan agama tauhid yang mengatur urusan materi dan spiritual yang menyeimbangkan antara kebutuhan hidup di dunia dengan tuntutan kehidupan di akhirat kelak (Mahasnah 2016: 20).

Sejarah peradaban Islam di Sulawesi Selatan bermula dari munculnya Kedatuan Luwu yang menerima Islam sebagai agama kerajaan pada awal abad ke-17. Setelah Kedatuan Luwu yang merupakan kerajaan tertua dan paling disegani menjadi kerajaan Islam, kerajaan kembar Gowa-Tallo yang terkuat dan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan pada masa itu mengikuti jejak Kedatuan Luwu menjadi kerajaan Islam. Sejak saat itu pengaruh dan penyebaran Islam di sebagian besar wilayah tersebut berlangsung sepanjang satu dasawarsa baik dilakukan secara damai maupun dengan peperangan.

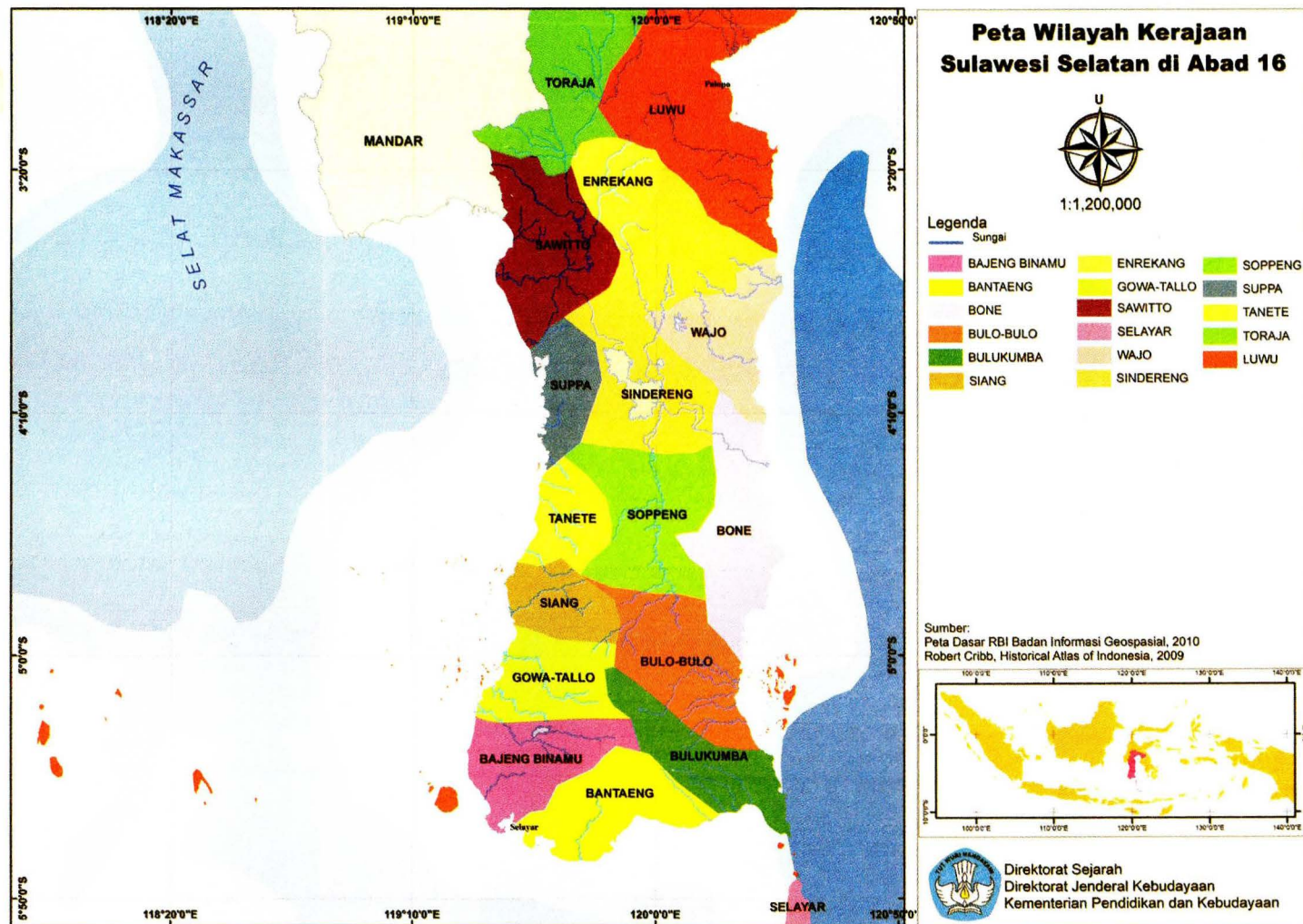
Sementara itu, Luwu merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu sering disebut Kedatuan Luwu karena penguasa kerajaan itu menggunakan gelar Datu atau *Pajung*. Luwu dianggap sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan berdasarkan catatan naskah-naskah lokal yang menyatakan hal tersebut. Raja Luwu juga dianggap sebagai moyang dari raja-raja di Sulawesi Selatan sehingga dalam naskah tradisional dinyatakan bahwa "Luwu

dimuliakan karena merupakan asal dari para leluhur raja-raja Bugis dan Makassar.”

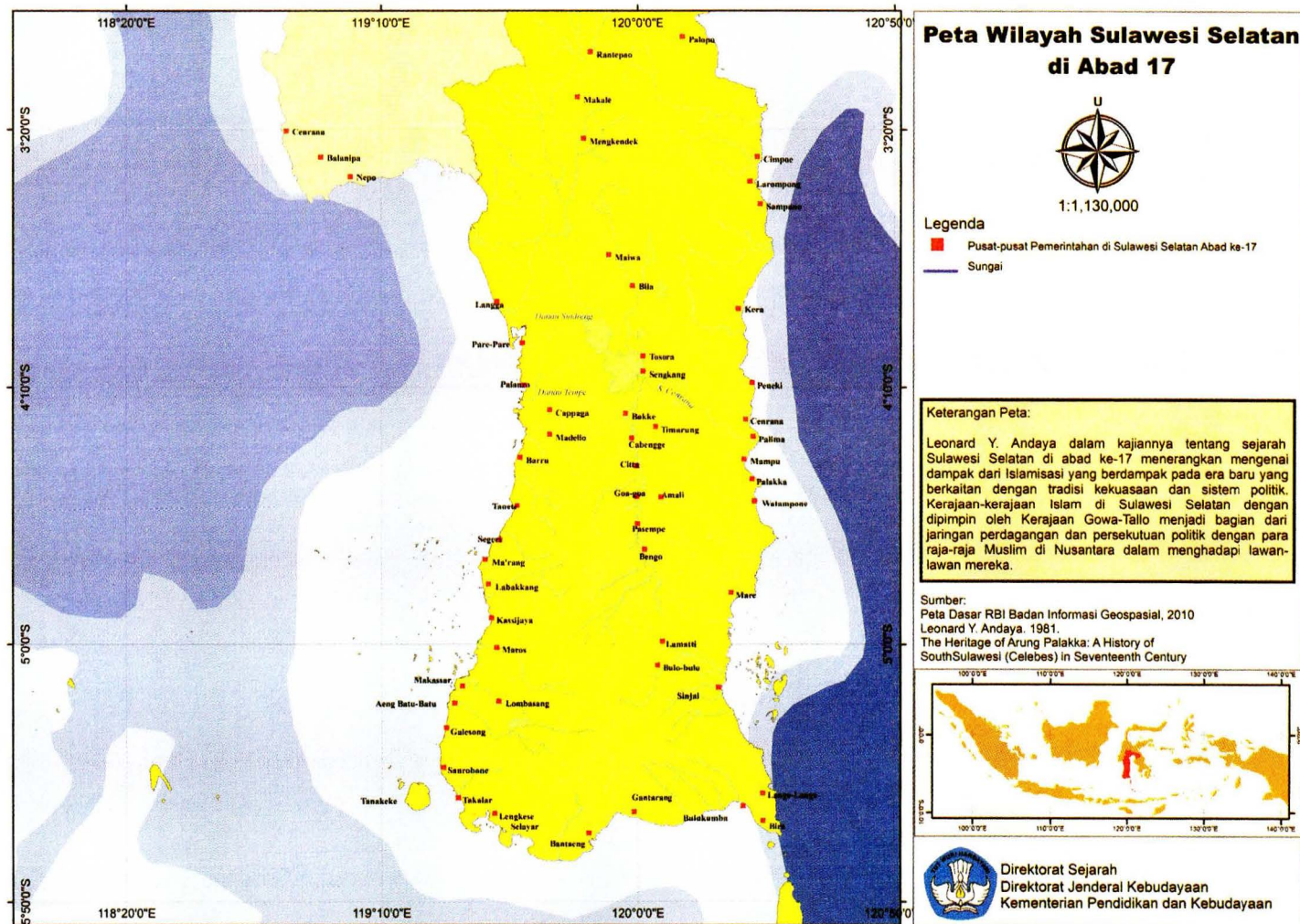
Pengkajian mengenai peradaban Islam di Luwu belum banyak dilakukan walaupun sebagian besar sumber lokal ataupun asing, baik dari sumber Belanda maupun Portugis, sejak abad ke-16 telah menyatakan bahwa Luwu adalah kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang rajanya memeluk agama Islam pada awal abad ke-16. Lontarak Wajo atau Kronik Kerajaan Wajo telah menyebutkan bahwa pada hari Jumat bertepatan dengan 15 Ramadhan 1013 Hijriah atau berdasarkan penanggalan Masehi jatuh pada 4 Februari 1605, baginda Datu Luwu XV bernama La Patiware Daeng Parabung (1587–1615) memaklumkan bahwa dirinya memeluk agama Islam di hadapan para bangsawan dan rakyat Kedatuan Luwu.¹ Datu Luwu didampingi oleh Datuk Sulaiman, mubalig dari negeri Minangkabau yang memperkenalkan ajaran Islam kepadanya. Baginda Datu La Patiware Daeng Parabung kemudian menggunakan gelar ‘sultan’ sebagai pertanda penguasa beragama Islam yaitu Sultan Muhammad Waliy Muzahir al-Din. Pada masa itu Kedatuan Luwu berpusat di Patimang, di wilayah Malange, berjarak sekitar 60 kilometer dari kota Palopo yang menjadi lokasi istana Kedatuan Luwu sekarang (Mahmud, Wolman dan Sumantri, dalam Sumantri [ed.] 2006: 162–9). Kedatuan Luwu adalah kerajaan tertua dan dihormati oleh kerajaan yang lain di wilayah Sulawesi Selatan.

Kedatuan Luwu telah dikenal dalam pelayaran dan perdagangan di Nusantara sejak abad ke-14 Masehi dengan berdasarkan penemuan arkeologi berupa keramik dan manik-manik yang menjadi petunjuk dari kegiatan tersebut (Bulbeck dan Prasetyo dalam Sumantri [ed.] 2006: 127). Bahkan sejak abad ke-13, kerajaan ini menjadi bagian dari jaringan niaga Nusantara dengan komoditas utama berupa biji besi yang dihasilkan oleh beberapa wilayahnya (Bulbeck dan Prasetyo dalam Sumantri [ed.] 2006: 129). Pamor besi dari wilayah kerajaan ini telah dikenal sampai di Tanah Jawa dan menjadi salah satu bahan utama pembuatan keris unggulan (Frey 1986: 3–6). Kitab *Negarakertagama* atau *Desawarnana* yang disusun pada masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 telah menyebutkan nama Luwu yang mengakui kedaulatan Majapahit bersama dengan beberapa wilayah lainnya di Sulawesi Selatan seperti Makassar, Bantaeng, Selayar, dan Butun (Pigeaud 1960/63 [III]: 17).

1 Lontara *Sukkuna Wajo* menyebutkan bahwa Datu Luwu La Patiware Daeng Parabung menerima Islam pada 1603 M atau 15 Ramadhan 1013 H. Merujuk kepada penanggalan Hijriah yang lebih lengkap dibandingkan dengan penanggalan Masehi maka yang menjadi patokan adalah penanggalan Hijriah yang seharusnya menunjukkan tahun 1605 berdasarkan perhitungan Masehi. Lihat Noorduyt dalam Soedjatmoko, dkk. (ed.) (1975: 175); lihat juga Sewang (2004: 93).



Gambar 1.1. Peta Wilayah Sulawesi Selatan sekitar 1600



GAMBAR 1.2. PETA WILAYAH SULAWESI SELATAN ABAD KE-17

Pengislaman Kedatuan Luwu kemudian diikuti oleh Kerajaan Gowa dan Tallo,² dua kerajaan di wilayah Makassar yang merupakan kerajaan terbesar dan terkuat sepanjang abad ke-16/17 di Sulawesi Selatan. Pengislaman kedua raja pada kerajaan itu hanya berselang sekitar tujuh bulan atau pada September 1605, setelah Datu Luwu menyatakan diri memeluk agama Islam. Peristiwa masuknya Datu Luwu, Raja Gowa, dan Raja Tallo menjadi episode awal penyebaran Islam di Sulawesi Selatan sepanjang sekitar dua dekade.

Penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17 menyajikan sejumlah bukti yang berasal dari dalam maupun dari luar seperti halnya Islamisasi yang terjadi di wilayah lain di Nusantara atau secara umum yang berlaku di Asia Tenggara. Kisah-kisah pengislaman di Sulawesi Selatan yang terdapat dalam cerita-cerita rakyat maupun sumber naskah yang termuat dalam salinan *lontarak* (lontara) menggambarkan peristiwa sejarah yang tampak sebagai bagian dari rencana Tuhan kepada manusia. Menurut Anthony Reid dalam ulasannya mengenai Islamisasi Asia Tenggara menyatakan bahwa yang perlu diperhatikan adalah peralihan kerajaan menjadi Islam pada hampir seluruh wilayah Asia Tenggara selalu disertai dengan berbagai peristiwa gaib sebagai pendahuluan dari rencana Tuhan (Reid 2004: 20–52). Kisah pengislaman di Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam cerita rakyat dan *lontarak* memiliki persamaan dengan kronik-kronik Melayu seperti kronik Pasai, Malaka, dan Patani (Liauw 2011: 436–9; 439–60; 503–8) atau babad Tanah Jawa (Ras 2014: 247–57) yang menampilkan kisah pewahyuan melalui mimpi kepada para raja atau mukjizat para wali Allah di hadapan penguasa setempat sebelum raja memeluk agama Islam.

Beberapa kisah lokal di Sulawesi Selatan mengenai perpindahan agama diwarnai dengan kisah mistis. Pengislaman Makassar bermula dengan kisah raja

- 2 Penyatuan dua kerajaan utama di wilayah Makassar, yang sebelumnya terlibat persaingan dan perang bertahun-tahun lamanya, akhirnya mengalahkan Kerajaan Tallo pada masa Raja Gowa ke-10 yaitu I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (memerintah 1546–65); sedangkan di Tallo pada saat itu dipimpin oleh Raja Tallo ke-4 bernama I Nappakata'tana Daeng Padulung. Kedua kerajaan yang sebenarnya masih berkerabat tersebut kemudian membuat sebuah perjanjian dengan kesepakatan yang disebut *Rua Karaeng se're ata* yang berarti 'dua raja tetapi seorang hamba'. Perjanjian tersebut bermakna bahwa kedua raja berkuasa telah menyatukan rakyat kedua kerajaan dalam satu pemerintahan bersama. Dalam pemerintahan tersebut Raja Tallo berperan sebagai perdana menteri atau mangkubumi dari Kerajaan Gowa. Para sejarawan menamakan kedua kerajaan tersebut sebagai Kerajaan Makassar yang dalam perkembangan kemudian Kerajaan Gowa menjadi lebih terkenal sehingga dalam beberapa karya yang membahas kerajaan Makassar disamakan dengan Kerajaan Gowa. Lihat Pa'tunru (1993: 8–9).

Tallo I Malingkang Daeng Manyonri Karaeng Katangka atau lebih dikenal dengan Karaeng Matoaya yang dalam perjalanannya menemui Datuk Abdul Makmur atau Datuk ri Bandang terlebih dulu berjumpa seorang tua yang dianggap sebagai perwujudan penjelmaan Nabi Muhammad yang kemudian menuliskan surah Al-Fatihah di atas kuku jari raja Tallo tersebut (Chambert-Loir dalam Perret dan Ramli [ed.] 1998: 23–57). Sama halnya dengan kisah pengislaman daerah Tiro di Bulukumba yang dilakukan oleh Datuk Abdul Djawab yang memenangkan uji ilmu kebatinan dengan masyarakat setempat yang gemar melakukan sihir dalam membinasakan musuh (Sewang 2004: 96–7; Mahmud 2012). Demikian pula dalam kisah Puang Paboli seorang bangsawan Baebunta, sebuah wilayah kedatuan Luwu yang masuk Islam akibat kalah beradu kesaktian dengan Datuk Sulaiman (Mahmud 2012: 44–6). Unsur-unsur gaib itu menampilkan pengaruh masa pra-Islam yang bertujuan untuk memperlihatkan asal-usul kerajaan, pengaruh, atau kesaktian dari para penguasa tersebut, namun penggambaran tersebut tetap berada dalam bingkai yang dapat diterima oleh kalangan Muslim secara umum (Reid 2004: 20).

Letak Sulawesi Selatan yang strategis dalam pelayaran antara Kepulauan Maluku dengan Malaka membuat sejumlah kerajaan terutama di sepanjang pesisir selatan hingga barat daya Sulawesi menjadi tempat persinggahan (Amir 2015). Pelabuhan Makassar yang berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa menjadi tujuan utama pelayaran dan persinggahan para pedagang Melayu dan Eropa di bagian timur Nusantara sepanjang abad ke-16 (Villiers 1990: 143–59). Hal ini menyebabkan wilayah itu diberkahi sumber-sumber luar terutama dari bangsa Portugis dan Belanda. Persaingan dagang dan pengaruh kepada para penguasa kerajaan antara orang-orang Melayu yang beragama Islam dengan Portugis sebagai perwakilan agama Katolik membuat mereka menawarkan keyakinan iman mereka kepada para raja dan bangsawan. Demikian pula antara para pedagang Belanda dengan Kerajaan Gowa yang memperebutkan dominasi atas perdagangan rempah-rempah Maluku (Sewang 2004: 52–70).

Sumber-sumber Eropa memperlihatkan Islam sebagai saingan atau ancaman bagi kepentingan mereka di wilayah timur Nusantara. Seorang Portugis bernama Antonio de Payva menerangkan bahwa saingan utama mereka dalam berdagang dan menyiarkan ajaran agama adalah para pedagang Melayu Islam yang berasal

dari Sentana (Ujung Tanah), Pao (Pahang), dan Patane (Patani) yang berusaha mengubah niat raja memeluk agama Katolik dan menariknya masuk agama Islam. Payva menyebutkan, pada 1545 para pedagang Melayu telah ramai menetap di wilayah bandar pelabuhan Kerajaan Siang yang terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi. Para pedagang Melayu ini mengumpulkan produk perdagangan yang bernilai tinggi antara lain kayu gaharu, kulit penyu, dan beras (Schurharmmer 1977: 528; Pelras dalam Bonneff, dkk. 1983: 58–82; Reid 2004: 154–5).

Gambaran mengenai masyarakat Sulawesi Selatan juga diberikan oleh seorang bangsa Perancis bernama Nicolas Gervaise yang menulis tentang deskripsi Kerajaan Makassar sebelum dan setelah Islam berdasarkan narasumber dari anggota keluarga Kerajaan Gowa. Gervaise menyebutkan bahwa sebelum Islam masuk, orang-orang Makassar adalah penyembah berhala seperti halnya masyarakat di wilayah Hindia lainnya dan mereka memuja matahari dan bulan (Gervaise 1701: 118). Namun, gambaran tersebut berubah sama sekali dalam catatan pengunjung lain yang bernama Alexander de Rhodes yang mendatangi Makassar setelah empat puluh tahun kemudian dan melihat bahwa di Makassar sudah tidak ada lagi babi karena pribumi telah memeluk agama Islam, kaum wanita telah menutup tubuh seluruhnya dari kepala hingga kaki sehingga wajah mereka pun tidak terlihat (Reid 2004: 34). Laporan bangsa Eropa ini merupakan sumber yang memadai mengenai masyarakat termasuk perkembangan Islamisasi di Sulawesi Selatan.

Selain sumber-sumber naskah lokal, cerita rakyat, dan catatan bangsa Eropa, Islamisasi juga memberikan sumber berupa peninggalan arkeologis dari peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Makam-makam bercorak Islam dan mesjid-mesjid tua peninggalan awal peradaban Islam menjadi bukti terjadinya perubahan yang besar di masyarakat. Makam para penziar agama Islam yang terkenal dengan sebutan “Tiga Datuk” (orang Bugis menyebut mereka dengan istilah *datuk tellue* dan di Makassar dengan sebutan *datuk tallua*) sampai hari ini ramai dikunjungi para peziarah. Mesjid-mesjid pertama yang didirikan pada awal penerimaan Islam sepanjang satu dekade abad ke-17 beberapa di antaranya masih berdiri dan masih digunakan untuk beribadah dan kegiatan keagamaan Islam seperti mesjid tua di Kerajaan Sandrabone yang dibangun awal abad ke-17, mesjid Katangka di Gowa yang didirikan pada 1605, dan mesjid Jami Palopo

yang dibangun pada 1606 (Duli, dkk. 2013). Pembangunan Mesjid Jami Tua Palopo seiring dengan pemindahan pusat istana Luwu dari Malangke ke Palopo tampaknya merupakan usaha yang dilakukan oleh penguasa Luwu dalam usaha membangun tatanan baru yang Islami yakni pemerintahan, kota, dan rakyatnya. Tampaknya upaya ini juga untuk memperjelas maksud pendirian kota Palopo sebagai kota kerajaan Luwu Islam menggantikan Malangke.³

Menurut J. Noorduyn (1972: 9–10), dalam kajiannya tentang Islamisasi di Makassar, penyebaran Islam memiliki kesamaan dengan wilayah lain di Nusantara yaitu melalui tiga tahapan: kedatangan, penerimaan Islam, dan penyebarannya lebih lanjut. Pandangan ini merujuk kepada kehadiran para pedagang Melayu dan telah bermukim di Makassar sejak masa Raja Gowa X Tunipalangga Karaeng Lakiung (1546–65). Dalam kronik Gowa disebutkan bahwa para pedagang Melayu yang berasal dari Pahang, Patani, Campa, Minangkabau, dan Johor, tersebut diberi pemukiman oleh raja di kampung Mangallekana dekat Somba Opu ibu kota Kerajaan Gowa. Mereka mendapat keistimewaan dari raja berupa perlindungan termasuk didirikan sebuah mesjid yang didirikan bagi mereka beribadah walaupun pada saat itu raja belum memeluk Islam (Cummings 2007: 34, 68–9; Pa'tunru 1993: 15). Para pedagang Melayu yang bermukim di Makassar bertanggung jawab atas pengislaman Makassar dengan mendatangkan tiga orang mubaliq yang berasal dari Koto Tangah di Minangkabau pada awal abad ke-17 pada masa pemerintahan Raja Gowa XIV I Mangngarangi Daeng Manrabia. Pada masa pemerintahan raja tersebut ajaran Islam menyebar di seluruh Sulawesi Selatan (Reid 2004: 155; Resink: 37–8).

Penyebaran syiar Islam di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh tiga mubalig asal Minangkabau yang bernama Datuk Sulaiman, Datuk Abdul Makmur, dan Datuk Abdul Jawad menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan pada masa itu. Pendekatan yang dilakukan oleh Datuk Sulaiman di Luwu adalah memperkenalkan ajaran tauhid untuk menggantikan kepercayaan *Dewata Seuwa* yang diyakini oleh masyarakat Luwu kepada keimanan kepada Allah Yang Maha Esa (Mattulada 1976: 20–1; Sewang

3 Pola ini tampaknya berlaku umum di Nusantara seperti pemindahan kota Banten Girang yang Hindu ke Banten Lama yang bercirikan Islam; lihat Mahmud, Wolman, dan Sumantri dalam Sumantri (ed. 2006: 164–5).

2004: 96–7). Datuk Abdul Makmur yang memiliki keilmuan sebagai ahli fikih bertugas di Gowa dan Tallo untuk menghadapi masyarakat yang masih berpegang pada kebiasaan lama mereka yaitu sabung ayam, berjudi dan menenggak *ballo* atau tuak. Sementara Datuk Abdul Jawad memilih ke daerah Tiro di Bulukumba untuk memperkenalkan Islam dengan pendekatan tasawuf kepada masyarakat Tiro yang masih menggunakan ilmu kebatinan dan sihir.

Pendekatan ketiga Datuk tersebut selaras dengan pandangan A. H. Johns mengenai syiar Islam yang dilakukan oleh para sufi pengembara yang telah berlangsung sejak abad ke-13 di Nusantara. Keberhasilan mereka dalam melakukan syiar Islam diperoleh berkat kemampuan mereka dalam memperkenalkan Islam dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat atau bersifat kontinuitas atas kepercayaan dan praktik kepercayaan setempat. Mereka melakukan pendekatan tasawuf sebagai media dalam menjalankan misi mereka dan hal tersebut ditemukan dalam historiografi lokal Melayu-Indonesia (Johns dalam Abdullah [ed.] 1987: 85–103).

Leonard Y. Andaya dalam kajiannya tentang sejarah Sulawesi Selatan pada abad ke-17 menerangkan mengenai dampak Islamisasi terhadap era baru yang berkaitan dengan tradisi kekuasaan dan sistem politik. Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan dengan pimpinan Kerajaan Gowa-Tallo menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan persekutuan politik dengan raja-raja Muslim di Nusantara untuk menghadapi lawan mereka. Sultan Ternate merupakan salah seorang raja yang selalu siap memberi bantuan kepada kerajaan Makassar ini jika memerlukan bantuan. Demikian pula dengan sultan-sultan dari Kerajaan Magindanao, Buayan, atau Sulu selalu siap memberikan bantuan. Sebaliknya, ketika mereka membutuhkan bantuan, para raja Muslim di Sulawesi Selatan bersedia memberikan bantuan kepada kerajaan-kerajaan Muslim tersebut. Selain itu, penerimaan Islam oleh penguasa kerajaan sebenarnya semakin memperkuat kedudukan raja di mata rakyatnya melalui jaringan resmi Islam yang menyebar mulai dari raja atau sultan dan kadhi hingga guru-guru agama di pedalaman yang menekankan ajaran Islam yang meyakinkan bahwa raja sebagai khalifah adalah wakil Tuhan di bumi. Pemahaman tersebut semakin menguatkan ikatan antara raja yang berperan sebagai pemimpin kerajaan dan sebagai pemimpin agama dengan rakyatnya (Andaya 1981: 34–5).

Gejala itu tampak dalam pendapat J. C. van Leur tentang Islamisasi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Menurutnya, motif ekonomi dan politik menjadi faktor penting masuknya Islam di kerajaan-kerajaan Nusantara. Para penguasa kerajaan menerima Islam dengan tujuan mendapatkan dan menarik para pedagang Muslim yang banyak menguasai sumber ekonomi sehingga meningkatkan kegiatan perdagangan di wilayah kekuasaannya. Penerimaan Islam oleh para raja tersebut kemudian membuat mereka ikut serta dalam jaringan perdagangan yang luas berskala internasional yang membentang dari Laut Cina hingga Laut Merah. Selain itu, dukungan para pedagang Muslim membuat para penguasa semakin kukuh kedudukannya dan memiliki jaringan kekuasaan dengan para penguasa Muslim lainnya yang dapat menahan pengaruh kekuasaan Majapahit (Van Leur 1955: 110–4).

Satu hal yang menarik dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan adalah tentang Kedatuan Luwu sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah itu. Kedatuan Luwu menjadi kerajaan Islam pertama di Sulawesi Selatan sementara sebagian besar sumber lokal maupun sumber luar mengisahkan hubungan yang lebih akrab antara pedagang Melayu dengan penguasa Kerajaan Makassar. Untuk menjawab hal tersebut kajian ini mengulas mengenai asal-usul Kedatuan Luwu berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Selama ini terdapat perdebatan mengenai sejarah pembentukan Kedatuan Luwu karena sebagian besar gambaran mengenai kerajaan itu berdasarkan naskah *Galigo* yang berisikan kisah para pendiri Luwu yang berasal dari 'langit' dan dipenuhi kisah mitos (Pelras 2006: 89–110).

Salah satu sumber tentang Luwu yang berasal dari laporan kolonial disusun oleh D. F. van Braam Morris yang pernah menjabat sebagai Gubernur Celebes (1888) yang bersifat spekulasi yang menyatakan bahwa masa keemasan Luwu dimulai pada abad ke-10 (Van Braam Morris 1888).⁴ Spekulasi itu timbul karena tidak ditemukan bukti tekstual yang dapat menentukan masa awal Kedatuan Luwu lebih awal daripada penyebutan Luwu dalam *Negarakertagama* yang berasal dari tahun 1365. Namun, sumber Belanda lainnya dari Speelman bertajuk "Notitie dienende voor eenen korten tijd en tot nader last van de Hoge Regering op Batavia voor den ondercoopman Jan van Oppijnen" (1670) menyebutkan tentang

4 Tulisan ini telah diterjemahkan oleh Muh. Yunus Hafid, "Kerajaan Luwu menurut Catatan D. F. van Braam Morris," dalam Sumantri (ed.) (2006: 184–233).

ekspor besi dari Luwu. Selain biji besi, perdagangan emas telah disebutkan sejak 1534, dan menarik perhatian Ataide, Gubernur Portugis di Maluku. Emas yang diperoleh dari pelimbangan dan penambangan kemungkinan berasal dari wilayah pesisir utara dan daerah Toraja. Selain itu, timah hitam dan tembaga telah ditambang di wilayah tersebut (Pelras dalam Bonneff, dkk. 1983: 61–2).

Sumber Belanda lainnya yang membahas tentang sejarah Sulawesi Selatan secara sistematis adalah karya Gubernur Celebes R. Blok yang ditulis pada 1759 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Kapten J. Von Stubenvoll pada 1817 bertajuk *History of the Island of Celebes*. Karya Blok ini didasarkan pada sumber-sumber lisan dan tertulis termasuk *notitie* dari Speelman yang merupakan pintu masuk ke dalam sumber-sumber mengenai Sulawesi Selatan pada masa sebelum dan awal masuknya Islam. Tulisan ini pun telah menyebutkan bahwa sebelum dominasi Gowa dan Bone, Kedatuan Luwu (Lohoo) merupakan kerajaan yang sangat kuat dan berkuasa di Sulawesi. Dalam catatan Blok disebutkan bahwa kedua kerajaan Bone dan Makassar menolak kebesaran Luwu namun kronik Kerajaan Bone mengakui hal tersebut secara jelas (Blok 1917: 3–4). Sementara itu, terlepas dari spekulasi mengenai sejarah awal Kedatuan Luwu, laporan Van Braam Morris (1888: 184–233) memberikan informasi tentang wilayah, masyarakat, dan keadaan negeri Luwu yang cukup memadai.

Christian Pelras, antropolog Perancis dalam kajiannya tentang masyarakat Bugis, turut menggunakan *La Galigo* sebagai satu-satunya sumber mengenai masa periode Bugis awal atau yang disebutnya sebagai 'zaman Galigo' yang membentang dari tahun 1100 hingga 1300. Periode itu menjadikan Luwu sebagai kerajaan paling tua di Sulawesi Selatan dan dianggap sebagai leluhur masyarakat Bugis sekarang (Pelras 2006: 129–33).

Sementara itu, para arkeolog yang terlibat dalam proyek *Origin of Complex Society in South Sulawesi*, dalam laporannya memperlihatkan temuan keramik di beberapa wilayah penggalian di Luwu yang menunjukkan bahwa Luwu telah menjadi bagian dari perdagangan Nusantara sejak 1200, jauh sebelum Malangke menjadi ibu kota Kedatuan Luwu (Bulbeck dan Caldwell 2000). Malangke adalah pusat Kedatuan Luwu pada masa Islam masuk di awal abad ke-17 sebelum dipindahkan oleh Datu Luwu XVI ke Palopo (Bulbeck dan Caldwell 2000: 94–5).

Selain itu, temuan proyek tersebut mengulas tentang masyarakat kedatuan Luwu yang kompleks dibanding wilayah lain di Sulawesi Selatan. Berbeda dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan, di Kedatuan Luwu terdapat banyak anak suku dengan bahasa ibu mereka yang berbeda-beda. Bahasa Bugis hanya dituturkan di daerah pesisir dan sangat sedikit penggunaanya di pedalaman terutama di sepanjang daerah sempit aliran sungai di Palopo selatan. Di wilayah pedalaman dataran rendah terdapat penutur bahasa Toala, Lemolang, Wotu, Padoe, dan Tolaki, sementara di lembah dataran tinggi tinggal para penutur bahasa Rongkong, Seko, Rampi, dan Mori (Bulbeck dan Caldwell 2000: 91–2).

Adapun kajian mengenai pusat Kedatuan Luwu setelah Islam, yaitu Kota Palopo, dilakukan oleh M. Irfan Mahmud yang difokuskan pada pendekatan fisik, sosial, dan kosmologi (Mahmud 2003). Pendekatan ini memperlihatkan ciri khas Kota Palopo yang, walaupun mewakili kosmologi Bugis yang bersifat religius-magis, memperlihatkan logika sosial dalam perancangannya. Seperti halnya kota-kota Muslim, perancangan Kota Palopo bersamaan dengan pembangunan masjid yang merupakan pusat kegiatan masyarakat. Selain itu, Kota Palopo juga dilengkapi tempat-tempat sakral yang menjadi fitur penanda kebesaran masa lalu Luwu, seperti Tana Bangkala yang menjadi situs pelantikan Datu, dan Salekkoe yang merupakan tempat ujian fisik dan mental bagi calon raja Luwu.

MASUKNYA ISLAM, KEHIDUPAN DAN ADAT ISTIADAT DI SULAWESI SELATAN

2.1 Sulawesi Selatan Sebelum Penyebaran Agama Islam

Masyarakat yang berdiam di wilayah Sulawesi Selatan telah memiliki kepercayaan dan keyakinan sendiri sebelum kehadiran agama samawi terutama Katolik dan Islam. Orang-orang di negeri Luwu memiliki keyakinan atas kisah dalam naskah *Galigo*, sementara orang-orang Toraja di pegunungan memegang teguh ajaran *aluk todolo*. Adapun orang-orang Makassar, terutama di daerah Malakaji yang terletak di selatan Gowa, meyakini keberadaan *Karaeng Lowe* atau Tuhan Yang Maha Besar dalam kepercayaan mereka yang disebut ajaran *patuntung* yang merupakan pemahaman untuk selalu mendekatkan diri dan perhatian kepada tanah leluhur.¹

Sumber-sumber Eropa terutama pada sekitar abad ke-16 memberikan gambaran tentang kepercayaan yang diyakini dan dijalankan oleh orang-orang Makassar dan Bugis berdasarkan kesaksian maupun cerita-cerita yang mereka dapatkan dari berbagai sumber. Pada 1545, Francois Xavier seorang imam Katolik bangsa Portugis, menggambarkan masyarakat di Sulawesi Selatan

1 Lihat lebih jauh tentang *patuntung* dalam Rössler (1990).

dalam catatannya bahwa “. . . orang-orang itu . . . tidak mempunyai kuil [*casa de idolos*] dan tidak ada orang mendorong mereka kepada kekafiran. Mereka menyembah matahari ketika mereka melihatnya dan di daerah mereka tidak terdapat ketakhyulan lainnya” (Pelras dalam Bonneff, dkk. 1983: 70). Mereka tidak mempunyai rumah ibadat atau kuil; upacara-upacara keagamaan dan kurban diadakan di tempat-tempat terbuka. Gambaran tersebut mirip dengan deskripsi Nicholaus Gervaise, seorang imam bangsa Perancis, dalam *Description historique du Royaume de Macacar* atau ‘Penjelasan mengenai Sejarah Kerajaan Makassar’ (Paris, 1668) sebagai berikut.

... orang-orang Makassar mempunyai kebiasaan mengadakan kurban persembahan untuk matahari dan bulan, karena mereka merasa berutang budi terhadap seluruh kekayaan, bahkan atas keberadaan mereka sendiri sampai pada kesuburan, berkat kesuburan yang membahagiakan karena pengaruh mereka (matahari dan bulan); yang mereka jaga dengan penuh kesungguhan dalam bangunan-bangunan yang dihiasi dengan lambang matahari dan bulan terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga atau dari tanah bakar, yang diberi warna emas sesuai dengan cita rasa mereka (Gervaise 1710: 118).²

Selain gambaran mengenai pemujaan kepada matahari dan bulan terdapat pula deskripsi yang menarik mengenai masyarakat Sulawesi Selatan terutama mengenai orang Makassar dan Bugis pada masa sebelum kedatangan agama Islam dan setelah Islam berkembang di kawasan itu pada awal abad ke-17. Seorang pengunjung bernama van Soldt menuliskan,

Pada umumnya rambut mereka di sisir seperti orang-orang Jerman zaman dahulu, sedangkan jenggot mereka dicabuti atau dicukur sampai leher atau dipanjangkan seperti jenggot kambing, pelihara jadi dua bagian yang pendek atau sedikit panjang mencuat seperti sayap. Perempuan telanjang bulat selama mereka belum menikah; apabila mereka sudah menikah mereka memakai celana yang lebar, bahasa latinnya *caligas* dan semacam baju panjang berlengan pendek seperti pakaian laki-laki Banda, Ternate atau kepulauan Maluku lainnya (Pelras dalam Bonneff, dkk. 1983: 74–3).

Pengunjung lainnya mencatat bahwa

Aneka macam buah-buahan Hindia berlimpah-ruah, demikian pula

2 Lihat juga Hamonic dalam Bonneff, dkk. (1983: 23–4).

dengan kambing, kerbau, dan babi, meski yang terakhir sulit diperoleh karena Raja telah menerima hukum Muhammad empat tahun lalu . . . Para lelaki biasanya memakai satu, dua butir, atau lebih bola-bola pada penis mereka dengan ukuran yang sama seperti yang digunakan pria Siam, tetapi tidak berlubang atau berbunyi di tengahnya, melainkan terbuat dari gading atau tulang ikan yang keras, yang sekarang juga makin berkurang di kalangan mereka karena peralihan agama; ketika masih kafir, kaum perempuan mereka memotong rambut dengan semacam sisir, tetapi sekarang rambut mereka dibiarkan panjang dan digulung seperti kebiasaan perempuan Melayu; budak-budak perempuan yang sering terlihat memikul air di punggung membiarkan bagian atas tubuh dengan payudara telanjang sepenuhnya dan mengenakan celana panjang sampai ke ujung pusar. Waktu mandi mereka telanjang bulat, baik laki-laki maupun perempuan, sesuatu yang tidak pernah saya lihat di tempat lain di Hindia ini (Reid 2004: 34).

Ketika agama Islam tersebar di kalangan bangsawan dan rakyat sekitar 1605, laporan-laporan tentang masyarakat Sulawesi Selatan mengalami perubahan. Pakaian perempuan dan laki-laki mulai tertutup mengikuti pakaian orang Melayu pada umumnya. Seorang pengunjung bangsa Eropa melaporkan ketika tiba di Makassar setelah Islam menjadi agama kerajaan bahwa

. . . di sana (Makassar) . . . tidak ada lagi babi karena pribumi yang sudah masuk Islam telah menyapu bersih seluruh babi dari negeri ini . .
.. Tubuh kaum perempuan tertutup seluruhnya dari kepala hingga kaki sedemikian rupa sehingga wajah mereka pun tak terlihat (Reid 2004).

Setelah Islam diterima sebagai agama kerajaan, maka *sara'* atau syariat Islam menjadi bagian integral dari pranata sosial budaya orang Makassar dan Bugis, selain pegangan mereka selama ini yaitu adat, *pangadakkang* (Makassar) atau *pangadêrrêng*. *Sara'* bersama *pangadakkang* memberikan tuntunan dalam menata tingkah laku kehidupan sosial-budaya. Ketaatan orang Makassar dan Bugis kepada *sara'* sama dengan ketaatan mereka terhadap adat yang mereka yakini. Karena sifat-sifat penyesuaian, maka penerimaan *sara'* ke dalam *pangadakkang* menjadi sarana utama berlangsungnya proses sosialisasi dan enkulturasi Islam dalam kebudayaan orang Makassar dan Bugis. Proses ini berlangsung intensif sehingga mereka mengidentikkan diri dengan Islam. Apabila di antara mereka ada yang bukan Islam maka dianggap menyalahi *pangadakkang* dan diperlakukan sebagai orang asing di lingkungannya.

Meski demikian, berbagai budaya pra-Islam masih terus berlanjut seperti pelapisan sosial, pandangan suci terhadap *arajang* (regalia kerajaan), berjudi besar-besaran yang merupakan kegemaran kaum bangsawan, poligami yang merupakan atribut kemuliaan kaum bangsawan dan orang kaya, pemujaan kepada benda-benda pusaka yang pada hakikatnya bertentangan dengan syariat Islam. Namun, pertentangan dijaga agar sistem sosial tidak terganggu. Maka antara *sara'* dan *pangadakkang* saling menyesuaikan. Di sini, penguasa sebagai pelindung kedua hal itu berperan besar untuk mendamaikan pertentangan dan perbedaan.

Pada 1525, sebelum penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan awal abad ke-17, telah terjadi aktivitas penyebaran agama Kristen di wilayah ini. Namun usaha yang dilakukan oleh tiga misionaris bangsa Portugis yakni Antonio dos Reys, Bernardini de Marvao, dan Cosme de Annunciacao yang berlabuh di Makassar, pada saat itu menemui kegagalan. Diberitakan bahwa mereka tidak berhasil dalam menjalankan misinya akibat sikap penduduk yang kurang bersahabat dan hidup dalam ketidakaturan sehingga mereka kemudian memutuskan meninggalkan Makassar dan berlayar ke negeri lain (Wessels 1949: 65).

Pada 1544, seorang pedagang bangsa Portugis bernama Antonio de Payva tiba di Makassar atas perintah Ruy Vas Pareira, penguasa Malaka pada masa itu untuk mencari kayu gaharu. Sebelumnya, pada 1542 de Payva pernah datang dalam perjalanan sebelumnya dan membuatnya pandai menggunakan bahasa setempat. De Payva datang kedua kalinya dan berlabuh di wilayah Kerajaan Suppa yang terletak di Teluk Pare-Pare yang terletak di pantai barat Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu de Payva menyampaikan sejumlah hal mengenai ajaran Kristen kepada penguasa Suppa (Wessels 1949: 67).

Setelah mengunjungi Kerajaan Suppa, de Payva datang ke Kerajaan Siang yang berjarak sekitar 40-50 mil dari Kerajaan Suppa dan disambut dengan ramah oleh penguasa setempat. Tidak lama berselang, Raja Suppa yang bernama Makereiye dan rombongannya mengunjungi Kerajaan Siang untuk menjumpai de Payva dan menyatakan ketertarikannya untuk memeluk Kristen dan meminta de Payva membaptisnya. Raja Suppa kemudian dibaptis dan diberi nama Don Luis. Selanjutnya setelah Raja Suppa memeluk agama Kristen ia kembali ke

negerinya dan mendirikan sebuah gereja di Kampung Maena. De Payva juga berhasil mengkristenkan Raja Bacukiki dan Raja Siang (Wessels 1949: 54).

Keterangan lebih jauh mengenai perkembangan agama Katolik di tiga kerajaan tersebut termuat dalam surat Pinto, pengikut Vicente Viegas, seorang misionaris di Makassar, tertanggal 7 Desember 1548:

Pada tanggal 20 November 1548 saya tiba kembali ke Malaka dan dari perjalanan saya ke Macacares (Makassar), dan oleh karena saya bersama Pater Vicente Viegas telah tinggal selama tiga tahun di sana, maka saya merasa wajib memberitahukan kepada Bapak Uskup soal keadaan di daerah itu dan mengenai orang-orang Kristen, berkat hasil usaha Pater Vicente Viegas.

Di sana saya telah diterima oleh seorang raja Kristen; raja Daerah Suppa yang bersama dengan isteri dan anaknya, serta sejumlah besar rakyatnya, merupakan orang pertama yang bertobat menjadi Kristen. Raja Suppa itu merasa heran karena sampai sekarang tidak ada juga misionaris datang.

Dari Raja Suppa kemudian saya menghadap seorang raja lain, yang lebih besar dan lebih berkuasa. Gelarnya maharaja dan ayah mertua Raja Suppa. Tempat kedudukannya lebih masuk ke dalam, sejauh lima-enam mil, namanya Sidenre (Sidenreng). Jumlah rakyatnya paling banyak, konon ada 300.000 orang . . .

Saya tinggal di sana (Sidenreng) selama delapan bulan. Selama itu saya selalu dijamu dengan mewah oleh sang raja dan setiap hari dia selalu berbicara dengan saya mengenai pengiriman imam. Sedapat-dapatnya saya, saya selalu mohon maaf kepada raja, agar dia tidak merasa kecewa dan berbesar hati.

Sesudah itu saya mengunjungi Macasares. Di sana saya pergi ke Siang (Pangkajene). Dahulu Raja Siang itu Kristen dan sangat bersahabat dengan kita. Sebagian besar rakyatnya pun sudah Kristen. Tetapi raja Kristen itu sudah meninggal, sudah digantikan adiknya, yang belum memeluk agama Kristen. Saya bertanya kepadanya, apakah dia ingin menjadi Kristen. Dia menjawab, "Ya, dan saya akan melakukan yang telah dilakukan saudara saya." Selanjutnya dia berkata, "Sebaiknya jika di sini didatangi misionaris-misionaris dan sejumlah orang Portugis, yang suka tinggal menetap di kerajaan saya (Sewang 2004: 57).

Tidak terdapat keterangan yang menyebutkan alasan ketiga raja di wilayah Bugis ini memeluk agama Katolik. Hal itu diduga disebabkan oleh kemampuan de Payva dalam menjelaskan agama Katolik dalam bahasa daerah setempat (Sewang 2004: 55; Pelras 1983: 69). Namun, pemerintah Portugis di Malaka tidak menaruh perhatian serius atas usaha penyebaran Katolik di Sulawesi Selatan. Ketika Raja Siang, salah seorang dari tiga raja Bugis yang memeluk Katolik, meminta pengiriman misi di wilayahnya ternyata tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah. Franciscus Xavier seorang misionaris Portugis pernah menuliskan dalam suratnya (10 November 1545) tentang keinginannya mengunjungi Makassar namun kapal yang ditunggunya tidak datang sehingga ia memutuskan bertolak ke Maluku (Sewang 2004: 55). Dalam kurun 1580–90, disebutkan hanya terdapat empat orang Fransiskan dikirim ke Sulawesi Selatan namun usaha misi mereka tidak diberitakan kecuali dikatakan bahwa terdapat sekitar 500 orang Portugis berdiam di Makassar. Kurangnya perhatian tersebut mungkin disebabkan oleh Portugis yang lebih menaruh perhatian ke Maluku.

Persaingan memperebutkan pengaruh di kalangan elite dan usaha penyebaran agama antara Portugis dan Melayu memunculkan berbagai versi tentang keadaan tersebut. Versi Makassar mengisahkan bahwa akibat tidak dapat menentukan pilihan di antara kedua agama tersebut, penguasa Kerajaan Gowa memutuskan bertaruh dengan mengirimkan utusan kepada pemerintah Portugis di Malaka untuk meminta pendeta dan pada saat bersamaan terdapat utusan ke Aceh (atau *mufthi* Mekkah) untuk mendapatkan mubalig. Raja Gowa bersumpah akan memeluk agama yang utusannya lebih dulu tiba di kerajaannya, dan karena mubalig Islam tiba lebih awal, paduka kemudian memeluk Islam (Pelras 2006: 158–9). Keadaan tersebut mungkin menjadi penyebab utama menurunnya misi gereja di Sulawesi Selatan.

2.2 Kehadiran Orang Melayu

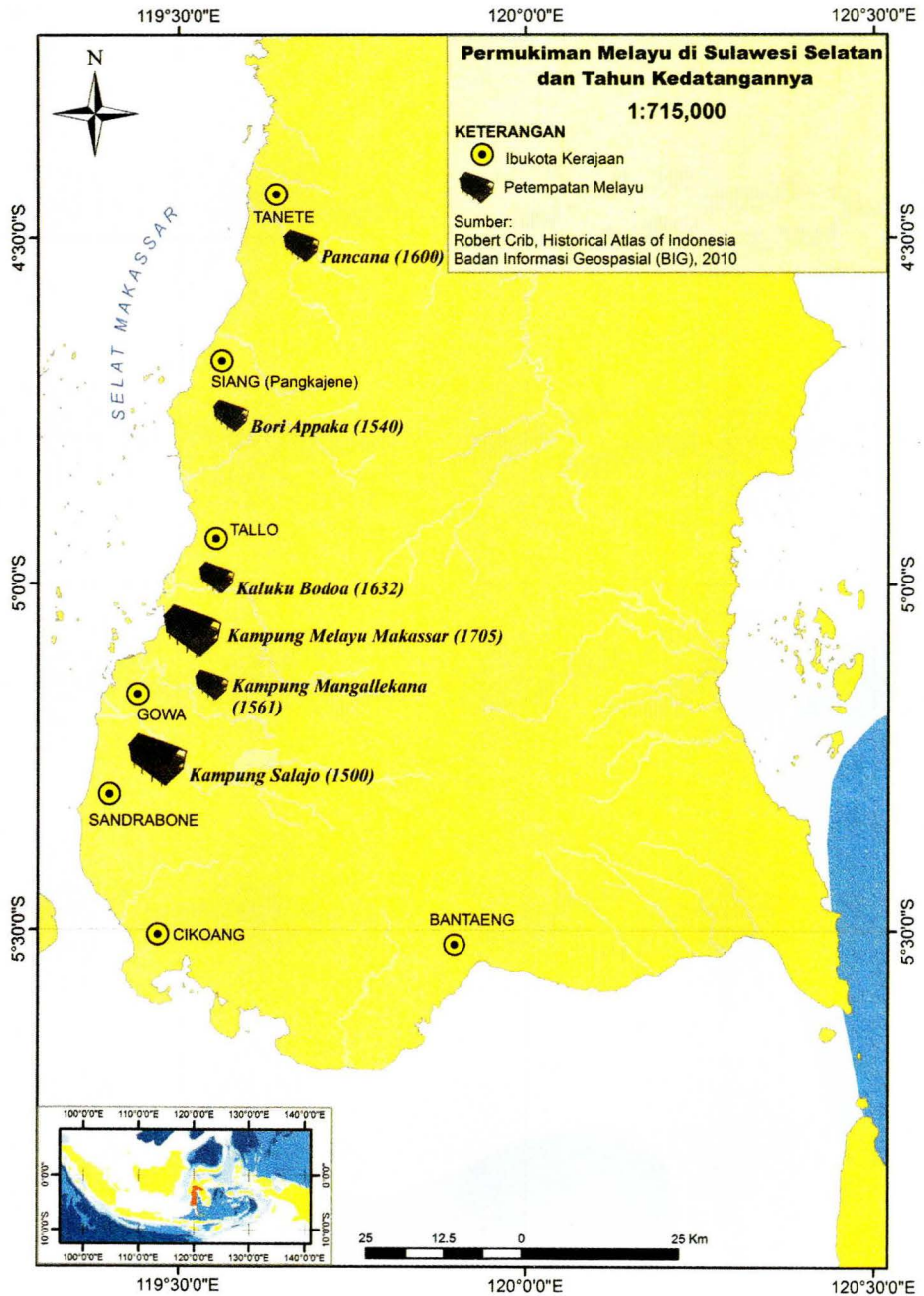
Masyarakat Melayu yang bermukim di pesisir Makassar merupakan kelompok yang berjasa dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17. Tokoh-tokoh Melayu yang bermukim di Makassar memberikan saran kepada ketiga mubalig asal Minangkabau untuk mula-mula mengislamkan penguasa

Kedatuan Luwu. Setelah usaha pengislaman sebelumnya yang menemui kegagalan, mereka menyadari bahwa tahap pertama untuk menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan adalah mendekati istana Luwu karena di antara raja-raja di wilayah itu penguasa Luwu merupakan raja yang dimuliakan. Asal-usul raja-raja Sulawesi Selatan diyakini berasal dari Kedatuan Luwu.

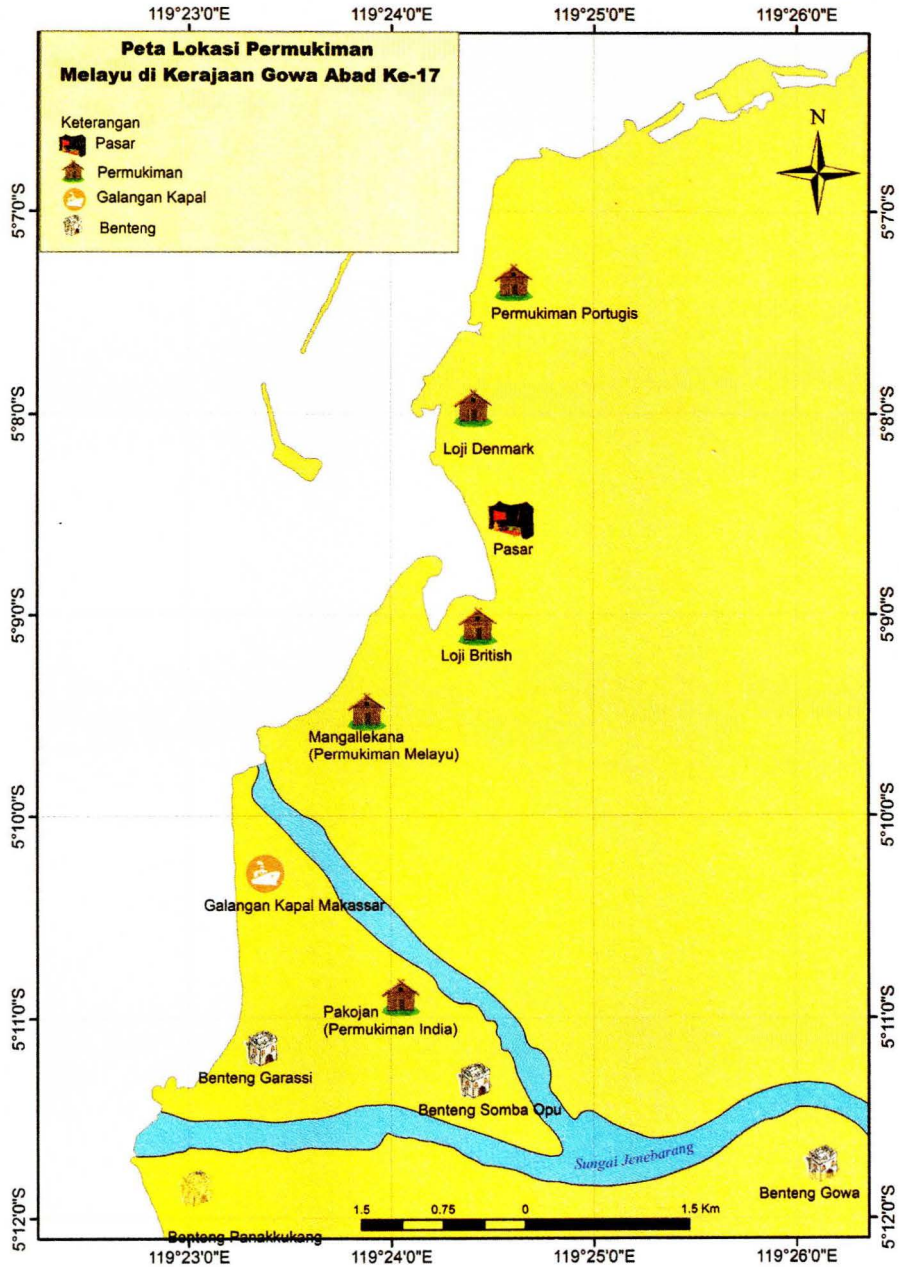
Masyarakat Melayu telah bermukim di wilayah Makassar terutama sejak pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Mereka berasal dari wilayah barat Nusantara terutama dari wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu. Secara umum mereka dikenali sebagai pedagang pemeluk Islam dengan gelaran di depan nama mereka seperti 'datuk', 'tuan', dan 'ince' atau 'encik' (Hussin 2007: 1–18; Hussin 2011: 12; Amir 2015: 22–3). Masyarakat Melayu ini bermukim di wilayah sepanjang pesisir selatan hingga barat daya Pulau Sulawesi terutama yang berhadapan dengan Selat Makassar (Amir 2015: 102–48). Wilayah pesisir barat merupakan daerah sempadan antara Makassar dan Bugis sehingga di daerah tersebut terdapat masyarakat yang menggunakan bahasa Makassar dan ada yang berbahasa Bugis. Namun, pada abad ke-16/17 wilayah itu merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Gowa (Pa'tunru 1995: 2).

Wilayah Makassar merupakan permukiman utama suku Makassar yang berbahasa ibu Makassar. Wilayah Makassar atau *Mangkasaraq* dalam penyebutan setempat meliputi Gowa, Bontonompo, Polongbangkeng, Takalar, Sandrabone, dan Galesong. Menurut Stapel, seorang penulis Belanda, pada masa kejayaan Kerajaan Gowa pada abad ke-16/17 kata 'makassar' merupakan istilah yang digunakan oleh orang asing dan bukan oleh orang Makassar untuk menyebut wilayah antara Sungai Garassiq dan daerah Sambung Jawa.³ Pada masa kejayaan Gowa, istilah Makassar untuk menunjukkan kedudukan raja Gowa sebagai penguasa tertinggi dalam ikatan persekutuan dengan Kerajaan Tallo. Raja Gowa tinggal di istana di ibu kota Somba Opu dan dalam pelbagai laporan asing disebutkan sebagai Sultan Makassar atau Raja Makassar (Gervaise 1710). Adapun kota Makassar sekarang adalah daerah yang disebut Ujung Pandang.

3 Catatan kaki dalam C. Skinner; lihat Amin (2008: 2).



Gambar 2.1. Peta Permukiman Melayu di Sulawesi Selatan dan Tahun Kedatangannya



Gambar 2.2. Peta Permukiman Melayu di Kerajaan Gowa Abad ke-17

Hubungan antara orang Melayu dengan Makassar telah berlangsung lama. Naskah Melayu *Sulalatus Salatin* mencatat peristiwa kunjungan muhibah utusan Sultan Mansur Syah (1459–76), penguasa Kerajaan Malaka ke Makassar. Sultan Malaka mengutus dua pejabat istana yaitu Seri Bija Pikrama dan Tun Sura Diraja untuk bertemu dengan Raja Gowa dalam rangka membangun hubungan persahabatan antara Malaka dan Makassar (Ahmad 1979: 100–3). Naskah *Sulalatus Salatin* tidak menyebutkan nama penguasa Kerajaan Gowa pada saat itu namun dengan merujuk kepada periode kekuasaan Sultan Mansur Syah maka kemungkinan besar berlangsung pada masa pemerintahan Raja Gowa VIII bernama I Pakkereqtau Tunijallo (1460–1510).⁴ Hubungan yang baik antara orang-orang Melayu dengan Makassar kemungkinan besar membuat Makassar menjadi salah satu negeri penghijrahan orang Melayu ketika Malaka runtuh akibat serangan bangsa Portugis pada 1511.

Orang Melayu meramaikan dunia perdagangan di Sulawesi Selatan dan mereka memainkan peranan penting dalam perkembangan kerajaan setempat. Sekitar 1545, Antonio de Paiva, seorang pedagang bangsa Portugis, yang melakukan pelayaran melalui pesisir utara tengah pantai Sulawesi dan singgah di Kerajaan Siang, sebuah negeri di pesisir barat daya Sulawesi Selatan, menjumpai para pedagang besar dari Ujung Tanah (Johor), Pahang, dan Patani. Para pedagang Melayu tersebut menjadikan pelabuhan Kerajaan Siang untuk mendapatkan komoditas yang bernilai dagang tinggi seperti kayu gaharu, kulit penyu, beras, dan budak (Reid 2004: 154–5).

Setelah Kerajaan Siang mulai surut seiring perkembangan Kerajaan Gowa terutama pada masa pemerintahan Raja Gowa X yang bernama I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (1546–65) atau biasa disebut dengan Karaeng Tunipalangga, para pedagang Melayu memindahkan kegiatan perdagangan mereka ke Gowa. Pada 1561, para pedagang Melayu diwakili oleh Nakhoda Bonang dengan mempersembahkan sejumlah hadiah meminta kepada baginda raja untuk berkenan memberikan mereka permukiman. Peristiwa tersebut dikisahkan dalam kronik Kerajaan Gowa dan Tallo sebagai berikut.⁵

4 Lihat fase kedatangan orang Melayu ke Makassar dalam Cummings (1998: 106–21).

5 Lihat lontara *Patturioloangna Tugowaya*, kronik Gowa, dalam Cummings (2007: 34, 68–9); juga Pa'tunru (1995: 15).

Pada dialah juga datang meminta tempat kediaman Orang Jawa, Anakoda Bonang. Adapun persembahannya kepada Raja ketika ia meminta tempat kediaman ialah sepucuk senapan (kamaleti), delapan puluh junjungan "belo," sekayu Sakelat, sekayu beledu, dan setengah kodi "cinde ilau." Kata Ananda Bonang kepada Raja Tunipallangga, "Empat macam kami harap-harapkan dari Tuanku," maka menyambutlah Raja itu, "Apa?" Menjawablah ia, "Kami minta supaya jangan dimasuki pekarangan kami (dengan begitu saja), janganlah kami dikenakan pengaturan "nigayang"⁶ bila ada anak kami dan janganlah kami dikenakan peraturan "nirapping"⁷ bila ada. Maka diperkenankanlah (permintaan itu) oleh Raja, dan berkatalah Raja, "Sedangkan kerbauku bila lelah kuturunkan (ia) ke dalam air, bila bebannya berat turunkan sebagian, apabila engkau sesamaku, akan tetapi janganlah engkau melakukan pembunuhan dalam kerajaanku di luar pengetahuan." Berkatalah pula Raja, "Berapa macam (orang) yang kau masukkan ke dalam permintaanmu itu?" Berkatalah Anakoda Bonang, "Semua kami bersarung ikat ialah (orang), Pahang, Patani, Campa, Minangkabau, dan Johor."

Raja Gowa X Karaeng Tunipalangga berkenan memberikan kepada para pedagang Melayu permukiman di Kampung Mangallekana yang terletak di sebelah utara Somba Opu, ibu kota Kerajaan Gowa. Raja Gowa menjamin keselamatan mereka dan memberikan status otonomi atas wilayah tersebut kepada masyarakat Melayu tersebut dengan syarat selama mereka tidak melanggar peraturan dan tidak melakukan pembunuhan tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan baginda raja.⁸

Keahlian masyarakat Melayu dalam bidang pelayaran, perdagangan, dan teknologi dimanfaatkan dengan baik oleh penguasa Gowa. Kepakaran mereka di bidang peleburan besi, emas, persenjataan, pembuatan kapal layar, senjata tajam, batu bata, pemintalan tali, dan sebagainya, membuat Kerajaan Gowa berhasil

6 *Nigayang* merupakan hukuman yang berlaku dalam masyarakat Makassar yang membagi keluarga ketika kemerdekaan seorang anak urutan ganjil dapat dibeli dengan sejumlah uang untuk mencegah dia masuk dalam rumah tangga istana.

7 *Nirapping* merupakan tindakan penguasa yang memiliki hak mengambil harta dari pelaku kejahatan.

8 Menurut sejumlah sarjana, perjanjian tersebut merupakan satu-satunya kasus pra-Eropa di Nusantara ketika para pedagang asing mendapat jaminan tertulis yang khas dari kerajaan. Ini memberikan gambaran terhadap reputasi Makassar sebagai negeri yang ramah kepada orang asing. Lihat dalam Reid (2004: 155); Resink: 37–8.

melakukan penaklukan atas kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang membawa kerajaan tersebut atas penguasaan terhadap jalur pelayaran, perdagangan, penguasaan barang, dan penguasaan sumber tenaga manusia atau budak.⁹ Baik orang Makassar maupun Melayu mendapatkan keuntungan atas perkembangan Kerajaan Gowa. Bandar pelabuhan Makassar menjadi pelabuhan transit pelayaran menuju Maluku dalam perdagangan rempah-rempah dan menjadi tempat yang menyediakan komoditas yang akan dipertukarkan dengan rempah-rempah di Maluku. Keadaan pelabuhan Makassar digambarkan dalam laporan Belanda bahwa sekitar 40 jung milik pedagang Melayu berlayar ke Maluku yang dimiliki oleh pedagang Melayu dari Patani, Johor, dan dari berbagai negeri lainnya yang berdiam di Makassar dalam jumlah ribuan orang (Reid 2004: 156).

Pada masa pemerintahan Raja Gowa Karaeng Tunipalangga, seorang keturunan Melayu campuran Bajau bernama I Mangambari Kare Mangaweang—yang lebih dikenal dengan sebutan Daeng ri Mangallekana—diangkat menjadi syahbandar. Sebutan ‘daeng’ tersebut menunjukkan bahwa I Mangambari Kare Mangaweang merupakan keturunan Melayu-Bajau yang berasal dari kelas terhormat yang berasal dari Kampung Mangallekana, permukiman utama masyarakat Melayu di Makassar. Penunjukan I Mangambari Kare Mangaweang sebagai syahbandar menggantikan Daeng Pamatteq, syahbandar Makassar yang terkenal, yang seterusnya diangkat sebagai *tumailalang* atau pembesar yang mengurus dalam negeri kerajaan.¹⁰

Pada masa Raja Gowa XII bernama I Manggorai Daeng Mammata Karaeng Bontolangkasa Tunijallo (yang menggantikan Raja Gowa XI yaitu I Tajibarani Karaeng Tunibatta, memerintah hanya selama 40 hari setelah terbunuh oleh pasukan Kerajaan Bone dalam penyerangan Gowa ke kerajaan itu), I Mangambari Kare Mangaweang dilantik menjadi *tumailalang*. Pada masa pemerintahan Raja Gowa XII (1565–90) ini masyarakat Melayu dibangun sebuah mesjid di Kampung Mangallekana atas perintah raja walaupun saat itu baginda belum memeluk agama Islam.¹¹

Permukiman masyarakat Melayu terdapat juga di wilayah Kerajaan

9 Lihat kronik Gowa dalam Cummings (2007: 34, 68); Pa'tunru (1995: 15).

10 Lihat lontara *Patturioloangna Tugowaya*, kronik Gowa, dalam Cummings (2007: 34, 68).

11 Kronik Gowa dalam Cummings (2007: 41, 74).

Sandrobone yang berada di pesisir selatan Makassar. Pada abad ke-16, Kerajaan Sandrobone merupakan taklukan atau *palili* Kerajaan Gowa. Permukiman tersebut bernama Kampung Salajo yang mungkin mengambil nama salah satu negeri di Minangkabau yang merupakan kampung halaman para pemukim Melayu di sana.¹² Nama Kampung tersebut kemudian diubah menjadi Kampung Patani ketika keluarga Datuk Maharaja Lela seorang bangsawan keturunan dari Kerajaan Patani mulai bermukim sekitar 1632 atas permintaan Raja Gowa (Asba 2011). Kini, Kampung Patani berada dalam wilayah Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

Kisah mengenai permukiman Melayu di Sandrobone terdapat dalam satu naskah yang ditulis dalam bahasa Makassar dengan menggunakan huruf Arab (Jawi) atau dalam bahasa Makassar disebut huruf *serang*.¹³ Naskah tersebut mengisahkan mengenai tokoh Dato Makotta dan Datuk Leang Abdul Kadir yang bermukim di tempat tersebut sekitar tahun 1010 Hijriah atau 1603 Masehi. Dikisahkan dalam naskah tersebut bahwa kedua tokoh itu adalah penyebar agama Islam di Sandrobone. Dato Makotta disebutkan sebagai perintis pendirian masjid pertama di Sandrobone yang berdiri pada 1603 dan disempurnakan pada 1605 oleh Tuan Razak Syaik Nuruddin atau dikenal dengan sebutan Tuan Rajja. Masjid tersebut pertama kali digunakan sembahyang untuk umum pada 1607 dengan imam pertamanya adalah Tuan Rajja.

12 Salajo adalah salah satu nagari dari 13 wilayah Kubuang Tigo Baleh yang menjadi asal-usul penubuhan kabupaten (*regentschap*) Solok; lihat dalam Idris (ed.) (1992: 88).

13 Lihat Arsip Makassar No. 01/MKH/17/Unhas/UP Rol 77 No. 17.



Gambar 2.3. Peta Permukiman Melayu di Sandrabone Awal Abad ke-17

Meskipun tampak bahwa para penguasa di pesisir Makassar memberikan keistimewaan kepada masyarakat Melayu namun sebenarnya sikap tersebut berlaku bagi bangsa asing lainnya. Di Kerajaan Gowa, penguasa melalui syahbandar menerima semua orang asing termasuk bangsa Portugis dan Melayu yang berseberangan sejak kejatuhan Malaka 1511. Penguasa Kerajaan Makassar memberikan izin mendirikan rumah ibadah seperti masjid dan gereja. Para pedagang bangsa Portugis disebutkan sebagai kelompok pedagang yang paling banyak jumlahnya dan menjadikan pelabuhan Makassar sebagai pusat perdagangan budak sejak awal abad ke-17. Para pedagang Inggris mendirikan

kantor dagang pada 1613, kemudian Denmark pada 1618, dan kantor dagang Perancis pada 1622. Sementara itu, para pedagang Cina berdatangan sejak 1619, dan perwakilan dagang Kerajaan Golconda dari India tiba pada 1622 (Reid 2009: 73–94).

Di antara bangsa-bangsa yang hadir di Makassar, Portugis dan Melayu merupakan dua bangsa yang saling bersaing dalam perdagangan dan usaha mereka memengaruhi raja untuk memeluk agama yang mereka anut masing-masing. Bangsa Portugis datang ke Nusantara dalam rangka mencari rempah-rempah yang merupakan komoditas yang mahal dan sangat laku di Eropa. Rempah-rempah bersama dengan garam sangat diperlukan di Eropa untuk mengolah bahan makanan terutama daging hewan yang banyak disembelih untuk diawetkan selama musim dingin. Selain itu, akibat trauma Perang Salib, bangsa Portugis—atau disebut Peranggi—memandang setiap Muslim sebagai saingan mereka dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Hal itu menyebabkan mereka selain berdagang dan menanamkan kekuasaan juga menyebarkan agama mereka. Sikap tersebut juga tampak ketika mereka hadir di Sulawesi Selatan (Sewang 2004: 53–4).

Demikian halnya dengan bangsa Melayu yang memandang bangsa Portugis sebagai lawan berat mereka. Sikap itu tidak terlepas dari pandangan mereka terhadap Portugis yang bertanggung jawab atas kejatuhan Kerajaan Malaka akibat serangan Portugis pada 1511. Walaupun demikian hebatnya persaingan antara kedua bangsa tersebut, penguasa Makassar menyatakan wilayahnya terbuka dan bebas sehingga kedua bangsa tersebut tidak bersinggungan secara frontal. Pada 1580, para pedagang Melayu melalui Sultan Babullah, penguasa Ternate, mendesak Raja Gowa XII Daeng Mammata Karaeng Bontolangkasa Tunijallo untuk memeluk agama Islam namun ditolak oleh Sang Raja. Walaupun demikian Raja Gowa memberikan izin pembangunan mesjid kepada masyarakat Melayu (Pelras 2006: 158).

2.3 Kedatangan Tiga Mubalig dari Minangkabau

Pada masa pemerintahan Raja Gowa XII, usaha memperkenalkan ajaran Islam telah dilakukan oleh para pemuka masyarakat Melayu di Makassar. Pada

1575, berdasarkan Kronik Kutai disebutkan bahwa Datuk Abdul Makmur, seorang mubalig asal Minangkabau, diundang untuk memperkenalkan ajaran Islam namun usaha tersebut menemui kegagalan. Hal itu disebabkan oleh masyarakat pada saat itu masih gemar menjalankan kebiasaan lama mereka yaitu makan dendeng babi, hati rusa mentah yang dicincang dan disajikan dengan bumbu dan darah (*lawar' dara*), serta menikmati minuman tuak. Keadaan itu membuat Datuk Abdul Makmur hijrah ke daerah Kutai dan berhasil menyebarkan Islam di sana.

Datuk Abdul Makmur adalah mubalig yang berjasa dalam pengislaman di Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Ia kemudian datang lagi ke Makassar bersama dua mubalig lainnya yaitu Datuk Sulaiman yang kemudian mengislamkan Datu Luwu, dan Datuk Abdul Jawad yang menyebarkan Islam di daerah Tiro. Ketiga datuk itu merupakan teman seperguruan dalam mempelajari agama Islam di Aceh dan kedatangan mereka di Makassar atas perintah Sultan Johor (Pelras 2006: 159).

Dalam *Lontara Wajo* disebutkan bahwa ketiga datuk tersebut berasal dari Koto Tangah di wilayah Minangkabau. Kedatangan ketiga mubalig itu merupakan jawaban atas misi penyebaran agama Kristen yang gencar dilakukan Portugis di Sulawesi Selatan sekitar pertengahan abad ke-16. Persaingan antara bangsa Portugis dengan para pedagang Melayu telah berlangsung lama di wilayah itu. Para misionaris Portugis berusaha menyebarkan pengaruhnya ke dalam lingkungan istana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dan terutama kepada penguasa Gowa dan Tallo yang merupakan kerajaan paling berpengaruh dan terkuat pada masa tersebut. Antonio de Payva menulis dalam suratnya mengenai kunjungannya ke Sulawesi Selatan pada 1542 bahwa

... lawan saya adalah pendatang Melayu Islam ... dari Sentana (Ujung Tanah), Pao (Pahang) dan Patane (Patani), yang berusaha supaya raja mengubah maksudnya (untuk menerima agama Katolik), karena sudah lima puluh tahun lebih mereka datang berdagang di situ . . . (Sewang 2004: 88).

Pandangan de Payva mengenai orang Melayu tersebut ditemukan pula dalam *Lontara Wajo* yang mengisahkan sikap kurang senang orang Melayu setelah melihat sejumlah orang Makassar dan Bugis dipengaruhi oleh ajaran agama

Katolik yang disampaikan oleh para *panrita lombo* atau misionaris Portugis.¹⁴

Datuk Abdul Makmur juga disebut dengan nama Khatib Tunggal dan lebih dikenal dengan gelar Dato' ri Bandang mengikuti nama tempat mubalig itu dimakamkan di sekitar wilayah Kerajaan Gowa-Tallo. Adapun Datuk Sulaiman atau Khatib Sulung bergelar Dato' ri Patimang berdasarkan nama tempat ia wafat di wilayah Kerajaan Luwu tersebut. Sementara Datuk Abdul Djawad atau Khatib Bungsu dimakamkan di daerah Tiro di Bulukumba tempat beliau menyebarkan ajaran Islam sehingga mubalig ini kemudian terkenal dengan sebutan Dato' ri Tiro. Di wilayah Bugis ketiga datuk itu disebut *datu' tellue* sedangkan di Makassar dinamakan *datuk tallua*.

Ketiga datuk tersebut tidak banyak disebut jati dirinya. Salah satu dari ketiga datuk itu yang paling banyak dibahas adalah Datuk ri Bandang. Namun, kemungkinan pembahasan tokoh ini dapat menjadi rujukan untuk melihat mengenai dua datuk lainnya. De Graaf dan Pigeaud (1974: 69) menyatakan bahwa Islamisasi di Makassar dilakukan oleh orang yang datang dari Minangkabau, Sumatera Tengah, yang bernama Datuk ri Bandang. Disebutkan bahwa tokoh ini sebelumnya pernah belajar ilmu agama di Giri dan dikatakan memiliki hubungan kerabat dengan Dinasti Giri, kemungkinan melalui perkawinan. Pendapat serupa mengenai ketiga datuk yang pernah berguru di Giri diyakini oleh Noorduyn, namun Pelras menduga bahwa ketiganya datang langsung dari Koto Tangah di Minangkabau. Perbedaan itu tampaknya disebabkan oleh keterangan dalam naskah *lontara* yang menjadi acuan para sarjana tersebut hanya memuat secara singkat keterangan para penyebar agama Islam tersebut, sehingga sulit mengetahui secara pasti asal ketiga datuk tersebut (Sewang 2004: 94).

Hampir semua naskah lokal dan tradisi lisan di Gowa, Wajo, Selayar, Bira dan di dua wilayah di luar Sulawesi, yaitu Bima dan Kutai, memiliki persamaan yang mengisahkan pengislaman yang dilakukan oleh ketiga datuk tersebut. Teks Luwu dan Wajo menyebutkan bahwa sebelum tiga Datuk tersebut mengislamkan kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan pada abad ke-17 yaitu Gowa, mereka terlebih dulu menuju ke Kerajaan Luwu untuk mengajak penguasa Luwu untuk memeluk agama Islam. Pengislaman di Kerajaan Luwu berlangsung secara baik karena kepercayaan lama yang diyakini masyarakat Luwu tentang keberadaan Tuhan

14 Lihat *lontara Sukkuna Wajo* dalam Sewang (2004: 89).

Yang Maha Esa ternyata tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Daerah lain yang berhasil diislamkan oleh ketiga datuk itu sebelum mengislamkan Kerajaan Gowa adalah daerah Tiro di Bulukumba dan Pulau Selayar.

Dalam teks *Salasilah Kutai* yang disunting oleh Mees (1935: 240), disebutkan nama Dato' ri Bandang atau Tuan di Bandang bersama seorang mubalig lainnya yang bergelar Tuan Tunggang Parangan atau Tuan di Parangan. Keduanya datang mengunjungi Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Makota. Namun Tuan di Bandang kemudian kembali ke Makassar dan namanya tidak disebutkan lagi dalam teks tersebut (Chambert-Loir 1998: 34). Sedangkan Tuan Tunggang Parangan kemudian berhasil mengislamkan Raja Makota dan menjadi titik awal penyebaran agama Islam di Kutai. Para datuk itu juga disebutkan berjasa atas pengislaman negeri Buton sebagaimana terdapat dalam manuskrip Gantarang. Daerah Gantarang terletak di pantai timur bagian tengah Pulau Selayar di selatan Makassar. Naskah Gantarang menyebutkan nama Ince Ujong, saudara Sultan Minangkabau, bersama tiga rekannya yaitu Dato' ri Tiro, Dato' ri Barri, dan Dato' ri Patima diutus oleh "Raja dan Kalifah di Makkah" untuk mengislamkan Buton. Adapun Dato ri Bandang selepas pengislaman Buton kemudian bertolak ke Selayar (Chambert-Loir 1998: 35).

Kemungkinan Islam masuk ke Selayar pada dua daerah itu, yakni Gantarang dan Balabulo, dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa tersebut berkisar pada masa yang hampir bersamaan dengan pengislaman penguasa Gowa dan Tallo pada 1605. Naskah Gantarang menyebutkan bahwa Karaeng Gantarang, Karaeng Tallo, Karaeng Gowa, dan Karaeng Mampu' masuk Islam hampir berurutan waktunya mengikuti ajaran Datuk ri Bandang (Chambert-Loir 1998: 37). Adapun *karaeng* merupakan gelar bagi penguasa suatu wilayah adat atau kerajaan di wilayah Makassar sementara di kerajaan-kerajaan Bugis gelar yang digunakan secara umum adalah *arung*.

Penyebaran Islam di Pulau Selayar oleh Datuk ri Bandang dimulai di daerah Ngapalohe yang terletak di pantai timur pulau tersebut. Menurut cerita, Datuk ri Bandang berjumpa dengan seorang nelayan bernama I Pusu' dan kemudian berkata, "Saya mau mengislamkan kamu," namun dijawab oleh nelayan tersebut, "Saya takut kepada Karaeng Gantarang." Datuk ri Bandang kemudian

menegaskan bahwa dirinya akan mengislamkan Karaeng Gantarang juga. I Puso kemudian diislamkan, lalu keduanya menuju kediaman Karaeng Gantarang atau penguasa wilayah adat Gantarang yang bernama I Pangali Sultan Pattaraja. Ketika berjumpa dengan Karaeng Gantarang, Datuk ri Bandang mengatakan bahwa dirinya berasal dari Minangkabau yang diutus oleh Raja Makkah untuk mengislamkan penguasa Gantarang. I Pangali kemudian mengatakan bahwa dirinya takut kepada Karaeng Gowa atau penguasa Kerajaan Gowa namun sekali lagi Datuk ri Bandang mengatakan bahwa dirinya akan mengislamkan Karaeng Gowa. Karaeng Gantarang kemudian memeluk Islam dan membangun sebuah masjid di wilayahnya dan sejarah Islam di wilayah Gantarang pun bermula (Chambert-Loir 1998: 37–8).

Selanjutnya Datuk ri Bandang meneruskan pelayarannya bersama I Puso' menuju Kerajaan Gowa namun kemudian mereka berlabuh di wilayah Kerajaan Tallo. Karaeng Tallo bermaksud menjemput mereka untuk datang ke rumahnya namun Datuk ri Bandang berujar bahwa rumah itu sebaiknya dibersihkan terlebih dulu. Maksud ucapan Datuk ri Bandang tersebut adalah dirinya hendak mengislamkan Karaeng Tallo yang kemudian menjawab bahwa dirinya takut kepada Karaeng Gowa. Menyimak percakapan tersebut, I Lambu, seorang prajurit atau *tubarani* dari Tallo, menuduh Datuk ri Bandang bermaksud menghapus adat mereka. Dikisahkan, Datuk ri Bandang meminta I Lambu melakukan wudhu. Datuk ri Bandang berhasil menyadarkan I Lambu dan bersedia bertaubat dan masuk Islam. Kemudian, Karaeng Tallo juga bersedia memeluk agama Islam (Chambert-Loir 1998: 38).

Setelah kejadian tersebut, I lambu menghadap Karaeng Gowa untuk memberitahu-kan mengenai kedatangan Datuk ri Bandang. Ketika Karaeng Gowa hendak menjumpai mubalig tersebut dirinya berjumpa dengan seseorang di tengah jalan yang menanyakan arah tujuannya. Oleh orang tersebut dikatakan bahwa Karaeng Gowa menyatakan masuk Islam dan orang itu menyampaikan salam kepada Datuk ri Bandang. Setelah berjumpa, Karaeng Gowa dan Datuk ri Bandang mengislamkan rakyat Gowa, membangun sebuah masjid dan mengajarkan penduduk menunaikan salat lima waktu, Salat Jumat, membaca Quran, ilmu tasawuf, dan sebagainya. Mubalig itu meminta kepada Karaeng Gowa agar tidak melupakan salat sebagaimana yang telah dipelajarinya. Selanjutnya

Datuk ri Bandang pergi ke wilayah pedalaman dan mengislamkan Karaeng Mampu berserta rakyat di wilayah kekuasaannya (Chambert-Loir 1998: 39).

Salah seorang mubalig yang menyebarkan agama Islam adalah Datuk Abdul Jawad yang terkenal dengan sebutan Datuk ri Tiro. Ia datang bersama Datuk ri Bandang dan Datuk Sulaiman ke Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17. Datuk Abdul Jawad terkenal sebagai penganjur Islam di negeri Tiro yang terletak di wilayah Bulukumba. Teks-teks Bugis menyebutkan ketiga datuk berasal dari Minangkabau, namun sebuah naskah Bima menyebutkan bahwa Datuk Abdul Jawad berasal "dari Aceh yang pernah belajar di Tiro" (Damste 1942: 65). Keterangan ini dianggap sebagai suatu pernyataan spekulatif karena hanya merujuk kepada nama kecil dari Abdul Jawad yaitu Ipidie (Damste 1942: 69; Chambert-Loir 1998: 54).

Masyarakat Minangkabau mempunyai kebiasaan untuk berguru dan belajar ke Aceh terutama sejak abad ke-15 karena pengaruh kekuasaan kerajaan Aceh telah sampai ke pesisir barat dan pendidikan agama Islam telah berkembang di wilayah tersebut. Model pendidikan di Aceh disebut "dayah" atau "zawiah" yang didirikan terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17. Para lulusan pendidikan tersebut banyak yang kembali ke negerinya dan mengembangkan pengajaran Islam di negerinya masing-masing (Mahmud 2003: 66).

Dikisahkan bahwa setelah belajar ilmu agama di Aceh dan kembali ke Minangkabau, Datuk Abdul Jawad atau Datuk ri Tiro ditugasi Sultan Muda Alaidin Ali Riayat Syah IV (1589–1604) untuk menyiarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Abdul Jawad berangkat ke Riau bersama dua rekannya yaitu Datuk Abdul Makmur dan Datuk Sulaiman kemudian berlayar ke Johor untuk mempelajari kebudayaan Bugis dan Makassar dari para pedagang dan pelaut yang ramai terdapat di sana. Atas sokongan Sultan Johor, mereka menambah bekal pengetahuan ke Tanah Jawa terlebih dulu dan setelah itu barulah berlayar ke Sulawesi Selatan (Mahmud 2003: 67). Setelah tiba di Makassar, ketiga datuk tersebut berlayar ke Luwu untuk mengislamkan penguasa Kedatuan Luwu. Setelah Datu Luwu XV menerima ajaran Islam, ketiga datuk berpisah dalam menjalankan dakwah mereka. Datuk Sulaiman tetap tinggal di Luwu dan beberapa lama kemudian ke Kerajaan Wajo

untuk mengajarkan Islam di negeri tersebut. Adapun Datuk Abdul Makmur atau lebih dikenal dengan nama Datuk ri Bandang melanjutkan perjalanannya ke Kerajaan Gowa dan Tallo untuk mengislamkan kedua penguasa besar tersebut. Sementara itu, Abdul Jawad atau Datuk ri Tiro berlayar menuju pesisir timur dan mendarat di Limbua di daerah Tiro, Bulukumba.

Dalam cerita rakyat yang ditemukan di Tiro mengenai kedatangan Datuk Abdul Jawad terdapat kisah mistis yang mengungkapkan *karamah* atau kemampuan supranatural mubalig itu. Disebutkan, setelah Datuk Abdul jawad tiba di Limbua, dirinya memulai dakwahnya di daerah pesisir timur Teluk Bone yaitu di Kampung Basokeng dan Biropa' yang terletak di kaki bukit Kampung Tiro. Dua kawasan itu merupakan daerah yang memiliki kontur pantai yang landai dan menjadi permukiman penduduk yang menyandarkan hidupnya di laut. Di wilayah pesisir ini, Datuk Abdul Jawad mencoba mengenalkan ajaran Islam di kalangan penduduk sebelum dirinya bertolak ke negeri Tiro (Mahmud 2003: 68).

Kehadiran Datuk Abdul Jawad dan kisah mengenai *karamah* yang dimilikinya menyebar dan terdengar penguasa Tiro, I Launru Daeng Biasa, yang kemudian mengundang mubalig itu untuk menemuinya. Dalam pertemuan tersebut, penguasa Tiro ingin menguji kesaktian Abdul Jawad. Berdasarkan cerita rakyat di Tiro, dikisahkan bahwa pada hari yang ditentukan, penguasa Tiro berhadapan dengan mubalig itu. Penguasa Tiro mendapat giliran pertama mempertontonkan ilmu leluhur yang dimilikinya. Dengan hanya menunjuk ke arah sebatang pohon kelapa yang berbuah lebat, seluruh buah kelapa di pohon itu berjatuhan tanpa tersisa satu buah pun. Ketika mendapat giliran, Datuk Abdul Jawad memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya dengan meminta kepada pohon kelapa di dekatnya untuk bersujud atau menunduk kepada dirinya. Alkisah, pohon tersebut mengikuti permintaan mubalig dengan menunduk sehingga buahnya dapat dipetik, kemudian kembali tegak seperti semula. Melihat kemampuan Datuk Abdul Jawad, penguasa Tiro mengakui keunggulan ilmu lawanandingnya tersebut dan akhirnya mengikuti ajaran yang dibawa sang mubalig.

Kesan mendalam terhadap ilmu dan pengetahuan yang dimiliki Datuk Abdul Jawad membuat I Launru Daeng Biasa memintanya untuk menetap di wilayah kekuasaannya. Abdul Jawad memenuhi permintaan tersebut dengan menetap di

Tiro hingga akhir hayatnya. Lokasi makam Datuk ri Tiro terletak di sebelah utara Hila-Hila. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Datuk Abdul Jawad kemudian dikenal dengan sebutan Datuk ri Tiro (Mahmud 2003: 70).

Satu hal yang menarik dari pengislaman di Tiro adalah penguasa tidak mengalami perubahan secara mendasar dengan mengikuti simbol-simbol Islam. Penguasa Islam di Tiro tidak menggunakan gelar Islam seperti 'sultan'. Karaeng Launru Daeng Biasa tetap menggunakan namanya tanpa penambahan gelaran Islam seperti penguasa di Luwu atau di Bone. Pendekatan agama yang dijalankan Datuk Abdul Jawad lebih menekankan pada pengalaman spiritual berlandaskan tasawuf dibanding perubahan sosial budaya (Mahmud 2003: 90).

Sementara itu Datuk Sulaiman Khatib Sulung yang bertanggung jawab atas pengislaman Kedatuan Luwu tidak mengalami kesulitan besar. Pendekatan syariat yang membahas mengenai pemerintahan, ibadah, dan kepercayaan menjadi perbincangan di antara mubaliq tersebut dengan raja dan pemuka Kedatuan Luwu. Pendekatan yang dilakukan Datuk Sulaiman mendapat tempat di hati Datu Luwu La Patiware Daeng Parabung sehingga baginda memutuskan memeluk Islam sehingga penguasa ini terkenal sebagai raja pertama yang memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan. Setelah pengislaman di Kedatuan Luwu, Datuk Sulaiman berangkat ke Kerajaan Wajo atas permintaan Raja Gowa untuk mengenalkan agama Islam di sana setelah Wajo berhasil dikalahkan dalam sebuah peperangan pada 1610. Datuk Sulaiman berhasil mengislamkan penguasa Kerajaan Wajo yang bergelar Arung Matoa Wajo yang pada saat itu dijabat oleh La Sangkuru Mulajaji (1607–10). Peristiwa tersebut terjadi pada 15 Syafar 1020 Hijriah atau 1610.

Setelah memeluk agama Islam, Matoa Wajo XXI menggunakan nama Islam La Sangkuru Patau Sultan Abdurrahman. Matoa Wajo itu tidak lama menjabat kerana wafat pada tahun yang sama. Datuk Sulaiman juga mengajarkan mengenai urusan keagamaan dan peribadatan kepada rakyat Wajo sebelum dirinya kembali ke Luwu (Mappangara dan Abbas 2003: 98–9). Pada akhir hayatnya, Datuk Sulaiman dikenal dengan nama Datuk Patimang berdasarkan lokasi makamnya di daerah Patimang-Malangke berdekatan dengan makam penguasa Luwu yang pertama memeluk Islam yaitu Datu Luwu XV La Patiware Daeng Parabung.



Gambar 2.4
Makam Datu Luwu XV La Patiware
Daeng Parabung

2.4 Ajaran Islam dalam Kehidupan dan Adat Istiadat

Setelah penguasa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan memeluk Islam sebagai agama kerajaan terjadi proses sosialisasi dan enkulturasi Islam ke dalam peradaban masyarakat Bugis dan Makassar yang disebut *pangngadérréng* yang menjadi syariat Islam sebagai salah satu unsur pokoknya. Dalam Lontara Latoa yang memuat aturan-aturan dalam masyarakat terdapat uraian mengenai masuknya syariat Islam ke dalam pranata sosial- budaya masyarakat Bugis yang menyebutkan bahwa:

terdapat empat macam saja yang memperbaiki negara, barulah dicukupkan lima macamnya, ketika sampai kepada keislaman dan dimasukkan juga sara' (syariat) Islam itu, pertama *ade'*, kedua *rapang*, ketiga *wari*, keempat *bicara*. Adapun *Ade'* itu ialah yang memperbaiki rakyat dan adapun *rapang* itu adalah yang mengkokohkan kerajaan, adapun *wari'* itu memperkuat kekeluargaan negara (yang) sekeluarga, dan adapun *bicara* itu adalah yang memagari perbuatan yang sewenang-wenang dari orang yang berbuat sewenang-wenang adanya, dan adapun *sara'* itu ialah sandaran orang lemah yang jujur, apabila tidak lagi dipelihara *ade'* itu, maka rusaklah rakyat, apabila tidak dipelihara lagi *rapang*, itu maka lemahlah kerajaan, apabila hilanglah *wari'* itu tidak bersepakatlah rakyat, dan apabila tidak ada lagi *sara'* itu, maka berbuat sewenang-wenang semua orang, apabila tidak lagi *bicara* itu, maka rusaklah hubungan kekeluargaan negara-negara (yang) sekeluarga, ialah nanti yang menjadi sumber pertikaian, dan adapun pertikaian itu berujung pada perang, dan barasiapapun orang yang mengingkari *rapang* itu, ialah didatangkan baginya oleh Allah Taa'la lawan yang kuat, apabila tidak lagi dijalani *bicara* itu maka saling binasa membinasakanlah orang, karena tidak ditakutinya lagi perbuatan (yang bersumber) dari kekuatan (yang diperbuatnya), begitulah maka yang dikehendaki oleh *toriolo* (orang-orang terdahulu) agar diperteguh *ade'*, dipelihara dengan cermat *rapang*, dan bersama-sama menegakkan kepastian *bicara*, agar dirobohkanlah orang (yang mempergunakan) kekuatan (kekerasan) diperkuatlah (perlindungan) terhadap orang lemah itu (Mattulada 1984: 114-6).

Dengan diterimanya *sara'* atau syariat Islam ke dalam *pangngadérréng*, kehidupan sosial dan budaya masyarakat mendapat warna baru dalam menjalankan berbagai tingkah laku dalam kehidupan sosial dan budayanya. Diterangkan oleh Mattulada bahwa ketaatan orang Bugis dan Makassar terhadap syariat Islam menyamai ketaatannya dengan aspek-aspek *pangngadérréng* lainnya. Keadaan ini terjadi karena penerimaan Islam sebagai agama dalam masyarakat tidak banyak mengubah nilai-nilai dalam masyarakat dan budaya

yang telah ada sebelumnya. Kehadiran Islam pada mulanya cenderung berfokus pada urusan ibadah dan tidak mengubah lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat termasuk adat mereka yang termuat dalam *pangngadérréng* (Mattulada 1976: 22–3).

Walaupun Islam menjadi agama kerajaan dan diikuti oleh rakyatnya namun sesungguhnya berbagai perbuatan dan nilai-nilai pra-Islam masih berjalan terutama di kalangan bangsawan karena hal itu termaktub dalam *pangngadérréng*. Perbuatan tersebut dilindungi oleh penguasa dan *pangngadérréng* seperti aturan pelapisan sosial yang di atur dalam *wari'*, pemujaan terhadap *arajang* atau benda-benda pusaka kerajaan, perjudian besar-besaran yang menjadi kegemaran kaum bangsawan, dan memiliki banyak istri yang menjadi simbol kemuliaan dan kekuatan serta luasnya jaringan yang dimiliki oleh bangsawan. Walaupun tampak bertentangan dengan syariat Islam namun sejak awal penerimaan Islam, keadaan itu tetap dijaga agar perbedaan yang dapat menimbulkan pertentangan tidak perlu terjadi. Inilah yang menyebabkan Islam dapat mudah berkembang karena mendapat perlindungan dari para raja dan bangsawan dan berhasil masuk menjadi bagian dari *pangngadérréng* (Mattulada 1976: 24).

Para penganjur agama Islam pertama, terutama ketiga mubalig, yaitu Datuk Sulaiman, Datuk Abdul Makmur, dan Datuk Abdul Jawad, dalam melakukan dakwahnya hanya tertuju kepada aspek iman dan kebenaran tauhid pada awalnya. Mereka menyesuaikan ajaran Islam dengan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat diterima dalam *pangngadérréng* yang kemudian lebih memudahkan proses sosialisasi ajaran Islam dalam masyarakat. Para penganjur itu memandang bahwa dalam proses dan perjalanan waktu, nilai-nilai Islam dapat mengubah kebiasaan yang tidak sesuai dalam *pangngadérréng*. Sejalan dengan waktu, proses yang intensif itu berhasil dengan sangat baik karena masyarakat Bugis dan Makassar kemudian mengidentifikasikan diri mereka dengan Islam. Dalam pergaulan sosial akan muncul pandangan yang janggal jika terdapat orang Bugis atau Makassar yang bukan pemeluk Islam karena akan dianggap menyalahi *pangngadérréng* sehingga menyebabkan dirinya akan dianggap asing dalam lingkungan dan masyarakatnya (Mattulada 1976: 24).

KEDATUAN LUWU

3.1 Luwu Dalam Tradisi Lisan, Catatan Naskah Tradisional, dan Sejarah

Sebagai kerajaan yang dianggap tertua di Sulawesi Selatan, asal-usul dan perkembangan Kedatuan Luwu mengundang berbagai perdebatan dan asumsi para sarjana. Masyarakat Kedatuan Luwu bersifat kompleks dibanding wilayah lain di Sulawesi Selatan. Berbeda dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan, di Kedatuan Luwu terdapat banyak anak suku dengan bahasa ibu mereka yang berbeda-beda. Bahasa Bugis hanya dituturkan di daerah pesisir dan sangat sedikit penggunaannya di pedalaman terutama di sepanjang daerah sempit aliran sungai di Palopo selatan. Di wilayah pedalaman dataran rendah terdapat penutur bahasa Toala, Lemolang, Wotu, Padoe, dan Tolaki sementara di lembah dataran tinggi tinggal para penutur bahasa Rongkong, Seko, Rampi, dan Mori (Bulbeck dan Caldwell 2000 91–2). Diduga, para penutur tersebut telah ada sebelum 1100 Masehi, ditandai oleh keberadaan perkampungan (*chiefdoms*) kecil yang hidup dari pengolahan ladang yang merupakan hunian masyarakat awal peradaban Luwu (Pelras 2006: 56).

Dalam tradisi lisan di Wotu, salah satu dari sejumlah anak suku yang terdapat di Luwu, yang memiliki bahasa ibu sendiri yaitu bahasa Wotu (Salombe 1986), masyarakatnya meyakini bahwa wilayah mereka, yaitu Bukit Lampenai yang terletak di sebelah timur Wotu, merupakan tempat kali pertama Batara Guru turun dari langit mengajarkan manusia bercocok tanam. Lokasi tersebut disebut *bilasa lamo*a atau 'kebun dewata' dalam bahasa Wotu (Amir dalam Sumantri [ed.] 2006: 238–9; BMAW 2003). Bahasa Wotu merupakan *lingua franca* atau bahasa komunikasi yang digunakan di kawasan pesisir utara Teluk Bone, sebagian Sulawesi Tengah hingga Kabupaten Poso dan sekitarnya dan di Buton di Sulawesi Tenggara. Pelras berpendapat bahwa bahasa Wotu adalah bahasa asli Luwu dan penuturnya adalah pewaris budaya Luwu sesungguhnya.

Tradisi lisan masyarakat Wotu yang dikenal dengan istilah *Surra Mattua* menarik garis silsilah mereka kepada tokoh Batara Guru yang diyakini sebagai utusan langit pertama yang turun ke bumi untuk membawa ketenteraman dalam masyarakat. Kisah tersebut memiliki persamaan dengan kisah yang terkandung dalam kitab *La Galigo* yang memuat kisah asal-usul penguasa Luwu dan Bugis namun terdapat satu versi yang berbeda yang memuat tentang keberadaan keturunan Batara Guru dalam versi orang Wotu. Versi tersebut tidak terdapat dalam versi Bugis yang memuat kisah mengenai perkembangan Kedatuan Luwu versi Wotu (Amir dalam Sumantri [ed.] 2006: 240–1).

Kisah mengenai nenek moyang orang Wotu disebutkan dalam dua periode masa seperti halnya kisah dalam lontara Luwu yaitu periode *mula ito mamulae* atau periode 'manusia awal' untuk menyebutkan masa kehadiran Batara Guru dan periode *mula ito ganna duanggoe* atau 'permulaan manusia kedua' yang mengacu kepada masa kepemimpinan Simpursiang (Amir dalam Sumantri [ed.] 2006: 240). Versi Wotu mengisahkan bahwa *Patotoq e ri Bottinglangi* atau dewata tertinggi mengutus putranya Batara Guru untuk turun ke bumi dan memimpin masyarakat di Luwu. Kehadirannya disertai dengan singgasananya yang terbuat dari bambu emas, tujuh orang *oro*, istana, menyusul perlengkapan perang dan peralatan lainnya. Batara Guru dianggap sebagai penguasa Luwu pertama yang memperkenalkan dan mengajarkan pertanian kepada rakyatnya. Orang Wotu menganggap dirinya sebagai keturunan Batara Guru dengan mengambil silsilah dari cicit Batara Guru yaitu Simpursiang atau Simpursia. Simpursia adalah

putra dari pasangan We Tenriabeng dan Remmang ri Langi. We Tenriabeng sendiri merupakan saudara kembar dari tokoh kepahlawanan Luwu yaitu Sawerigading. Simpursia menikah dengan saudara sepupunya yang bernama We Salinru Tojang yang merupakan putri bungsu dari Sawerigading dan We Cudai. Adapun Sawerigading dan We Tenriabeng merupakan anak dari penguasa Luwu II yaitu Batara Lattuq yang merupakan anak dari Batara Guru (Amir dalam Sumantri [ed.] 2006: 240).

Simpursia atau dalam bahasa Wotu disebut *Pua Modala Salassae* atau 'yang berjalan di istana' memiliki putra bernama La Tikka yang kemudian menikah dengan seorang perempuan rupawan yang bernama We Daruma. Dikisahkan bahwa setelah pernikahan tersebut Simpursia menyerahkan tahta Luwu kepada La Tikka beserta lontara Luwu dan dua buah senjata pusaka peninggalan Batara Guru. Simpursia disebutkan kembali ke langit dan berpesan kepada pewarisnya tersebut bahwa jika kelak mereka memiliki anak maka keturunan pertama akan diberi kekuasaan di *tengngana Luwu* atau Wotu sebagai *Macoa Bawa Lipu* sedangkan yang bungsu diberi kuasa di Watangpareng sebagai datu.

Tradisi lisan Wotu menyebutkan bahwa La Tikka dan We Daruma memiliki empat orang anak yang terdiri dari tiga orang putra yang bernama Bau Kuna, Bau Leko, Bau Jala, dan seorang putri bernama Bau Cina. Berdasarkan wasiat dari Simpursia, maka putra sulung bernama Bau Kuna dilantik menjadi *Macoa Bawalipu* yang memerintah di Wotu sedangkan putri bungsu bernama Bau Cina diberi kuasa di Wareq setelah dinikahkan dengan seorang putra bangsawan dari Mengkoka di wilayah Sulawesi Tenggara.

Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan dua orang anak La Tikka yaitu Bau Leko dan Bau Jala. Mereka terutama tidak setuju dengan pengangkatan adik perempuan mereka sebagai penguasa Wareq sehingga dewan adat memutuskan bersidang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun Bau Kuna sebagai putra tertua bersikukuh dengan amanat dari kakeknya dan ayahnya sedangkan kedua saudara laki-lakinya tersebut tetap tidak mau menerima hasil putusan sidang. Kedua saudaranya tersebut memutuskan meninggalkan kehidupan mereka di Luwu. Bau Leko meninggalkan negerinya menuju arah utara sedangkan Bau Jala berlayar ke selatan.

Perjalanan Bau Leko dan Bau Jala tersebut dapat dikatakan menjadi awal dari perkembangan pengaruh Luwu atas wilayah lain di luar batasan negeri Luwu. Bau Leko berjalan menembus rimba dan gunung sehingga sampai ke sebuah tempat yang sangat jauh dari Luwu dan meminta izin kepada kepala suku yang disinggahinya untuk mendirikan pondok. Kepala suku mengatakan bahwa kalau Bau Leko ingin mengambil tanah dipersilakan untuk mengambil wilayah rawa di sekitar lokasi tersebut seluas apa pun yang dia kehendaki. Alkisah, mendengar hal itu, Bau Leko menerimanya dan menaburkan segenggam tanah *bangkala* atau tanah keramat yang dibawanya dari Luwu sehingga dalam tujuh hari tujuh malam terjadi keajaiban yang membuat tanah rawa mengering. Mengetahui hal itu, kepala suku terperanjat apalagi setelah mengetahui bahwa Bau Leko adalah bangsawan tinggi Luwu sehingga membuat dirinya segera menghadap dan bersujud memohon maaf kepada Bau Leko. Kepala suku tersebut kemudian mengangkat Bau Leko menjadi raja mereka. Wilayah tempat rawa tersebut dinamakan Palu berasal dari kata *topalve* yang dalam bahasa Wotu bermakna 'tanah yang terangkat dan mengering' (Amir dalam Sumantri [ed.] 2006: 242). Kini, lokasi itu menjadi pusat ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun saudaranya, yaitu Bau Jala, memilih berlayar ke arah selatan setelah memohon restu kepada saudara tertuanya Bau Kuna. Dikisahkan bahwa perahu Bau Jala melesat bagaikan anak panah hingga akhirnya kandas atau dalam bahasa Wotu disebut *buttu* di suatu daratan yang sekarang dikenal sebagai 'Butung' atau 'Buton'. Seperti halnya kakaknya di Palu, Bau Jala pun ditabalkan oleh rakyat setempat menjadi penguasa di wilayah tersebut (Amir dalam Sumantri [ed.] 2006: 242).

Kisah versi Wotu tersebut menghubungkan Luwu yang diwakili oleh Wotu dengan dua wilayah yaitu Palu dan Buton. Silsilah penguasa pada ketiga wilayah itu pada tiga generasi memiliki persamaan dengan kisah *Galigo* yang menjadi pegangan masyarakat Luwu dan Bugis. Namun, pada versi Wotu terdapat perbedaan pada urutan generasi keempat dan kelima yang menghubungkan Luwu (Wotu) dengan Palu dan Buton. Di sini, disebutkan silsilah para penguasa Luwu, Palu dan Buton mengikuti versi Wotu, yakni *Pua Motanru Bulawae* 'yang bertanduk emas', merupakan ayah dari La Patiganna atau Sangkuruwira. La Patiganna kemudian menikah dengan Latte Isomba Tawallangi dan berputra

bernama Patotoq E yang kemudian menikah dengan Pua Dettia Unru Senrijaya yang menurunkan Batara Guru. Selanjutnya Batara Guru menikah dengan We Nyilitimo dan mendapatkan putra bernama Batara Lattu yang merupakan ayah dari Sawerigading dan We Tenriabeng dari pernikahannya dengan We Datu Sengngeng. Selanjutnya anak perempuan dari Sawerigading yang bernama Salinru Tojang dari perkawinannya dengan We Cudai menikah dengan saudara sepupunya yang bernama Simpursia, putra We Tenriabeng dari perkawinannya dengan Remmang ri Langi. Adapun salah seorang anak Sawerigading yang paling terkemuka karena kemampuannya menyusun kisah silsilah Luwu bernama La Galigo, yang namanya diabadikan sebagai nama kitab naskah tersebut di kemudian hari. Selanjutnya perkawinan Salinru Tojang dengan Simpursia menurunkan anak bernama La Tikka atau Pua Atikka yang kemudian kawin dengan We Daruma. Dalam tradisi lisan orang Wotu, Pua Atikka menjadi moyang penguasa Wotu (Aleluwu), Palu, dan Buton (Amir dalam Sumantri [ed.] 2006: 242-3).

Tidak mudah untuk membuat interpretasi sejarah dengan menggunakan tradisi lisan sebab berbagai pengaruh dan perkembangan yang berasal dari masyarakat akan berpengaruh terhadap kisah tersebut terutama ketika data sejarah tidak cukup tersedia sedangkan tinggalan arkeologi masih memerlukan pengkajian lebih jauh. Namun, beberapa kajian linguistik menemukan tingginya persentase kemiripan antara bahasa Wotu dengan bahasa Wolio di Buton serta bahasa Layolo di Pulau Selayar (Salombe 1986). Kemiripan bahasa ini memunculkan dugaan bahwa mereka adalah pelaku utama dalam perdagangan pada masa awal Kedatuan Luwu sekitar abad ke-11 sebelum berpindah ke Malangke dan seterusnya berpindah lagi ke Palopo pada awal abad ke-17 (Amir dalam Sumantri [ed.] 2006: 247).

Tradisi lisan Wotu juga mengisahkan perihal hubungan antara Luwu dengan wilayah pedalaman. Alkisah, pada masa kekuasaan Simpursia disebutkan ada seorang penjahat yang bernama La Sopanti yang tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. La Sopanti mengganggu ketenteraman di bagian barat Wotu sehingga membuat rakyat Luwu ketakutan. Seorang putra bangsawan dari istana Simpursia bernama La Saeyyo Pua Mona kemudian memutuskan menghadapi bajingan tersebut yang kemudian berhasil

mengalahkan dan menewaskannya. Atas jasanya, La Saeyyo kemudian diberi tanah sejauh jatuhnya anak panah yang terlepas dari busurnya. La Saeyyo menembakkan anak panahnya ke arah selatan. Tempat anak panahnya menancap disebut *tammuku* dan wilayah itu dihadiahkan kepada La Saeyyo termasuk orang-orang yang berdiam di sana yang menjadi pengikutnya. Orang-orang yang berdiam di wilayah tersebut dengan senang hati menerima pahlawan ini dan menamakan daerah tempat La Saeyyo bermukim dinamakan Lampu Awa yang memiliki arti 'orang jujur datang.' Nama daerah tersebut masih digunakan sampai sekarang. Di tempat itulah La Saeyyo menurunkan anak-anaknya bernama Pua Lalo Gauna, Pua Lalo, dan Pua Lalo Lalo.

Setelah sekian masa berdiam di sana, La Saeyyo Pua Mona memutuskan pindah ke utara di antara wilayah Wotu dan Bada yang terletak di Sulawesi Tengah. Di sana, ia kawin dengan seorang perempuan setempat bernama Ramongi dan mendapatkan seorang putri. Sebuah kejadian membuat La Saeyyo meninggalkan Ramongi dan putrinya. Hal itu terjadi karena Ramongi meminta La Saeyyo membantunya membersihkan tinja anaknya berhubung saat itu ia (Ramongi) sedang menanak nasi. Seketika La Saeyyo meninggalkan keluarganya dan menaiki wilayah pegunungan, membawa busur dan ayam jantan kesayangannya. Mungkin itulah permulaan pemali bagi laki-laki Wotu mencuci kotoran di bagian pantat anaknya terutama anak perempuan. Selanjutnya La Saeyyo menetap di suatu daerah bernama Bada dan membangun peradaban di sana dan tetap menjalin hubungan dengan tempat asalnya di Wotu, sebuah wilayah yang menjadi bagian dari awal peradaban Luwu. La Saeyyo disebutkan meninggal di wilayah tersebut dan kemudian dimakamkan di Poso. Kisah petualangan La Saeyyo Pua Mona tampaknya menjadi landasan bagi posisi Wotu di Kedatuan Luwu yang berperan sebagai *domain* atau penghubung antara Luwu dengan suku-suku di pedalaman yang sampai sekarang masih dapat didapatkan kisahnya. Pemangku adat suku Pamona yang dipimpin oleh Lembang Pamona sampai saat ini masih meminta izin kepada pemegang adat tertinggi di Wotu yaitu Macoa Bawa Lipu (Amir dalam Sumantri [ed] 2006: 244–5).

Catatan tertua mengenai negeri Luwu berasal dari kitab *Negarakertagama* atau *Desawarnana* yang disusun pada masa Kerajaan Majapahit. Kitab yang disusun oleh Prapanca pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1364)

itu menyebutkan Luwu dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan termasuk beberapa wilayah di sekitar Pulau Sulawesi dalam *sarga* XIII dan XXIV, "*Muwah tanah; Bantayan pramuka Bantayan len Luwuk tentang Udamakarkartayadhi nikanang sanuasaapupul Ikangsakasanu-sanusa Makassar Butun Banggawi Kuni Craliyao mwangi (ngi) Selaya Soto Muar*" (Yamin 1986: 60–3). Nama negeri Luwu disebutkan dengan beberapa tempat di dataran Sulawesi seperti negeri Bantayan (Bantaeng), Makassar, Butun (Buton) dan Selaya (Selayar).

Kitab Galigo yang menjadi sumber tertua sejarah Luwu dikumpulkan ketika seorang sarjana Belanda, B. F. Matthes, bertugas di Sulawesi Selatan sekitar 1880. Naskah tersebut mengisahkan tentang sejarah pembentukan Kedatuan Luwu yang mula-mula bernama Wareq yang berlokasi di sekitar Kampung Ussuq sekarang. Adapun raja pertama kerajaan ini dikisahkan bernama Batara Guru yang merupakan anak tertua dari To Palanroe atau To Patoto'e yang merupakan dewa tertinggi di langit dan istrinya yang bernama Datu Palinge. Batara Guru berjumpa dengan istrinya yang bernama We Nyili Timo Tompoq'e ri Busa Empong di sebuah tempat bernama Waraq atau Wareq yang menjadi cikal bakal Kedatuan Luwu. Selain dengan We Nyili Timo, Batara Guru juga kawin dengan perempuan lain yang bernama We Saungriu yang menurunkan seorang putri bernama Sangiang Sari. Putri ini meninggal pada umur belia dan di makamnya kemudian tumbuh tanaman padi yang menjadi awal dari pertanian padi di Luwu.

Perkawinan antara Batara Guru dengan We Nyili Timo menurunkan seorang putra bernama Batara Lattu yang kemudian menggantikan dirinya menjadi penguasa Kedatuan Luwu berikutnya. Batara Lattu kawin dengan We Sengngeng dan setelah berkuasa mendirikan istananya di Bukit Finsemoni yang kemudian dijadikan tempat kediamannya setelah istana baru didirikan di Ussuq. Istana di Ussuq menjadi tempat pemerintahan dan kemudian kediaman para *bissu* atau para pendeta yang menjalankan ritual keagamaan di daerah Cerekang. Wilayah ini dianggap sebagai cikal-bakal kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang keturunannya menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan yang terdapat di Sulawesi Selatan (Mappangara [ed.] 2004: 37–8).

Nama Luwu juga dikaitkan dengan kisah penyerangan Kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah (1440) yang termuat dalam

kitab Sejarah Melayu. Kitab tersebut mengisahkan pada suatu masa terdapat satu armada dari Makassar yang dipimpin oleh Keraing Samarluka. Diduga, penyebutan nama 'Keraing Samaluka' merupakan kesalahan transliterasi dari Jawi ke Latin. 'Keraing' adalah penyebutan yang salah dari gelar 'karaeng' yang merujuk kepada penguasa atau kepala sebuah wilayah adat yang digunakan di Makassar. Nama 'Samarluka' mungkin berasal dari penyebutan 'Sama ri Luwuka'. Istilah 'sama' merujuk kepada penyebutan bagi penduduk asli daerah laut yang hidup nomaden yaitu orang Bajau. Keberadaan orang Bajau dalam literatur tradisional di Sulawesi Selatan disebutkan berasal dari Luwu (Reid 2004: 133–47; Pelras dalam Bonneff, dkk. 1983: 58).

Dalam naskah Galigo yang memuat kisah tentang asal-usul para penguasa Kedatuan Luwu diberitakan bahwa orang-orang Bajau tercipta dari butiran telur burung yang terjatuh ketika pohon *welenrengnge* ditebang. Pohon tersebut berukuran raksasa, sebagai bahan pembuatan perahu bagi Sawerigading, anak penguasa Kedatuan Luwu yang bernama Batara Lattu. Dikisahkan, ketika pohon raksasa itu ditebang dan tumbang, bagian ujungnya menerpa sebuah bukit kecil di sebelah timur wilayah Ussu' sehingga terbelah menjadi dua bagian dan kemudian dikenal dengan sebutan Bulu' Poloe atau 'bukit yang terbelah.' Pohon raksasa tersebut kemudian dijadikan perahu besar sebanyak tujuh buah untuk menemani Sawerigading berlayar dalam usahanya mendapatkan cinta seorang wanita dari negeri Cina yang bernama We Cudai. Putri ini sangat mirip dengan saudara perempuan kembaran Sawerigading bernama We Tenriabeng. Orang-orang Bajau inilah yang kemudian mendampingi pelayaran dan petualangan Sawerigading ke negeri Cina untuk bertemu dengan We Cudai (Mappangara [ed.] 2004: 37. Satu hal yang menarik dari naskah Galigo adalah bagian yang mengisahkan pertemuan antara Sawerigading dengan Nabi Muhammad. Pertemuan itu dikisahkan terjadi di Mekkah dan pada saat itu disebutkan bahwa usia Sawerigading lebih tua sekitar tujuh tahun dari Nabi Muhammad (Mappangara [ed.] 2004: 38). Kisah tentang Sawerigading sangat panjang dan memiliki beragam versi di hampir semua wilayah di Sulawesi Selatan dan juga di beberapa wilayah sekitarnya seperti di Palu dan Kendari bahkan sampai di negeri-negeri Semenanjung.

Sementara itu, orang-orang Bajau, yang juga disebut *to sama'*, terkenal

dengan kemampuan mereka dalam pelayaran. Mereka juga menjadi bagian dari kisah pembentukan Kerajaan Gowa. Kronik Gowa mengisahkan bahwa penguasa pertama Kerajaan Gowa yang disebut puteri *Tumanurung* atau 'yang turun dari langit' dan tidak diketahui asal-usulnya tersebut kawin dengan dengan seorang lelaki yang berasal dari selatan yang bergelar Karaeng Bayo yang merupakan pemimpin atau ketua dari orang-orang Bajau (Reid 2004: 138).

Dalam kisah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, penguasa Kedatuan Luwu XV yang bernama La Patiware Daeng Parabung menjadi raja pertama yang memeluk agama Islam setelah perjumpaan dan dialog yang panjang dengan tiga mubalig asal Minangkabau. Setelah Datu Luwu memeluk Islam, penguasa Kerajaan Gowa dan Tallo menyusul mengikutinya. Ketiga kerajaan besar itu saling membantu dan mendukung dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan sepanjang satu dekade pada awal abad ke-17. Satu hal yang menarik diperhatikan adalah hubungan kekerabatan antara penguasa Luwu dan Gowa yang terjalin karena permaisuri Datu Luwu La Patiware Daeng Parabung adalah saudara raja Gowa XIV I Mangngarangi Daeng Manrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin (1593-1639). Isteri Datu Luwu tersebut bernama Karaeng ri Balla Bugisika yang menjadi salah satu aspek yang menguatkan hubungan antara Kedatuan Luwu dan Kerajaan Gowa (Mattata 1967: 56).

3.2 Ikatan Kekerabatan antara Luwu dan Gowa

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memahami penyebaran Islam di Sulawesi Selatan adalah hubungan antara Kedatuan Luwu dengan Kerajaan Gowa pada awal abad ke-17. Kebesaran dan kekuatan Kerajaan Gowa bersama kerajaan kembarnya, Kerajaan Tallo, berhasil menaklukkan sejumlah wilayah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sepanjang abad ke-16 dan abad ke-17. Dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perselisihan yang berarti antara Kerajaan Gowa dan Luwu pada masa tersebut. Namun, kemungkinan penaklukan Luwu oleh Gowa juga tidak dapat dimungkiri sehingga sejumlah bangsawan Luwu mengatur rencana agar kerajaan mereka tidak menjadi taklukan Gowa tetapi menjadi mitra dari kerajaan besar tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan

antara dua kerajaan tersebut.

Usaha para bangsawan Luwu menemukan kesempatan ketika Kerajaan Gowa mengadakan pesta besar dengan mengundang raja-raja dari kerajaan sahabat dan dari taklukannya. Pesta tersebut berlangsung meriah dan para raja sahabat dan kerajaan taklukan membawa persembahan buat raja Gowa. Pesta yang diadakan oleh raja diperuntukkan saudara perempuannya yang terkenal akan kecantikannya berupa acara *riwinru* atau 'acara menginjak tanah'. Menurut kebiasaan pada masa itu, seorang anak raja tidak diperbolehkan menginjak tanah sampai dianggap dewasa. Seorang putri harus ditandu sedangkan seorang putra raja harus dijulang. Setelah acara *riwinru* barulah anak raja boleh menginjak tanah.

Mengetahui bahwa yang akan *riwinru* adalah saudari raja Gowa maka Datu Luwu XV La Patiware sendiri memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. Datu Luwu sendiri pada masa tersebut belum memiliki permaisuri yang mendampinginya memerintah di Kedatuan Luwu. Dalam menghadiri acara tersebut Datu Luwu memilih dan mengajak para pembesar dan cerdik pandai di Kedatuan Luwu untuk mendampinginya ke Gowa. Di antara para pembesar Luwu terdapat Madika Marinding yang memimpin masyarakat adat Marinding dan bernama Somme yang dianggap cakap dan memiliki pengetahuan tentang adat-istiadat orang Gowa (Mattata 1967: 74–6).

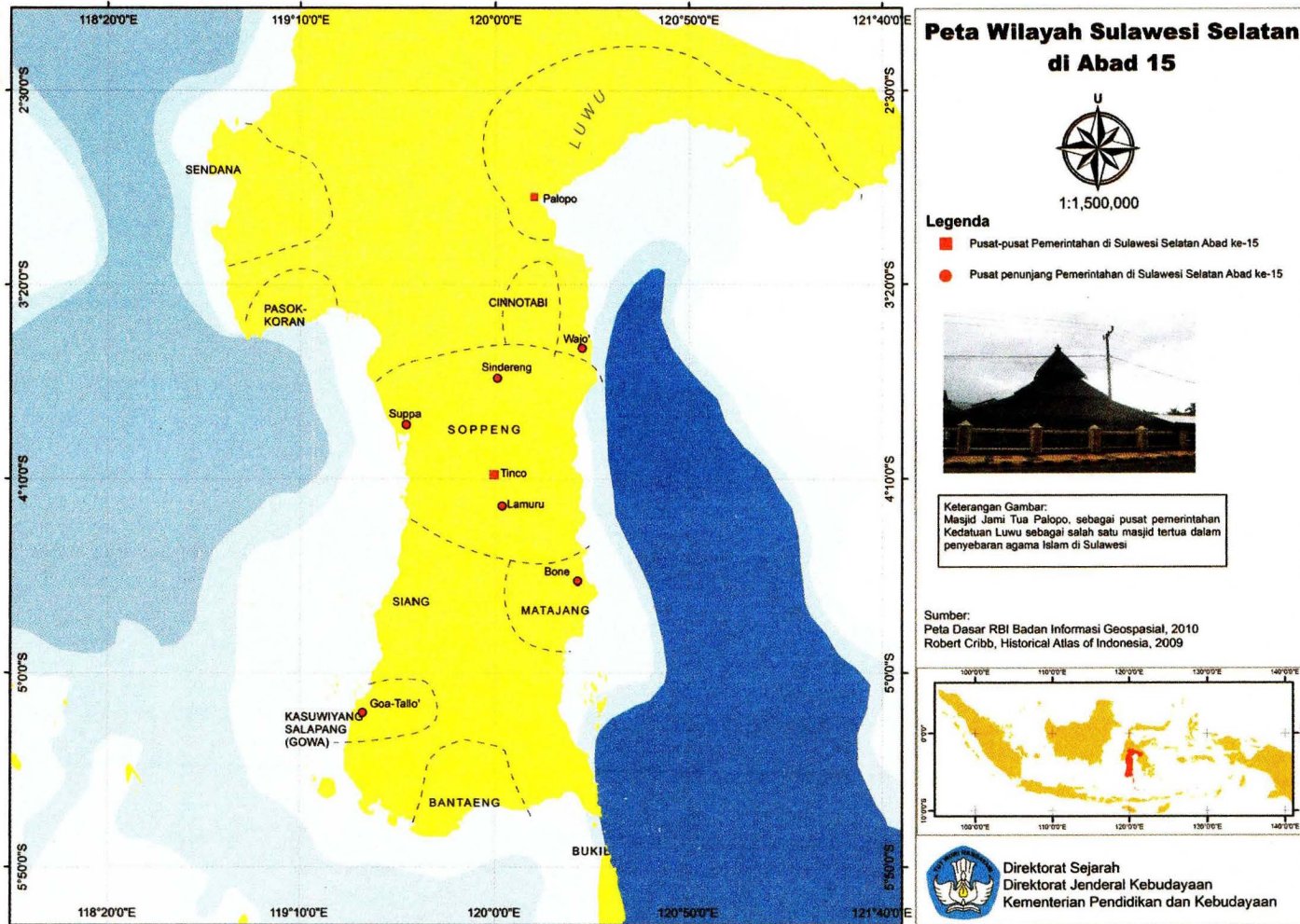
Tiba di Kerajaan Gowa, Datu Luwu dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan untuknya; demikian pula dengan para raja yang hadir pada saat itu. Datu Luwu terpesona dengan kemegahan istana Gowa dan kemeriahan acara. Pandangannya tertuju pada seorang putri yang duduk di tengah-tengah istana dengan pakaian kebesarannya dan dikelilingi oleh dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Paduka Datu Luwu bertanya kepada Madika Marinding sambil berbisik siapakah gerangan puteri yang berada di tengah-tengah istana Gowa tersebut. Madika Marinding yang memahami adat-istiadat Gowa menemukan kesempatan untuk menyatukan Luwu dan Gowa kemudian menjawab dengan suara yang agak keras bahwa putri tersebut adalah saudari Raja Gowa yang sedang *riwinru*. Suara Madika Marinding terdengar oleh sekalian orang dalam istana Gowa sehingga menimbulkan kegelisahan dalam istana. Sebenarnya Datu Luwu tidak mengetahui adat-istiadat orang Gowa bahwa barang siapa yang

menanyakan tentang wanita yang berada dalam istana Gowa maka jika sederajat haruslah dinikahkan, namun apabila tidak setaraf akan dihukum berat. Siasat Madika Marinding berhasil sehingga pesta *riwinru* diperpanjang beberapa hari karena Datu Luwu dinikahkan dengan adik raja Gowa tersebut. Putri itu kemudian diberi gelar Karaeng ri Balla Bugisika atau 'Yang Dituankan di Istana Orang Bugis'. Ketika Datu Luwu kembali ke istananya di Malangke, pasangan pengantin tersebut disambut dengan pesta yang meriah. Perkawinan itu menyatukan Kedatuan Luwu dengan Gowa dan berhasil menghindarkan Kedatuan Luwu dari upaya penaklukan oleh Kerajaan Gowa. Atas jasanya, jabatan Madika Marinding hanya boleh dijabat oleh keturunan dari Somme yang terus berlaku hingga Swapraja Luwu ditiadakan setelah kemerdekaan Republik Indonesia (Mattata 1967: 75–7).

Adapun Kedatuan Luwu pada sekitar awal abad ke-17 merupakan kerajaan yang makmur dan kuat yang berpusat di Patimang-Malangke. Berdasarkan kajian arkeologi, wilayah tersebut memiliki pola permukiman yang luas dibanding wilayah Luwu yang lain. Pusat istana di Patimang-Malangke memperlihatkan kemegahan yang menyerupai istana Gowa di Somba Opu antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 (Bulbeck, Prasetyo dan Sumantri dalam Sumantri [ed.] 2006: 36–7).

3.3 Keadaan Geografi Kedatuan Luwu

Kerajaan Luwu, dalam catatan sejarah sering juga disebut Luhū atau Lu, memiliki batas wilayah asli yang sangat luas dibanding wilayah kerajaan yang lain di Sulawesi Selatan. Wilayah asli yang dimaksud adalah yang menjadi bagian utama dari kebudayaan Luwu. Dalam catatan Van Braam Morris yang menjadi Gubernur Celebes pada 1888 disebutkan bahwa Luwu berbatasan dengan Pitumpanua yang merupakan bagian dari Kerajaan Bone, Wajo, dan Poleang. Dalam tulisan ini catatan van Braam Morris akan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan negeri Luwu disertai beberapa catatan dari penulis (Hafid dalam Sumantri [ed.] 2006: 190–233).



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kedatuan Luwu Abad 15

Wilayah Kedatuan Luwu meliputi Mengkoka atau Bingkoka, Lelewau, Ussu, Wotu, Baebunta, Ponrang, Rongkong, Sengkong, Seko, Bua, Olang, Masamba, Walenrang, Larompong, Suli, Cimpu, dan Bariko. Adapun ibu kota Kedatuan Luwu juga disebut Wara atau Wareq. Sementara itu, wilayah pulau-pulau di antaranya adalah Pulau Libukang yang terletak di Teluk Palopo, Pulau Bulu Poloe, Satiri Besar dan Satiri Kecil yang terletak di selatan Ussuq, serta Laburako dan Campen di sebelah utara Mengkoka di dekat Teluk Pao serta Pamarang.

Kedatuan Luwu bagian barat berbatasan dengan wilayah Kerajaan Wajo, Ajatappareng, Masenrempulu dan kerajaan-kerajaan Mandar. Di sebelah utara berhadapan dengan daerah Palos atau Kaili dan Poso yang sekarang terletak di wilayah Sulawesi Tengah, sedangkan di timur berbatasan dengan Laiwui atau Kendari dan Poleang. Adapun sepanjang pantai selatan dibatasi oleh Teluk Bone. Batas selatan berbatasan dengan Pitumpanua dan Wajo. Orang-orang Luwu bahkan menganggap wilayah Toraja dan Poso merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Luwu. Hal itu disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Toraja yang membawa persembahan pada saat pelantikan raja di Luwu.

Luwu memiliki wilayah pegunungan yang amat luas di antaranya di bagian selatan dan barat berdiri Pegunungan Latimojong dengan puncaknya yang mencapai sekitar 10.000 kaki. Di sebelah utara pegunungan itu terdapat puncak gunung yang lebih tinggi dari puncak Latimojong yaitu Pegunungan Ussuq Tomori dan Tobungku dan di timur laut dan sebelah timur terdapat Pegunungan Lelewau dan Mengkoka. Seluruh gunung itu pada masa lampau merupakan hutan lebat dan liar bahkan mendekati Palopo, ibu kota kerajaan Luwu. Sementara itu, wilayah datar dijumpai di bagian pantai barat dan pantai utara barat laut. Wilayah itu masuk beberapa kilometer ke pedalaman dan memiliki populasi penduduk yang bermukim di sana yang lebih banyak. Daerah itu terendam pada waktu air pasang dan merupakan jenis tanah aluvial yang lembek dan sebagian adalah rawa-rawa.

Ibu kota Kedatuan Luwu, yaitu Palopo, terletak di ujung utara barat laut Teluk Bone bersebelahan dengan bagian selatan dari cabang rawa-rawa Gunung Malambe dan Andoli yang menjorok ke arah laut. Rawa-rawa tersebut terdapat di muara sungai Palopo dan Picempute. Kota Palopo terdiri dari kampung-kampung Tappongnge, Suratanga, Mangarabombang, Panjalae, Campae, Bonee,

Parupange, Amasang, Bolasadae, Batupai, Pajalesang Bunturu, Tompotikka, Warue, Songka, Penggoli, Sabamparu, Laminda, Kampongberu, Balandai, Ladiadia, dan Rompuang.

Adapun sungai-sungai utama di wilayah Luwu mengalir di wilayah selatan Palopo yaitu Sungai Bariko, Larompong, Cimpu, Suling Jene Maejae, Olang Ponrang, Bua, Songka, Palopo, dan Picempute. Sedangkan di sebelah timur terdapat Sungai Salo Bulu, Tamalaba, Walenrang, Marowo, Lamasing, Pompengngang, Laburaburao, Laore, Uppa, Uwae-Lawi, Mantalinga, Pao Biro atau Patimang, Tokkee, Tamponge, Cappa-Salu, Lapunte, Walo, Jampu, Batalongka, Tammuko, Patila, Setang-setang, Lauwo, Laborau, Saluwanna, Batubalo, Wotu, Bubu, Langkara, Cerekang Ussuq. Sementara itu yang terdapat di wilayah selatan Ussuq adalah Sungai Lelewau, Pao, Kolako, Tohuwa, dan Passuloi. Di sebelah selatan Mengkoka terdapat Sungai Pondo Pulo, Bua Tallang dan Towari yang bermuara di Teluk Bone.

Adapun sungai yang terbesar di Luwu adalah Sungai Ussuq yang berhulu di Danau Matano, kemudian Sungai Cerekang yang dapat dilayari perahu besar hingga pedalaman. Sungai Ussuq dapat dimasuki hingga pedalaman dengan mengayuh perahu selama dua hari perjalanan karena harus melawan arus. Disebutkan oleh Morris bahwa pada 1861 sungai ini dikunjungi oleh Gubernur J. A. Bakkers dengan mendayung selama dua hari melawan arus dan wilayah pinggir sungai pada masa itu belum berpenghuni. Namun, sekitar akhir abad ke-19, wilayah itu menjadi ramai sebagai jalan pengangkutan damar dari pedalaman menuju kota Palopo.

Sungai Jenemaejae merupakan salah satu sungai yang unik di Luwu karena airnya berwarna merah. Sungai itu beraliran deras dan jarang dilayari karena tidak berpenghuni di tepiannya. Sedangkan Sungai Larompong dan Bua merupakan jalur utama pengangkutan komoditi kopi dari pedalaman yang ramai dikunjungi dari pedalaman. Adapun komoditi kopi yang terutama berasal dari Toraja memiliki kualitas yang baik karena dipetik saat masak di batang pohon dan hanya buah yang telah merah saja yang dipetik. Disebutkan bahwa orang-orang Toraja tidak mengikuti pengaruh para pedagang luar yang berbuat curang dengan membasahi biji kopi jualan mereka untuk mendapatkan tambahan berat

pada timbangan.

Salah satu komoditas utama Luwu yang terkenal sejak masa silam adalah besi yang dibuat sebagai kelewang, keris, badik, dan tombak. Senjata-senjata besi dari Luwu memiliki pamor yang sangat bagus. Menurut van Braam Morris, Rongkong dan Wotu merupakan dua wilayah yang terkenal menghasilkan senjata tajam berkualitas baik. Besi bahan baku pembuatan senjata dikenal dengan istilah *pamoro* yang ditambang di wilayah Tarongkong dan Ussu, sementara emas ditemukan di Susu yang terletak di pegunungan sebelah barat Cimpu, di Latupa dekat hulu Sungai Palopo, di Dampang Toreo di pedalaman Toraja serta di wilayah utara barat laut Palopo. Pada masa lampau benda-benda tersebut dipertukarkan dengan garam, kain tenun, tembikar, dan barang-barang tembaga.

dapun hasil hutan Luwu yang merentang di pantai utara dan pantai timur Teluk Bone berupa sago, rotan, madu, lilin, damar, kayu pertukangan yang baik, nipa rumbia, dan bambu. Hasil hutan itu merupakan karunia bagi penduduk Luwu pada masa lampau karena merupakan sumber alam yang tidak ada habis-habisnya sehingga membuat orang luar memandang mereka sebagai bangsa pemalas. Para pedagang yang datang terutama adalah orang-orang Arab, Cina, Bugis, dan Makassar, yang tinggal sementara untuk mengumpulkan hasil bumi termasuk biji kopi yang berkualitas baik. Pada akhir abad ke-19, banyak kapal pedagang yang datang ke Palopo dan terus meningkat sejak 1886 untuk mengangkut hasil bumi dari wilayah itu. Kapal-kapal tersebut berasal dari Wajo, Pontianak, dan Singapura. Biasanya kapal pedagang datang pada bulan Juli atau Agustus kemudian pulang membawa sago, rotan, kopi, lilin, kulit, *soga* (bahan membatik) dan kayu *nibong* untuk dibawa ke Singapura. Disebutkan, perdagangan sago mencapai kurang-lebih 15.000 pikul, rotan sekitar 10.000 pikul, dan kopi mencapai 6.000 pikul setiap tahun. Lokasi perdagangan terpenting terdapat di Suling, Larompong, Bua, Batatongka, Wotu, Burau, dan beberapa kampung di Mengkoka yang terletak di dekat pantai dan muara.

3.4 Struktur Sosial dan Kehidupan Sosial di Kedaduan Luwu

Dalam pemerintahan Kedaduan Luwu, seorang raja pada umumnya disebut

datu atau *pajung*. Seorang raja Luwu berasal dari keturunan *arumatasa'* atau dari golongan darah bangsawan tinggi yang masih murni dan lahir dari keturunan asli raja (*wijatomanurung*). Pemilihan raja dilakukan oleh Dewan Adat yang dihormati sebagai manusia keturunan pilihan dari langit. Jabatan penguasa Luwu bersifat turun-temurun baik melalui garis bapak maupun garis ibu. Seorang raja perempuan akan dipilih dalam keadaan yang luar biasa. Seorang yang diangkat sebagai raja menggunakan gelar *datu*; apabila telah dilantik menggunakan gelar *pajung*. Adapun anggota Dewan Adat di kerajaan disebut dengan gelar *opu*, *maqdika*, *mencara*, dan *makole*. Kepala-kepala distrik yang menempati posisi penting memakai gelar *datu*, *makole*, *maqdika*, *mencara*, *palempang*, dan *aru*. Kepala kampung dengan gelar *matowa*, *sariang*, dan pembawa berita atau utusan dinamai *suro*. Kepala-kepala orang Toraja dinamai *maqdika* dan *tomakaka*. Syhabandar sama seperti di mana-mana disebut *sabandara* dan pembantu (kaki tangan) dinamai *mata-mata* (Hafid dalam Sumantri [ed.] 2006: 215).

Masyarakat di Kedatuan Luwu terbagi atas tiga kategori yaitu, pertama, kelas bangsawan yang terdiri dari raja dan semua anggota keluarga kerajaan, para pembesar, putra-putri bangsawan dan pemuka negeri yang ternama. Kedua adalah kelas menengah yang terdiri dari kepala-kepala bawahan, kepala kampung, orang baik-baik dan penduduk merdeka. Sementara yang berada pada urutan terbawah adalah golongan hamba.

Sama halnya dengan orang Makassar, para bangsawan Luwu pada umumnya menggunakan gelar *daeng*. Sementara mereka yang berasal dari kalangan orang baik-baik, orang kaya menggunakan penyebutan *uwaqna* atau 'bapak dari' atau *indoq na* yang bermakna 'ibu dari', dan sering pula dinyatakan dengan istilah *daeng na* atau 'daeng dari'. Makna 'daeng' pada kelompok kedua ini lebih bermakna pada 'kerabat dari'. Contohnya seperti jika seseorang memiliki nama anak bernama Amir, maka ayahnya akan dipanggil dengan sebutan *uwaqna* Borahima atau bapaknya si Ibrahim. Adapun orang-orang rendahan atau bawahan selalu menyapa orang di atasnya atau pimpinannya dengan sebutan *puang* yang bermakna 'raja', 'sahib', atau 'tuan'. Hal itu juga berlaku kepada panggilan dari orang yang berusia lebih muda kepada yang lebih tua (Hafid dalam Sumantri [ed.] 2006: 206).

Daeng adalah gelar bangsawan pada umumnya, akan tetapi golongan kecil juga memakainya. Bagi orang baik-baik, kaya, dan berharta, kadang-kadang nama *uwa'na* (bapak dari) atau *indo'na* (ibu dari) diubah menjadi *daenna* (daeng dari). Bawahan selalu menyapa atasannya dengan sebutan *puang*; demikian juga dengan yang muda terhadap yang tua dalam umur, termasuk orang-orang kecil. Orang kecil disapa dengan nama dari anak-anaknya, umpamanya *Uwan'naBaso* (bapaknya Baso') atau *Indo'naBasse* (ibunya Basse'), pada orang Toraja *Awa'naBaso'* dan *InanaBasse'*. Adik pria atau adik perempuan dari kakak laki-laki, atau kakak perempuan selalu menyapa *daengku*, sedang kakak laki-laki atau kakak perempuan terhadap adik laki-laki atau adik perempuan disebut *anri* (Hafid dalam Sumantri [ed.] 2006: 206).

Gubernur Sulawesi dan Wilayah Taklukanya, B. F. van Braam Morris (1888) dalam catatannya juga membuat deskripsi yang menarik mengenai pakaian yang digunakan oleh masyarakat Luwu, terutama pada akhir abad ke-19 sebagai berikut (Hafid dalam Sumantri [ed.] 2006: 208–10).

Pakaian orang-orang biasa di Luwu terdiri dari sehelai celana pendek dari katun putih (*saluwara'ponco'*) sehelai sarung berwarna belang (*lipa'*) sehelai destar (*pasapu'*) dan sehelai ikat pinggang (*pa'bakkang*). Selanjutnya pada pinggang memakai kantong tembakau (*purukang*) dari kain laken warna hitam, hijau, atau merah tempat penyimpanan ramuan sirih, uang dan jimat-jimat, di atasnya keris, *kawali* (*badi'*) atau kalewang yang diikat dengan pengikat keris tali *bannang*. Apabila mereka berpergian selalu membawa tombak di tangannya.

Orang-orang besar memakai pakaian serupa, dengan beberapa perbedaan antara lain celananya terbuat dari sutera merah pendek, sarung kerisnya dari emas (*pasantimpo*) dan tali kerisnya dari pasmen (*tali bannang pajama*) serta sarung dan destarnya dikilaukan (*rigarusu*).

Baju hanya dipakai saat upacara atau dalam perjalanan. Guru-guru atau pemuka agama biasanya songko dan memakai juga baju putih panjang sesuai ketentuan. Tasbih (*bilampilang*) terikat pada sapu tangan, atau dibelitkan pada hulu *badik* atau *kawali* guru (senjata pemuka agama adalah sebilah badik tidak lebar dengan hulu terbalik ke atas). badik ini diselibatkan ke dalam pinggang dengan pelat *jorong* (oval) dari emas, perak atau kuningan.

Wanita memakai celana pendek dan sarung berwarna belang, sedang dalam rumah mereka tidak memakai baju, ataupun kalau memakai baju warna hitam, coklat, merah atau baju pendek tembus cahaya, yang semua disesuaikan dengan umur mereka. gadis-gadis memakai memakai baju sutera tembus pandang. Dalam perjalanan, semua baju-baju ini yang berwarna putih disertai tambahan pula bagi wanita-wanita memakai kain merah di atas kepala.

Perhiasan yang ada ialah cincin, subang, gelang tangan dan gelang kaki, plat dada dari emas, perak atau kuningan, yang semuanya disesuaikan dengan kedudukan dan kekayaannya. Pakaian istana ialah pada badan bagian atas telanjang, sehelai *tapong* (suatu baju panjang), bagaikan secara memakai sarung sekitar tubuh di atas keris dan sebuah *songkok* (kopiah Bugis).

Tidak seorang pun diperbolehkan memasuki pekarangan istana apabila tidak memakai kopiah dan sebilah tombak dalam tangan. Mereka yang memakai destar harus tinggal dekat *tabu-tabuang*. Anggota-anggota Hadat dan putra-putra utama, apabila mereka menjenguk raja, membawa sendiri sirihnya (*epu*) di dalam tangan.

Pada keramaian atau saat-saat upacara dipakai pakaian sutera (*passangingang*), dengan *tapong* hitam dan kopiah bagi yang tua dalam umur, sedang yang muda memakai *tapong* putih. Kancing emas pada baju, adalah barang yang sangat disukai, juga emas pada pengikat keris dengan pelbagai tulisan Qur'an sebagai jimat. Demikian pula istri-istri dari orang-orang penting memakai baju sutera pada saat-saat diadakan pesta.

Putra-putra muda yang ada di istana, harus memakai sarung seperti rok seputar tubuh di atas keris dalam sabuk. Pakaian ini dinamai *matappi risaliweng* (anak tertua). Anak-anak menurut tradisi telanjang, sedang anak-anak orang terkemuka memakai emas lempeng dada emas (*kawari*), gelang tangan dan gelang kaki emas (*patto*), perhiasan emas pada leher (*geno*), jimat emas pada lengan atas (*sima*'), dan penutup kemaluan emas yang bagi perempuan disebut *jempang* dan bagi laki-laki disebut *aco-aco*. Keduanya mempunyai bentuk seperti (*pudendum*) dan penis (*pelir*).

Sebagai pertanda kemuliaan, setiap pemangku pejabat kerajaan memakai sebilah tombak pendek kecil yang dipegang serta diikuti pembawa sirihnya di belakang raja dan pembesar kerajaan, serta putra-putrinya yang terpendang

menempatkan pembawa tombaknya di depan raja, dan pembesar kerajaan terpenting juga mempunyai perisai kehormatan (*lengu* atau *kaliawo*), *bassi pakka* (lambing dengan dua atau tiga ujung serupa dengan garpu), cerek (*cere'*) dan kotak sirih (*epu* atau *ota*). Saat perang, orang-orang penting dipersenjatai dengan *bassibanranga* (lembing dengan jambul) dan memakai baju *rante* (*malienkolder*), sedangkan orang biasa memakai tombak biasa atau dipersenjatai dengan bedil atau kelewang.

Orang-orang Toraja mempunyai pakaian yang berbeda. Bagi mereka yang selalu berhubungan dengan orang-orang penduduk pantai memakai celana putih pendek, sarung putih, dan baju putih; demikian pula dengan perempuan. Tetapi bagi laki-laki tidak memakai destar di kepala, namun seutas tali sepanjang dua atau tiga depa. Orang Toraja asli tidak memakai suatu selain hanya *sungkalli* (*cindako*) dari kulit kayu dan sehelai sarung, atau dari kulit kayu, atau dari kain katun tenunan sendiri. Senjatanya adalah sebilah kelewang, sebilah tombak dan sumpitan dengan anak-anak panah berbisa. Bilamana mereka berangkat menuju perang atau pergi mengayau, maka mereka memakai topi rotan dengan tanduk tembaga (*lake*) yang masuk ke dalam baju besi, yang terbuat dari kulit kayu, disebut *babukara* atau *parakang*. Perlengkapan diri yang lain adalah perisai dari kayu persegi empat atau perisai dari anyaman rotan bulat (*lengu* atau *jobang*). Pada tahun-tahun terakhir mereka banyak menggunakan senjata api.

Pakaian merupakan aspek penting bagi penampilan diri seseorang dan berkaitan dengan status sosialnya. Aspek berbusana ini juga dikaitkan dengan perhiasan yang digunakan oleh mereka. Pakaian dan perhiasan merupakan dua hal yang paling sering ditunjukkan bahkan oleh orang-orang yang masuk dalam kategori miskin sekalipun akan berusaha tampil sebaik mungkin pada acara-acara penting. Ada kalanya gaya berpakaian orang biasa maupun para bangsawan memiliki kesamaan dan hanya dibedakan oleh kehalusan kainnya (Reid 1992: 97).

DATUK SULAIMAN DAN PENYEBARAN ISLAM DI LUWU

4.1 Penerimaan Islam di Luwu

Sebagaimana dikisahkan sebelumnya bahwa kedatangan tiga mubalig dari Minangkabau untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan berhasil mengislamkan Datu Luwu pada 1605. Namun, sebelum mengislamkan La Patiware Daeng Parabung, datu Luwu XV, ketiga mubalig ini menjumpai penguasa wilayah Bua yang merupakan *lili'* atau vasal dari Kedatuan Luwu. Penguasa wilayah Bua disebut Maqdika yang pada saat itu dijabat oleh Tandipau. Maqdika Tandipau yang menemui ketiga mubalig dari Minangkabau takjub dengan perahu yang ditumpangi mereka yang berwujud 'kulit kerang laut kima yang besar' (Mangappara [ed.] 2004: 119).

Terdapat sejumlah versi yang berkembang mengenai kemampuan luar biasa ketiga mubalig tersebut mendatangi wilayah yang akan menjadi tempatnya memulai penyebaran Islam. B. F. Matthes seorang sarjana Belanda yang mengumpulkan naskah mengenai legenda-legenda yang terdapat di Bugis dan Makassar menyebutkan bahwa Datuk Abdul Makmur atau Datuk ri Bandang menaiki sebuah kapal yang mirip dengan peta dunia. Sedangkan dua rekannya

yang lain, yaitu Datuk Abdul Jawad atau Datuk ri Tiro berlabuh di Bone dengan menggunakan *talibo* atau kulit kerang raksasa, dan Datuk Sulaiman menggunakan selembur daun *buwe* atau *phasoleus* (Matthes 1885: 446, 449, 453; Chambert-Loir dalam Perret dan Ramli [ed.] 1998: 52).

Kisah-kisah tersebut tidak hanya terdapat di Sulawesi Selatan. Kisah pengislaman di Kutai yang dilakukan oleh Tuan di Parangan tercatat memiliki kemampuan menaiki ikan parangan. Sedangkan dalam catatan Cabaton menyebutkan bahwa Sunan Giri pergi ke Ampel dengan hanya menumpang sebuah tempurung kelapa yang mengapung di permukaan air. Sedangkan Cosquin mengisahkan legenda tentang Sunan Giri yang ketika bayi dihanyutkan di sungai sebagaimana kisah tentang Nabi Musa yang juga dihanyutkan semasa masih bayi (Chambert-Loir dalam Perret dan Ramli [ed.] 1998: 53).

Kedatangan ketiga datuk tersebut ke Luwu membuat takjub Maqdika Bua Tandipau sehingga menerima mereka dengan tangan terbuka. Tandipau merupakan bangsawan Luwu pertama yang melakukan perbincangan dengan ketiga datuk tersebut mengenai berbagai hal seperti kebatinan, pemerintahan, dan keagamaan. Walaupun Maqdika Bua menerima kebenaran ajaran yang disampaikan oleh ketiga datuk tersebut namun Tandipau belum berani menyatakan diri menerima agama Islam tanpa sepengetahuan Datu Luwu. Seperti halnya yang berlaku di negeri-negeri Melayu bahwa melakukan perbuatan tersebut merupakan bentuk durhaka kepada rajanya yang dapat berdampak besar bagi dirinya. Tandipau kemudian mengatur pertemuan antara ketiga mubalig tersebut dengan Datu Luwu di pusat kerajaan di Malangke pada masa itu.

Datu Luwu XV La Patiware Daeng Parabung menerima ketiga mubalig tersebut yang diantar oleh Tandipau ke istana Luwu. Setelah melalui dialog panjang siang dan malam akhirnya Datu Luwu terbuka hatinya dan bersedia menerima agama Islam. Datu Luwu kemudian memilih nama Sultan Muhammad Waliy Muzahir al-Din untuk menunjukkan dirinya sebagai penguasa Islam. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat bertepatan dengan 15 Ramadhan 1013 Hijriah atau berdasarkan penanggalan Masehi jatuh pada 4 Februari 1605. Baginda Datu Luwu menyatakan bahwa agama Islam menjadi pegangan hidup

dan menyempurnakan hukum yang terdapat di Kedatuan Luwu. Walau demikian Datu Luwu memilih jalan damai dalam melaksanakan penyebaran Islam dan tidak memaksakan dengan cara kekerasan (Mappangara [ed.] 2004: 119–21). Bersama baginda La Patiware Daeng Parabung, permaisuri Karaeng ri Balla Bugisika, dan ketiga anak mereka, yaitu La Pattiaraja (12 tahun), La Patipasaung (10 tahun), dan Karaeng Bainea (6 tahun), memeluk agama Islam, diikuti oleh para bangsawan istana lainnya. Termasuk Maqdika Bua Tandipau bersama pengikutnya kemudian mengikuti langkah rajanya memeluk agama Islam. Pelaksanaan syariat pada masa awal tersebut terutama pada pengakuan atas Allah dan rasul-Nya Muhammad (syahadat) dan larangan untuk tidak lagi mengkomsumsi babi (Mappangara [ed.] 2004: 120).

Walaupun demikian, seorang kerabat raja Luwu yang bernama Patiparessa Aru Pao, yang juga merupakan saudara Datu Luwu, meminta waktu atas larangan memakan daging babi. Bangsawan itu meminta penangguhan aturan tersebut agar dirinya dapat menghabiskan persediaan dendeng daging babi yang dimilikinya. Namun, ternyata dendeng tersebut tidak pernah habis karena kemungkinan terus ditambahkan oleh para pengikutnya. Keadaan itu menimbulkan perbincangan dan kegaduhan di antara para bangsawan istana Luwu. Hal itu menyebabkan Patiparessa Aru Pao menghilang dan selang beberapa hari ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi, entah dibunuh atau melakukan bunuh diri (Mattata 1967: 72).

Terlepas dari penolakan tegas ajaran Islam mengenai daging babi sebagai makanan, masyarakat di sekitar Luwu memandang babi sebagai perwakilan dari Dunia Bawah yang berhubungan dengan hutan belantara yang dipenuhi oleh hal-hal gaib dan menakutkan. Menurut orang Toraja, salah bentuk gaib tersebut adalah keyakinan bahwa ilmu kekebalan yang paling kuat adalah dari rantai besi yang didapatkan dari lapisan kulit bawah babi. Pendapat tersebut juga diyakini oleh masyarakat lain di luar suku Toraja (Gibson 2009: 101).

Kesukarelaan Datu Luwu La Patiware Daeng Parebung memeluk agama Islam tidak lepas dari tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam sebuah versi tradisi lisan diungkapkan bahwa setelah ketiga datuk tiba di pantai dan bertemu dengan seorang nelayan yang berasal dari Mandar di pesisir pantai

Makassar, ketiga datuk menyatakan hendak bertemu dengan panglima perang Kerajaan Gowa. Nelayan tersebut mengatakan bahwa hendaklah ketiga datuk tersebut menjumpai I Malingkaang Daeng Manyonri. Setelah itu ketiga datuk bertanya kerajaan apakah yang terbesar dan kerajaan mana yang termulia di pulau ini dan dijawab oleh nelayan dengan menyebut Kerajaan Luwu. Mendengar jawaban tersebut, ketiga datuk segera berlayar menuju Luwu melalui Selat Makassar, Mamuju, melalui Toraja. Pada saat bersamaan, sebelum ketiga datuk tiba di Luwu dikisahkan bahwa baginda Datu Luwu bermimpi dengan istrinya melihat bulan dan tujuh bintang di langit yang jatuh di pangkuannya.

Keesokan harinya paduka mengumpulkan para anggota adat untuk memberikan penjelasan mengenai mimpinya. Menurut anggota adat bahwa *déwata séwwaé* yang mahabesar kekuasaannya akan melimpahkan kebaikan paling besar kepada raja dan kekuasaan Datu Luwu. Alkisah, tiga hari setelah baginda bermimpi tersebut datanglah ketiga datuk ini dari arah Pegunungan Alimpeng. Seorang laki-laki datang menghadap raja memberitahukan bahwa dirinya melihat tiga orang laki-laki di Pegunungan Alimpeng dan bernaung di bawah pohon kayu yang kelihatan aneh dan gaib. Disebutkan bahwa bentuk badannya tidak sama dengan kebanyakan orang Luwu, suaranya tidak sama, mereka juga membaca sesuatu, dan melakukan gerakan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Datu Luwu mengingat mimpinya dan kemudian mengumpulkan kembali dewan adat Luwu untuk menjemput dan membawakan usungan serta bendera Kedatuan Luwu kepada ketiga datuk tersebut. Setelah itu ketiga datuk diantar masuk istana dan disambut sebagai tamu kerajaan. Ketika ketiga datuk menyampaikan maksudnya untuk mengajak Datu Luwu memeluk agama Islam, baginda pun menyatakan kesediaannya memenuhi ajakan itu (Ilyas 2011: 416–7).

Setelah Datu Luwu memeluk agama Islam, ketiga datuk tersebut memohon dukungan raja untuk membantu usaha penyebaran Islam di seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan. Datu Luwu yang memahami keadaan kerajaan-kerajaan pada masa itu menyarankan agar terlebih dulu mengislamkan penguasa kerajaan Gowa dan Tallo karena merupakan kerajaan terbesar dan terkuat pada masa tersebut. Selanjutnya ketiga datuk itu berpisah untuk menjalankan metode dakwah mereka masing-masing, Datuk Abdul Makmur kembali ke Gowa untuk mengislamkan penguasa di sana, Datuk Abdul Jawad ke Tiro mengajarkan

tasawuf kepada penduduk di sana sedangkan Datuk Sulaiman tetap tinggal di Luwu dan mengajarkan Islam di sana dan juga ke Wajo setelah penguasa Wajo dikalahkan oleh Gowa pada 1610 (Mattulada 1976: 20–1).

Kendati penyebaran Islam di wilayah Kedatuan Luwu dijalankan secara damai, rakyat di wilayah lainnya bersikap kritis terhadap ajaran yang baru saja dipeluk oleh penguasa Kedatuan Luwu. Hal itu tampak dalam sebuah cerita rakyat di wilayah Baebunta yang merupakan salah satu vasal Kedatuan Luwu. Kisah tersebut menceritakan perjumpaan Datuk Sulaiman dengan Daeng Paboli, seorang bangsawan Baebunta, dalam usahanya mengajak rakyat di wilayah itu untuk memeluk agama Islam. Daeng Paboli yang terkenal dengan kemampuan ilmunya ingin mencoba ketinggian pengetahuan yang dimiliki oleh Datuk Sulaiman sebelum dirinya mau menerima agama Islam. Tantangan Daeng Paboli tersebut diterima oleh Datuk Sulaiman. Dalam cerita rakyat Baebunta, kisah adu kemampuan antara Datuk Sulaiman melawan Daeng Paboli itu mengandung unsur supranatural (Mahmud 2012: 44–5).

Adu kemampuan tersebut dilakukan di hadapan para bangsawan dan rakyat Baebunta. Daeng Paboli Datuk berjanji jika kemampuannya lebih rendah daripada kemampuan Datuk Sulaiman, ia akan memeluk ajaran yang dibawa oleh Sang Datuk. Selanjutnya Datuk Sulaiman mempersilakan Daeng Paboli memperlihatkan kemampuan ilmunya. Dengan kemampuan supranaturalnya, Daeng Paboli menyusun sepuluh butir telur ayam bertumpuk ke atas pada sebuah batu. Tidak sebutir telur pun terjatuh bahkan terlihat kokoh menjadi satu rangkaian dari bawah ke atas. Para penonton terkagum-kagum menyaksikan kehebatan Daeng Paboli. Selanjutnya orang hebat dari Baebunta tersebut mempersilakan Datuk Sulaiman memperlihatkan kemampuannya pula. Datuk Sulaiman kemudian memperlihatkan *karamah*-nya; mula-mula mengeluarkan telur pada tumpukan kelima dan ajaibnya susunan telur tersebut tidak jatuh. Datuk Sulaiman kemudian mengambil secara berturut-turut telur pada tumpukan keempat, ketiga, kedua, dan yang paling dasar tanpa menjatuhkan tumpukan keenam sehingga keempat butir telur yang tersisa terlihat menggantung tanpa penopang telur-telur yang lain.

Melihat hal tersebut, Daeng Paboli belum bersedia menerima kehebatan

Datuk Sulaiman dan mengajukan tantangan kedua dengan mengambil sebuah *balubu* atau tempayan yang berisi air. Tempayan tersebut dibalikkan namun air di dalamnya tidak tumpah setetes pun. Menyaksikan kepandaian bangsawan tersebut, rakyat Baebunta bersorak dan menyangka kemenangan sudah berada di pihak Daeng Paboli. Namun keriuhan itu hanya berlangsung sekejap ketika Datuk Sulaiman mengambil tongkat dan segera menghantam tempayan tersebut dengan keras sehingga pecah berserakan ke tanah tetapi air dalam tempayan tersebut tetap utuh melayang sebagaimana bentuk tempayan semula. Takjub dengan kehebatan Datuk Sulaiman yang melebihi kemampuannya, Daeng Paboli menyatakan bahwa dirinya dengan suka rela memeluk Islam sesuai janjinya dan meminta rakyat Baebunta mengikuti dirinya. Mereka kemudian meninggalkan ajaran *dewata seuwae* yang merupakan kepercayaan lama yang selama itu dijalankan di Tanah Luwu (Mahmud 2012: 44–6).



Sementara itu, penduduk pedalaman lainnya yang masih menganut kepercayaan lama tetap memuja kitab Galigo dengan tokoh utamanya Sawerigading. Datuk Sulaiman bersama para bangsawan istana yang telah memeluk Islam berusaha mengislamkan mereka. Kebanggaan atas keunggulan Sawerigading yang dipuja pada hampir sebagian besar kerajaan di Sulawesi Selatan harus segera ditembus. Pusat kepercayaan agama lama Luwu terletak di wilayah Cerekang yang pada masa itu berjarak sekitar satu minggu perjalanan dari pusat pemerintahan Luwu di Malangke.

Untuk menghadapi kepercayaan lama yang telah mengakar dalam masyarakat Luwu diciptakan sebuah kisah mitos mengenai perjumpaan Sawerigading dengan Nabi Muhammad. Dalam cerita itu, Sawerigading disebutkan lebih tua tujuh tahun daripada Nabi Muhammad yang digambarkan masih remaja. Pertemuan itu terjadi di Mekkah saat Sawerigading menuju ke sana karena tidak menemukan lagi lawan yang dapat menandingi kesaktiannya di dunia Timur. Perjumpaan Sawerigading dan Nabi Muhammad bertujuan saling menguji kemampuan ilmu kesaktian mereka masing-masing. Berbagai ragam ketangkasan yang dilakukan oleh keduanya disaksikan oleh penduduk Mekkah. Mereka bergantian memenangi adu ilmu hingga pada pertemuan terakhir yang dimenangi oleh Nabi Muhammad. Pertemuan tersebut menggunakan ribuan telur sebagai media pertandingan mereka. Pada kesempatan terakhir, Sawerigading dengan kesaktiannya mampu menyusun telur dari bawah satu demi satu sehingga tegak lurus menjulang ke langit. Kehebatan tersebut disambut keriuhan penduduk Mekkah yang masih jahiliyah dan pada umumnya tidak bersimpati kepada Muhammad. Namun, calon nabi terbesar tersebut bersikap tenang. Muhammad kemudian mencabut telur pada tumpukan kedua, keempat, keenam, dan seterusnya, sehingga semua telur yang berada pada tumpukan genap terpisah sedangkan telur-telur yang berada pada tumpukan ganjil tampak melayang namun tetap tegak lurus dan tidak rubuh. Kehebatan Nabi Muhammad itu kemudian diakui oleh Sawerigading. Selanjutnya ia menjamin, jika kelak Nabi Muhammad membawa ajarannya hingga ke Tanah Luwu maka ajaran itu akan diterima oleh segenap rakyat Luwu (Mappangara [ed.] 2004: 120).

Selain Baebunta, masyarakat di wilayah Rongkong termasuk yang dianggap

sulit menerima agama Islam walaupun mereka merupakan masyarakat yang sangat patuh kepada Datu Luwu kecuali mengenai persoalan kepercayaan. Pada masa itu pejabat *patunru* atau perdana menteri kerajaan bernama Mustafa, yang merupakan seorang cerdik pandai, memasukkan ajaran Islam ke dalam pelbagai ungkapan ke dalam adat Luwu sebagaimana ia lakukan kepada orang Ussuq dan Cerekang sebelumnya. Ajaran tersebut memaknai bahwa Muhammad dan Sawerigading adalah sosok yang satu melalui ungkapan *iya muto . . . iya muto* atau 'dia juga . . . itu juga' (Mappangara [ed.] 2004: 120).

Namun, yang paling sulit diislamkan dalam wilayah pengaruh Kedatuan Luwu adalah orang-orang Toraja yang terutama bermukim di wilayah pegunungan. Mereka sangat memegang teguh kepercayaan lama mereka yaitu ajaran *Aluk Todolo* yang mempercayai kehidupan setelah mati dan untuk sampai kepada proses tersebut diperlukan pengorbanan hewan dan upacara kematian yang menghadirkan banyak orang. Mereka percaya bahwa orang yang telah meninggal hanya sedang dalam perjalanan sejenak sebelum memasuki alam baru yang mereka sebut alam *puya* yang memiliki kehidupan seperti yang mereka tinggalkan (Bigalke 1982).

Selain hal tersebut, orang Toraja menganggap bahwa larangan memakan babi bagi orang yang telah memeluk agama Islam dipandang sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap nenek moyang babi. Hal itu berkaitan dengan cerita mitos yang terdapat dalam masyarakat Toraja mengenai "Bonggakaradeng Pandai Besi yang Menghamili Babi" (Gibson 2009: 101–2). Kisah tersebut menceritakan tentang seorang lelaki bernama Bonggakaradeng yang berasal dari Desa Batu Tandung yang berdekatan dengan Sungai Masuppu. Dikisahkan bahwa ia adalah orang berikutnya yang menemukan istrinya dari dalam bambu. Istrinya bernama Datu Baringan yang bersaudara dengan seekor ular piton. Suatu hari, ketika Bonggakaradeng sedang berburu di hutan sempat beristirahat di bawah pohon *uru* di sebuah tempat bernama Pokka Uru di Buttu Karua, sebuah gunung di Simbuang. Ketika ia mengencingi sebuah pohon tumbang tanpa disadari dirinya telah menghamili roh babi yang bersemayam di dalam pohon tersebut. Babi itu kemudian melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki yang diberi nama Buttu Karua dan Buttu Layuk. Ketika berumur sekitar enam tahun, ibunya menyuruh mereka mencari ayahnya, Bonggakaradeng, menempa besi. Di sana, keduanya

menawarkan diri membantu namun ditolak oleh Bonggakaradeng karena menganggap mereka tidak berguna baginya. Namun, ketika Bonggakaradeng sedang beristirahat dan pulang ke rumahnya untuk makan siang keduanya mengerjakan pekerjaan di tempat kerja ayahnya. Mereka mampu menyelesaikan semua pekerjaan bahkan melampaui standar Bonggakaradeng sendiri.

Terdapat versi lain; kedua anak tersebut mengerjakan sebuah *labo' penai bulawan* atau sebuah pedang emas yang diberi nama Tonapa. Pedang itu kemudian menjadi pusaka keramat; sarungnya terdapat di Sawitto, sebuah kerajaan Bugis, sedangkan pedangnya tersimpan di Simbuang. Kedua anak itu berhasil menakutkan Bonggakaradeng bahwa mereka adalah putranya dan tinggal beberapa waktu bersama ayahnya tersebut. Tetapi karena kebiasaan Bonggakaradeng yang masih menyantap daging babi, kedua putranya meninggalkan Bonggakaradeng berperahu ke hilir Sungai Masuppu bersama ibu mereka. Di tempat tersebut, ibu mereka berubah menjadi batu. Mereka kemudian mengeluarkan kekuatan gaib yang menyebabkan langit gelap-gulita kecuali di sekitar kediaman mereka sehingga orang-orang meminta penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Kedua saudara itu mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan keadaan ini bila orang-orang itu sepakat untuk memperlihatkan rasa hormat dan berhenti mengkomsumsi daging babi atau daging apapun yang tidak mati karena disembelih. Penduduk bersepakat dan ketika Islam datang di wilayah tersebut mereka memeluk agama Islam, sementara kedua bersaudara tersebut mengawini anak perempuan dari keluarga bangsawan tinggi setempat dan menurunkan beberapa anak yang kelak menjadi leluhur penting (Gibson 2009: 101–2).

Terdapat versi lain yang mirip dengan kisah tersebut di Ara, sebuah wilayah di pesisir timur Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai tempat para ahli pembuat perahu (Gibson 2009). Kisah tersebut menceritakan tentang Sawerigading yang merupakan tokoh utama dalam kebudayaan Luwu menghamili seekor babi dan menurunkan seorang putra yang sama terkenalnya dengan bapaknya yaitu La Galigo. Kisah tersebut diperoleh dari tradisi Konjo, yaitu masyarakat penutur bahasa lokal Konjo di kawasan Ara (Gibson 2009). Suatu ketika Sawerigading ke Pamata di Pulau Selayar untuk membuat perahu. Untuk memperlihatkan kekuasaannya ia selalu mengencingi tempat yang didatanginya sebagai tanda

dan karena kesaktiannya binatang yang meminum air kencingnya dapat menjadi hamil.

Suatu ketika sambil membawa sebuah bilah papan dari hutan, Sawerigading kencing di atas sehelai daun pohon sukun yang tumbuh di sebuah jalan setapak. Seekor babi yang lewat meminum air bekas kencing tersebut dan kemudian hamil. Beberapa waktu kemudian babi itu melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah anak itu bertumbuh besar, ibunya membawa anak tersebut kembali ke tempat meminum air kencing itu. Anak itu kemudian berjalan berkeliling perahu selama dua-tiga hari sambil bernyanyi bahwa dirinya ingin menjadi nakhoda perahu tersebut. Sang pembuat perahu menangkapnya dan menanyakan mengapa ia bernyanyi di sana selama beberapa hari. Melihat anaknya ditangkap, babi betina tersebut marah dan berkata hendak menggigit yang menangkap anaknya. Si pembuat perahu kemudian hendak melemparinya dengan kapak namun anak itu mengatakan bahwa babi itu ibunya. Pembuat perahu itu ragu sehingga anak itu memperlihatkan tempat babi itu meminum air kencing dan pembuat perahu tersebut menyadari bahwa anak tersebut adalah putranya dan berjanji merawatnya bersama ibunya. Anak tersebut kemudian memaksa bapaknya menukarkan papan haluan dan buritan perahu tersebut sebelum berlayar. Anak itu kemudian dinamakan La Galigo Daeng Mangeppe yang kemudian mengumpulkan awak kapalnya dan pergi berlayar (Gibson 2009: 99).

Dalam menganalisis kedua cerita mitos itu, Gibson (2009) berpendapat bahwa babi sebagai pertanda Dunia Bawah yang mewakili daerah pegunungan dan hutan merupakan pengejawantahan dari masyarakat Toraja yang terkurung daratan dengan penguasaan penempaan logam. Sementara pada masyarakat Ara merupakan perwakilan dari dunia pelayaran dan pembuatan perahu. Secara historis, kedua mitos itu saling berhubungan erat dengan Tanah Luwu yang memiliki produk baik emas maupun besi logam yang dihasilkan wilayahnya yang menarik perhatian para pedagang yang berlayar melewati Ara menuju Teluk Bone sejak dahulu kala. Penempaan logam memiliki kaitan erat dengan pembuatan perahu dan pelayaran yang terdapat dalam kisah La Galigo yang berkaitan dengan penebangan pohon *walenrang* dengan menggunakan kapak untuk mendapatkan kayu pohon itu sebagai bahan pembuatan kapal bagi pelayaran Sawerigading (Gibson 2009: 102). Berdasarkan hal itu, larangan memakan

babi lebih pada pandangan yang bersifat spiritual dan kultural dibanding aspek higienis sebagaimana dalam pandangan umum.

Persentuhan Islam dengan keyakinan dan budaya lokal di Nusantara merupakan suatu yang khas dan unik karena mengalami adaptasi penyerapan dan bercampur dengan keyakinan setempat yang sangat beragam (Azra dalam Abdullah dan Lopian [ed.] 2012: 129). Salah seorang dari Wali Sanga yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa yaitu Sunan Kalijaga, misalnya, merupakan tokoh yang sangat pandai menggunakan dan memanfaatkan budaya dan praktik keagamaan setempat untuk menyiarkan agama Islam dengan menggunakan wayang dan gamelan. Sunan Kalijaga meminjam cerita atau lakon yang terdapat dalam tradisi Hindu yang dikenal dalam masyarakat Jawa yaitu Mahabharata dan Ramayana dan dengan kreativitasnya memasukkan unsur-unsur wacana dan ajaran Islam ke dalam lakon tersebut (Azra dalam Abdullah dan Lopian [ed.] 2012: 128). Dalam hal penyebaran Islam di Kedatuan Luwu, kisah Galigo digunakan untuk memudahkan syiar Islam di wilayah pedalaman.

Keberhasilan Datuk Sulaiman menyiarkan agama Islam di Kedatuan Luwu dan wilayah kekuasaannya tidak terlepas dari kemampuannya yang luar biasa dalam menghubungkan ajaran tauhid yang berkaitan dengan ke-Maha Esaan Tuhan dengan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat terutama dalam pemujaan terhadap Sawerigading. Keberhasilan itu menjadi awal dari keberhasilan dalam pengislaman di seluruh kerajaan yang terdapat di Sulawesi Selatan sepanjang satu dekade setelah Luwu dan Gowa menjadi kerajaan Islam pada 1605. Strategi ketiga datuk penyiar agama Islam dari Minangkabau untuk memilih Kedatuan Luwu sebagai tahap awal dalam penyiaran agama Islam tidak lepas dari pengetahuan tentang sejarah masyarakat di Sulawesi Selatan. Mereka memahami bahwa hambatan terberat dalam pengislaman datang dari para bangsawan yang menjadi ahli waris *tomanurung* atau leluhur para raja dan bangsawan (Pelras 2006: 159).

Kronik Kerajaan Wajo menyebutkan bahwa 'walaupun kekuasaan ada di Gowa, namun kemuliaan sebenarnya berada di Luwu' sehingga 'Datu Luwu merupakan pangkal asal semua bangsawan (*arung*)'. Untuk dapat menyebarkan agama Islam maka penguasa Luwu haruslah diislamkan terlebih dulu, bukan

hanya karena prestise politik tetapi karena Luwu merupakan pusat mitos di Sulawesi Selatan (Pelras 2006: 160). Pengislaman penguasa Luwu, La Patiware Daeng Parabung, dan segenap rakyat di kerajaannya oleh Datuk Sulaiman tidak lepas dari kemampuannya menghubungkan pemahaman ketauhidan dengan kepercayaan Bugis tentang Sawerigading. Menurut Pelras, terdapat tarekat di Luwu yang menghubungkan antara ajaran tasawuf Islam dengan kepercayaan orang Bugis. Terdapat lontara yang mengisahkan Adam dan Hawa dengan pasangan yang menurunkan para dewa yang terdapat dalam kitab Galigo yang menggambarkan bahwa Sawerigading adalah seorang nabi yang sebelumnya meninggalkan bumi dan telah meramalkan akan turunnya Al-Quran. Bahkan terdapat pandangan bahwa Sawerigading pernah tenggelan di timur atau di Teluk Ussuq dan muncul kembali di barat atau di Mekkah. Sinkretisme itu timbul sebab tidak banyak pilihan akibat persaingan penyiaran agama dengan Portugis yang juga berniat mengembangkan ajaran Kristen pada awal abad ke-17 di Sulawesi Selatan. Metode ini dipilih agar para raja dapat menerima Islam sementara berharap dalam jangka panjang kepercayaan dan ajaran yang tidak sesuai dapat dihapus oleh para mubalig setelah mereka (Pelras 2006: 161).

4.2 Konsep Ajaran Datuk Sulaiman

Keberhasilan Datuk Patimang mengislamkan Datu Patiware Daeng Parabung berkat kemampuannya meyakinkan penguasa kerajaan tertua di Sulawesi Selatan tersebut terutama dalam bidang ketauhidan. Kronik Wajo yang memuat perbincangan antara Datuk Sulaiman dengan Arung Matowa Wajo mengenai ketauhidan tampak dapat mewakili perbincangan antara mubalig dari Minangkabau tersebut dengan Datu Luwu. Perbincangan tersebut membahas persoalan yang sama yaitu mengenai hubungan ajaran Islam dengan konsep *Dewata Seuwwae* yang menjadi bagian dari kepercayaan lama masyarakat Bugis pada masa sebelum Islam. Sejumlah perjanjian yang berlangsung dalam internal kerajaan maupun dengan kerajaan lainnya disepakati berdasarkan ungkapan *nasaqbi déwata séwwaé* atau 'disaksikan oleh *déwata séwwaé*'. Hal itu bermakna bahwa masyarakat pada masa itu memercayai kekuatan di luar diri mereka yang menjadi kontrol terhadap perbuatan yang salah dan dapat memberikan hukuman

jika murka.¹

Konsep *Déwata Séwwaé* atau 'Dewata yang Maha Tunggal' memiliki kesamaan dengan konsep ke-Esa-an Allah. Konsep *Dewata Seuwwae* dapat diartikan sebagai berikut (Hamid 1988: 4):

- a. *Déq wātang séwwaé* artinya tidak berzat, tidak memiliki bentuk tertentu, dan tunggal maknanya bahwa Tuhan itu tidak berwujud, tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat oleh indra kita, Dia Esa dan Tunggal;
- b. *Déq wātang séwwaé* berarti berarti tidak ada kekuatan ataupun kekuasaan yang menandinginya hanya Dia yang tunggal;
- c. *Déq wātang séwwaé* artinya tidak ada satupun kekuatan, makhluk yang diciptakannya yang dapat menyamai kekuatan Dia yang Maha Tunggal.

Datuk Sulaiman menyakinkan kepada penguasa Luwu, Wajo, dan wilayah lainnya yang menjadi tempat penyarannya bahwa Dewata Yang Maha Tunggal adalah Allah Ta'ala, Tuhan sesungguhnya. Dia tidak beranak dan diperanakkan dan tiada satu pun yang menyamai-Nya karena hanya Dia-lah yang disembah. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang tak berawal dan berakhir. Syariat dengan cara mengucapkan syahadatain menjadi penekanan dan ukuran seseorang memeluk agama Islam pada masa itu. Selain itu, Datuk Sulaiman mewajibkan melaksanakan salat wajib lima waktu dan salat Jumat dilakukan bersama-sama serta melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Selain itu, Datuk Sulaiman memberikan pelajaran mengenai perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad, antara lain (Ilyas 2011: 439–44),

1. *Ajaq muwammanuq-mānuq* yaitu janganlah engkau mempercayai bunyi-bunyian atau suara yang bermakna baik atau buruk bila mengerjakan sesuatu. Hal itu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Bugis dan Makassar yang percaya pada suara binatang yang memiliki makna baik atau buruk. Semisal suara burung hantu di atas rumah menandakan akan ada keluarga terdekat yang akan meninggal dunia atau mendengar ataukah bertemu dengan burung gagak berarti akan bernasib sial atau segera mengurungkan niat melakukan

1 Namun konsep ajaran *déwata séwwaé* tidak dikenal dalam naskah Galigo karena dalam naskah tersebut semua dewa yang termuat bukanlah dewa yang tunggal karena semua dewa berketurunan, beranak dan bercucu; lihat Ilyas (2011: 438).

sesuatu.

2. *Ajaq muwapi narāka īyanaritu riyaseng barahala, gauq maqkuwaé ri sompa* yang bermakna janganlah memberikan sesajian, itulah yang dinamakan berhala, perbuatan demikian adalah menyembah berhala. Hal ini sehubungan dengan ritual masyarakat yang mempersembahkan sesajen kepada dewa-dewa untuk tujuan *songka bala* atau *tulak bala* agar makhluk halus dan roh halus tidak mengganggu atau sebagai tanda syukur.
3. *Ajaq muwappakereq*, melakukan tindakan pengeramatan sesuatu seperti pohon besar, kuburan, benda pusaka atau semacamnya yang bertujuan pemujaan atau menjadi tempat pemujaan.
4. *Ajaq muwappolobéyaq muwaseng papōlé dēcéng*, yaitu memercayai ramalan dengan cara melihat telapak tangan karena dianggap dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid dan memupuskan rasa tawwakal kepada Allah. Dalam kepercayaan Bugis terdapat kitab *kutika* yang menyandarkan baik dan buruk ditentukan oleh hari naas.
5. *Ajaq muwanré cammuguq* yaitu jangan memakan hewan yang tidak memiliki leher atau dalam hal ini babi yang diharamkan oleh Nabi Muhammad dan dilaknat oleh Allah.
6. *Ajaq muwapangaddi naqpésangkangi Allāh Taalā* yaitu janganlah berbuat zina karena hal tersebut dilaknat oleh Allah. Hal itu berkaitan dengan seringnya dilakukan perjamuan bagi para bangsawan yang tidak hanya menawarkan makan dan minum tetapi juga menawarkan perempuan sebagai bagian adat kebiasaan pada masa itu. Pada masa lampau para bangsawan seringkali bertindak sewenang wenang dengan mengambil anak atau isteri orang untuk memusakan syahwatnya sehingga menimbulkan persoalan dalam masyarakat.
7. *Ajaq muwennung paqkunesseq (tuwaqserī)* yang bermakna janganlah minum minuman penguat atau yang telah difermentasi biasanya dengan menggunakan kulit kayu Boli.
8. *Ajaq mupogauq rība (maqpa jénné)*, yaitu membungakan harta atau memakan riba.

9. *Ajaq mubōtō* yaitu larangan melakukan kegiatan berjudi.

Penyiaran agama Islam di Luwu belum sepenuhnya berjalan baik ketika Datuk Sulaiman diminta oleh Raja Gowa dan Datu Luwu untuk menyebarkan Islam di Kerajaan Wajo setelah dikalahkan pada 1610. Kronik Wajo mengisahkan keberhasilan Datuk Patimang mengembangkan ajaran Islam di Wajo. Dikisahkan bahwa mesjid penuh sesak dengan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah. Selain itu berbagai ajaran Islam seperti tata cara nikah, hukum waris, kematian, dan bermacam hal yang berkaitan dengan pengembangan Islam berjalan dengan baik. Keadaan ini membuat Raja Gowa meminta kepada Datuk Sulaiman untuk kembali ke Luwu untuk membimbing Datu Luwu dan rakyatnya kembali. Namun tak lama setelah kembali ke Luwu, Datuk Sulaiman meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Patimang sehingga dirinya digelari Datuk ri Patimang. Makam Datu Patimang terletak berdekatan dalam satu kompleks dengan makam Datu Luwu XV, La Patiware Daeng Parabung. Kematian mubalig ini membawa duka mendalam bagi para raja dan rakyat Sulawesi Selatan pada masa itu (Ilyas 2011: 456).



Gambar 4.2
Makam Datuk Sulaiman di Patimang-Malangke

4.3 Keadaan Negeri Luwu Setelah Kematian Datuk Sulaiman

Beberapa waktu setelah wafatnya Datuk Patimang sekitar 1611 dan disusul oleh Datu Luwu XV, Sultan Muhammad, terjadi kegaduhan politik di Kedatuan Luwu. Keadaan itu disebabkan oleh penunjukan putra kedua, yaitu Patipasaung Sultan Abdullah, sebagai Datu Luwu XVI menggantikan ayahandanya. Penunjukan itu menimbulkan ketidakpuasan dari putra pertama yang bernama Pattiaraja yang menganggap dirinya yang paling berhak atas tahta Luwu karena dialah anak sulung. Namun, alasan dirinya tidak ditunjuk sebagai pengganti ayahandanya adalah karena rakyat tidak menyukai perbuatannya yang dikisahkan sering sewenang-wenang terhadap rakyat. Sifat sebaliknya terdapat pada diri adiknya, La Patipasaung, yang dicintai oleh rakyat dan memiliki kepribadian yang sangat penting dimiliki oleh seorang datu atau raja (Mattata 1967: 77–8).

Ketidakpuasan La Pattiaraja, yang bergelar Somba Opu, membuat ia meninggalkan istana Luwu dan mendirikan ibu kota di Cilallang di tepi Sungai Paremang yang airnya berwarna merah. La Pattiaraja menyatakan dirinya sebagai Datu Luwu di sebuah bukit batu yang bernama Kamanre. Dirinya menganggap keputusan ayahandanya mengangkat adiknya sebagai Datu Luwu telah melanggar adat. Keadaan itu membuat rakyat Luwu yang berada di sekitar daerah Ponrang, Bajo, Suli, Larompong dan Pitumpanua merasa resah akibat klaim La Pattiaraja atas wilayahnya dan dipaksa untuk tunduk kepada 'raja' tersebut. Berbagai kekacauan timbul seperti pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh pengikut kedua bersaudara tersebut. Keadaan itu menimbulkan kekurangan pangan karena penduduk merasa tidak aman menjalankan pekerjaan mereka di ladang dan sawah.

Melihat keadaan tersebut, tiga kepala wilayah adat yaitu Madika Bua, Makole Baebunta, dan Madika Ponrang, bergerak memperbaiki keadaan dengan berniat untuk mempertemukan kedua bersaudara secara langsung. Mereka menemui kepala-kepala adat dan bermufakat untuk menjalankan satu jalan penyelesaian yaitu mempertemukan kedua bersaudara tersebut secara empat mata di sebuah baruga yang dibangun di tempat yang bernama Ratona di wilayah Baebunta. Baruga tersebut dibangun dengan dua buah 'sapana' atau tangga yang sama

baik di ujung sebelah timur maupun di barat. Di bagian tengah baruga tersebut dipasangkan tirai sutra berwarna kuning tempat kedua bersaudara akan dipertemukan. Waktu yang dipilih adalah bertepatan dengan acara pesta panen padi. Adapun yang akan menjemput baginda La Patipasaung adalah Makole Baebunta sedangkan Madika Ponrang akan menjemput La Pattiaraja.

Pada waktu yang ditentukan berangkatlah kedua Madika menjemput kedua bersaudara tersebut, dan ketika Madika Ponrang menaiki tangga baruga sebelah timur sambil membimbing tangan Pattiaraja maka bertemulah dengan Makole Baebunta di sebelah barat yang membimbing baginda Pattipasaung. Di tengah baruga tersebut berdirilah Madika Bua yang memegang dua bilah keris yang sangat tajam dengan bentuk dan ukuran yang sama. Madika Bua menyodorkan kepada kedua bersaudara tersebut sebilah keris ke tangan mereka masing-masing dan berkata, "Tuanku, bertarunglah sekarang juga dan barang siapa yang masih hidup itulah yang akan kami junjung karena rakyat Luwu tidak dapat mempertuankan dua Datu. Rakyat tidak dapat menanggung lagi derita akibat permusuhan anda selama ini." Ribuan orang yang hadir dan tidak menyangka peristiwa tersebut menjadi sangat terkejut. Kedua bersaudara yang juga tidak menyangka dipertemukan di tempat itu kemudian menyadari kesalahan mereka masing-masing. La Pattiaraja memeluk saudaranya dan berkata kepada sekalian yang hadir bahwa dirinya telah mengikhlaskan adiknya menjadi Datu Luwu dan mengakui kecakapan yang dimilikinya. Ia kemudian memutuskan meninggalkan Luwu dan pergi ke Gowa, tempat asal ibunya (Mattata 1967: 80).

4.4 Masa Pemerintahan Datu Luwu XVI Sultan Abdullah

Perebutan tahta kedatuan Luwu antara dua bersaudara putra Datu Luwu La Patiware yaitu La Pattiaraja dan adiknya La Patipassaung telah berakhir dengan kembalinya sang adik atas tahta Luwu sesuai dengan amanat ayahanda mereka. La Pattiaraja sendiri akhirnya meninggalkan Tanah Luwu, pergi ke negeri ibunya di Makassar. La Patipassaung dikukuhkan sebagai Datu Luwu XVI dengan gelar Sultan Abdullah. Salah satu usaha penguasa baru itu adalah menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh rakyat di wilayah Kedatuan Luwu. Dikisahkan pada masa pemerintahannya dapat dikatakan bahwa hampir sembilan puluh persen rakyat

Luwu memeluk agama Islam (Mattata 1967: 81).

Untuk menjalankan roda pemerintahannya lebih baik, Datu Luwu memutuskan memindahkan istana dari Malangke ke Palopo. Di sana pula Datu Luwu memerintahkan membangun masjid pertama di kerajaan tersebut. Konon kabarnya mesjid tersebut dibangun hanya dalam waktu satu hari. Hal itu menjadi bukti betapa semangat Islam pada masa itu begitu kuat sehingga hanya diperlukan waktu yang sangat singkat untuk membangun sebuah masjid yang masih bertahan hingga sekarang ini. Pada masa pemerintahan Datu Luwu XVI La Patipassaung Sultan Abdullah (1615–37) dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, adil dan merupakan seorang ahli pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu perdana menteri (*patunru*), Daeng Mangawing yang bergelar Mustafa 'yang paling bersih' (Mattata 1967: 81).

Datu Luwu XVI La Patipasaung Sultan Abdullah juga membentuk kembali lembaga *sara'* atau syariat yang dipimpin oleh seorang kadi untuk mengurus persoalan keagamaan dan berbagai kepentingan umat. Para pejabat *sara'* disebut dengan istilah *parewa sara'* yang terdiri atas seorang kadi atau di Bugis disebut *kali*, beberapa imam atau *imang*, sejumlah bilal, kemudian amil berdasarkan jumlah masjid yang terdapat di wilayah kerajaan. Mereka memegang peranan penting dan resmi menangani segala urusan keagamaan, seperti salat led, Maulid, Isra' Mi'raj di istana. Selain itu para pemuka agama itu berperan penting dalam urusan pernikahan kaum bangsawan dan raja termasuk dalam upacara kematian raja atau pembesar kerajaan (Mattulada 1976: 37).

Lembaga *sara'* atau syariat kemudian menjadi bagian dari pranata kehidupan sosial-budaya masyarakat Luwu secara khusus dan bagi masyarakat Bugis dan Makassar pada umumnya di Sulawesi Selatan. Pranata sosial-budaya ini dinamakan *pangngadéréng* yang menjadi warna baru dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah diajarkan oleh Datuk Sulaiman mengenai pembagian pekerjaan yang menjadi urusan para pejabat *sara'* sesuai dengan kedudukan sosialnya dalam *pangngadéréng*, maka seorang *kali* atau kadi menangani tugas di antaranya menikahkan dan mengatur penyelenggaraan rangkaian upacara kematian bagi raja, bangsawan dan kalangan istana. Seorang khatib berkewajiban mengurus pernikahan dan kematian raja bawahan dan

bagian isi istananya. Sementara itu, seorang bilal berkewajiban menikahkan dan mengurus kematian pejabat yang berasal dari wilayah persekutuan adat di tempatnya bertugas. Sedangkan para guru yang berada di setiap kampung berkewajiban mengurus penyelenggaraan pernikahan dan kematian bagi masyarakat umum (Mattulada 1976: 48).

Adapun pendapatan yang diberikan kepada pejabat *sara'* telah diatur sebagaimana diajarkan oleh Datuk Sulaiman sebelumnya seperti yang termuat dalam lontara Wajo yaitu sebagai berikut (Mattulada 1976: 47).

1. Dari zakat fitrah dan zakat harta yang ditetapkan bahwa kadi mendapatkan dua bagian dari masing-masing *kali* atau khatib dari tiga *limpo* atau daerah bawahan Kerajaan Wajo. Khatib mendapat dua bagian dari masing-masing bilal dalam *limpo*-nya. Sementara itu, bilal mendapatkan dua bagian dari masing-masing penghulu dalam *limpo*-nya. Sedangkan penghulu *limpo* dan amil memiliki bagian yang sama.
2. Dari sedekah pada Idul Fitri, Idul Adha, kenduri kerajaan, dan penyelenggaraan urusan menangani mayat hingga penguburannya, dilakukan seperti pembagian yang telah disebutkan di atas.
3. Dari penyelenggaraan pernikahan atau *lise' nikka* yang diatur bahwa mereka mendapatkan 10 persen dari *sunréng* atau mas kawin yang diserahkan kepada *kali* sebagai wali hakim.

Dalam lontara Wajo, Datuk Sulaiman mencontohkan bahwa para pejabat lembaga *sara'* memperoleh hak-hak istimewa antara lain dibebaskan dari sekalian pajak baik berupa pajak hasil bumi dan harta bendanya, dari kerja umum dan semacamnya, di luar tugas pelayanan dalam pesta-pesta kerajaan, serta bebas dari *solo'* atau pemberian bingkisan kepada pengantin. Apabila mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaannya maka tidak boleh diberi hukuman atau denda tetapi hanya dibebastugaskan atau dipecat dari jabatannya tersebut. Misalnya, seorang pejabat lembaga itu melakukan tindakan kriminal semacam pencurian, perzinahan, minum minuman keras, dan sebagainya, yang melanggar ajaran agama maka dirinya akan dipecat sebagai hukuman utama dari perbuatannya tersebut (Mattulada 1976: 47).

Satu hal yang penting dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Abdullah adalah pemindahan ibu kota Kedatuan Luwu dari Patimang-Malange ke Palopo yang berjarak sekitar 40 kilometer. Disebutkan bahwa pemindahan itu bertujuan agar memudahkan syiar Islam dan menata pemerintahan Luwu lebih baik. Wilayah yang dijadikan ibu kota baru Kedatuan Luwu tersebut mulanya bernama kampung Wareq. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Wareq atau Wara menunjukkan nama tempat yang memiliki makna yang sama dengan Watampare, Ale Luwu, dan 'Palopo'. Secara etimologi, kata *ware* ditafsirkan bermakna 'melintang', 'mencegah', atau 'palang'. Sementara itu, kata *palopo* memiliki pengertian, pertama, sebagai penyebutan nama jenis makanan khas Luwu yang terbuat dari bahan berupa beras ketan, gula merah, dan santan. Kedua, kata *palopoi* berarti kata yang pertama diucapkan ketika tiang utama atau sokoguru masjid tua Palopo ditegakkan. Makna ketiga berasal dari bahasa Galigo yaitu 'mengatasi'.² *Wareq* dan *palopo* merupakan dimensi simbol yang bermakna mengatasi segenap dimensi simbol. Dengan melihat secara geografis, makna mengatasi itu tampak pada letak Palopo atau Wareq yang melintang membuat garis yang mengatasi perbedaan ruang kerajaan yaitu Palopo Selatan dan Palopo Utara (Mahmud 2003: 7). Secara geografi, letak Kota Palopo membentang dari utara ke selatan pada 22° 55' Lintang Utara sampai 3° 04' Lintang Utara, kemudian membujur dari barat ke timur pada 120° 04' Bujur Timur sampai 120° 15' Bujur Timur. Pada situs ini mengalir dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Boting di bagian utara dan Sungai Amasangan di sebelah selatan (Mahmud 2003: 13).

Setelah pemindahan ibu kota Kedatuan Luwu ke Palopo, Sultan Abdullah juga mendirikan masjid untuk keperluan ibadah dan pembinaan umat. Dikisahkan bahwa Masjid Tua Palopo dibangun hanya dalam tempo sehari yang dilakukan bersama-sama segenap rakyat Kedatuan Luwu. Dalam tradisi Islam disebutkan bahwa berdirinya sebuah kota Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW selalu didahului oleh pembangunan sebuah masjid dengan tujuan sebagai pusat kegiatan berbagai aspek kehidupan umat Islam (Mahmud 2003: 69). Pada kota-kota Islam, letak masjid biasanya pada bagian barat dari alun-alun di pusat kota. Pada umumnya masjid tersebut dinamakan Masjid Agung atau Masjid Jami'.

2 Penafsiran Johan Nyompa (1983) dalam catatan kaki pada Mahmud (2003: 7).

Demikian pula dengan masjid yang dibangun atas perintah Datu Luwu tersebut sampai kini dinamakan Mesjid Jami' Tua Palopo.

Adapun komponen utama dari kota Islam di Nusantara adalah keraton atau istana di pusat kota yang pada umumnya menghadap ke utara, dibuat terpisah dari bangunan lainnya oleh tembok keliling, parit, atau sungai buatan. Selain itu, terdapat alun-alun yang umumnya terletak di sebelah utara atau sebelah selatan istana. Biasanya, apabila letak istana menghadap ke utara maka alun-alun berada di bagian utara sedangkan apabila istana terletak di selatan maka letak alun-alun akan menghadap ke selatan (Mahmud 2003: 44-5).

Pada masa pemerintahan Datu La Patipassaung terjadi perubahan besar dalam susunan kenegaraan di kedatuan tersebut. Jabatan *kali* atau kadi menjadi bagian dari anggota *Ade Seppulo Dua* atau adat dua belas sebagai perwakilan umat Islam dalam Dewan Adat tertinggi di Kedatuan Luwu. Selain Dewan Adat Dua Belas, Datu Luwu juga membentuk Dewan *Ade Asera* atau Dewan Adat Sembilan yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Bentuk ini menyebabkan kekuasaan seorang datu atau raja berada di tangan rakyat terutama yang menyangkut urusan pengangkatan dan pemecatan seorang datu (Mattata 1967: 83-4).

Dalam bentuk pemerintahan tersebut, datu didampingi oleh *pengadarang* atau kabinet ditambah dengan dua dewan. *Pengadarang* disebut juga dengan *pallatenni ade* atau 'pemangku adat' yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari yang terdiri dari seorang *patunru* atau perdana menteri yang bergelar *opu patunru*, seorang *pabbicara* atau menteri kehakiman yang bergelar *opu pabbicara*, kemudian seorang *tomarilaleng* atau menteri dalam negeri bergelar *opu tomarilaleng*. Terakhir adalah *balirante* merupakan menteri kesejahteraan yang bergelar *opu balirante* (Mattata 1967: 85-6).

Selanjutnya adalah Dewan Adat Sembilan atau *Ade Asera* yang terdiri atas pertama adalah *anak tellue* yang merupakan kepala-kepala adat wilayah Bua, Ponrang, dan Baebunta. Mereka bergelar *Madika* Bua, *Madika* Ponrang, dan *Makole* Baebunta. Ketiganya pula memiliki hak istimewa sebagai anggota *Ade Seppulo Dua* atau Dewan Adat Dua belas. Kedua adalah *Bendera Tellue* yang merupakan perwakilan dari tiga golongan warga kerajaan yang memiliki pengaruh yang kuat yang terdiri dari golongan *anakarung* yaitu golongan bangsawan

dan anak raja, kemudian golongan *atturiolong* atau golongan bersenjata dan ketiga adalah *pampawaepu* atau golongan kaum pekerja. Adapun golongan *pampawaepu* diketuai oleh seorang *andeguru* yang diangkat atau diberhentikan oleh datu sendiri atau oleh *pengadarang*. Ketiga golongan ini memiliki bendera masing-masing yaitu bendera *kamummu'e* yang berwarna ungu untuk golongan bangsawan, bendera putih bergambar macan siap menerkam, disebut *macangnge*, bagi kaum bersenjata, dan bendera putih dengan gambar gunting di tengah, disebut *goncingnge*, yang merupakan bendera kaum pekerja (Mattata 1967: 85–6).

Sementara itu golongan ketiga adalah tiga *matoa* yang mewakili Wage, Cendrana, dan Latetonro yang merupakan wakil dari pendatang Bugis di Tanah Luwu. Alkisah ketiga *matoa* tersebut merupakan pendatang yang mengikuti Sawerigading ketika tokoh ini berada di Bone dan Wajo kembalinya dari negeri Cina. Para pendatang Bugis sebagian mendiami wilayah yang berada di sekitar Kota Palopo dan sebagian lagi bermukim di bagian utara Kota Palopo seperti di Pulau Libukang, Lamasari, atau di Welangpellang. Mereka telah berdiam dan berketurunan di wilayah tersebut yang kemudian menjadi bagian dari rakyat Kedatuan Luwu. Masuknya ketiga perwakilan itu menunjukkan kebesaran hati penguasa Luwu agar tidak ada rakyat yang dianaktirikan kedudukannya (Mattata 1967: 86).

Adapun jabatan *kali* atau kadi dapat masuk menjadi bagian dari Dewan Adat berdasarkan pengangkatan yang dilakukan oleh Datu Luwu sendiri. Pengangkatan kadi mengikuti masa pemerintahan seorang datu; apabila datu yang menunjuk kadi itu wafat atau diberhentikan, misalnya, maka kadi yang bersangkutan harus meletakkan jabatannya. Jabatan itu dapat dipegang lagi jika datu yang baru masih menunjuknya sebagai kadi.

Namun, ada kalanya banyak persoalan kegamaan yang cukup mendesak diselesaikan sementara pengangkatan datu baru memerlukan proses panjang hingga berbulan-bulan. Dalam situasi demikian, jabatan sementara kadi dipegang oleh *opu patunru* yang merupakan perdana menteri kerajaan. Jabatan rangkap tersebut memberinya gelar *kadi matoa* yang berperan sebagai perdana menteri dan kadi—namun jabatan yang terakhir bersifat tidak aktif hingga terpilih kadi

baru. Jika dalam keadaan tidak ada kadi yang terpilih sama sekali barulah *opu patunru* berperan aktif pula sebagai kadi. Hal itulah yang menyebabkan seorang *opu patunru* haruslah seseorang yang tidak hanya memiliki pengetahuan dalam pemerintahan namun juga harus memiliki kepandaian dalam pengetahuan tentang ajaran Islam (Mattata 1967: 89).

Pada masa pemerintahannya, Datu La Patipassaung Sultan Abdullah didampingi oleh seorang *opu patunru* bernama Daeng Mangawing yang terkenal piawai mampu dalam pemerintahan dan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. Daeng Mangawing juga terkenal tegas dalam memperjuangkan kebesaran kerajaan dan memakmurkan rakyat Luwu. Ia juga memberikan amanat mengenai syarat pengangkatan seorang *opu patunru* seperti dinyatakan, *lapa mulai patunru tau tettongngiengngi sulapa eppae, seuwani malempuppi, maduanna magetteppi, matellunna mattetepi, maeppana temmappasilaingepi*; terjemahnya, jika datu hendak mengangkat seorang *patunru* haruslah memiliki sifat yang penting yaitu pertama adil, kedua berpendirian teguh, ketiga bersungguh-sungguh atau sabar melaksanakan kewajibannya, dan keempat tidak membedakan orang termasuk dalam pangkat dan jabatan (Mattata 1967: 82).

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum dasar yang memasukkan unsur ajaran Islam, yang diciptakan Opu Patunru Daeng Mangawing pada masa Sultan Abdullah, menggantikan hukum dasar Kedatuan Luwu yang lama. Secara garis besar dasar hukum di Luwu menyatakan bahwa *patuppu ri ade'e, pasanrei ri sara'e, muatangnga ri rapangnge, mupatarettei ri wari'e, mualai peppegau ripobiasangnge*, atau 'bersendikan kepada adat, sandarkan pada syariat (Islam), jalankan aturan ketertiban, bandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan'. Kalimat tersebut mengandung makna bahwa segala sesuatu yang hendak dikerjakan haruslah terlebih dulu didasarkan pada adat dan berpedoman pada syariat Islam. Selain itu, perlu diperhatikan keadaan yang berlangsung dalam masyarakat termasuk tata tertib dalam melaksanakan pekerjaan tersebut yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Namun, perlu diperhatikan bahwa walaupun sesuatu kebiasaan atau tindakan sesuai dengan adat tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hal itu tidak dapat dilaksanakan. Artinya, ajaran Islam menjadi dasar pelaksanaan suatu adat atau kebiasaan (Mattata

1967: 94). Maka, dapat dikatakan bahwa sendi-sendi kemasyarakatan Kedatuan Luwu telah mengalami perubahan sejak masa pemerintahan La Patipassaung. Ajaran Islam telah mendominasi pemerintahan yang tidak lagi mendasarkan pada kepercayaan lama yang pernah dianut oleh masyarakat Luwu sebelumnya.

5 PENINGGALAN ISLAM DI LUWU

5.1 Kota Palopo

*B*erdasarkan penggalian dan kajian arkeologi diketahui bahwa ketika Luwu menjadi kerajaan Islam pertama di Sulawesi Selatan sekitar 1905 merupakan sebuah kerajaan dagang yang makmur dan kuat. Hal itu terbukti dari penemuan sejumlah tinggalan bendawi yang berasal dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 berupa keramik yang jumlahnya cukup besar dibanding wilayah lain di Luwu. Diperoleh kesan, pusat istana Kedatuan Luwu di Patimang-Malangke memperlihatkan kemewahan yang serupa dengan halaman istana Kerajaan Gowa di Benteng Somba Opu pada periode yang sama (Bulbeck, Prasetyo, dan Sumantri dalam Sumantri [ed.] 2006: 33–59).

Kebesaran Kedatuan Luwu didukung oleh tiga faktor yaitu potensi pertanian berupa sagu yang dapat menopang populasi yang besar, kedua adalah letak yang strategis di mulut Sungai Baebunta yang dapat digunakan untuk mengirim produk dari dataran tinggi—berupa biji besi, emas, dan damar—yang diangkut melalui Sungai Rongkong. Faktor ketiga adalah produksi senjata dan alat pertanian di Patimang-Malangke yang didukung oleh temuan produksi peralatan besi di sekitar wilayah tersebut (Bulbeck, Prasetyo, dan Sumantri dalam Sumantri [ed.] 2006: 36).

Belum banyak terungkap tentang perpindahan ibu kota Kedatuan Luwu dari Patimang-Malangke ke Palopo setelah menjadi kerajaan Islam. Disebutkan bahwa ketika Islam diterima di istana Luwu, saat itu Luwu berada di puncak kejayaannya baik di bidang politik, sastra, dan ekonomi. Kedatuan Luwu membangun kerja sama politik yang baik dengan Kerajaan Gowa-Tallo yang merupakan kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17. Salah satunya ditandai dengan adanya hubungan perkawinan antara Datu Luwu XV, La Patiware Daeng Parabung, yang memerintah pada masa tersebut dengan putri Kerajaan Gowa yang bernama Karaeng ri Balla Bugisika. Selain itu, terdapat dugaan bahwa epik La Galigo yang dianggap sebagai karya sastra terpanjang di dunia dikembangkan di istana Luwu pada masa Patimang-Malangke. Kisah dalam epik tersebut memuat pengakuan politik tentang asal-mula kerajaan di Sulawesi Selatan yang mengacu pada Luwu di seluruh semenanjung barat daya Pulau Sulawesi. Pendapat itu didasarkan pada bukti arkeologis hasil penggalian di Patimang-Malangke berupa tinggalan jejak bendawi kalangan *bissu*, pelaksana upacara kebudayaan Galigo dan juga gambaran tentang tempat tinggal para penguasa (Bulbeck, Prasetyo, dan Sumantri dalam Sumantri [ed.] 2006: 37).



Gambar 5.1
Masjid Tua Palopo

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa perpindahan ibu kota Kedatuan Luwu ke Palopo diperkirakan akibat mulai meredupnya Malange-Patimang sekitar abad ke-17 bersamaan dengan penerimaan Islam. Namun, terdapat pula pendapat bahwa perpindahan itu merupakan konsekuensi dari visi reformasi penguasa Luwu setelah penerimaan Islam. Toponim Wareq yang menjadi asal-usul Kota Palopo walaupun baru tumbuh pada abad ke-17 telah menjadi bagian penting dalam sejarah masyarakat Luwu seperti terbaca dalam teks-teks klasik Bugis pra-Islam. Penemuan arkeologi berupa menhir berukuran 1,5 hingga 2 meter di Amassangan, yang oleh penduduk setempat dianggap sebagai nisan, menunjukkan bahwa lokasi ini merupakan tempat penting dalam tradisi pra-Islam di Luwu. Pendirian Kota Palopo tampaknya merupakan bagian dari revitalisasi kesucian dengan meletakkannya kembali pada posisi politik tertinggi dengan sentuhan budaya Islam (Mahmud, Wolman, dan Sumantri dalam Sumantri [ed.] 2006: 164–5).

Kota-kota pertama yang tumbuh pada mulanya berakar dari pertumbuhan pusat-pusat seremoni atau tempat suci yang berhubungan dengan kekuatan alam yang dikendalikan bagi keuntungan manusia. Kota merupakan permukiman permanen yang berwujud model magis dari jagat raya dan Tuhan. Keadaan itu membuat mereka yang berada di pinggiran atau wilayah pertanian memberikan sumbangan secara suka rela atau pajak. Redistribusi kekuasaan dan sumber material dilakukan oleh kelas penguasa seiring pertumbuhan kota yang pada mulanya adalah pusat keagamaan.¹

Perkembangan agama Islam di Nusantara biasanya berdampak pada pembangunan atau pemindahan kota baru. Dalam hal Bandar Banten, misalnya, tergambar bahwa perpindahan ibu kota Kerajaan Banten dari Banten Girang ke Banten Lama merupakan simbol peralihan dari kota Hindu ke kota bercirikan Islam. Pemindahan ibu kota itu menunjukkan proses perkembangan peradaban Islam di Banten. Kota Banten Lama berada pada kawasan pantai dan mengalami puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kota itu pada awalnya dirintis oleh Sultan Maulana Hasanuddin atas saran ayahnya, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sekitar 1526. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, putra Maulana Hasanuddin, kota Banten Lama yang terletak di

1 Lihat analisis Kevin Lynch (1984); dikutip dari Ambary (1998: 120).

Surosowan, sekitar 13 kilometer dari kota Banten Girang, mulai dibangun dengan membuat dinding kota dari batu dan batu karang, dan dilengkapi dengan masjid, keraton, lapangan, pasar dan pelabuhan (Ambary 1998: 120–1).

Demikian pula pemindahan ibu kota Kedatuan Luwu dari Patimang-Malangke ke Wareq atau Palopo pada masa pemerintahan La Patipassaung Sultan Abdullah yang disertai pembangunan masjid merupakan pertanda pendirian kota Islam. Pendirian kota Islam senantiasa diikuti dengan pembangunan masjid. Secara geografis, kedudukan pusat istana di Palopo berada tepat di jantung wilayah yang menjadi simbol perekat berbagai komunitas yang terdapat di Luwu. Pemaknaan dan pengabdian kata *palopoi* yang berarti 'atasi' saat pemancangan tiang utama masjid menjadi simbol persatuan tersebut. Namun, sayangnya, selain data arkeologis, sumber tertulis seperti lontara yang menjelaskan tentang pembangunan dan perkembangan kota Palopo tidak ada sama sekali sehingga menimbulkan kesulitan untuk melihat perkembangan kota tersebut (Mahmud 2003: 7–8).

5.2 Masjid Jami' Palopo

Mesjid Jami' Palopo merupakan salah satu yang tertua di Sulawesi Selatan yang dibangun pada sekitar awal abad ke-17. Masjid ini dibangun menyertai perpindahan ibu kota Kedatuan Luwu dari Patimang-Malangke ke Palopo. Letak masjid sangat strategis karena berada di tengah-tengah pusat Kota Palopo dan berlokasi di bagian barat istana Datu Luwu.

Para ahli menyebutkan bahwa konstruksi masjid tua Palopo sangat unik karena dibangun dengan dinding yang terbuat dari batu cadas berbentuk segi empat yang sangat tebal, sekitar 0,9 sentimeter. Struktur bangunan masjid menyerupai arsitektur candi-candi di Jawa yang dapat dilihat pula dari denahnya yang berbentuk bujur sangkar dengan luas lantainya sekitar 15 x 15 meter persegi. Hiasan bagian bawah dinding berupa *molding* yang tampak seperti bagian dari bunga *padmanaba* atau lotus/teratai serupa dengan hiasan di candi Borobudur, sedangkan alur-alur bagian atas dinding juga memiliki kesamaan dengan hiasan candi-candi di Jawa (Effendy 2003: 54–6).

Keunikan lain yang dimiliki masjid tua Palopo adalah konstruksinya yang

merupakan perpaduan konstruksi candi—seperti telah disebutkan—dan konstruksi atap kayu berbentuk sirap yang menyerupai rumah *joglo* di Jawa. Bentuk atap piramidanya tersusun tiga bagian dengan konstruksi *tajug* yang merupakan model konstruksi masjid di Jawa. Dua tumpang atapnya ditopang oleh empat tiang yang serupa dengan tiang *sokoguru* atau tiang utama pada konstruksi model *joglo*. Adapun atap berbentuk piramida paling atas ditopang oleh kolom tunggal berpenampang lingkaran dengan diameter kayu sekitar 90 sentimeter dari jenis kayu yang disebut *cinna gori*. Pada bagian puncak atap masjid terdapat hiasan berupa keramik Cina yang sekarang tidak lagi kelihatan karena telah tertutup plafon (Effendy 2013: 56).

Pembangunan Masjid Jami' Palopo memiliki aspek simbolik di antaranya terdapat tujuh buah jendela pada sisi kiri dan kanan yang melambangkan jumlah hari dalam seminggu. Pada jendela terdapat teralis yang berjumlah lima batang menggambarkan kewajiban salat lima waktu dalam sehari. Sementara itu pada bagian dinding depan terdapat tujuh bukaan yaitu tiga di bagian kiri dan tiga di bagian kanan serta satu di tengah berupa pintu masuk ke dalam ruang salat. Adapun pada bagian dinding barat terdapat ceruk di bagian depan yang berfungsi sebagai *mihrab*. Sementara itu, pada bagian dinding sebelah barat terdapat ventilasi udara sebanyak enam buah berderet dengan susunan tiga di atas dan dua di bawahnya (Effendy 2013: 56).

5.3 Kompleks Makam Raja-raja di Lokko'e

Situs pemakaman raja dan bangsawan Luwu di Lokko'e berada di tengah kota Palopo, didirikan sekitar masa pemerintahan Datu Luwu XVIII Settiaraja Petta Matinroe ri Tompotikka (1663–1704). Dalam kompleks makam disemayamkan sejumlah raja atau *Pajung* Luwu, yaitu Settiaraja, La Tenripeppang Sultan Abdullah, Datu Luwu XXVII (1778–1810), Daeng Mabaro'e (putra mahkota Datu XXVIII), Andi Jelling, Datu Luwu XXXV, dan makam para permaisuri dan orang kesayangan raja (*cenning*) termasuk para kerabat istana lainnya (Effendy 2013: 220–1).



Berdasarkan kajian arkeologi, pada situs tersebut telah bercampur antara makam-makam tua dan makam-makam baru; demikian pula dengan makam-makam kuno yang telah diperbarui oleh ahli waris. Di dalam kompleks makam Lokko'e terdapat satu kubah yang kemungkinan dibangun pada 1619. Kubah tersebut berbentuk piramida dengan dasar berbentuk segi empat dan memiliki pintu masuk di sisi selatan berbentuk lengkung serta dengan konstruksi dasarnya dari batu andesit sedangkan bagian badan dan atasnya dari batu bata. Bentuk dasar dan badan berupa segi empat dengan ukuran panjang sisi 1000 sentimeter dengan tinggi badan 180 sentimeter dengan ketinggian hingga ke puncak kubah sekitar 700 sentimeter. Kubah tersebut berisi sekitar 36 buah makam dengan bentuk *jirat* peti batu sebanyak 22 buah makam dan gundukan tanah sebanyak 14 buah makam. *Jirat* adalah bangunan persegi panjang yang dibuat di atas tanah kubur yang dapat berbentuk sederhana bagi makam orang biasa, dan dapat juga berbentuk megah tergantung status sosial orang yang dikuburkan di

tempat tersebut. Adapun makam yang berada di luar kubah berjumlah sekitar 25 makam yang dapat dikenali. Makam tersebut menggunakan nisan tipe Aceh sebanyak sembilan buah makam, nisan tipe Jawa yang berbentuk pipih dengan motif hiasan berbentuk makara sebanyak satu buah, dan 22 nisan pipih dengan varian berbentuk pedang sebanyak 17 buah dan pipih bertangkai sebanyak lima buah, ada yang polos dan ada yang berhiaskan kaligrafi bertulis nama Allah dan Muhammad (Effendy 2013: 221).

6 PERADABAN ISLAM DI MALUKU

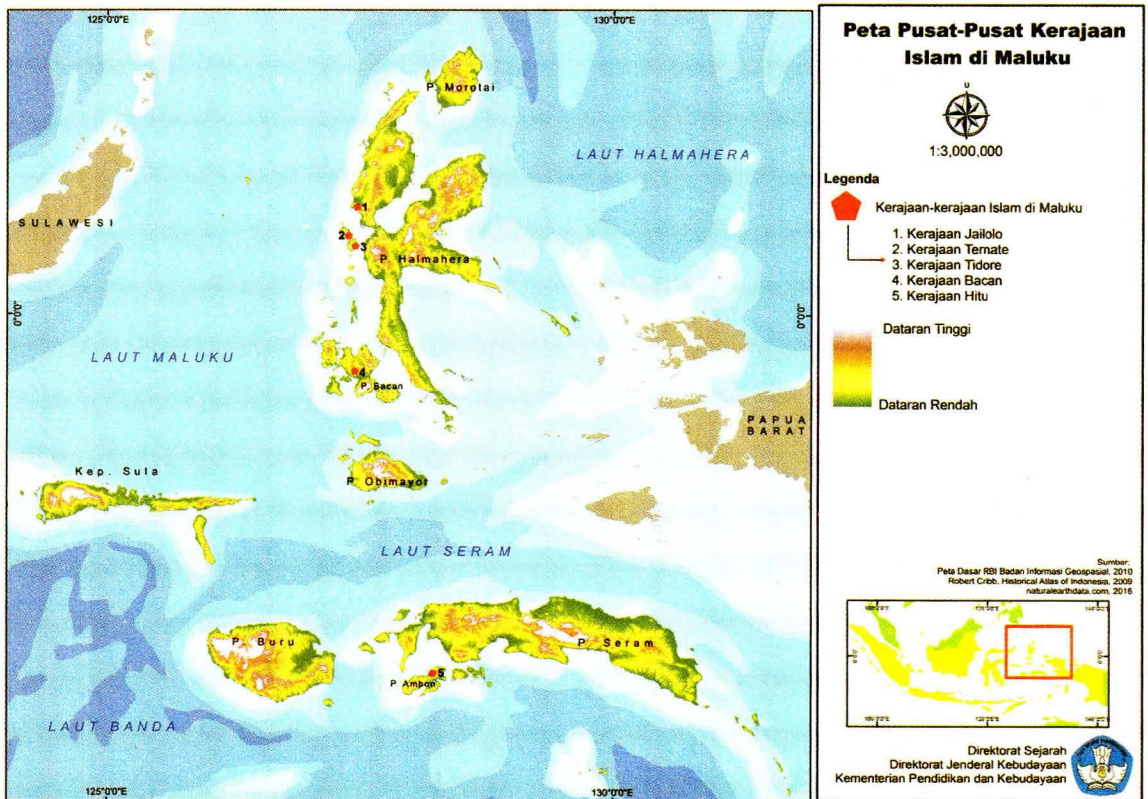
6.1 Pengertian Maluku

Pengertian 'Maluku' pada zaman lampau berbeda dengan pengertian 'Maluku' pada masa kini. Pada awalnya, istilah 'Maluku' menunjuk pada keempat pusat kerajaan yang dulu disebut *kolano* di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Keempat *kolano* tersebut merupakan semacam konfederasi yang kemungkinan besar terbentuk pada sekitar abad ke-14 yang disebut *Maloko Kie Raha* yang berarti "empat gunung di Maluku." Dalam perkembangan selanjutnya, keempat *kolano* itu memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup seluruh Maluku Utara (sekarang seputar Provinsi Maluku Utara) dan sebagian dari wilayah Sulawesi di sebelah barat, dan Papua Barat di sebelah timur. Meskipun demikian wilayah hasil perluasan itu tidak tercakup dalam istilah Maluku yang hanya menunjuk pada pusat keempat *kolano* tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, dengan sendirinya wilayah sekitar Seram (termasuk Pulau Ambon) yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Maluku (Kabupaten Maluku Tengah) dan sebagian wilayah Kepulauan Banda (Kabupaten Maluku Tenggara) dalam masa *Maloko Kie Raha* sama sekali tidak tercakup dalam

pengertian asli istilah 'Maluku'.

Hingga kini belum diketahui secara pasti kapan nama Maluku mulai diberlakukan dan berasal dari kata atau bahasa apa. Semua itu masih menjadi perdebatan di kalangan para pakar sejarah. Namun, secara umum masyarakat meyakini bahwa kata *maluku* berasal dari bahasa Arab yang bentuk lengkapnya *jaziratul muluk* yang berarti 'wilayah banyak raja'. *Muluk* adalah bentuk jamak dari *malik* yang berarti 'raja', dan ini sesuai dengan banyaknya raja di daerah itu —sekurang-kurangnya empat raja masing-masing seorang di Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Sebagian sarjana masih meragukan asal kata *maluku* karena dikaitkan dengan masuknya agama Islam di Maluku. Padahal, nama itu telah digunakan jauh sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15. Kalau nama itu dikaitkan dengan kedatangan saudagar Arab, boleh jadi memang berasal dari bahasa Arab ketika saudagar Arab atau Persia sudah melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara jauh sebelum abad ke-10 (Utomo 2009).



Gambar 6.1 Peta Pusat-pusat Kerajaan Islam di Maluku

Wilayah Maluku yang kini dikenal sebagai sebuah kepulauan yang terletak di antara Sulawesi di sebelah barat dan Papua di sebelah timur merupakan bentukan kolonialisme Belanda yang membagi menjadi tiga wilayah *gouvernement*, yaitu Gouvernement Ternate untuk Maluku Utara dengan pusat pemerintahannya di Benteng Oranje di Ternate, Gouvernement Amboina untuk Maluku Tengah dengan pusat pemerintahannya di Benteng Victoria di Ambon, dan Gouvernement Banda untuk Maluku Tenggara dengan pusat pemerintahannya di benteng Belgica, Bandaneira (Ohorella [peny.] 1999: 65). Dengan demikian sampai terbentuknya Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, wilayah yang disebut Maluku adalah pulau-pulau yang terletak di antara Sulawesi dan Papua, dan pulau-pulau di antara Morotai di utara hingga Kepulauan Tanimbar di tenggara.

6.2 Lingkungan Alam

Kini, Maluku yang sekarang dibagi menjadi dua wilayah administratif yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Sebelum pemekaran pada 1999, memiliki sebutan populer 'Provinsi Seribu Pulau' karena terdiri atas 1.127 pulau besar dan kecil. Wilayahnya dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Pulau Sulawesi di sebelah utara, Laut Arafuru di sebelah selatan, Laut Maluku dan Pulau Sulawesi di sebelah barat, dan Pulau Papua di sebelah timur. Dari keseluruhan luas 851.000 kilometer persegi, luas daratannya hanya 81.687 kilometer persegi (sekitar 10 persen dari luas keseluruhan).

Dari sekian banyak pulau yang tercatat, yang terbesar adalah Pulau Seram (18.625 kilometer persegi), Halmahera (18.000 kilometer persegi), dan Buru (9.000 kilometer persegi). Dari sisi geologi Pulau Seram adalah pulau tertua (3.000 juta tahun), dan yang termuda adalah Pulau Gebe, Banda, dan Damer (sekitar 1 juta tahun).



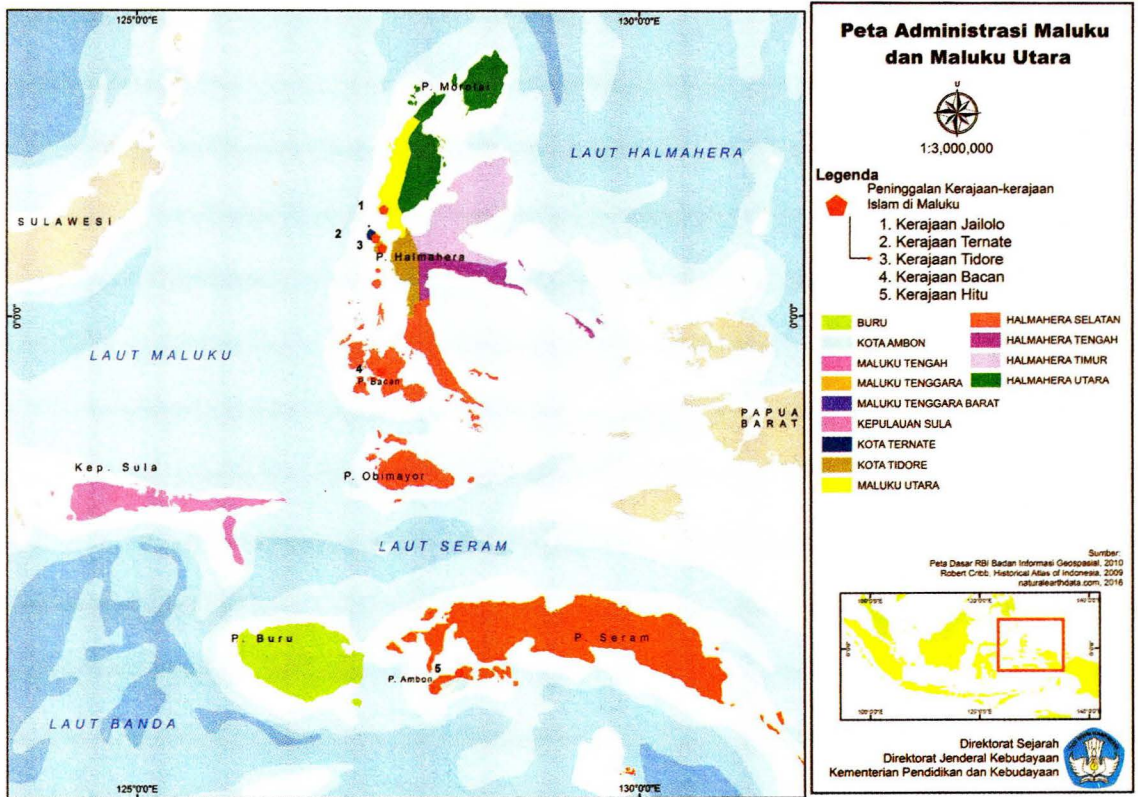
Gambar 6.2
Foto Pulau Ternate

Hampir seluruh pulau tersebut bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Gunung api yang ada di pulau-pulau tersebut rata-rata bersifat aktif, di antaranya Gunung Gamalama yang hampir sepanjang masa meletus. Tercatat ada 24 buah gunung tak berapi; yang tertinggi Gunung Binaya (+3.055 meter dpl) di Pulau Seram, dan yang terendah Gunung Buku (+450 meter dpl) di Pulau Halmahera. Gunung api aktif yang tercatat berjumlah 10 buah, dimulai dari yang tertinggi adalah Gunung Wetar (+5.282 meter dari dasar laut palung Banda), dan yang terendah adalah Gunung Api (+1.150 meter dari dasar laut palung Banda).

Pulau-pulau di Kepulauan Maluku juga disebut 'Pulau dengan Seribu Tanjung'; tercatat ada 1-1 tanjung, 25 batang sungai (umumnya sungai kecil dan pendek), dan 39 buah danau dengan luas keseluruhan 50 kilometer persegi. Luas kawasan berhutan di seluruh Maluku lebih dari 5.000.000 kilometer persegi, sekitar 59 persen dari luas daratannya. Pada umumnya jenis tanahnya latosol, alluvial, andosol, vulkanis, dan grumosol.

Maluku Utara adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Provinsi

yang biasa disingkat sebagai Malut ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku, merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Maluku berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan diresmikan pada 12 Oktober 1999. Ibu kota sementara provinsi ini adalah Ternate di Pulau Ternate. Sofifi, sebuah kelurahan di Kecamatan Koba Utara (Pulau Halmahera), merupakan ibu kota definitif Provinsi Maluku Utara yang diresmikan pada Agustus 2010. Untuk mencapai ibu kota provinsi harus ditempuh dengan *speed-boat* selama 30 menit atau 90 menit dengan *ferry* dari Kota Ternate.



Gambar 6.3 Peta Administrasi Kabupaten di Maluku dan Maluku utara

Secara geografis Provinsi Maluku Utara terletak di antara garis 3° Lintang Utara–3° Lintang Selatan dan garis 124°–129° Bujur Timur serta terbentang dari utara ke selatan sepanjang 770 kilometer dan dari barat ke timur sepanjang 660 kilometer dengan batas-batas wilayah Samudra Pasifik di sebelah utara, Laut Seram di sebelah selatan, Laut Halmahera di sebelah timur, Laut Maluku di sebelah barat. Jadi wilayah Ternate sebagian besar dikelilingi oleh lautan, dan

terdiri dari delapan pulau besar yaitu Pulau Halmahera (18.000 kilometer persegi), Pulau Obi (3.900 kilometer persegi), Pulau Taliabu (3.195 kilometer persegi), Pulau Bacan (2.878 kilometer persegi), dan Pulau Morotai (2.325 kilometer persegi), Pulau Ternate (106,2 kilometer persegi), Pulau Tidore (116,1 kilometer persegi), dan Pulau Makian (113,1 kilometer persegi). Pulau Hiri, Pulau Burida, Pulau Moti, Pulau Maka, Pulau Mayau dan Pulau Mano merupakan pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan memiliki sumber daya alam yang banyak dicari sejak Abad Pertengahan yaitu cengkih.

Luas keseluruhan wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,36 kilometer persegi. Sebagian besar wilayahnya merupakan laut, yaitu seluas 106.977,32 kilometer persegi (76,27 persen) dengan panjang garis pantai sepanjang 3.104 kilometer. Sisanya seluas 33.278 kilometer persegi (23,73 persen) merupakan daratan dengan kontur permukaan tanahnya berbukit-bukit dan bergunung-api. Ada juga gunung api yang langsung menyembul dari dasar laut seperti Pulau Maitara. Pulau Ternate adalah pulau gunung api dengan gunung apinya yang masih aktif Gamalama, namun mempunyai dataran kaki gunung yang cukup luas. Pemukiman penduduk menempati areal sebelah timur kaki gunung. Pulau Halmahera merupakan pulau terbesar tetapi mempunyai banyak semenanjung dan teluk. Kabupaten Halmahera Barat yang beribu kota di Tobelo nyaris merupakan sebuah pulau dengan tanah genting yang berbatasan dengan Selat Ternate di sebelah barat.

Secara administratif, saat ini Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Pulau Morotai, serta dua kota yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore. Pada 2008, Pulau Morotai yang semula menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Utara, dimekarkan menjadi kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten/kota tersebut terdiri dari 112 kecamatan dan 1.062 desa/kelurahan dan pada 2013 Pulau Taliabu yang semula menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula dimekarkan menjadi Kabupaten Pulau Taliabu.

Topografi wilayah Maluku Utara sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit dan termasuk kategori pulau vulkanis dan pulau karang. Topografi yang terdapat di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir dan pada daerah sekitar Teluk Buli (wilayah Halmahera Timur) sampai Teluk Kao (wilayah Halmahera Utara), pesisir barat mulai dari Teluk Jailolo ke utara dan Teluk Weda ke selatan dan utara ditemui daerah dataran yang luas. Pada bagian lainnya terdapat deretan pegunungan yang melandai dengan cepat ke arah pesisir.

Sebagian besar topografi Pulau Halmahera berupa pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe, dan Dodinga. Dengan karaktersitik daratan dan perairan yang demikian, wilayah itu memiliki potensi pengembangan sumber daya alam yang cukup menjanjikan, seperti perikanan, pertambangan, perkebunan dan pariwisata ataupun potensi lain. Dengan arah kebijakan serta strategi pengembangan yang tepat, semua potensi itu bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Hampir di setiap pulau di Maluku Utara memiliki gunung api berbentuk stratovulkanis atau kerucut. Gunung-gunung api itu antara lain Gunung Gamkonora (+1695 meter dpl) di Pulau Halmahera, Gunung Kie Monuhu (+1730 meter dpl) di Pulau Tidore, Gunung Kie Besi (+1357 meter dpl) di Pulau Makian, dan Buku Siberia (+2120 meter dpl) di Pulau Bacan. Meski memiliki banyak gunung api, pada umumnya pulau-pulau di Maluku Utara pada tidak memiliki sungai besar yang dapat dilayari hingga ke daerah pedalaman. Mungkin, hal itu disebabkan oleh daratannya yang sempit.



Gambar 6.4
Foto gunung di Pulau Tidore

Setelah pemekaran 1999, luas Provinsi Maluku menjadi sekitar 611.000 kilometer persegi. Terdiri dari pulau-pulau Ambalau, Manipa, Kelang, Babi, Buano, Seram, Ambon, Saparua, Haruku, Nusalaut (tiga pulau dalam kepulauan Uliaser atau Lease), Kepulauan Banda, Kepulauan Geser, Kepulauan Gorong, Kepulauan Watubela, Kepulauan Licipara, Kepulauan Teon, Nila, Bui, Tengah, Kaimear, dan Serua. Pulau Seram merupakan pulau terbesar, sedangkan Pulau Ambon merupakan pulau yang terbanyak penduduknya.

Kepulauan tersebut terdiri dari tanah datar, tanah berbukit-bukit gelombang lemah, dan tanah pegunungan. Tanah datar yang terluas terdapat di Pulau Buru (lebih dari 2.400 kilometer persegi). Tanah berbukit gelombang lemah dan daerah perbukitan terdapat di Pulau Seram bagian selatan (seluas lebih dari 1.600 kilometer persegi). Gunung api yang masih tergolong aktif terdapat di Kepulauan Banda.

Di sebelah tenggara Kepulauan Maluku terdapat kepulauan yang jarang tercatat dalam sejarah. Kepulauan itu terdiri lebih dari 400 buah pulau besar dan

kecil, tetapi yang dimukimi manusia hanya sekitar 60 buah pulau. Masing-masing pulau dalam rangkaian kepulauan itu memiliki keadaan alam dan lingkungan yang berbeda-beda. Di Pulau Kei Kecil tidak terdapat pegunungan. Dataran tinggi terdapat di sebelah utara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kur, sedangkan seluruh bagian lainnya merupakan dataran rendah. Dalam rangkaian kepulauan ini, pulau yang terbesar adalah Pulau Kei Kecil.

Di Pulau Kei Besar terdapat rangkaian pegunungan yang membujur dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 80 kilometer dengan ketinggian puncaknya +800 meter dpl, terdapat di Gunung Dab. Dataran rendahnya terdapat di bagian tengah Pulau Kei Besar. Keadaan tanah yang subur memungkinkan tanaman dapat berumur panjang.

Di Kepulauan Aru tidak ditemukan pegunungan ataupun dataran tinggi, sungai, dan danau. Dataran rendah di bagian selatan berbeda dengan dataran rendah di bagian utara dan tengah yang dikelilingi rawa-rawa. Keadaan tanahnya subur dan dikelilingi hutan primer. Di bagian selatan terdapat padang ilalang dengan banyak kawanan rusa.

Tanimbar merupakan nama kecamatan (Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Tanimbar Selatan) yang terletak di Pulau Yamdena. Di sekelilingnya terdapat pulau-pulau yang lebih kecil. Seluruhnya terdapat 43 buah pulau, tiga buah pulau dimukimi penduduk, sedangkan 40 buah pulau tidak berpenduduk. Di pulau-pulau ini tidak terdapat pegunungan, sungai, rawa, ataupun danau. Terdapat dataran tinggi tetapi tidak terlalu luas. Seluruh pulau hanya terdiri dari tanah datar yang cukup subur dengan tanaman yang menonjol yaitu anggrek Larat dan Lelemuku yang beraneka warna. Meski tanahnya subur tetapi pada masa ramainya perdagangan rempah daerah itu tidak memiliki hasil tanaman yang dapat diperdagangkan.

6.3 Daya Tarik Maluku

Rempah yang terdiri dari cengkih, pala, bunga pala, dan kayu manis merupakan barang komoditi penting dan banyak penggemarnya. Berdasarkan sumber tertulis yang ditemukan diperoleh informasi bahwa komoditi itu

telah menyebar jauh dari sumbernya yang kala itu hanya ada di sebelah timur Nusantara, tepatnya di Kepulauan Maluku. Sumber-sumber tertulis itu antara lain kitab *Injil Perjanjian Lama* atau dikenal juga dengan sebutan *Taurat* (Lembaga Alkitab Indonesia 1999), sumber para penulis dari Yunani (Wheatley 1961), dan catatan para pengelana atau saudagar yang berniaga ke Maluku.

Sumber tertulis pertama yang menyebut *rempah* dan beberapa komoditi lain yang diduga berasal dari Nusantara adalah *Kitab Perjanjian Lama* (1 Raja-Raja 10: 10–12) yang menyatakan,

- (10) Kemudian Ratu Syeba memberikan 4.140 kg emas kepada raja. Ia juga memberikan sejumlah besar *rempah* dan perhiasan. Tidak pernah ada pemberian *rempah-rempah* sedemikian banyak seperti yang diserahkan oleh Ratu Syeba kepada Raja Sulaiman.
- (11) Kapal-kapal milik Hiram membawa emas dari *Ofir* dan juga mengangkut banyak *kayu cendana* dan perhiasan.
- (12) Sulaiman mempergunakan *kayu cendana* untuk penopang Bait Allah dan istana dan membuat alat musik harpa dan alat seperti harpa yang lebih kecil bentuknya untuk para penyanyi. Tidak ada orang yang pernah membawa kayu semacam itu ke Israel dan tidak ada yang melihat kayu sejenis itu sejak waktu itu.

Dari kutipan *Kitab Perjanjian Lama* (1 Raja-Raja 10: 10-12) terdapat dua kata penting yang perlu dicermati, yaitu *rempah* dan *kayu cendana* (*Santalum album*). Rempah yang terdiri dari cengkih (*Eugenia aromatic*, Kuntze), pala (*Myristica fragrans*, Linnaeus), dan bunga pala (*fuli*). merupakan hasil hutan yang menurut ahli tumbuh-tumbuhan, sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara (abad ke-15), hanya dihasilkan atau tumbuh di bumi Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku (Deinum dan Wit dalam van Hall dan van der Koppel [red.] 1949). Pertanyaannya, bagaimana dan siapa yang membawa komoditi itu hingga jauh ke Timur Tengah; apakah saudagar dari Maluku, atau saudagar lain yang datang ke Maluku. Atau, boleh jadi komoditi itu dibawa dari Maluku secara estafet ke pelabuhan-pelabuhan penting seperti Goa di India, Kuffah di Persia (sekarang masuk Irak), dan kemudian bandar Oman di Jazirah Arab, dan

Timur Tengah sekitar Mesir dan Syria. Perdagangan rempah di Nusantara telah berlangsung lama sebelum “the Age of Commerce” yang berkembang sejak abad ke-15 (Reid 1988).

Tumbuhan lain yang menjadi ciri khas Nusantara adalah kayu cendana (*Santalum album*). Jenis kayu itu hanya tumbuh di hutan-hutan Nusantara, khususnya di daerah Timor Nusatenggara Timur. Pada masa sejarah Nusantara, kayu itu menjadi komoditi yang cukup penting karena cirinya yang menimbulkan aroma wangi. Karena wanginya itu, sejak milenium kedua Masehi hingga kini komoditi itu dijual tidak dalam bentuk kayu gelondongan, tetapi dalam bentuk potongan-potongan kecil atau serbuk yang penggunaannya dengan cara dibakar ditaburkan di atas bara arang.

Pada sekitar 1500 SM, ketika hutan di Nusantara masih lebat, kayu cendana dapat dipotong dalam bentuk kayu gelondongan. Kayu cendana dalam bentuk gelondongan itulah mungkin dikirim ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah (Kuil Sulaiman), istana Raja Sulaiman, dan alat-alat musik yang dibuat dari kayu. Karena aroma harum yang ditimbulkan oleh kayu ini, dalam Kitab Raja-Raja 1 disebutkan kayu itu digunakan sebagai balok penopang dalam kuil, “Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk Bait Allah dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi; kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini.” Karena alasan aroma harumnya, kayu jenis itu layak dipakai sebagai bahan bangunan kuil dan istana.

6.4 Cengkih Hanya ada di Maluku

“Saudagar-saudagar Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana dan Banda untuk fuli (dan pala) dan Maluku (utara) untuk cengkih, dan barang-barang dagangan ini tidak tumbuh di tempat lain di dunia kecuali di tempat itu.”

Daya tarik rempah-rempah (cengkih, pala, dan bunga pala), menjadi dorongan utama perkembangan perdagangan antarbangsa di Asia Tenggara. Pakar tumbuh-tumbuhan menyatakan bahwa cengkih (*Eugenia aromatic*,

Kuntze) hanya tumbuh di Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Pala dan lapisan pembungkus kulit biji (*fuli*) diperoleh dari pohon pala (*Myristica fragrans*, Linnaeus) terdapat di pulau karang Banda. Setelah 1550, pohon-pohon ditanam di kawasan lain di Nusantara. Dengan kemajuan teknologi budi daya tanaman, pada akhirnya dapat ditanam di beberapa tempat di dunia seperti di Pulau Zanzibar yang letaknya di sebelah timur Tanzania, timur benua Afrika di Samudra Indonesia.

Melalui komoditi cengkih dan pala, dapat ditelusuri jalur-jalur pelayaran dan perdagangan yang menunjukkan seberapa jauh hubungan Maluku dengan dunia luar. Sebuah sumber tertulis Romawi dari Plinius Major (tahun 75 Masehi) menyebutkan *garyophyllon* (nama tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di hutan sakti India).¹ Diduga, *garyophyllon* adalah cengkih, dan telah dikenal di benua Eropa pada awal abad Masehi (Rouffaer 1905). Namun, jauh sebelum itu orang-orang di Mesopotamia sudah menggemari cengkih. Hal itu terbukti oleh penemuan jambangan berisi cengkih di gudang dapur sebuah rumah di Situs Terqa, Euftrat Tengah, Syria, salah satu wilayah peradaban Mesopotamia. Saat ekskavasi arkeologis dilakukan, arkeolog Italia Giorgio Buccellati begitu terkagum-kagum atas temuannya yang berupa sebuah wadah berisi benda seperti cengkih. Rupanya ia menggali rumah seorang saudagar yang berasal dari masa 1.700 SM di Terqa. Awalnya, sang arkeolog ini tidak percaya atas temuannya namun setelah diteliti bersama seorang rekannya, ahli paleobotani bernama Kathleen Galvin, ia yakin bahwa benda yang ditemukannya memang cengkih. Galvin menegaskan bahwa cengkih di dunia ini hanya dihasilkan di Kepulauan Maluku.

1 Orang Tionghoa rupanya sudah mengetahui bahwa cengkih hanya dapat diperoleh dari Maluku, "hanya satu tempat di laut selatan yang memproduksi cengkih . . ." (Groeneveldt 1960).



Gambar 6.5
Foto Cengkeh yang hanya ada di Maluku

Sumber Eropa lainnya menyebutkan bahwa St. Silvester, seorang Paus di Roma yang berkuasa tahun 314–35 Masehi menerima hadiah 150 pon cengkih. Sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 547 Cosmos Indicopleustis mencatat di antara barang-barang dagangannya terdapat rempah-rempah yang didatangkan dari Tiongkok dan Srilanka.

Sumber-sumber tertulis tentang hasil dari Maluku, mengindikasikan bahwa bukan pembeli yang datang ke Maluku, melainkan orang-orang dari Maluku (Nusantara) yang datang. Kalau pembeli yang datang, biasanya diceritakan juga tempat yang didatangi itu. Sebuah deskripsi “menyesatkan” yang ditulis oleh penulis Arab terkenal Ibnu Battuta (1350 Masehi) menyatakan, “cengkih yang diperdagangkan adalah *batang* pohonnya, buahnya disebut *pala*, dan bunganya dinamakan *fuli*” (Dunn 2011; cetak miring BBU). Hal itu berarti, Ibnu Battuta tidak tahu bagaimana bentuk pohon cengkih dan bagaimana bentuk pohon pala.

Seberapa jauh pelaut Nusantara mengarungi laut. Apakah mereka hanya

melayari laut atau selat yang memisahkan antarpulau, atau lebih jauh lagi sampai ke Asia Selatan, Tiongkok, Asia Timur, bahkan Eropa? Sebuah gambar cat air yang dibuat oleh Alphonse Pellion yang berjudul *Kora-kora from Gebe, North Moluccas, 1818* menggambarkan sebuah perahu besar dengan 9–10 pendayung dan sebuah layar besar (Reid 2002). Perahu besar itu sangat layak untuk pelayaran jarak jauh dan digunakan sebagai pengangkut rempah-rempah, khususnya pala dan cengkih, ke pelabuhan *entrepôt* di Asia Tenggara. Gambar perahu itu dibuat di Eropa, bukan di Asia Tenggara khususnya Nusantara.

Pada abad ke-15, Maluku merupakan pusat perdagangan cengkih di bagian timur Nusantara, khususnya di Maluku Utara sebelah barat Pulau Halmahera. Beberapa kerajaan lain yang juga merupakan pusat perdagangan cengkih adalah Tidore, Bacan, dan Jailolo di Halmahera. Perdagangan cengkih pada masa itu (sekitar abad ke-15) berbarengan dengan penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para saudagar dan mubalig. Pada saat itu cengkih merupakan komoditi perdagangan yang banyak dicari saudagar dari berbagai daerah dan bangsa. Untuk menghindari persaingan perdagangan, para raja dan penguasa di Maluku membangun prinsip kekeluargaan.

Menurut *Hikayat Ternate* yang ditulis oleh Naidah (van der Crab 1878), pada abad ke-19 disebutkan prinsip-prinsip kerukunan keluarga dalam perdagangan cengkih. Sudah sewajarnya bila dibangun kerukunan keluarga karena pada dasarnya para raja dan penguasa dari empat kerajaan itu masih keturunan dari seorang ulama dari Timur Tengah yang bernama Ja'far as-Sadik (Imam Syi'ah ke-6 pada 699–765). Dalam mitos, ulama itu disebutkan berkawin dengan seorang bidadari setempat yang bernama Nur Sifa. Dari perkawinannya itu, ia menurunkan raja-raja Maluku (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo). Kerukunan di antara keempat kerajaan itu segera berubah ketika bangsa Portugis dan Spanyol datang pada sekitar awal abad ke-16.

Bermula dari persaingan dagang di antara kedua bangsa asing tersebut, mereka memanfaatkan para *kolano* di Maluku. Pada 1512, Ternate bekerja sama dengan Portugis dalam meningkatkan volume perdagangan cengkih. Pada 1522, Sultan Ternate mengizinkan Portugis membangun benteng di Gamlamo (Gamalama) yang terletak di sebelah timur Pulau Ternate. Sementara itu, Tidore

yang terletak di seberang timur Ternate memiliki kekuatan laut yang andal lengkap dengan persenjataannya. Oleh karena Tidore mempunyai persenjataan yang mudah bergerak, kerajaan itu lebih unggul dari Ternate.

Ketika Portugis masih bercokol di Ternate, perdagangan cengkih Kesultanan Ternate tidak mengalami kemajuan karena dimonopoli Portugis. Namun, setelah kejadian pembunuhan Sultan Khairun pada 1570, dan pengusiran terhadap Portugis oleh Sultan Baabullah pada 1577 perdagangan cengkih Ternate maju pesat, dan Kesultanan Ternate mengalami masa kejayaan hingga Sultan Baabullah mangkat pada 1583.

6.5 Era Perdagangan Rempah

Indonesia yang terletak di pertengahan jalur pelayaran dan perdagangan antara India dan Tiongkok telah dikenal sejak lama. Berhubungan dengan aktivitas itu, banyak ahli percaya bahwa “sosialisasi” budaya India berlangsung di Jawa dan Sumatera. Kedua pulau itu telah dinyatakan dalam catatan geografi Arab Kuno sejak abad-abad awal Masehi. Orang Portugis muncul untuk pertama kalinya di Nusantara pada 1509, yang diikuti dengan aksi Antonio de Abreu, seorang perwira armada Afonso de Albuquerque, memperoleh Maluku, pulau penghasil rempah-rempah. Kakak-beradik Parmentier dari Dieppe (Parmentier 1883), Perancis barat berhadapan dengan Inggris, pada 1529 juga berlayar ke Sumatera dalam usaha mencari rempah-rempah walaupun kematian yang ditemukannya di sana. Selanjutnya, orang Belanda datang ke Jawa pada 1596, membangun Batavia pada 1619, dan sedikit demi sedikit berhasil menggantikan kedudukan orang Portugis.

Pengenalan beberapa produk alam Nusantara sebagai komoditi perdagangan yang transaksinya berlangsung sejak zaman “baheula” dan melibatkan banyak bangsa merupakan hal yang menarik untuk diungkap. Mengacu pada data sejarah dan arkeologi maritim, dapat dibahas pokok yang terkait dengan topik yang lebih luas, yaitu *economic exchanges* atau pertukaran ekonomi (Mollat 1980).

Besarnya kebutuhan akan rempah-rempah mengakibatkan perubahan jalannya sejarah serta mempengaruhi hubungan internasional. Hal itu

memunculkan arti lain rempah sebagai komoditi yang menyebabkan bangsa Eropa mendatangi Nusantara untuk memperolehnya dari tangan pertama. Dalam konteks ini rempah-rempah adalah cengkih, pala, lada, kayu manis, dan lain-lain. Pada saat itu, perahu yang memanfaatkan angin sebagai tenaga penggerak sangat berperan. Tanpa perahu atau kapal, eksplorasi, kolonisasi, ataupun perkembangan umum sebagian besar dunia, merupakan hal yang tidak akan begitu saja terwujud. Sejak abad pertama tarikh Masehi, masyarakat di Nusantara telah memiliki hubungan dagang dengan wilayah-wilayah lain. Ada rute dagang dari Tiongkok melalui Nusantara ke India, Persia, Mesir, Eropa, dan sebaliknya. Barang dagangan yang dihasilkan Nusantara adalah rempah-rempah yang terutama berasal dari Maluku. Saudagar Jawa dan Sumatera membawa barang itu ke pusat perdagangan di kawasan Nusantara barat. Selanjutnya mereka atau para saudagar dari India, mengangkutnya ke India. Di sana telah menunggu saudagar-saudagar Asia Barat (orang Persia dan Arab, mula-mula juga orang Yunani dan Mesir), yang selanjutnya membawa rempah-rempah tadi bersama barang lain ke pasaran Timur Tengah dan Eropa. Rute dagang itu tampak bagaimana sebuah rantai yang terjalin dari beberapa mata rantai.

Penduduk Sumatera yang berada di ujung barat Nusantara telah melibatkan diri dalam perdagangan antara Tiongkok dan India sejak abad ke-5 dan ke-6 (Selling 1981). Mulai abad ke-7, secara teratur para saudagar Arab yang kebanyakan datang dari India berlayar ke Asia Tenggara. Perdagangan secara meluas tidak saja dilakukan di Nusantara, malahan mencapai Tiongkok sebelah selatan. Lada dan bermacam rempah lain yang dihasilkan dari Lampung dan Jawa Barat, dan kayu harum, adalah komoditas yang dicari saudagar asing (Hall 1968).

Sejak lama, Gresik di Jawa Timur juga merupakan sebuah mata rantai pelayaran dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Di Loran masih tersimpan data pertanggalan yang dihubungkan dengan keberadaan komunitas Islam yang paling tua di Asia Tenggara, ialah nisan Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 495 Hijrah atau sekitar 1101 Masehi (Ambary 1998). Lokasi sekitarnya mengandung sisa kehidupan sebuah bandar abad ke-10 hingga abad ke-14 Masehi (Situs Pasucinan), yang mampu menempatkannya sebagai alternatif dari lokasi Gresik awal. Temuan keramiknya bertanggal abad ke-10 hingga abad ke-14 didominasi produk dinasti Song-Yuan. Dari Gresik banyak saudagar mengadakan

hubungan dagang dengan Maluku (Groeneveldt 1960). Nama Gresik disebutkan dalam *Hikayat Maluku*.

Kehadiran orang Portugis di Nusantara bermula dengan penjelajahan di pantai barat Afrika sejak abad ke-15. Keinginan menemukan jalur ke Nusantara sebagai cara mencari kekayaan melalui perdagangan merupakan faktor pendorongnya. Di dalamnya terkandung maksud mengalihkan lalu lintas perdagangan melalui jalur baru. Diperhitungkan, hal tersebut akan merugikan bangsa-bangsa yang sampai saat itu menguasai rantai perdagangan Asia-Eropa, di antaranya bangsa Turki, yang ketika itu sedang menyerang kerajaan-kerajaan Eropa. Itu dapat dikategorikan sebagai alasan politis bangsa Portugis. Adapun alasan lain yang mendorong penjelajahan itu adalah rasa tanggung jawab mereka atas penyiaran agama, pengabdian terhadap agama Kristen sehingga dapat dilihat pula alasan keagamaan di baliknya.

Maka, pada awal abad ke-16, faktor baru masuk dalam konstelasi kekuatan ekonomi, politik, dan religi di Nusantara, yakni ketika Malaka—pusat perdagangan utama antara Maluku dan India—direbut Portugis pada 1511. Peristiwa tersebut diikuti dengan malang-melintangnya armada kapal mereka di perairan antara Jawa dan Maluku. Puncaknya terjadi pada 1522 ketika mereka mendirikan benteng di Temate. Semua itu adalah kelanjutan dari kegiatan *os descobrimentos* atau 'penjelajahan dan penemuan' dalam sejarah Portugal yang merupakan *seculo domo* atau 'abad/zaman keemasan' pada lintasan sejarah bangsa itu. Tujuan jangka panjangnya jelas, yakni menguasai perdagangan Asia-Eropa yang dapat dicapai dengan menguasai lautan.

Orang Portugis jelas mencium peran Malaka sebagai bandar yang amat penting. Keletakannya yang strategis menjadi tumpuan hubungan dagang regional Asia Tenggara dan internasional. Dari barat, berdatangan kapal-kapal saudagar Pegu, Benggala, Srilanka (Serendib, menurut pelaut Arab) dan Goa. Mereka adalah perantara lalu lintas komoditi Barat dan Timur. Dari arah timur, kedatangan saudagar Siam, Tiongkok, dan Jepang meramaikan jual-beli berbagai jenis barang dagangan yang dibawa dan yang diperlukan. Jung Tiongkok datang ke Malaka membawa sutra, keramik, dan sebagainya. Sedangkan barang utama yang dibawa balik ke Tiongkok berupa lada, gaharu, rempah, dan hasil hutan

Nusantara. Disampaikan oleh Tomé Pires bahwa satu kuintal lada yang dibeli dengan nilai 4 *cruzados* di Malaka laku dijual dengan harga 15 atau 16 *cruzados* di Tiongkok (Cortesaõ [ed.] 1967). Dari selatan, kapal-kapal yang sarat dengan rempah-rempah dan kayu harum, hasil bumi dan hasil hutan Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Maluku, datang mengisi gudang-gudang saudagar di Malaka. Kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang besar atas tumbuh-kembangnya bandar-bandar pesisir utara Pulau Jawa seperti Cirebon, Demak, Jepara, dan Tuban, selain memberi kesempatan diperolehnya pangsa pasar yang luas atas produk berupa cengkih dari Maluku, pala dan bunga pala dari Banda, dan kayu gaharu dari Lombok, atau kayu cendana dari Timor.

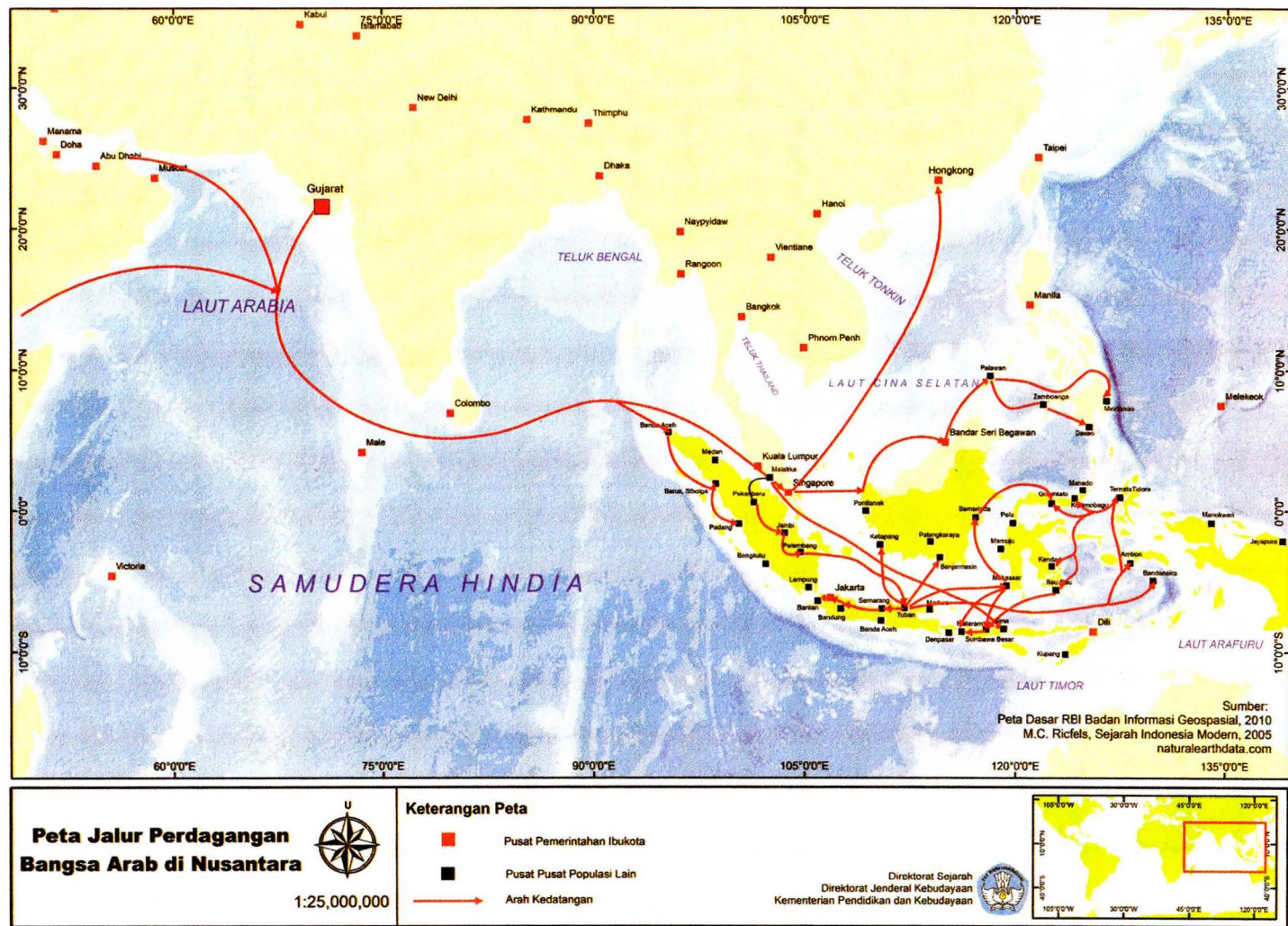
Kedatangan Diego Lopes de Sequiera² pada 1509 di Pedir menandai hubungan Sumatera dan Portugal sebelum orang Portugis menguasai Malaka. Ia melanjutkan pelayaran ke Pasai di Aceh, dan kemudian ke Bandar Malaka di Semenanjung Tanah Melayu. Tujuannya menguasai kekayaan alam Pasai, yang antara lain menghasilkan kamper (kapur barus), damar, lada, dan jahe. Namun, akibat serangan Aceh pada 1524, Portugis meninggalkan bentengnya di Pasai.

Penaklukan Goa dan Malaka oleh orang Portugis mengakibatkan perubahan rute perdagangan rempah. Sebelumnya, lada dibawa melalui Laut Merah, lewat jalan darat ke Kairo, dilanjutkan dengan kapal melalui Laut Tengah, dan masuk ke Eropa. Setelah itu rute bergeser ke selatan Afrika melalui Tanjung Harapan. Hal itu jelas menguntungkan pihak Portugal, dan sebaliknya merugikan orang-orang Venesia.

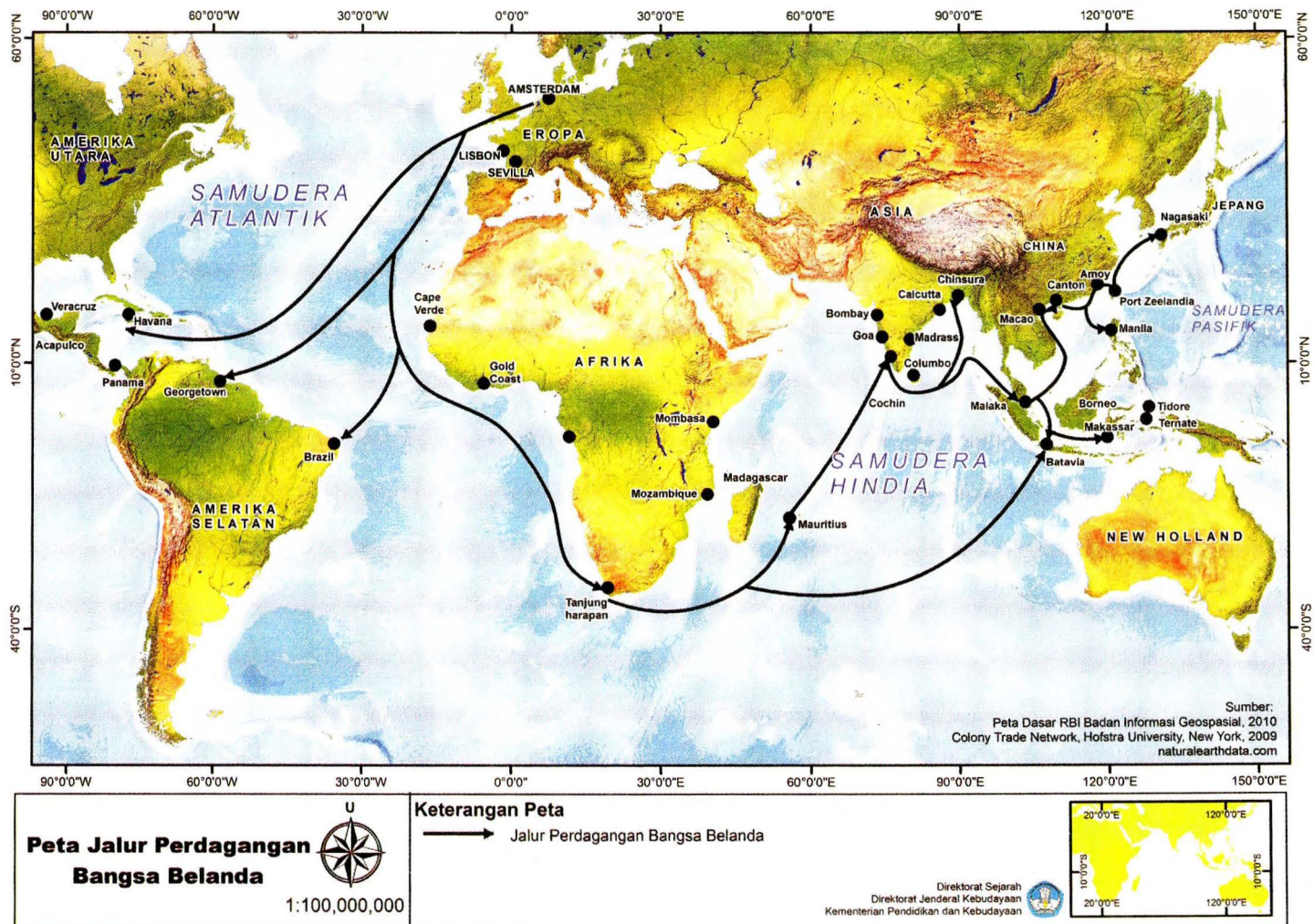
Saudagar Muslim yang tidak mau lagi singgah di Malaka cenderung berdagang di bandar-bandar pesisir utara Jawa dan kawasan barat Nusantara, seperti Aceh di Sumatera. Aceh yang beruntung, mampu menciptakan bandar alternatif bagi saudagar yang enggan menyinggahi Malaka. Sebagian ruas Selat Malaka berada di bawah kontrolnya sehingga mengganggu arus perdagangan orang Portugis di Nusantara. Aceh juga berkali-kali menyerang Malaka, bahkan menyerbu Patani (selatan Thailand), Johor, dan Perak (Tahir Al-Haddad 1957). Menurut sumber Tiongkok, ketika itu Aceh mengeksport kayu gaharu, cengkih, dupa, lada, kayu sapang, dan sebagainya.³

2 Pemimpin armada pertama orang Eropa yang tiba di Asia Tenggara yang selamat dari serangan orang Melayu; lihat Reid (2002).

3 Dalam hal ini Aceh berfungsi sebagai pelabuhan antara karena Aceh tidak menghasilkan rempah dan kayu-kayuan harum; lihat Groeneveldt (1960).



Gambar 6.6 Peta Jalur Perdagangan Bangsa Arab



Gambar 6.7 Peta Jalur Perdagangan Bangsa Belanda

Bangsa Eropa lain yang ikut memasuki ajang “perburuan rempah-rempah” Nusantara adalah orang Belanda. VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang dibentuk pada 1602 merupakan sebuah federasi dari enam badan dagang yang sejak 1596 telah mengirimkan armada dagangnya ke bandar-bandar di Nusantara. Tempat-tempat penting yang menghasilkan komoditi bagi konsumen Eropa—yakni rempah-rempah—dikuasainya dengan cara yang lebih luas, berbeda dengan tempat-tempat yang hanya dijadikan titik persinggahan atau jual-beli.

Walaupun perdagangan utamanya antara Batavia dan Negeri Belanda, VOC tidak meninggalkan perdagangan dengan bandar lain di Asia Tenggara dan Asia Timur. Bila yang diangkut dari Batavia adalah rempah-rempah, maka yang dibawa dari Belanda berupa uang, barang-barang keperluan VOC, serta sedikit barang dagangan (Leirissa 1976).

Upaya Belanda memonopoli rempah-rempah Nusantara dilakukannya dengan susah payah. Kenyataan menunjukkan bahwa saudagar Tionghoa tetap aktif dalam perdagangan lada di sepanjang abad ke-17. Bahkan mereka mampu mencegah Belanda menguasai perdagangan lada di Kalimantan pada 1730. Kondisi itu menyebabkan rencana Belanda memonopoli pasar lada Eropa tidak begitu saja dapat dilaksanakan sehingga pada 1736 East India Company masih mampu mengimpor lada ke London dalam jumlah yang sama banyak dengan yang diterima VOC di Batavia dari seluruh kepulauan Nusantara (Boxer 1973).

Pada era perdagangan rempah di Asia Tenggara terbentuk jalur-jalur pelayaran yang menghubungkan antara tempat yang memproduksi dan tempat-tempat untuk memasarkan. Tercatat dalam sejarah, pulau-pulau produsen rempah ada di kawasan timur Nusantara, seperti Ternate, Tidore, Bacan, Moti, dan Kepulauan Banda. Nusatenggara—yang pernah disebut Kepulauan Sunda Kecil—juga dikenal sebagai penghasil kayu-kayuan yang beraroma harum seperti kayu cendana dan gaharu.

Dari tempat-tempat penghasil komoditi perdagangan yang sangat digemari itu, rempah dan kayu-kayuan dipasarkan ke seluruh penjuru dunia dengan cara estafet, dari pelabuhan penghasil ke pelabuhan lain yang sejauh jangkauan kapal dan perbekalannya. Dari pelabuhan singgah tersebut kemudian diteruskan lagi ke pelabuhan tempat dipasarkan.

Di kawasan timur Nusantara, tercatat beberapa bandar yang membentuk jaringan pelayaran lokal. Di daerah yang sekarang masuk Kabupaten Maluku Tengah (Provinsi Maluku) terdapat Hitu sebagai pusat bandar yang membawahkan bandar-bandar kecil yang lain seperti Seram Laut/Gorong, Kei-Aru, dan Tanimbar. Dari Hitu komoditi yang dihasilkan dari pelabuhan kecil tersebut kemudian dibawa ke pelabuhan yang jauh seperti Jepara dan Gresik di Tanah Jawa.

Di daerah Maluku Utara terdapat empat pusat bandar utama yaitu Jailolo, Bacan, Ternate, dan Tidore. Tidore membawahkan beberapa bandar di Halmahera Timur, Kepulauan Raja Ampat, dan Irian Barat; Ternate membawahi bandar-bandar di Kepulauan Banggai, pesisir timur sampai utara Sulawesi; Jailolo membawahi bandar-bandar di pesisir barat Pulau Halmahera.

Pada sekitar abad ke-18, hingga meletusnya Tambora (10–15 April 1815), Sumbawa dikenal sebagai penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Beras dari tempat itu dipasarkan ke Malaka untuk selanjutnya diteruskan ke bandar lain di Asia Tenggara daratan seperti Yangoon dan Bangkok. Pelayaran dari Sumbawa tidak dilakukan secara langsung tetapi singgah di Banjarmasin dan Gresik.

Jalur pelayaran bisa terbentuk bukan saja dari alasan perdagangan, tetapi dapat juga dari alasan politik dan keluarga. Hubungan emosional antara Malaka–Palembang cukup erat. *Sejarah Melayu* mencatat bahwa seorang bangsawan Palembang, Parameswara, meninggalkan tempat kelahirannya untuk merantau. Awalnya (abad ke-14) ia berangkat menuju Ketapang di Kalimantan Barat untuk bertemu dengan Raja Majapahit. Dari Ketapang, ia ke Temasek (sekarang Singapura) dan akhirnya tiba di sebuah perkampungan nelayan yang bernama Malaka. Oleh Parameswara perkampungan ini kemudian dibangun menjadi sebuah kota.

Pada Era Perdagangan Rempah, sebelum dikuasai Portugis pada 1511 Malaka merupakan bandar besar. Dari Malaka komoditi perdagangan dibawa ke tempat lain seperti Asia Barat dan Eropa, Thailand, Vietnam, dan Jepang. Akibat ramainya perdagangan laut dan tumbuh serta berkembangnya kota, penguasa Malaka membuat *Hukum Kanun Malaka* yang berisi tentang pengaturan pemerintahan dan kehidupan rakyat. Demikian pentingnya Malaka maka tidak heran apabila ada pepatah yang menyebutkan “Barangsiapa dapat menguasai Malaka, ia dapat mencekik Eropa.”

AWAL MASUKNYA PERADABAN ISLAM DI MALUKU

7.1 Masuknya Islam

*S*alah satu faktor yang membawa agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara adalah perdagangan, khususnya perdagangan rempah yang kala itu merupakan komoditi yang sangat digemari di dunia Timur. Belakangan, setelah mulai dikenal di dunia Barat, banyak saudagar Eropa berdatangan ke Nusantara yang disertai padri Katolik dan pendeta Protestan menyebarkan agama Kristen. Satu hal yang tampak jelas ialah bahwa masuk dan berkembangnya ajaran agama, baik Islam maupun Kristen, di Nusantara adalah melalui jalur niaga.

Terkait dengan Islamisasi di Nusantara, pertanyaan pertama adalah kapan Islam masuk ke Nusantara dan siapa yang membawa atau menyebarkannya. Pertanyaan kedua, corak Islam seperti apakah yang masuk ke Nusantara. Pertanyaan terakhir, ketiga, bagaimanakah bentuknya sekarang. Pertanyaan pertama dan kedua dapat dijawab secara teoretis melalui bukti-bukti arkeologi mutakhir yang telah ditemukan. Akan halnya pertanyaan terakhir dapat dijawab melalui kaca mata budaya yang masih dapat disaksikan di beberapa tempat di Nusantara.



Hingga kini tidak ada satu pun bukti tertulis yang secara tersurat menyatakan kepastian kapan Islam masuk di Nusantara dan pembawa atau penyebabnya. Kajian mengenai dugaan masuknya Islam di Nusantara hingga saat ini baru didasarkan atas bukti tertulis dari nisan kubur serta beberapa naskah yang menuliskan para saudagar Islam (Tibbets 1957) yang ditemukan di beberapa tempat di Nusantara, seperti di Aceh, Barus di pantai barat Sumatera Utara, dan Gresik di Jawa Timur.

Islamisasi di Nusantara terkait erat dengan sejarah Islam yang hingga kini belum “lengkap” ditulis dan bersifat masih parsial. Sejak jauh hari, keadaan itu ditengarai Presiden Sukarno yang menyatakan bahwa sikap ulama Indonesia kurang atau bahkan tidak memiliki pengertian perlunya penulisan sejarah (Suryanegara 1999: 24). Selain itu, terdapat kendala lain untuk menuliskan sejarah yakni kurangnya data atau sumber tertulis dan luas geografis Indonesia sehingga untuk mengintegrasikan data dari berbagai daerah juga sulit.

Mengenai asal-muasal Islam masuk Nusantara terdapat beberapa pendapat dengan argumen masing-masing. Ada yang berteori bahwa Islam datang dari Arab, Persia, India, bahkan ada yang menyatakan dari Tiongkok (Drewes 1983: 8; Hurgronje 1996: 6). Meski pendapat tersebut berbeda-beda, terdapat sisi kesamaan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui “perantaraan” kaum saudagar. Mereka berniaga sambil menyebarkan syi’ar Islam yang dalam Hadist dikatakan, “Sampaikanlah dari saya ini walau hanya satu ayat.” Kemudian setiba di Nusantara, barulah disebarkan oleh ulama-ulama lokal atau para wali seperti Wali Sanga di Tanah Jawa.

Tidak ada satu pun pendapat yang pasti mengenai kapan Islam masuk ke Nusantara jika mengingat hubungan berbagai kerajaan di Nusantara dengan TimurTengah, Persia, India, danTiongkok sudah berlangsung lama. Para saudagar dari tempat-tempat tersebut membawa dan mengambil komoditi perdagangan dari dan ke Nusantara. Dari Nusantara mereka membawa hasil-hasil hutan yang laku dijual di pasaran, seperti kapur barus, kemenyan, dan rempah-rempah. Dari tempat asalnya mereka membawa barang-barang kaca, minyak wangi yang ditempatkan dalam botol kecil, keramik, kain sutra atau brokat, batu-batu mulia dan barang-barang perunggu. Di antara barang-barang dagangan, ada

juga barang-barang untuk keperluan upacara ajaran Hindu dan Buddha seperti genta, *kakkhara* (ujung tongkat bhiksu/pendeta), dan arca-arca perunggu. Sebelum Islam, para saudagar, pendeta, dan bhiksu menyebarkan budaya India di Nusantara, termasuk penyebaran ajaran Hindu dan Buddha.¹ Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi, Sriwijaya pernah menjadi pusat pengajaran Buddha. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa Islam masuk ke Nusantara juga dibawa oleh para saudagar.

Sumber-sumber tertulis yang merupakan catatan harian orang-orang Tionghoa, Arab, India, dan Persia menginformasikan bahwa tumbuh dan berkembangnya pelayaran dan perdagangan melalui laut antara Teluk Persia dengan Tiongkok sejak abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah disebabkan oleh dorongan pertumbuhan dan perkembangan pelbagai emporium besar di ujung barat dan ujung timur benua Asia. Di ujung barat terdapat emporium Muslim di bawah kekuasaan Khalifah Bani Umayyah (660–749 Masehi), dan Bani Abbasiyah (750–870 Masehi) (Hourani 1951). Di ujung timur Asia terdapat kekaisaran Tiongkok di bawah kekuasaan Dinasti T'ang (618–907 Masehi) (Tjandrasasmita dalam Soebadio dan Sarvas [ed.] 1978: 143). Kedua emporium itu mungkin yang mendorong majunya pelayaran dan perdagangan Asia, demikian pula peranan Sriwijaya sebagai sebuah emporium yang menguasai Selat Malaka pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Emporium itu merupakan kerajaan maritim yang menitikberatkan pada pengembangan pelayaran dan perdagangan. Demikian berkuasanya emporium Sriwijaya sehingga dapat menentukan besar-kecilnya cukai yang harus dibayarkan oleh kapal-kapal niaga yang melewati wilayah kekuasaannya.

Nama Persia yang sekarang disebut Iran, menurut catatan harian Tionghoa adalah *Po-sse* atau *Po-ssu* yang biasa diidentifikasi atau dikaitkan dengan kapal-kapal Persia, dan sering pula diceritakan sama dengan sebutan *Ta-shih* atau *Ta-shih K'uo* yang biasa diidentifikasi dengan Arab. *Po-sse* dapat juga

1 Pada 2004, di perairan Laut Jawa sebelah utara Cirebon, Jawa Barat, ditemukan runtuhan sebuah kapal yang diduga tenggelam karena kelebihan muatan. Berdasarkan pertanggalan keramik dan teknologi pembuatannya, kapal yang tenggelam tersebut berasal dari sekitar abad ke-10 Masehi. Muatannya bermacam-macam yang berasal dari berbagai tempat di luar Nusantara. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, dapat diduga bahwa barang-barang muatan kapal tersebut berasal dari daerah Persia, India, dan Tiongkok. Sebagian besar merupakan barang dagangan, dan sebagian lagi merupakan barang-barang untuk upacara keagamaan atau benda-benda keagamaan (lihat Utomo 2007: 4–15).

dimaksudkan dengan orang Persia yaitu orang Zoroaster yang berbicara dalam bahasa Persi— orang-orang Muslim asli Iran—yang dapat pula digolongkan pada orang-orang yang disebut *Ta-shih* atau orang Arab. Orang Zoroaster dikenal oleh orang Arab sebagai orang Majus yang merupakan mayoritas penduduk Iran setelah pengislaman.

Kehadiran orang Po-ssu bersama-sama orang Ta-shih di bandar-bandar sepanjang tepian Selat Malaka, pantai barat Sumatera, dan pantai timur Semenanjung Tanah Melayu sampai ke pesisir Laut Tiongkok Selatan diketahui sejak abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Mereka dikenal sebagai saudagar dan pelaut ulung. Sebuah catatan harian Tionghoa yang menguraikan perjalanan pendeta Buddha I-tsing tahun 671 Masehi dengan menumpang kapal Po-sse dari Kanton ke arah selatan, yaitu ke Fo-shih (Sriwijaya). Catatan harian itu mengindikasikan kehadiran orang Persia di bandar-bandar di pesisir laut Tiongkok Selatan dan Nusantara. Kemudian pada 717 Masehi diberitakan pula tentang kapal-kapal India yang berlayar dari Srilanka ke Sriwijaya dengan diiringi 35 kapal Po-sse (Poerbatjaraka 1952). Namun, pada 720 Masehi kapal-kapal itu kembali ke Kanton karena banyak yang mengalami kerusakan.

Hubungan pelayaran dan perdagangan antara bangsa Arab, Persia, dan Sriwijaya rupa-rupanya dibarengi dengan hubungan persahabatan di antara kerajaan-kerajaan di kawasan yang berhubungan dagang. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa surat Maharaja Sriwijaya yang dikirimkan melalui utusan kepada Khalifah Umar ibn 'Abd. Al-Aziz (717–720 Masehi). Isi surat tersebut antara lain tentang pemberian hadiah sebagai tanda persahabatan serta permohonan kepada khalifah agar mengirimkan mubalig ke Sriwijaya untuk mengajarkan Islam (Azra 1994).

Bukti-bukti arkeologis yang mengindikasikan kehadiran saudagar Po-sse di Nusantara—Sriwijaya dan Malayu—adalah temuan artefak dari gelas dan kaca berbentuk vas, botol, jambangan, dan lain-lain di Situs Barus, pantai barat Sumatera Utara (Guillot 2020), dan situs-situs di pantai timur Jambi yaitu Muara Jambi, Muara Sabak, dan Lambur. Barang-barang tersebut merupakan komoditi penting yang didatangkan dari Persia atau Timur Tengah dengan pelabuhannya antara lain Siraf, Musqat, Basra, Kufah, Wasit, al-Ubulla, Kish, dan Oman. Dari

Nusantara, para saudagar tersebut membawa hasil bumi dan hasil hutan. Hasil hutan Sumatera yang sangat digemari pada masa itu adalah kemenyan dan kapur barus.

Hubungan pelayaran dan perdagangan yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan politik itu selanjutnya menimbulkan proses Islamisasi. Dari proses Islamisasi ini pada abad ke-13 Masehi kemudian muncul kerajaan Islam Samudera Pasai dengan sultan pertama Malik as-Saleh yang mangkat pada 1297 Masehi. Menurut kitab *Sejarah Melayu* (Hadidjaja 1951: 40), *Hikayat Raja-raja Pasai*, dan catatan harian Marco Polo yang singgah di Peurlak pada 1292, Samudera Pasai bukan hanya kerajaan Islam pertama di Nusantara, tetapi juga di Asia Tenggara. Kehadiran kerajaan Islam itu semakin mempererat hubungan antara Sumatera dan negara-negara di Arab dan Persia.

Pada pertengahan abad ke-14, Ibn Battuta singgah di Pasai yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Malik al-Zahir. Dalam catatan hariannya disebutkan bahwa Sultan adalah seorang penganut Islam yang taat dan ia dikelilingi oleh para ulama dan dua orang Persia yang terkenal, yaitu Qadhi Sharif Amir Sayyid dari Shiraz dan Taj ad-Din dari Isfahan. Ahli-ahli tasawuf atau kaum sufi yang datang ke Samudera Pasai dan juga ke Malaka tempat para sultan menyukai ajaran “manusia sempurna” atau “insan al-kamil” mungkin sekali dari Persia.

Beberapa ratus tahun sebelum Kesultanan Samudera Pasai, di wilayah Aceh telah berdiri kerajaan bercorak Islam yaitu Kerajaan Peurlak. Kerajaan itu berdiri pada tahun 225 Hijriah atau 845 Masehi dengan rajanya Sultan Sayid Maulana Abdal-Aziz Syah keturunan Arab-Quraisy yang berpaham Syi’ah.²

Intensitas hubungan perdagangan antara Persia dan kerajaan di Nusantara demikian tinggi. Tidak mustahil di beberapa tempat yang dikunjungi saudagar Persia, tinggal dan menetap pula orang-orang Persia. Di tempat itu timbul juga kontak antarbudaya yang berbeda, dan tidak mustahil ada juga penganut Islam Syi’ah. Hal itu dapat diketahui dari adat istiadat dan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum Syi’ah.

2 Saya meragukan penguasa itu keturunan Arab-Quraisy karena di bagian belakang namanya menggunakan gelar *syah*. Gelar ini biasa dipakai oleh para penguasa Persia atau yang berasal dari Persia.

7.2 Islam di Maluku

Menurut catatan para pengelana dari Barat, Islam masuk di timur Nusantara—khususnya Maluku dan Ternate—pada sekitar 1460. Tomè Pires yang menulis *Suma Oriental* pada 1512–15 menyatakan bahwa Islam telah berada di Kepulauan Maluku sejak 50 tahun yang lalu (Jacobs [ed.] 1971: 334).³ “Kabarnya kepercayaan Mohammedisme di Kepulauan Maluku sudah dimulai sejak limapuluh tahun yang lalu. Raja-raja di kepulauan ini adalah pengikut Muhammad, meski tidak terlalu terlibat dalam kegiatan sektenya,” tulis Pires (Cortesaõ [ed.] 2015: 295). Sementara itu, Antonio Galvao yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Portugis pertama, mencatat bahwa Islam telah masuk ke Ternate “sekitar 80 tahun yang lampau” (Galvao 1971). Antonio Pigafetta yang tiba di Tidore pada 1521 menyatakan bahwa orang Islam telah ada di Maluku Utara pada waktu itu (Masinambow 1987).

Terdapat dua versi mengenai masuknya Islam di Maluku. Versi pertama menceritakan bahwa ada seorang putri bangsawan Jawa datang ke Ternate dan kawin dengan Raja Ternate, Tidore Vongi. Dari perkawinan itu, raja dan pengikutnya otomatis menjadi muslim. Versi lain mengatakan bahwa Raja Ternate bertandang ke Malaka. Dalam perjalanan kembali ke Ternate, ia singgah di Jawa dan mengawini salah seorang putri keluarga raja yang berkuasa. Setiba di Ternate, ia kemudian mengislamkan masyarakat Ternate. Raja di Maluku yang pertama-tama memeluk Islam adalah Raja Ternate pada sekitar 1460 (Jacobs 1971). Raja yang dimaksud dalam kedua versi tersebut adalah Gapi Baguna atau Kaicil Sia yang memerintah pada 1432–65.

Cerita tersebut menunjukkan bahwa Islam berkembang di Maluku dimulai dari raja kemudian menyusul rakyat di kerajaan itu. Raja atau penguasa belajar langsung pada mubalig di Tanah Jawa. Setelah itu hasil pengetahuannya disebarkan di tempat asalnya. Di Tanah Jawa kelompok masyarakat pemeluk Islam biasanya terdapat di daerah pesisiran pantai utara Jawa, di bandar-bandar seperti Jepara, Lasem, Tuban, dan Gresik. Bandar-bandar tersebut merupakan tempat para saudagar dari berbagai bangsa dan agama bertemu. Hal itu berbeda dengan kerajaan yang lain di Nusantara yang menunjukkan Islam berkembang terlebih

3 Kurun waktu “50 tahun yang lalu” tentu harus dihitung ke belakang sejak Pires menulis bukunya.

dulu di lingkungan masyarakat, setelah itu baru diikuti penguasa kerajaan.

Naidah, putri istana Ternate dan penulis *Hikayat Maluku*, menginformasikan bahwa raja pertama Kerajaan Ternate, Mashur Malamo, putra Ja'far as-Sadik telah menganut Islam.⁴ Namun, menurut Valentijn, sejak Raja Komala atau Tsyili Naay (1304–17) di Ternate semasa pemerintahan Sida Arif Malamo atau Tsyili Aiya (1322–31) sudah ditemui orang-orang Arab, Melayu, dan Jawa yang beragama Islam (Masinambow 1987). Dengan demikian, di kalangan masyarakat Ternate saat itu sudah ada pemeluk Islam.

Berkaitan dengan versi tersebut, dalam tradisi Maluku dinyatakan bahwa Raja Ternate yang ke-12, Molomatea (memerintah 1350–7), bersahabat dengan seorang Muslim Arab yang datang ke Maluku dan memberikan petunjuk bagaimana cara membuat kapal. Informasi lain dari tradisi Maluku adalah bahwa pada masa pemerintahan Raja Marhum (Gapi Baguna; memerintah 1432–65), datang seorang mubalig dari Jawa. Ia mengajarkan menulis indah (kaligrafi) dan membaca al-Quran. Apa yang diajarkannya menarik perhatian Raja, keluarga, dan masyarakatnya sehingga tertarik untuk masuk Islam (Tjandrasasmita 2000). Meskipun demikian, agama Islam belum begitu berkembang pada waktu itu.

Baik di Maluku Utara maupun Maluku Tengah, Islam masuk melalui dua jalan yang sesuai dengan jalur pelayaran perdagangan rempah. Jalur pelayaran yang cukup dikenal melalui selatan. Jalur pelayaran itu memang telah sangat ramai jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Jalur pelayaran dan perdagangan itu sangat populer di kalangan saudagar yang berasal dari pelabuhan-pelabuhan di Sumatera dan Jawa.⁵ Jalur pelayaran itu membuat bandar-bandar di Maluku Tengah, seperti Hitu, menjadi penting jauh sebelum menghasilkan rempah-rempah. Pada masa itu rempah dibawa dari pulau penghasil di Maluku Utara dan Banda, kemudian dipasarkan melalui bandar-bandar di Maluku Tengah. Melalui jalur pelayaran itu daerah Maluku Tengah mendapat pengaruh kebudayaannya dari pusat-pusat agama Islam di Pulau Jawa seperti dari Gresik dan Demak di

4 Menurut *Hikayat Ternate*, pengislaman terjadi pada 643 Hijriah atau 1250 Masehi. Apabila dikaitkan dengan dikenalnya rempah jauh sebelum tarikh Masehi, boleh jadi apa yang dituliskan dalam *Hikayat Ternate* ada benarnya. Bukti arkeologis yang ditemukan di dasar laut perairan Cirebon menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-10 ada saudagar Muslim di perairan Nusantara (lihat van der Crab 1878: 381–493).

5 Lopian, A.B., 1965. hlm. 67-72

Jepara.

Dalam catatannya, Galvao menunjukkan bahwa salah satu jalur pelayaran yang penting dan aman dalam abad ke-16 adalah jalur utara Nusantara, melalui Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, atau melalui Kerajaan Sulu di Mindanao, kemudian menuju Malaka. Selain itu, dari Sulawesi Utara dapat membelok ke selatan melalui Selat Makassar hingga ke Pulau Jawa. Jalur pelayaran ini juga dapat terus ke pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok. Selanjutnya Galvao menyebutkan bahwa agama Islam yang datang di Maluku Utara sebagian berasal dari Malaka dan dibawa oleh saudagar dan mubalig melalui jalur pelayaran tersebut (Leirissa 1973: 4).

Berbagai pendapat mengenai masuknya Islam di Maluku mempunyai satu kesamaan, yaitu bahwa penyebaran Islam mengikuti jalur-jalur niaga pada masa itu, dengan sasaran utama kota-kota pantai dan bandar-bandar perniagaan. Bagaimana, mengapa dan kapan penduduk Maluku mulai menganut agama Islam? Tidak terjadi kesepakatan bulat di kalangan para pakar sejarah dan arkeologi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hal yang dapat disepakati adalah bahwa para saudagar asing dari Arab, Persia, Gujarat, Tiongkok, berikut para saudagar Jawa dan Melayu yang telah memeluk agama Islam, merupakan para penyebar agama Islam di Kepulauan Maluku pada masa awal era perdagangan rempah sekitar abad ke-14/15 Masehi.

Siapa yang dapat direpresentasikan para saudagar asing seperti yang dimaksud dalam premis sejarah tersebut? Syekh Mansur dari Arab yang bermukim di Tidore pada masa pemerintahan Kolano Caliat, dan Datu Maulana Husein dari Gresik yang bermukim di Ternate pada masa pemerintahan Kolano Marhum merupakan saudagar asing dan Nusantara yang melakukan Islamisasi Maluku.

Proses berkembangnya Islam di Maluku didorong oleh pergaulan masyarakat setempat. Sebagai kota bandar yang banyak dikunjungi saudagar luar, sudah barang tentu terjadi interaksi antara para pendatang dan penduduk pribumi. Akibat interaksi tersebut terjadi pembauran yang diikuti oleh perkawinan di antara pendatang dan penduduk pribumi. Proses itu cukup signifikan dalam mempercepat penyebaran Islam di kalangan penduduk Maluku. Secara

keseluruhan dapat dipandang bahwa kombinasi semacam itu dapat berlangsung di alam Maluku karena atmosfir pemerintahan para penguasa di kawasan ini cukup kondusif.

Masalah yang paling menimbulkan perdebatan panjang di kalangan para pakar adalah tentang kapan Islamisasi Maluku mulai berlangsung. Seperti yang telah dikemukakan, banyak pendapat yang mengatakan satu sama lainnya berbeda. Namun para pakar sejarah umumnya mengacu pada sumber-sumber asing (Eropa), terutama Portugis, yang menetapkan bahwa tahun 1486, saat penabalan Sultan Zainal Abidin dari Ternate, "resmi" merupakan awal tarikh Islam di Maluku. Pada saat itu, secara politis dan budaya Zainal Abidin menanggalkan gelar *kolano* yang biasa dipakai oleh para penguasa sebelumnya, dan menggantinya dengan gelar *sultan* yang Islami.

Dalam laporannya, De Clerq menyebutkan bahwa pada 1334 dan 1372 di Kerajaan Tidore telah naik tahta dua orang *kolano*, yaitu Nuruddin dan Hasan Syah. Keduanya tidak menyangkan gelar *sultan*, tetapi di belakang namanya terdapat gelar *syah* atau *shah* yang menunjukkan bahwa penyangkannya adalah penguasa di Persia. Di Kerajaan Samudera Pasai dan Malaka para penguasanya juga memakai gelar *syah* (seperti Mudaffar Syah, Mansur Syah, dan Mahmud Syah). Belakangan di Ternate gelar *sultan* dipakai bersamaan dengan gelar *syah* seperti Sultan Mudaffar Syah.

Bentuk dan motivasi masuknya Islam ke Maluku tidak bisa lepas dari jalur pelayaran dan perdagangan dari Malaka dan Jawa. Mengambil titik berangkat dari situ, dapat dilihat metode dasar yang dipakai para khalifah, yakni melalui aktivitas perdagangan. Namun, kemudian mereka berhasil beradaptasi dengan masyarakat dan membangun komunikasi dengan para penguasa lokal di suatu wilayah, dan juga menggunakan mekanisme kebudayaan sebagai cara penyesuaian diri secara efektif. Setidaknya, dari sudut pandang kebudayaan setiap jejak yang ditinggalkan Islam di satu daerah juga meninggalkan bukti bahwa Islam sangat intens berdialog dengan kebudayaan masyarakat setempat. Contoh paling sederhana bisa dilihat pada peninggalan masjid khas Jawa, Banten, atau juga masjid khas Maluku (seperti Masjid Wapauwe di Hila/Hitu). Titik berangkat itu yang membuat Islam diterima oleh masyarakat di Kerajaan

Ternate tanpa masalah yang berarti. Kebudayaan orang Ternate malah dijadikan sebagai batu loncatan untuk memperluas ajaran Islam sampai ke pelosok negeri dan pulau-pulau di sekitarnya. Para (calon) ulama Ternate, dengan menumpang kapal pelaut/saudagar rempah, pergi ke Gresik dan Tuban di Jawa Timur untuk memperdalam ilmu Islam, dan kembali menyebarkan Islam di negerinya.

Pendekatan yang sama juga berlaku ketika Islam masuk ke Ambon melalui Hitu. Ketika itu Hitu merupakan bandar utama di Pulau Ambon. Dialog yang intens dengan kebudayaan masyarakat setempat kembali terjadi di sana. Aktivitas tersebut merupakan bukti bahwa perdagangan atau aspek ekonomi hanya merupakan alat yang mendorong Islam bergerak dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan jalur pelayaran dan perdagangan. Namun, kebudayaan menjadi alat untuk membangun rasa keislaman yang tinggi dalam hidup masyarakat di mana Islam berkembang dan dianut.

Pada waktu Islam masuk ke Nusantara kekuatan penjajahan bangsa Eropa belum lagi kuat, dan perdagangan rempah-rempah masih didominasi oleh para saudagar Tionghoa dan Arab. Ketika masuk ke Nusantara, Islam menguasai jalur perdagangan yang penting seperti pesisir timur Sumatera di sekitar Selat Malaka, pesisir barat Semenanjung Tanah Melayu, pesisir utara Jawa, Brunei, Kepulauan Sulu dan Mindanao, dan Maluku. Jalur perdagangan kayu cendana di Pulau Timor masih tetap menjadi wilayah non-Islam. Jalur perdagangan itu kurang diminati saudagar Islam, meskipun kayu cendana termasuk salah satu barang komoditi yang digemari oleh orang-orang dari Asia Barat (Persia) dan India.

Ketika Islam atau para saudagar muslim memasuki *Moloko Kie Raha*, di wilayah itu terjadi ketegangan di antara kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore serta dengan Kerajaan Jailolo. Situasi itu tidak bisa diabaikan sebagai bagian dari fakta sejarah ketika Islam berjumpa dengan masyarakat di sana. Tetapi satu hal yang menarik adalah Islam Maluku yang perkembangannya dimulai dari Ternate, meluas ke Pulau Ambon dengan pusatnya di Kerajaan Hitu, dan terus berkembang ke daerah Lease. Seiring dengan meluasnya pengaruh Islam di Lease, Kerajaan Iha di Saparua menjadi simbol kekuatan Islam baru di Maluku bagian tengah.

Islamisasi Ternate, Hitu, dan Lease, berlangsung secara wajar karena

kekuatan perdagangan saudagar Muslim mulai terbentuk di kawasan itu. Hitu menjadi penting karena banyak saudagar mendapat pasokan air tawar dari sana (Abdoerahman 1973). Apalagi Hitu pada suatu masa pernah menjadi bandar utama di daerah Maluku bagian tengah sebelum Ambon dibuka sebagai bandar utama oleh VOC. Fakta ini sama seperti ketika Banda menjadi bandar utama yang cukup penting karena merupakan pemasok ikan yang enak kepada para saudagar serta penyedia pala dan bunga pala yang merupakan komoditi penting kala itu.

Pendekatan budaya semacam itu melahirkan simpati kelompok masyarakat lokal yang semula memeluk ajaran asli menjadi penganut Islam yang taat. Bahkan hal itu pun tampak ketika negeri-negeri Hatuhaha Amarima menjadi pusat peradaban Islam tertua di Lease. Untuk yang satu ini memang perlu penelitian lebih mendalam sebab Islam Hatuhaha Amarima memiliki tatanan ritus Islami yang khas dan kontekstual seperti pada ibadah puasa di bulan Ramadhan dan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah.

Di Maluku—terutama di Tulehu, Liang, Tial, Hila, Latu, Kasieh, Lisabata, Pelauw, Ori, Kailolo, dan Iha—dapat ditemukan orang-orang yang menganut agama Islam menggunakan bahasa ibu mereka dalam komunikasi sehari-hari. Namun, ketika menjalankan ritual agama Islam mereka menggunakan bahasa Arab. Kondisi seperti itu tidak lagi ditemukan pada negeri-negeri yang masyarakatnya menganut agama Kristen, kecuali di Maluku Tenggara, tetapi juga sudah mulai ditinggalkan oleh generasi mudanya. Pada sisi ini, Islam Maluku adalah suatu hasil adaptasi kebudayaan yang sangat penting. Dalam adaptasi itu bagaimana struktur bahasa setempat dijadikan sebagai mekanisme penyebaran ajaran agama dan ditempatkan sebagai unsur yang penting. Hal itu membuat corak budaya di dalam Islam begitu kuat, karena itu agamanya menjadi mudah diterima dan dipandang sebagai agama yang “membawa damai.” Unsur kedamaian yang dirasakan itu adalah ketika masyarakat tetap berkomunikasi dengan bahasanya sehingga mereka tidak merasa tersisihkan dari kelompok besar.

Dalam menentukan corak budaya pada Islam-Maluku perlu dipertimbangkan kembali beberapa hal seperti sejauh mana pemanfaatan ritus-ritus adat setempat sebagai bentuk aktualisasinya. Orang Islam di Maluku tidak senang dengan struktur pemerintahan dalam bentuk kerajaan seperti diperkenalkan pendatang

Eropa. Karena itulah muncul anggapan bahwa sebagian masyarakat yang masih berpegang pada adat mengandung unsur kafir dan haram.

Agama Islam memasuki *Moloko Kie Raha* jelas melalui aktivitas perdagangan para saudagar dan mubalig-mubalig Islam yang ikut bersama mereka. Mengenai kapan tepatnya dan di daerah mana mula-mula agama ini masuk dan berkembang tidak dapat dipastikan. Namun, yang jelas sekitar pertengahan abad ke-15 agama Islam sudah dianut dan bertumbuh pada kerajaan-kerajaan di *Moloko Kie Raha*. Menurut sejarah, pada abad ke-10/11 sudah ramai perniagaan rempah-rempah di Kepulauan Maluku, terutama cengkih dan pala, yang dilakukan orang Arab dan Persia. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-10 Masehi, Islam sudah ada di Nusantara. Melalui perantaraan para saudagar Persia, Islam diketahui sudah berkembang di Kerajaan Sriwijaya di belahan barat Nusantara.

Dalam hikayat diceritakan bahwa di Ternate telah datang seorang ulama Islam bernama Datu Maulana Husein. Ulama itu sangat pandai membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu dan menarik sehingga penduduk yang mendengarkannya jadi tertarik. Sebelum penduduk diajarkan membaca al-Qur'an, mereka diharuskan bersyahadat lebih dulu sehingga sejak saat itu mulailah penduduk Ternate masuk dan menerima Islam sebagai agamanya. Atas ajakan Datu Maulana Husein, raja Ternate saat itu, Gapi Buta menerima Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Zainal Abidin (1465–86). Setelah mangkat pada 1486, baginda disebut Sultan Marhum.

Sumber sejarah lama dan cerita rakyat secara tradisonal menyebutkan bahwa semua sultan yang memerintah di empat kerajaan utama di *Moloko Kie Raha* berasal dari keturunan Ja'far as-Sadiq, seorang Arab yang konon masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Ja'far as-Sadik kawin dengan puteri Nur Safah, yang tiba di Ternate pada 10 Muharram 470 Hijrah (kira-kira 1015 Masehi). Selanjutnya diceritakan bahwa dari perkawinan itu mereka dikaruniai delapan orang anak, empat putra dan empat putri. Keempat putra ini menjadi sultan-sultan pertama dari keempat kerajaan yaitu Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan.

1. Kerajaan Ternate; sultan pertama adalah Sultan Masyhur Malamo.
2. Kerajaan Tidore; sultan pertama adalah Sultan Suhadjati, bergelar Muhammad Bakil pada tahun 502 H.

3. Kerajaan Jailolo; sultan pertama adalah Darajati.
4. Kerajaan Bacan; sultan pertama adalah Kaicil Buka.

Berdasarkan berita Arab yang ditulis oleh para penulis Arab yang ikut berlayar dengan saudagar, di antaranya berita dari ahli geografi Arab Mas'udi, dapat diduga bahwa orang Arab telah sampai ke Nusantara pada abad ke-10.⁶ Sebelum bangsa Eropa datang, orang Persia yang memegang kendali perniagaan di Selat Malaka telah tiba di Tiongkok untuk berdagang. Selanjutnya disebutkan bahwa di Guangdong (Kanton) terdapat komunitas orang Persia dan pos perniagaan mereka.

Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan di *Moloko Kie Raha*. Dalam perkembangannya, kedua kerajaan tersebut bersaing untuk memperebutkan hegemoni politik dan ekonomi. Tidak jarang mereka melibatkan kekuatan pendatang dari Eropa, seperti Portugis, Spanyol dan Belanda. Di balik usaha memberikan bantuan kepada kerajaan lokal, kekuatan pendatang asal Eropa juga berambisi menguasai perdagangan rempah di kawasan itu dengan praktik monopoli. Persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore diperburuk oleh campur tangan bangsa Portugis yang membantu Ternate dan bangsa Spanyol yang membantu Tidore. Setelah memperoleh keuntungan, kedua bangsa Barat tersebut bersepakat menyelesaikan persaingan mereka dalam Perjanjian Saragosa yang ditandatangani pada 22 April 1529.⁷ Berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan menguasai Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku.

Walaupun sedang bersaing memperebutkan hegemoni di kawasan *Moloko Kie Raha*, kerajaan-kerajaan di Maluku tetap tidak menginginkan bangsa-bangsa Eropa mengganggu aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Sikap tersebut

6 Mas'udi dalam catatannya menyebutkan bahwa raja Zabag yang disebut Maharaja menguasai banyak pulau, di antaranya Kalah, Sribuza, dan pulau-pulau lainnya di luar Tiongkok (lihat Ferrand 1913/14: 56–7).

7 Perjanjian Saragosa (Saragossa atau Zaragoza), ditandatangani pada 22 April 1529, antara pihak Spanyol dan Portugis yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 *marine leagues* atau 17 sebelah timur Kepulauan Maluku. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugal yang diprakarsai oleh Paus setelah melihat persaingan perebutan koloni di antara kedua bangsa itu. Melalui perjanjian itu dicapai hasil yang lebih terperinci dari kedua belah pihak.

merupakan salah satu ciri kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Oleh karena itu, mereka selalu mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan Eropa, misalnya perlawanan Sultan Khairun (1550–70) terhadap Portugis yang dilanjutkan oleh putranya, Sultan Baabullah (1570–83). Perlawanan Baabullah mampu memaksa Portugis meninggalkan Maluku dan memindahkan kegiatannya di Flores dengan mendirikan benteng di Lohayong. Adapun perlawanan terhadap bangsa Belanda dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Nuku (1780–1805) di Tidore.

Islam masuk dan berkembang di Tidore sejak kedatangan seorang pendakwah dari tanah Arab bernama Syekh Mansur. Atas ajakan Syekh Mansur, Raja Tidore yang bernama Kolano Caliatu masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Jamaluddin (1495–1512) (Amal 2016: 468).

Dalam proses penyebaran Islam ke Sulu dan Mindanao di kepulauan Filipina, Kesultanan Ternate memegang peranan penting. Menurut berita bangsa Spanyol, pada 1857 para penyebar Islam ke Mindanao datang dari Brunei dan Ternate. Di Mindanao para penyebar Islam itu mendirikan madrasah dan masjid.

Masuknya Islam di daerah Pulau Seram Barat dimulai dari daerah Latu dan Bualoy. Disebutkan bahwa penyebar Islam di daerah itu adalah Maulana Zainal Abidin. Penduduk asli pemeluk Islam pertama adalah Kapiten Nunusaku (Kapitan Iho Lussy) yang berguru kepada Maulana Zainal Abidin. Setelah Iho Lussy memperoleh ilmu agama Islam yang cukup, ia pun aktif berdakwah seperti gurunya. Sebagian besar penduduk di daerah Seram memeluk agama Islam berkat jasa Iho Lussy dan gurunya. Setelah Kapitan Iho Lussy meninggal dunia, tugas dakwah Islam dilanjutkan oleh anaknya yaitu Muhammad Lussy.

Masuknya Islam di daerah Maluku Tengah melalui saudagar Islam yang datang dari Jawa Timur. Pusat pendidikan Islam di Jawa Timur sesudah keruntuhan Majapahit adalah Gresik. Dari Gresik itulah ulama Islam bersama para saudagar berdatangan ke Pulau Ambon. Kala itu, Hitu sudah merupakan bandar besar yang ramai dikunjungi saudagar dari berbagai tempat di Nusantara. Oleh karena itulah Hitu menjadi pusat penyebaran Islam pada daerah sekitarnya pada 1500. Sementara itu, masuknya Islam di Pulau Kei diduga berlangsung pada tahun yang sama.

Dengan diperkenalkannya agama Islam kepada penduduk *Moloko Kie Raha*, mengakibatkan timbulnya proses islamisasi. Proses masuk dan berkembangnya

agama Islam di lingkungan sebuah institusi kerajaan ini berpengaruh pada bidang politik pemerintahan sehingga timbul kerajaan Islam. Ajaran Islam juga memperkaya hukum adat setempat dengan memasukkan hukum-hukum Islam. Hukum Islam tampak bergandengan dengan hukum adat setempat. Penggunaan aksara Arab oleh raja-raja, bangsawan, dan penduduk setempat memperkaya pula kosa kata bahasa daerah Maluku. Dari sudut kultur, agama Islam ikut pula menentukan corak kebudayaan masyarakat Maluku yang islami.

Pada 1564, disepakati suatu perjanjian antara Portugis dan Ternate. Untuk merayakan penandatanganan perjanjian itu, Portugis mengundang Sultan Khairun datang ke kapal Portugis. Yang tidak disukai oleh Sultan Khairun adalah usaha kristenisasi oleh orang Portugis terhadap rakyatnya yang sudah memeluk Islam. Pada saat perjamuan di atas kapal Portugis itu, Sultan Khairun ditikam secara keji oleh salah seorang pengawal/adik Gubernur De Mesquite sehingga Baginda tewas.

Putra Sultan Khairun, yaitu Baabullah, naik tahta menggantikan ayahnya. Sultan Baabullah (1570–83) memaklumkan perang kepada Portugis. Sultan Tidore berdiri di belakang Ternate. Benteng pertahanan Portugis di Ambon (Victoria) diserbu pasukan Sultan Baabullah sehingga bendera Portugis di benteng ini diturunkan orang Ternate dan Tidore. Kemudian benteng Portugis dibakar hingga habis dan orang Portugis yang masih hidup menyingkir ke Malaka.

Hingga 1580, Ternate di bawah Sultan Babullah meluaskan kekuasaannya ke pulau-pulau sekelilingnya sehingga membentang dari Pulau Mindanao (Filipina) di utara hingga ke Sumbawa di selatan, dan dari Papua di timur hingga ke Sulawesi di barat termasuk Pulau Buton. Ketika sampai di Buton, Ternate juga mengirimkan para pendakwah untuk mengajak penduduk Buton, Makassar, dan Gowa masuk Islam. Sultan Babullah mangkat pada 1583.

Sejak Islam masuk dan berkembang di wilayah *Moloko Kie Raha* hingga jauh ke wilayah sekitarnya, banyak dibangun masjid sebagai rumah ibadah. Bentuk atap bangunannya bersusun tiga hingga lima sebagaimana bentuk atap bangunan masjid di Nusantara. Dengan demikian dilihat dari sudut pandang kebudayaan, agama Islam turut menentukan corak kebudayaan di daerah Maluku.

KERAJAAN ISLAM DI MALUKU

8.1 Kerajaan Islam di Maluku

Dalam pembicaraan ini yang dimaksud dengan Maluku adalah *Maluku* [*Maloko*] *Kie Raha* yang pusat ke-*kolano*-annya di wilayah yang sekarang masuk Provinsi Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.¹ Konfederasi yang dikenal dengan istilah *Maloko Kie Raha* yang berarti 'empat gunung Maluku', diduga telah muncul pada sekitar abad ke-14. Meskipun luas wilayahnya hingga ke Sulawesi di barat dan Papua di timur, namun wilayah perluasan itu tidak tercakup dalam istilah Maluku yang hanya mengacu pada keempat pusat *kolano* tersebut.

Adanya institusi kerajaan yang memakai istilah *kolano* tersebut merupakan indikasi bahwa masyarakat setempat telah mengenal tatanan kemasyarakatan yang sudah maju yaitu telah mengenal peradaban. Peradaban selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat urban yang berbeda dengan masyarakat praindustri (Banerjee 2005). Peradaban pada dasarnya

1 Menurut Rumphius yang dimaksud dengan Maluku adalah pulau-pulau Ternate, Tidore, Motir (Motijl), Makian, dan Bacan, sedangkan keempat raja di utara, yaitu raja Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan, disebut raja-raja Maluku dengan gelar *kolano* (lihat Rumphius 1983).

merupakan bentuk masyarakat yang 'modern' masyarakat perkotaan, industri dan jasa. Bentuk masyarakat lainnya dikategorikan sebagai masyarakat praindustri seperti *hunting and gathering*, *pastoral*, dan *agrarian*. Kesemua masyarakat dilihat dari evolusi teknologi dan digolongkan sebagai bentuk kehidupan dalam sistem teknologi.

Kata *peradaban*—alih bahasa dari *civilization* (Inggris)—merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut bagian-bagian atau unsur-unsur suatu kebudayaan yang dianggap halus, maju, dan indah, misalnya kesenian baik seni lukis, seni sastra maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, kepandaian menulis, dan organisasi institusi kerajaan atau kenegaraan. Istilah itu juga sering digunakan untuk menyebut kebudayaan yang memiliki sistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan masyarakat perkotaan yang kompleks serta modern.

Perkembangan sistem teknologi sangat erat berkaitan dengan pola hidup masyarakat. Masyarakat modern yang memiliki pola hidup industri dikatakan sebagai masyarakat yang berperadaban, semakin berkembang teknologinya semakin tinggi peradabannya, seperti masyarakat *post-industrial* disebut sebagai masyarakat *post-modern*. Dengan demikian peradaban mengandung suatu penilaian terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat.

Ciri suatu peradaban ditandai oleh strata sosial, kota dengan penduduk berjumlah besar, serta perkembangan ilmu matematika dan cara penulisan (Childe 1979). Kriteria lain yang digunakan untuk menilai peradaban suatu masyarakat adalah meningkatnya produksi makanan, sistem profesional, dan berkembangnya institusi-institusi modern (pendidikan, militer, politik, dan ekonomi). Apakah semua kriteria tersebut dimiliki masyarakat di Nusantara, khususnya masyarakat di Maluku?

Kota merupakan hasil perkembangan bentuk permukiman. Mulai dari permukiman sederhana yang terdiri dari beberapa rumah tinggal hingga permukiman yang kompleks dengan segala fasilitas umum. Suatu bentuk permukiman dapat disebut kota apabila memiliki kriteria tertentu. Namun, untuk menentukan kriteria itu sangat tidak mudah sehingga sering menimbulkan perbedaan pendapat. Gordon Childe (1979) mengajukan beberapa kriteria sebuah kota, yaitu:

1. Ukuran kota lebih luas dan jumlah penduduk lebih padat jika dibandingkan dengan permukiman sebelumnya
2. Komposisi dan fungsi penduduk kota sudah berbeda dengan penduduk desa
3. Produser-produser primer harus membayar pajak pada raja
4. Memiliki *monumental public building*
5. Terdapat kelas-kelas penguasa seperti pendeta, pemimpin sipil, militer, dan pengawal
6. Mengenal tulisan
7. Mengenal pencatatan atau administrasi
8. Banyak spesialis, antara lain artis, tukang, pengrajin, dan pemahat.
9. Mengenal perdagangan jarak jauh
10. Banyak ahli.

Meskipun kriteria tersebut bukan merupakan ketentuan yang berlaku mutlak namun dapat memberikan gambaran mengenai pengertian kota kuno atau awal, sekurang-kurangnya kota kuno sekitar abad ke-15. Berdasarkan kriteria tersebut, di sini dijelaskan tentang kebudayaan, lebih spesifik lagi tentang peradaban Islam, di kawasan Kepulauan Maluku pada sekitar abad ke-15/16. Peradaban Islam di sini dimaknai sebagai sebuah kompleks komunitas masyarakat industri dengan sistem pengetahuan yang berangkat dari dunia Arab yang urban. Masuk dalam kawasan Maluku yang pada masa tersebut juga memiliki sistem urban khususnya masyarakat kerajaan. Kendala yang dihadapi adalah bahwa nilai budaya dalam peradaban Islam yang industrial atau kota ini dipahami tidak hanya pada masyarakat kerajaan tetapi juga pada masyarakat petani dan nelayan.

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis dan Belanda di Maluku juga cukup menambah maraknya perubahan budaya, bahkan “memperkaya” budaya Maluku yang dalam konteks kekinian menjadi multikultur. Perkembangan agama Islam di Maluku tidak mencirikan Islam seperti di tanah asalnya, Arab atau Timur Tengah. Islam di Maluku dalam bentuk budaya tak benda (*intangible culture*), memperlihatkan unsur-unsur budaya asli Maluku.

Pada masyarakat kerajaan, seperti di Maluku, penyebaran nilai Islam terletak pada sistem ekonomi dan politik. Dalam konsep kebudayaan (Spradley 1979) disebutkan bahwa kebudayaan adalah seperangkat nilai, norma, pengetahuan dan aturan yang dimiliki oleh manusia yang digunakan untuk memahami lingkungannya dan diwujudkan dalam tingkah laku. Kebudayaan memiliki tiga wujud, yaitu pengetahuan budaya, tingkah laku budaya, dan benda budaya. Dalam memahami peradaban Islam, terjadi penafsiran oleh berbagai bentuk masyarakat baik perkotaan, dalam hal ini kerajaan, maupun nelayan dan petani.

Dalam kajian mengenai peradaban Islam di kawasan timur Nusantara, kawasan yang menjadi percontoh adalah Kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau Halmahera, Morotai, Ternate, Tidore, Moti, Makian, Bacan dan pulau-pulau Sula di bagian utara Kepulauan Maluku; Pulau Seram, Ambon, Tukangbesi, Taliabu, Buru di bagian tengah Maluku; dan Kepulauan Banda-Neira di bagian tenggara-selatan Maluku.

Pada awalnya yang disebut 'Maluku' adalah pulau-pulau yang menghasilkan cengkih yang terletak berjajar di sebelah barat Pulau Halmahera, yaitu Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Pulau-pulau itu oleh Valentijn (1727/1858: 24) disebut *eigenlijke Molukken* yang berarti 'Maluku asli'. Orang Arab menjulukinya *jazairul Muluk* yang berarti 'kepulauan raja-raja'. Halmahera termasuk dalam Kepulauan Maluku. Setelah itu pengertian Maluku diperluas lagi hingga meliputi pulau-pulau yang menghasilkan cengkih dan pala. Dalam pengertian terakhir yang mengacu pada bentukan Belanda, yang disebut 'Maluku' adalah kepulauan yang terletak di antara Sulawesi dan Papua.

Sejak abad ke-13, di Kepulauan Maluku sudah terdapat beberapa kerajaan yang disebut *kolano*, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kerajaan Jailolo sebenarnya telah hilang pada abad ke-17 karena wilayahnya telah dibagi-bagi antara kerajaan Ternate dan Tidore dengan bantuan VOC. Dari keempat pulau atau kerajaan tersebut, Ternate merupakan sebuah pulau/kerajaan yang paling dikenal hingga ke Asia Barat bahkan Eropa. Pulau itu menjadi terkenal karena hasil cengkihnya. Akibatnya, bandar Ternate banyak dikunjungi saudagar dan pelaut asing. Keadaan itu terus berlangsung hingga sekarang. Banyak kapal yang bersandar di Pelabuhan Ternate.

Akibat dari pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain dari luar Maluku, lama kelamaan masyarakat kepulauan itu mengalami kemajuan kebudayaan dan menjurus kepada peradaban. Hal itu sejalan dengan dikenalnya cengkih hingga ke dunia luar, seperti ke Asia Barat dan Eropa. Interaksi antara masyarakat di Maluku dan para pendatang meningkatkan pengetahuan masyarakat itu di segala bidang. Dalam bidang organisasi sosial-politik, misalnya, semula hanya dikenal *kolano* sebagai pemimpin kampung kemudian berkembang menjadi kesultanan.

Pengetahuan tentang keempat kerajaan tersebut dapat diperoleh dari pelbagai hikayat dan silsilah yang dihasilkan dalam kerajaan-kerajaan itu sendiri sebelum abad ke-19. Sebagai contoh adalah *Sejarah Ternate* yang ditulis oleh Naidah (van der Crab 1878), *Kronik Kerajaan Bacan* yang tidak diketahui penulisnya (Coolhas 1923), dan *Hikayat Tanah Hitu* yang ditulis oleh Imam Rijali (Valentijn 1726/1858). Dari sumber-sumber hikayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang disebut 'Maluku' adalah wilayah yang mencakupi keempat kerajaan yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

8.2 Kerajaan Hitu

Di daerah sekitar Pulau Ambon telah muncul bandar-bandar kecil yang memusat atau berkiblat ke Hitu. Pada akhirnya, Hitu muncul sebagai bandar utama di Maluku Tengah sebelum peranannya diambil alih oleh Ambon (bentukan VOC Belanda) pada pertengahan abad ke-17.² Dalam *Hikayat Tanah Hitu* disebutkan bahwa Hitu muncul sebagai pusat perdagangan secara perlahan-lahan antara 1460 hingga 1490. Seperti ditulis oleh Imam Rijali, dalam hikayat itu disebutkan mengenai asal-usul kedatangan empat kaum yang menjadi cikal-bakal penduduk Hitu. Keempat kaum itu datang dari tempat yang berbeda-beda. Kaum yang pertama datang dari pantai tenggara Pulau Seram. Mereka disebut 'Saupele' dan 'Zamanjadi'. Kelompok kedua datang dari Tuban pada 1460 dan

2 Dalam *Kakawin Nagarakertagama* (14: 5) disebutkan, "... Lagi pula, Wanda(n), Ambon atau pulau Maluku," Menurut naskah itu, Ambon telah ada sejak zaman Majapahit (abad ke-14). Ketika VOC memanfaatkannya sebagai bandar utama, di lokasi itu telah ramai oleh aktivitas pelabuhan. Kata *ambon* digunakan Imam Rijali untuk menamakan seluruh pulau itu, dan dipertegas lagi oleh Rumphius karena nama Ambon sudah digunakan oleh penduduk asli pada zamannya. Dengan demikian tidak benar jika dikatakan bahwa 'Ambon' untuk sebutan pulaunya, sedangkan 'Amboina' untuk menamakan kota atau bandarnya.

menetap di pantai dekat sungai Waipaliti. Kaum ketiga disebut 'Latima' atau 'Lating', datang pada 1465 dari Jailolo (Halmahera) dipimpin oleh Jamilu. Kaum yang keempat datang dari Gorong di Kepulauan Seram bagian timur disebut 'Olong'. Keempat penguasa itu disebut *perdana* di Hitu, yaitu di wilayah Selan Binaur di pesisir selatan Seram Timur, dan Gorong di Kepulauan Seram Laut dan Gorong.

Mereka dipimpin oleh Mata Lian yang terkenal dengan sebutan Patih Putih. Ia diberitakan pernah berkunjung ke Jawa pada sekitar 1500. Di Jawa mungkin tinggal di Tuban selama beberapa bulan—karena itu ia juga berjudul Patih Tuban. Selama di Jawa, Mata Lian bertemu dengan penguasa Ternate yang juga sedang belajar agama Islam. Oleh karena itulah hubungannya dengan Kesultanan Ternate lebih erat. Dalam kesempatan pertemuan itu, dibahas rencana pembentukan pusat kekuasaan politik dan agama Islam di Hitu yang diperintah oleh lembaga kesultanan seperti di Ternate. Langkah pertama ialah menyusun pemerintahan Hitu yang dikenal dengan sebutan Pemerintahan Empat Perdana.

Keluarga lain yang termasuk datang pertama kali dan tinggal di Hitu adalah Soa Nusatapi. Keluarga ini berasal dari Jailolo di Pulau Halmahera yang datang ke Hitu pada 1465 atau 1480 (?). Soa-soa lain yang datang ke Hitu adalah Soa Perdana Tanahitumasang yang datang dari Jawa pada 1469.

Telah disebutkan bahwa jaringan pelayaran dan perdagangan di wilayah Maluku tercipta karena sumber daya alam yang merupakan spesifikasi masing-masing pulau. Hitu muncul sebagai bandar utama di Maluku Tengah pada sekitar awal abad ke-16 bersamaan dengan meluasnya pembudidayaan atau penanaman cengkih di wilayah tersebut, terutama di Jazirah Hoamoal di Seram Barat. Perluasan budidaya tanaman cengkih itu berkaitan dengan perluasan kekuasaan Ternate ke wilayah Maluku Tengah. Cengkih yang semula hanya ada di wilayah Maluku Utara, kemudian meluas ke wilayah Maluku Tengah terutama di Pulau Seram.

Sebagai bandar utama di Maluku Tengah, Hitu mempunyai kedudukan yang istimewa karena hubungannya dengan Jepara di Jawa yang kala itu merupakan bandar yang cukup ramai di pantai utara Jawa. Jepara merupakan pelabuhan Kerajaan Demak yang pada masa itu sudah menganut Islam dan merupakan

salah satu pusat syiar Islam. Hubungan dengan Jawa mulai dibangun oleh Jamilu dan keturunannya yang dikenal sebagai keluarga Perdana Nusatapi. Dalam *Hikayat Tanah Hitu* beberapa kali disebutkan mengenai pelayaran Jamilu dan keluarganya ke Jepara untuk berdagang sambil belajar tentang Islam.

Berkat hubungannya dengan luar daerah Maluku, Hitu berkembang menjadi bandar “acuan” bagi bandar yang lain di Maluku Tengah. Bandar lain seperti bandar di Seram Timur dan Kepulauan Seram Laut, dan Gorong mengacu kepada Hitu. Ketiga bandar kecil itu berfungsi sebagai bandar *feeder* atau bandar pengumpan tempat asal barang komoditi dikapalkan. Kenyataannya memang demikian hingga Ambon menjadi bandar utama yang “dilahirkan” oleh VOC. Seram Laut dan Gorong juga mempunyai hubungan dengan Kepulauan Kei-Aru dan Tanimbar. Oleh karena itulah secara tidak langsung Kei-Aru dan Tanimbar mengacu juga kepada Hitu.

Bandar-bandar di Maluku telah lama membentuk jaringan pelayaran dan perdagangan dengan Jawa. Disebutkan bahwa hubungan Ternate dan Hitu dengan Jawa sangat erat sehingga dapat dikatakan Islam diperkenalkan di Maluku melalui Jawa. Hal itu dicirikan oleh seorang raja dari Maluku yang memeluk Islam yaitu Zainal Abidin yang memerintah pada 1486–1500. Raja ini pernah belajar di Giri, Jawa Timur. Ia dijuluki Raja Balawa berarti “Raja Cengkih” karena sering membawa cengkih dari Maluku sebagai barang dagangan sekaligus persembahan (*curiocities*). Sejak saat itulah, Maluku diduga sudah memeluk agama Islam secara resmi meski hanya di kalangan terbatas yaitu elite keraton. Tidak mustahil jika jauh sebelumnya sudah tumbuh komunitas yang beragama Islam karena intensitas hubungan pelayaran dan perdagangan dengan kerajaan yang lain di sebelah barat Nusantara sudah berlangsung lama.

Ketika Hitu sudah meredup dan Ambon di bawah VOC dapat menguasai jaringan perdagangan dan pelayaran di Maluku Tengah, ada beberapa daerah yang pada waktu Hitu berjaya kurang diperhatikan karena dari sisi perdagangan dipandang kurang menguntungkan. Daerah-daerah tersebut adalah Haruku, Saparua, Nusalaut, dan Seram Barat. Oleh VOC, daerah-daerah itu mendapat perhatian dan berfungsi sebagai semacam bandar *feeder* bagi Ambon.

Meskipun VOC berhasil “meredupkan” bandar Hitu sebagai pusat bandar,

namun ada bandar pengumpan lain yang tidak terpengaruh oleh kemunduran Hitu. Wilayah Selan Binaur, Kepulauan Seram Laut, dan Gorong, tetap menjalankan fungsinya sebagai bandar yang bebas melakukan aktivitas niaga dengan daerah lain. Komoditi rempah yang dihasilkan dari pulau-pulau sekitarnya dapat diangkut hingga keluar jaringan lokal seperti ke bandar-bandar di Jawa. Pengaruh VOC Belanda tidak dapat menjangkau ketiga daerah tersebut.

Kerajaan Tanah Hitu merupakan kerajaan Islam yang terletak di Pulau Ambon dengan pusatnya di bagian utara. Kerajaan itu pernah mengalami masa kejayaan antara 1470–1682 dengan raja pertama yang bergelar Upu Latu Sitania 'raja tanya'. Menurut mitos, kerajaan itu didirikan oleh Empat Perdana yang ingin mencari tahu faedah baik dan tidak sehubungan dengan keberadaan raja. Kerajaan Tanah Hitu pernah menjadi pusat perdagangan rempah dan memainkan peran yang sangat penting di Maluku bagian tengah. Pada masa itu banyak kaum intelektual yang lahir dari Hitu, seperti Imam Rijali, Talukabessy, Kakiali, dan lain-lain, yang tidak tertulis di dalam sejarah Maluku sekarang. Kerajaan itu berdiri sebelum kedatangan Portugis dan Belanda.

Kedatangan Empat Perdana merupakan awal kedatangan manusia yang kemudian menetap di Tanah Hitu sebagai penduduk asli Pulau Ambon. Kata *perdana* berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 'pertama'. Empat Perdana adalah empat kelompok yang pertama datang di Tanah Hitu, pemimpin dari empat kelompok dalam bahasa Hitu disebut *Hitu Upu Hata* atau Empat Perdana Tanah Hitu. Empat Perdana Hitu juga merupakan bagian dari penyebar Islam di Maluku. Kedatangan Empat Perdana merupakan bukti sejarah syiar Islam di Maluku yang ditulis oleh penulis sejarah pribumi tua maupun Belanda dalam berbagai versi seperti Imam Rijali, Imam Lamhitu, Imam Kulaba, Holeman, Rumphius, dan Valentijn.

Pendatang pertama di Tanah Hitu adalah Pattiselan Binaur dari Gunung Binaya (Seram Barat) kemudian ke Nunusaku. Tahun kedatangannya tidak tertulis. Mereka mendiami suatu tempat yang disebut Bukit Paunusa, kemudian mendirikan negeri bernama Soupele dengan marganya Tomu Totohatu. Patisilang Binaur disebut juga Perdana Totohatu atau Perdana Zaman Jadi. Pendatang kedua adalah Kiyai Daud dan Kiyai Turi yang juga disebut Pattikawa dan Pattituri,

dan saudara perempuannya bernama Nyai Mas.

Menurut silsilah Turunan Raja Hitu Lama Pattikawa, Pattituri dan Nyai Mas adalah anak dari Muhammad Taha bin Baina Mala Mala bin Baina Urati bin Saidina Zainal Abidin Baina Yasirullah bin Muhammad An Naqib, yang nasabnya ditarik dari garis Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Selanjutnya disebutkan bahwa ibu mereka berasal dari keluarga Raja Mataram yang tinggal di Tuban dan mereka dibesarkan di sana (menurut Imam Lamhitu salah satu pencatat kedatangan Empat Perdana Hitu yang catatannya ditulis dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi pada 1689). Imam Rijali dalam *Hikayat Tanah Hitu* menyebutkan bahwa mereka orang Jawa datang bersama kelengkapan dan hulubalangnya yang bernama Tubanbessi atau orang kuat atau orang perkasa dari Tuban.

Adapun kedatangan mereka ke Tanah Hitu hendak mencari tempat tinggal leluhurnya yang jauh sebelum ketiga perdana itu datang. Ia ke Tanah Hitu pada abad ke-10, dengan nama Saidina Zainal Abidin Baina Yasirullah (artinya 'Rahasia Allah') yang menurut cerita turun-temurun Raja Hitu Lama tinggal di Mekah, kemudian melakukan perjalanan rahasia mencari tempat tinggal untuk anak-cucunya. Kelak di kemudian hari, dengan kehendak Allah Ta'ala, ia singgah di suatu tempat yang sekarang bernama Negeri Hitu, tepatnya di Haita Huseka'a atau Labuhan Huseka'a. Di sana mereka temukan keramat atau makam Sang Raja di atas batu karang. Tempat itu bernama Hatu Kursi atau Batu Kadera, sekitar satu kilometer dari Negeri Hitu. Peristiwa kedatangannya tidak ada yang mencatat, hanya berdasarkan cerita turun-temurun.

Perdana Tanah Hitu yang bernama Pattikawa atau Perdana Mulai tiba di Tanah Hitu tepatnya di Haita Huseka'a pada 1440 malam hari. Dalam bahasa Hitu Kuno disebut Hasamete artinya "hitam gelap gulita" sesuai warna alam pada malam hari. Mereka tinggal di suatu tempat yang diberi nama sama dengan asal ibu mereka yaitu Tuban/Ama Tupan atau Negeri Tuban. Dusun Ama Tupan atau Aman Tupan sekarang terletak kira-kira 500 meter di belakang Negeri Hitu.³ Perdana ini kemudian mendirikan negerinya di pesisir pantai yang bernama Wapaliti di

3 Menurut catatan Imam Rijali dalam *Hikayat Tanah Hitu*, salah satu perkampungan di Jazirah Hitu di Pulau Ambon berasal dari Tanah Jawa. Di beberapa tempat di Maluku Tengah terdapat nama-nama kampung seperti di Jawa, misalnya Tuban dan Jepara.

muara Sungai Wai Paliti. Perdana Pattikawa atau Perdana Mulai berarti orang yang pertama kali mendirikan negerinya di pesisir pantai. Nama negeri tersebut menjadi nama *soa* atau Ruma Tau yaitu Wapaliti dengan marganya Pelu.

Kemudian datang lagi Jamilu dari Kerajaan Jailolo (Halmahera). Jamilu tiba di Tanah Hitu pada 1465 pada waktu magrib yang dalam bahasa Hitu Kuno disebut "kasumba muda" atau warna merah sesuai dengan corak warna langit pada waktu magrib. Nama lain Jamilu adalah Patinggi dan Tahaleleela. Mendirikan negerinya bernama Laten, kemudian nama negeri itu menjadi nama marganya yaitu Lating. Jamilu disebut juga Perdana Jamilu atau Perdana Nustapi. Nustapi (Nusatau) yang berarti 'pendamai' karena ia dapat mendamaikan permusuhan antara Perdana Tanah Hitu dengan Perdana Totohatu. Imam Rijali sering menyebutnya Jamilu Bijaksana karena tindakannya bijaksana. Oleh Portugis dia juga digelar Kapitan Hitu I.

Sebagai pendatang terakhir adalah Kie Patti atau Kai Pati yang tiba dari Gorom (Pulau Seram bagian timur). Ia tiba di pantai Nukohali dekat Sungai Wai Olon Tanah Hitu pada 1468, pada sore hari yang dalam bahasa Hitu Kuno disebut *halo pa'u* yang berarti 'kuning sesuai corak warna langit pada waktu petang hari. Mendirikan negerinya dengan mengambil nama Olong. Nama negeri tersebut menjadi nama marganya yaitu marga Olong. Kie Patti disebut juga Perdana Pattituban karena ia pernah diutus ke Tuban untuk memastikan sistem pemerintahan di Tuban yang akan menjadi dasar pemerintahan di Kerajaan Tanah Hitu. Menurut Rumphius, Kie Patti diberi gelar *pati* setelah ia menikah dengan putri Jamilu, sedangkan Valentijn mengatakan bahwa ia berasal dari Gorom dan bernama Pati Lain.

8.3 Penggabungan Empat Hitu

Berhubung banyak saudagar dari Arab, Persia, Jawa, Melayu, dan Tiongkok, yang berdagang mencari rempah di Tanah Hitu dan banyak pendatang dari Ternate, Jailolo, Obi, Makian, dan Seram, ingin bertempat tinggal di Tanah Hitu, maka atas gagasan Perdana Tanah Hitu, keempat perdana bergabung untuk membentuk suatu organisasi politik yang kuat yang tergabung dalam satu kerajaan. Keempat perdana yang berencana bergabung adalah Zamanjadi yang

mendirikan negeri Sopele, Perdana Mulai mendirikan negeri Waipaliti, Jamilu mendirikan negeri Latim, dan Kiyai Pati mendirikan negeri Olon. Kemudian keempat perdana itu mendirikan negeri yang terletak sekitar satu kilometer dari Negeri Hitu. Negeri yang dibangunnya itu sekarang terletak kira-kira di Dusun Ama Hitu atau Aman Hitu. Di situlah awal berdirinya Negeri Hitu yang menjadi pusat kegiatan Kerajaan Tanah Hitu. Bekasnya berupa sisa pondasi bangunan masjid yang dipercaya sebagai bangunan masjid pertama di Tanah Hitu. Masjid tersebut bernama Masjid Pangkat Tujuh karena struktur pondasinya terdiri dari tujuh lapis.

Setelah itu keempat perdana tersebut mengadakan pertemuan yang disebut *tatalo guru* (duduk guru) artinya "kedudukan adat atas petunjuk" *Upuhatala* atau Allah Ta'ala yang merupakan metafor bahasa dari dewa kepercayaan Kakehang yaitu kepercayaan pribumi masyarakat Seram. Mereka bermusyawarah untuk memilih dan mengangkat pemimpin mereka. Dalam musyawarah itu dipilih seorang anak muda yang cerdas keturunan dari salah seorang empat perdana. Anak muda tersebut adalah anak dari Pattituri, adik kandung Perdana Pattikawa atau Perdana Tanah Hitu yang bernama Zainal Abidin dengan pangkat Abubakar Na Sidiq sebagai raja Kerajaan Tanah Hitu pertama yang bergelar pentabalan Upu Latu Sitania pada 1470. Latu Sitania atau *ile isainya* yang berarti 'dia sendiri', secara harfiah "dia sendiri seorang raja di Tanah Hitu" atau "raja penguasa tunggal." Dalam versi *Hikayat Tanah Hitu* karya Imam Rijali, *latu* berarti "raja" dan *sitania* atau *tanya, ite panyia*, berarti "tempat mencari faedah baik dan buruk beraja."

Setelah Negeri Hitu terbentuk sebagai pusat Kerajaan Tanah Hitu, datang lagi tiga *soa* Alifuru untuk bergabung yaitu Tomu, Hunut, dan Masapal. Negeri Hitu yang pada mulanya hanya merupakan gabungan empat negeri berubah menjadi gabungan dari tujuh negeri. Ketujuh negeri ini terhimpun dalam satu tatanan adat atau satu *uli*, berarti 'persekutuan', yang disebut Uli Halawan (Persekutuan Emas). Uli Halawan merupakan tingkatan *uli* yang paling tinggi dari keenam Uli Hitu (Persekutuan Hitu). Pemimpin Ketujuh negeri dalam Uli Halawan disebut Tujuh Panggawa atau *Upu Yitu* (sebutan kehormatan) yang beranggotakan Negeri Soupele, Negeri Wapaliti, Negeri Laten, Negeri Olong, Negeri Tomu, Negeri Hunut, dan Negeri Masapal.

8.4 Pemerintahan di Tanah Hitu

Raja Mateuna' adalah raja Kerajaan Tanah Hitu yang kelima dan juga merupakan raja terakhir pada pusat pemerintahan Kerajaan Tanah Hitu yang pertama. Kini, bekas kerajaan menjadi Dusun Ama Hitu terletak sekitar satu kilometer dari Negeri Hitu. Raja Mateuna' mangkat pada 29 Juni 1634.

Pada awal abad ke-16, semasa pemerintahan Raja Mateuna', Negeri Hitu sebagai pusat kegiatan Kerajaan Tanah Hitu dipindahkan ke pesisir pantai yang kini menjadi Negeri Hitu. Pada masa pemerintahannya terjadi kontak pertama dengan pendatang Portugis untuk urusan dagang. Perlawanan fisik dalam Perang Hitu I yang terjadi pada 1520–5 dipimpin oleh *tubanbessy* pertama yaitu Kapitan Sepamole. Dalam perlawanan itu Portugis berhasil disingkirkan dari Tanah Hitu. Kemudian, di lokasi penyingkiran itu didirikan Benteng Kota Laha di Teluk Ambon (Semenanjung Lei Timur) pada 1575. Dari sanalah Portugis mulai mengkristenkan penduduk Jazirah Lei Timur.

Raja Mateuna' meninggalkan dua anak yaitu Silimual dan Hunilamu. Ia beristrikan wanita asal Halong. Ibu dari Mateuna berasal dari negeri Soya di Jazirah Lei Timur di Hitu Selatan. Ia digantikan oleh anak kedua, yaitu Hunilamu dengan nama penobatannya Latu Sitania VI (1637–82). Anak pertama Silimual dinobatkan di Kerajaan Hoamual (Seram Barat) menjadi Kapitan Hoamual dan berdomisili di sana. Kapitan Hoamual memimpin perang melawan Belanda yang dikenal dengan Perang Hoamual (1625–56). Hingga sekarang seluruh keturunannya masih berdomisili di sana dan menjadi orang asli negeri Luhu (Seram Barat) bermarga Silehu.

Sesudah Portugis diusir, Belanda makin memperkokoh pengaruhnya dan mendirikan benteng pertahanan di Tanah Hitu bagian barat di pesisir pantai kaki Gunung Wawane. Raja Hunilamu memerintahkan ketiga perdananya mendirikan negeri baru untuk mengawasi kehadiran dan membendung pengaruh Belanda yang membangun Benteng Amsterdam di Tanah Hitu. Negeri baru itu dalam bahasa Hitu disebut Hitu Helo yang berarti 'Hitu Baru'. Disebabkan oleh perkembangan pengaruh dialek bahasa, kata *helo* menjadi *hila*, yaitu negeri Hila sekarang, sedangkan negeri asal mereka, yakni Hitu, berganti nama menjadi negeri Hitu Lama.

Belanda tiba di Tanah Hitu pada 1599 dan pada 1602 mendirikan serikat dagang bernama Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Sejak saat itulah terjadi perlawanan terhadap Belanda karena serikat dagang tersebut didirikan dengan tujuan monopoli perdagangan rempah. Puncaknya terjadi Perang Hitu II atau Perang Wawane yang dipimpin oleh Kapitan Pattiwane anak Perdana Jamilu dan *tubanbessy* kedua yaitu Kapitan Tahalele pada 1634–43. Perlawanan terakhir, yaitu Perang Kapahaha (1643–6), dipimpin oleh Kapitan Talukabessi (Muhammad Uwen) dan Imam Rijali setelah Kapitan Tahalele menghilang. Dengan berakhirnya Perang Kapahaha, Belanda menguasai Jazirah Lei Hitu.

Belanda melakukan perubahan besar-besaran dalam struktur pemerintahan Kerajaan Tanah Hitu dengan mengangkat Orang Kaya menjadi raja dari setiap *uli* sebagai raja tandingan terhadap Kerajaan Tanah Hitu. Hitu yang lama sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kerajaan Tanah Hitu dibagi menjadi dua daerah administrasi pemerintahan, yaitu Hitulama dan Hitumessing. Itulah politik pecah-belah VOC dalam melemahkan Kerajaan Hitu sampai ke akar-akarnya.

Negeri–negeri di Jazirah Lei Hitu yang tidak termasuk di dalam Uli Hitu berarti negeri baru atau negeri yang belum berdiri pada zaman kekuasaan Kerajaan Tanah Hitu (1470–1682). Ketujuh *uli* tersebut adalah:

1. Uli Halawan terdiri dari dua negeri yaitu Negeri Hitu dan Negeri Hila dengan pusat di Negeri Hitu.
2. Uli Solemata (Wakane) terdiri dari tiga negeri yaitu Negeri Tial, Negeri Molowael (Tengah-Tengah), dan Negeri Tulehu dengan pusat di Negeri Hila.
3. Uli Sailessi terdiri dari empat negeri yaitu Negeri Mamala, Negeri Morela, Negeri Liang, dan Negeri Wai dengan pusat di Negeri Tomo.
4. Uli Hutunuku hanya terdiri dari satu negeri yaitu Negeri Kaetetu.
5. Uli Sawani terdiri dari hanya satu negeri yaitu Negeri Wakal.
6. Uli Ala terdiri dari tiga negeri yaitu Negeri Seith, Negeri Ureng, dan Negeri Allang dengan pusat di Seith.
7. Uli Nauhenalehu terdiri dari hanya satu negeri yaitu Negeri Lima.

Sistem politik di Hitu memiliki pola dasar yang sama dengan di Maluku

Kie Raha yaitu pembagian dalam empat bagian. Negeri Hitu menjadi pusat kekuasaan dengan empat penguasa yang disebut Empat Perdana, masing-masing berasal dari satu garis keturunan yang menjadi cikal-bakal negeri Hitu. Keempat Perdana tersebut adalah Tanahitumeseng, Nustapi, Totohatu, dan Pati Tuban. Di antara empat perdana tersebut, Tanahitumeseng merupakan *primus inter pares* yang menurut orang Eropa juga disebut Raja Hitu (Manusama 1977). Raja Hitu merupakan pemersatu yang mewujudkan keutuhan masyarakat atau *soasiwa* seperti yang terdapat di Tidore (Leirissa 1996).

Sistem pemerintahan tersebut mengingatkan model federasi yang sangat umum terdapat di Nusantara bagian timur (Reid 1998). Atribut-atribut kekuasaan seperti payung, warna-warna, dan tanah terdapat pula di sini. Setiap Perdana dilengkapi dengan sebuah payung dengan warna tertentu seperti hitam, merah, kuning, dan biru. Hanya Raja Hitu sebagai Perdana Tanahitumeseng yang dibenarkan menggunakan empat payung dengan empat warna tersebut (Manusama 1977).

8.5 Kesultanan Ternate

Wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dengan hasil yang spesifik terdapat sistem bandar yang membentuk jaringan pelayaran dan perdagangan lokal. Sistem bandar tersebut dibagi dalam tiga wilayah utama yaitu Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Maluku Utara. Sayangnya informasi sejarah mengenai sistem di wilayah Maluku Utara dan Maluku Tenggara sangat langka meski data sejarah (politik) dari kedua wilayah itu cukup lengkap. Namun, berdasarkan pendekatan lingkungan, sistem bandar di kedua wilayah itu terbentuk karena sumber daya alam yang dihasilkan di daerah tersebut. Juga jika dibandingkan dengan sistem bandar di Maluku Tengah dapat dikatakan hampir sama.

Pada sekitar abad ke-15—bahkan mungkin jauh sebelumnya—di Maluku telah dikenal empat bandar utama yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Keempat bandar utama itu dikenal sebagai penghasil cengkih terbaik. Bandar-bandar niaga itu tentu terkait dengan bandar-bandar lain yang berfungsi sebagai pengumpan atau *feeder*. Bandar utama Ternate menjangkau daerah-daerah ke arah barat

seperti Kepulauan Banggai, pesisir timur Sulawesi, dan bahkan hingga daerah Sulawesi bagian utara. Bandar Jailolo mencakup pesisir barat Halmahera hingga abad ke-17 dan kemudian dikuasai oleh Ternate. Bandar utama yang terkecil dan diduga tidak memiliki bandar pengumpan di bawahnya adalah Bacan.

Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi dalam sejarah Indonesia termasuk kerajaan Islam awal yang terletak di Kepulauan Maluku. Kesultanan itu merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara dan salah satu dari empat kerajaan Islam di Maluku. Menurut *Hikayat Ternate*, kerajaan itu didirikan oleh Ciko yang setelah ditabalkan menjadi raja pada 1257 menyebut dirinya Mashur Malamo. Masa perkembangan dan kejayaan kesultanan itu berlangsung pada sekitar abad ke-16 berkat perdagangan rempah terutama cengkih. Disebutkan juga bahwa kesultanan itu memiliki kekuatan militer yang kuat. Pada masa jaya, kekuasaannya mencakup wilayah kepulauan Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kesultanan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia khususnya Maluku.

Pada awalnya, Pulau Ternate dikenal dengan nama Pulau Gapi. Pulau itu mulai ramai pada awal abad ke-13. Dalam kitab *Nagarakertagama* (14: 5) nama Ternate tidak disebutkan tetapi Maluku dan juga Ambon tercantum sebagai daerah yang dapat ditafsirkan "minta perlindungan" pada Majapahit.⁴ Menurut *Hikayat Ternate*, penduduk Ternate awalnya merupakan pindahan dari Halmahera. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, di Ternate terdapat empat kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang *momole* atau kepala kampung. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dagang dengan saudagar yang datang dari segala penjuru yang mencari rempah. Aktivitas dan interaksinya dengan penduduk luar yang jauh dari Nusantara sebagai akibat perdagangan rempah menjadikan Ternate dikenal luas. Lebih jauh, penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya saudagar Jawa, Melayu, Arab/Persia, dan Tionghoa.

4 Sebagian besar masyarakat sejarawan menafsirkan wilayah yang disebutkan dalam *Kakawin Nagarakertagama* merupakan daerah yang tunduk pada kekuasaan Majapahit sehingga wilayah Majapahit hampir sebesar wilayah Republik Indonesia sekarang yakni dari Sabang hingga Merauke.

Ketika aktivitas perdagangan semakin ramai serta muncul ancaman yang sering datang dari perompak, maka atas prakarsa Momole Guna (kepala persekutuan Tobona) diadakan musyawarah. Musyawarah bertujuan membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Dari sinilah awal terbentuk Kerajaan Gapi. Hasil musyawarah tersebut akhirnya mengangkat dan menabalkan Momole Ciko pemimpin Sampalu sebagai *kolano* (raja) pertama dengan gelar Mashur Malamo (memerintah 1257–77). Pusat pemerintahan Kerajaan Gapi berada di kampung Ternate, di kaki sebelah timur gunung Gamalama. Dengan perkembangan yang sangat pesat, penduduk menyebut daerah tersebut sebagai “Gam Lamo” (Gamalama) atau “kampung besar.” Lantaran popularitas dan perkembangan Kota Ternate yang sangat cepat, Kerajaan Gapi pada akhirnya lebih sering disebut dengan Kerajaan Ternate.

8.6 Sistem Pemerintahan di Ternate

Setelah menjadi sebuah institusi kerajaan, pimpinan tertinggi pemerintahan dipegang oleh seorang *kolano*. Hingga pertengahan abad ke-15, ketika penguasanya memeluk Islam (Gapi Baguna, 1485–6), kerajaan mulai memberlakukan syariat Islam. Sultan Zainal Abidin, anak dari Gapi Baguna, meninggalkan gelar *kolano* dan menggantinya dengan gelar *sultan* (memerintah 1486–1500). Ajaran Islam pada masa itu mulai masuk dalam struktur pemerintahannya (Amal 2016: 62–6). Penggunaan sebutan ‘kesultanan’ berkaitan dengan tempat Zainal Abidin berguru pada Sunan Giri di Jawa namun bukan berarti penyebaran Islam di Ternate melalui Jawa. Jauh sebelum itu, Ternate merupakan ‘ruang’ terbuka tempat orang dari berbagai bangsa dan agama masuk. Dengan demikian elemen Islam sudah melekat lebih dulu pada masyarakat Ternate. Sementara itu, pada masa kekuasaan para *kolano*, pengaruh Islam masih rendah dalam mewarnai struktur politik Kerajaan Ternate.

Sebuah lembaga baru dalam struktur pemerintahan di Ternate dibentuk yaitu Lembaga Jolebe atau *bobato* berjubah putih yang bertugas membantu Sultan dalam urusan keagamaan Islam. Sementara itu, *bobato* berjubah hitam yang telah dibentuk sebelumnya bertugas membantu sultan dalam urusan pemerintahan (Amal 2016: 64). *Jolebe* terdiri dari seorang *kalem* atau kadi, empat orang *imam*,

delapan orang *khatib* dan 16 orang *moding* yang bertugas membantu *amir al-din* —yang tidak lain adalah sultan—dalam menjalankan fungsi keagamaan dan syariat Islam. Dengan sendirinya, *jolebe* langsung bertanggung jawab kepada sultan sebagai pembina tertinggi agama Islam di kesultanan.

Perubahan struktur dan kelembagaan Kesultanan Ternate telah membawa pengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan lain di Maluku, terutama di Moloko Kie Raha. Kerajaan Tidore dan Bacan, misalnya, menerapkan struktur dan kelembagaan kerajaan mengikuti struktur dan kelembagaan baru yang telah dimulai di Ternate.

Menurut laporan Galvao, pada setiap kerajaan di Maluku terdapat seorang pejabat *casis general* atau dikenal dengan sebutan *qadhi* atau 'kadi' seperti telah disebutkan. Pejabat itu bertugas mengurus aktivitas keagamaan Islam (Jacobs 1971). Seorang *qadhi* mengepalai pegawai masjid raya (masjid kerajaan/kesultanan) yang terdiri dari empat orang *imam* dan empat orang *muadzin*, dan juga pegawai masjid di wilayah kesultanan yang memiliki susunan pegawai sama dengan masjid kesultanan.

Mengenai garis keturunan para *kolano* dapat disebutkan bahwa permaisuri Kolano Ciko adalah seorang perempuan yang berasal dari Seli (Tidore). Ia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Gapi Baguna yang setelah dewasa kawin dengan seorang perempuan dari Sula. Dari perkawinan itu lahir Zainal Abidin. Sementara itu, dalam catatan Valentijn dan de Clerq disebutkan bahwa Ciko adalah nama lain dari Sia yang tidak lain adalah Gapi Baguna II yang berkuasa pada 1432–65. Gapi Baguna adalah ayah dari Marhum yang berkuasa pada 1465–86. Setelah Marhum mangkat ia digantikan oleh Zainal Abidin yang berkuasa pada 1486–1500.

Kesultanan Ternate merupakan kesinambungan dari Kerajaan Gapi di bawah pemerintahan *kolano*. Dengan masuknya unsur Islam dalam struktur pemerintahan Ternate, para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Selain itu, ada jabatan *jogugu* atau perdana menteri yang memegang kekuasaan pemerintahan, dan *fala raha* sebagai para penasihat. *Fala raha* atau 'empat rumah' adalah empat *soa* bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para *momole* pada masa lalu, masing-masing dikepalai

seorang *kimalaha*. Mereka adalah Marsaoli, Tomagola, Tomaito dan Limatahu. Pejabat-pejabat tinggi kesultanan umumnya berasal dari *soa* itu. Bila seorang sultan mangkat dan tidak memiliki pewaris, penerusnya dipilih dari salah satu *soa*. Selanjutnya ada jabatan *Bobato Nyagimoi se Tuf Kange* (Dewan 18), *Sabua Raha*, *Kapita Lau*, *Salahakan*, *Sangaji*, dan lain-lain.

Bobato Nyagimoi se Tuf Kange atau lebih dikenal dengan *Bobato 18* adalah semacam lembaga legislatif dalam pemerintahan kesultanan. Lembaga ini bertugas memilih, mengangkat, dan bahkan memakzulkan sultan. Anggotanya terdiri dari berbagai golongan mulai dari perwakilan komunitas kelompok etnis hingga panglima militer kesultanan yang disebut *kapita lau*. Dalam sejarah Kesultanan Ternate baru sekali *Bobato 18* memakzulkan seorang sultan.

8.7 Persekutuan Moloku Kie Raha

Di Wilayah Maluku Utara terdapat lima kerajaan yang memiliki pengaruh yaitu Kolano Tidore, Kolano Jailolo, Kolano Loloda, dan Kolano Bacan, yang merupakan saingan Ternate dalam memperebutkan kekuasaan dan pengaruh di Maluku. Karena Kolano Sida Arif mempunyai pergaulan yang luas, Ternate mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi itu dibarengi dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelayaran. Kemajuan bandar Ternate membuat banyak saudagar dan pelaut asing singgah di bandar. Dari pergaulan dengan para pelaut asing, terserap pula pengetahuan tentang pelayaran dan pembuatan kapal. Keadaan itu membuat kerajaan lain di Maluku memandang Ternate sebagai musuh bersama hingga memicu perang.

Pada masa pemerintahan Kolano Cili Aiya atau Kolano Sida Arif Malamo (1317–31) di Ternate dicoba menghentikan konflik antar-kerajaan di Maluku Utara. Pada 1322, ia mengundang para *kolano* di Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan itu dikenal sebagai Persekutan Moti dengan pimpinan Kolano Jailolo. Tujuan pertemuan itu selain menjalin persekutuan adalah menyeragamkan bentuk institusi kerajaan di Maluku. Oleh karena pertemuan dihadiri empat raja Maluku yang terkuat maka disebut sebagai persekutuan *Moloko Kie Raha* atau Empat Gunung Maluku.

Menurut seorang Belanda, van der Kemp, Maluku yang sebenarnya meliputi Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo (Halmahera). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Naidah dalam *Hikayat Ternate*, bahwa Maluku artinya Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Menurut Naidah, hal itu terlihat dalam ungkapan *Moloko Kie Raha ma-rimoi bato, ma-kabasaran se maistiadat rimoi bato, ma-kabasaran se maistiadat rimoi bato* atau “Empat Gunung Maluku sesungguhnya punya satu asal-usul, punya kemegahan, dan budaya yang sama.”

Keempat kerajaan di Maluku Utara masing-masing berpusat di sebuah pulau kecil yang berjajar di sebelah barat Halmahera. Hanya Jailolo yang berpusat di Halmahera. Pada abad ke-17 Kerajaan Jailolo di Halmahera dihancurkan Ternate dan kemudian pulau besar itu dibagi dua wilayah kekuasaan Ternate dan Tidore (Leirissa 1996).

8.8 Awal dan Perkembangan Islam

Tidak dapat dipastikan kapan awal agama Islam masuk dan menyebar ke Ternate. Hal itu disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber sejarah yang didukung dengan data arkeologi (misalnya tulisan pada nisan kubur) yang tersedia. Namun, berdasarkan interaksi para saudagar pada kegiatan perdagangan rempah dengan wilayah Timur Tengah, diperkirakan sejak awal Kerajaan Ternate berdiri—bahkan jauh sebelumnya—masyarakat telah mengenal Islam. Tidak mustahil pada waktu itu sudah banyak komunitas Arab, Persia, dan Melayu, yang tinggal di Ternate. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih dalam perdebatan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15.

Penguasa Ternate ke-18 Kolano Marhum (1465–86) adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Penggantinya adalah anaknya, Zainal Abidin, yang pada masa pemerintahannya menanggalkan gelar *kolano* dan menggantinya dengan *sultan*. Sejak ditabalkan sebagai Sultan, agama Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, syariat Islam diberlakukan, dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para alim ulama. Langkah-langkahnya kemudian diikuti kerajaan lain

di Maluku secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana ia dikenal sebagai Sultan Bulawa atau 'Sultan Cengkih'.

Para pengelana Portugis juga menginformasikan bahwa Islam masuk ke Maluku, khususnya Ternate, ketika Zainal Abidin ditabalkan sebagai raja dan menanggalkan gelar *kolano* serta menggantinya dengan gelar *sultan* pada 1486. Pendapat itu mungkin ada benarnya jika dilihat pada waktu Islam "diumumkan" secara resmi sebagai agama kerajaan. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang interaksi masyarakat dengan bangsa-bangsa lain seperti Arab, Persia, Melayu, dan Jawa, maka dapat diduga bahwa Islam masuk ke Maluku jauh sebelum pentabalan Zainal Abidin.

Islamisasi daerah-daerah yang termasuk wilayah kesultanan tidak terlepas dari struktur pemerintahan dan kemauan politik penguasa. Setelah Sultan memeluk Islam dan menerapkan agama itu dalam struktur pemerintahan, berarti hukum dan syariat Islam diberlakukan. Oleh karena itu, para penguasa daerah yang berada di wilayah Kesultanan Ternate harus menerima kehadiran Islam. Perubahan itu menjadikan perlakuan yang berbeda dari penguasa terhadap rakyatnya. Penguasa memandang penduduk yang beragama Islam sebagai warga kelas satu, sedangkan terhadap penduduk yang masih beragama asli dilihat sebagai warga kelas dua. Bagi penduduk kesultanan yang mendiami daerah pesisir lebih beruntung karena dekat dengan penguasa. Apalagi bagi penduduk yang sudah menganut agama Islam.

Menurut sumber Eropa, penguasa Ternate yang paling berjasa dalam pengembangan agama Islam adalah Sultan Zainal Abidin. Ia tidak saja mengukuhkan agama Islam dengan memasukannya ke dalam struktur politik, tetapi ia juga berusaha memberikan pengetahuan tentang Islam kepada rakyatnya dengan mendirikan pesantren atau madrasah sekaligus mendatangkan guru agama dari Jawa. Apalagi sultan bersama ayahnya juga pernah belajar agama Islam di Giri, Jawa Timur.

Dalam upaya memperkuat dan mempertebal keimanan Islam di Ternate, sultan memulainya dari dalam Istana. Seluruh anggota keluarga sultan

diwajibkan mempelajari Islam dan menjalankan syariatnya dengan baik. Seorang guru sengaja didatangkan untuk mengajarkan Islam kepada putra-putri sultan. Sultan Kaicil Leliatu mengeluarkan ketentuan tentang cara berpakaian yang sopan dan tata-cara pernikahan menurut ajaran Islam (de Clerq 1890: 154–5). Dalam acara penabalan sultan, selain dilakukan secara adat Ternate, juga disertai penyumpahan menurut tradisi Islam. Pengambilan sumpah dilakukan di dalam Masjid Kesultanan dengan seorang pemuka agama meletakkan al-Quran di atas kepala sultan yang sedang ditabalkan. Setelah Belanda berhasil mengambil alih kekuasaan di Ternate, upacara penabalan sultan dilakukan di kediaman atau kantor residen dengan tata cara Eropa.

8.9 Kesultanan Tidore

Tidore merupakan kerajaan kedua terbesar di Nusantara bagian timur setelah Kerajaan Ternate. Tidak ada satu pun sumber tertulis yang menyebutkan kapan kerajaan itu didirikan dan di mana lokasi awal permukimannya. Valentijn mencatat bahwa pada awalnya Kerajaan Tidore terletak di Batu Cina, di sebelah selatan Dodinga. Namun, tidak dapat dipastikan kapan kerajaan ini dipindahkan ke Pulau Tidore, atau mengapa berada di Tidore.

Dalam catatannya, de Clerq (1890) berusaha menyusun daftar raja-raja yang pernah berkuasa di Tidore dalam bentuk kronik. Dalam kronik tersebut ia memperkirakan bahwa ketika *kolano* Ternate pertama—Ciko atau Mashur Malamo—ditabalkan pada 1257, Kerajaan Tidore belum berdiri. Pada sekitar 1277–1322, di Tidore terdapat enam kolano yang berkuasa, yaitu Busamuangi, Suhu, Balibunga, Duhu Madoya, Kie Matiti, dan Sele.⁵

Tidore merupakan sebuah pulau bergunung api di gugusan utara Kepulauan Maluku. Sebelum nama Tidore dikenal orang, pulau itu disebut *Limao Duko* atau *Kie Duko* yang berarti 'pulau bergunung-api'. Sebutan yang identik dengan nama gunung itu banyak digunakan pada beberapa tempat di kepulauan tersebut. Ketika Islam datang di Maluku, Kie Duko berubah menjadi *to ado re* atau *thadore/tidore* yang merupakan sebutan tanda perdamaian antara penguasa pribumi

⁵ Dalam bukunya, de Clerq tidak mencantumkan tahun berkuasanya para *kolano* tersebut (lihat Amal 2016: 468).

setelah perang besar antar-penguasa di Maluku Utara pada tahun 846 Masehi. Saat itu, Maluku dikenal sebagai daerah yang penuh dengan konflik antara penduduk pribumi hingga akhirnya seorang ulama asal Irak bernama Syekh Yakub turun tangan mendamaikan perang tersebut.

Kesultanan Tidore berpusat di wilayah Pulau Tidore, Maluku Utara. Mengenai lokasi pusat pemerintahannya belum diketahui secara jelas; apakah di Soasio ataukah tempat lain. Masa kejayaan kesultanan itu berlangsung sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18. Pada masa kejayaannya, kesultanan itu menguasai sebagian besar Halmahera Tengah, Halmahera Timur-Weda, Maba, Patani dan Gebe-Seram Pasir atau Seram Timur, Ambon, dan desa-desa lain di bawah Rarakit, Werinamatu, Ulisiwa, Kepulauan Raja Ampat hingga Papua daratan yang sangat luas, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Sultan Almansur (1512–26) merupakan penguasa Tidore yang gemar melakukan perluasan wilayah.

Pada 1521, Sultan Almansur menerima Spanyol di ibu kota kesultanan sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan pesaingnya, Kesultanan Ternate, yang bersekutu dengan Portugis. Atas keberadaan Spanyol di Tidore, Portugis mengajukan protes keras karena Spanyol melanggar Perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada 1494. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada 1663, Tidore menjadi salah satu kerajaan merdeka di wilayah Maluku. Terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin (memerintah 1657–89), Tidore berhasil menolak pengusaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18.

8.10 Awal Institusi Kerajaan

Informasi mengenai awal berdiri pusat kerajaan Tidore belum dapat dipastikan hingga raja yang ke-4. Barulah pada era Jou Kolano Balibunga, informasi mengenai pusat kerajaan Tidore sedikit terkuak—itu pun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Balibunga, namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan di mana lokasi Balibunga. Ada yang mengatakannya di utara Tidore, dan ada pula yang menyebutnya di daerah pedalaman Tidore selatan. Dengan demikian sejarah Tidore hanya berasal dari legenda. Data sejarah yang berupa tulisan para pendatang Eropa baru berlangsung sejak awal abad ke-16.

Pada 1495, syariat Islam mulai diterapkan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Gelar raja berubah menjadi *sultan*. Caliti naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan dengan nama Sultan Jamaluddin (1495–1512). Ia diislamkan oleh seorang Arab, Syech Mansur, yang memberi nama Jamaluddin tersebut. Pada waktu itu, pusat kerajaan berada di Gam Tina. Ketika Sultan Almansyur, pengganti Jamaluddin, naik tahta pada 1512, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum, Tidore Utara. Posisi ibu kota baru itu berdekatan dengan Ternate, diapit Tanjung Mafugogo dan Pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibu kota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai.

Dalam sejarahnya, terjadi beberapa kali perpindahan ibu kota Tidoere dengan berbagai alasan. Pada 1600, Sultan Mole Majimo (Alauddin Syah) memindahkan ibu kota ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan itu disebabkan oleh meruncingnya persengketaan dengan Ternate. Posisi ibu kota ketika itu sangat dekat dengan Ternate sehingga sangat rawan mendapat serangan. Pendapat lain menambahkan bahwa perpindahan ibu kota didorong oleh keinginan untuk berdakwah membina komunitas Kolano Toma Banga yang masih animistik agar memeluk Islam. Perpindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Limau Timore pada masa Sultan Saifuddin (Jou Kola, 1657–59). Limau Timore kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini.

Pada masa pemerintahan Sultan Nuku (1780–1805), wilayah kekuasaan Tidore meliputi Halmahera Timur (Weda, Patani, Gebe, dan Bicoli), Seram Utara dan Timur, Kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan, Seram, dan Halmahera Timur. Sultan Nuku berhasil menciptakan persekutuan tiga dari empat kesultanan Maluku, yaitu Tidore, Bacan, dan Jailolo.

8.11 Struktur Pemerintahan di Tidore

Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Meskipun sistem pemerintahan berbentuk kerajaan/kesultanan, sama seperti di Ternate dalam suksesi kekuasaan Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan yang lain di kawasan Nusantara. Seleksi sultan dilakukan melalui

mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari *dano* Folaraha (wakil marga dari Folaraha), yang terdiri dari Fola Yade, Fola Ake Sahu, Fola Rum dan Fola Bagus. Dari nama-nama itu, kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan.

Ketika Tidore mencapai masa jaya pada era Sultan Nuku, sistem pemerintahan di Tidore berjalan dengan baik. Saat itu, sultan dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa Tidore disebut *syara*, adat *se nakudi*. Dewan itu dipimpin oleh sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada *jo joau* (perdana menteri). Anggota Dewan Wazir terdiri dari *bobato pehak raha* (empat pihak *bobato*; semacam departemen) dan wakil dari wilayah kekuasaan. *Bobato* bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir. Empat *bobato* tersebut adalah:

1. *Pihak labe*, semacam departemen agama yang membidangi masalah syariah; anggota *pehak labe* terdiri dari kadi, imam, khatib dan modin.
2. *Pihak adat* bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri dari *jo joau*, *kapita lau* (panglima perang), *hukum yade* (menteri urusan luar), *hukum soasio* (menteri urusan dalam) dan *bobato ngofa* (menteri urusan kabinet).
3. *Pihak kompania* (bidang pertahanan keamanan) yang terdiri dari *kapita kie*, *jou mayor* dan *kapita ngofa*.
4. *Pihak juru tulis* yang dipimpin oleh seorang berpangkat *tullamo* (sekretaris kerajaan); di bawahnya ada *sadaha* (kepala rumah tangga), *sowohi kie* (protokoler kerajaan bidang kerohanian), *sowohi Cina* (protokoler khusus urusan orang Cina), *fomanyira ngare* (hubungan masyarakat kesultanan) dan *syahbandar* (urusan administrasi pelayaran).

Selain itu masih ada jabatan lain yang membantu menjalankan tugas pemerintahan, seperti *gonone* yang membidangi intelijen dan *serang oli* yang membidangi urusan propaganda.

Dalam pemerintahan sehari-hari terdapat dua jenis *bobato* selain *Bobato 18*, yaitu *bobato donya* dan *bobato akherat*. Tugas *bobato bonya* menangani urusan sehari-hari di kesultanan yang dipimpin oleh *jogugu* atau perdana menteri. Di dalamnya terdapat lembaga legislatif dan eksekutif yang bernama Komisi Empat. *Bobato akherat* adalah sebuah lembaga semacam Mahkamah Agung

Kesultanan. Tugasnya mengurus keimanan dan perangkat adat yang mengurus peribadatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *qadhi ukhrawi* yang pada masa sekarang dapat disamakan dengan imam besar.

8.12 Kehidupan Sosial Budaya

Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Nusantara. Oleh karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan di sana, para ulama memiliki status dan peran yang penting dalam masyarakat. Kuatnya hubungan antara masyarakat Tidore dengan Islam tercermin dalam ungkapan adat *adat ge mauri syara, syara mauri kitabullah* atau “adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah” atau disingkat *adat matoto agama* “adat bersendikan agama.” Perpaduan itu berlangsung harmonis hingga saat ini.

Seorang *jo joao* Kesultanan Tidore, M. Amin Farouk, mengemukakan bahwa banyaknya masjid di Tidore melambangkan suburnya aliran tarekat yang tidak lepas kaitannya dengan perjanjian antara empat kesultanan di Maluku pada 1322 di Pulau Moti. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Ternate menekankan pada pengurusan syariat, Tidore pada pengurusan tarekat, Bacan pada pengurusan hakikat, dan Jailolo serta Halmahera pada pengurusan makrifat. Tarekat-tarekat seperti Alawiyah, Qadiriyyah, dan Naqshabandiyah dapat hidup berdampingan meski mempunyai masjid sendiri-sendiri. Kunci dari perdamaian antartarekat itu adalah saling menghormati dan seringnya berkomunikasi yang difasilitasi oleh *jo joao*.

Tentang garis kekerabatan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal. Namun, tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Keluarga patrilineal yang terpenting mereka sebut *soa* atau klan. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antarsaudara sepupu (*kufu*). Setelah pernikahan, setiap pasangan baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat suami atau istri—dalam antropologi disebut *utrolokal*.

Dalam upaya menjaga keharmonisan dengan alam, masyarakat Tidore menye-lenggarakan berbagai jenis upacara adat. Di antaranya adalah upacara

Legu Gam Adat Negeri, upacara *Lufu Kie daera se Toloku* ("mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat"), upacara *Ngam Fugo, Dola Gumi, Joko Hale*, dan sebagainya.

Untuk berkomunikasi sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dengan bahasa ini pula, orang Tidore mengembangkan sastra lisan dan tulisan. Bentuk sastra lisan yang populer adalah *dola bololo* (semacam peribahasa atau pantun kilat), *dalil tifa* (ungkapan filosofis yang diiringi alat tifa atau gendang), *kabata* (sastra lisan yang dipertunjukkan oleh dua regu dalam jumlah yang genap, argumennya dalam bentuk syair, gurindam, bidal, dan sebagainya). Sebagian di antara sastra lisan disampaikan dan dipertunjukkan dengan iringan alat tifa, sejenis gendang. Sasra tulisan juga cukup baik berkembang di Tidore, hal itu bisa dilihat dari peninggalan manuskrip Kesultanan Tidore yang masih tersimpan di Museun Nasional Jakarta. Boleh jadi, masih banyak manuskrip yang tersebar di tangan masyarakat secara individual.

WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN ISLAM

9.1 Wujud Kebudayaan di Maluku

*H*ingga saat ini kajian mengenai masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Kepulauan Maluku masih tetap dalam pembahasan para pakar sejarah dan arkeologi. Banyak kajian yang menjelaskan tentang sejarah islamisasi wilayah Maluku meliputi proses penyebaran Islam, asal negara/kerajaan penyebar, proses penerimaan hingga penyebarannya. Beberapa pendapat dikemukakan mengenai teori masuknya Islam di wilayah itu, antara lain Mailoa yang menyatakan bahwa Islam datang ke Maluku Utara dari Malaka, Jawa (Gresik, Tuban, dan Jepara), atau Kalimantan (Banjarmasin), dan Projokusumo mengemukakan bahwa Banjar dan Giri atau Gresik cukup besar pengaruhnya dalam sosialisasi Islam di Maluku Utara, jauh sebelum terjadi arus balik, yakni penyebaran Islam dari Maluku ke arah barat (Buton) dan daerah lain di Sulawesi Selatan (dalam Ambary 1998: 153). Meski demikian, Islam dianggap telah masuk ke wilayah Maluku Utara pada sekitar abad ke-14, seperti yang terkandung dalam tradisi lisan yang menyebutkan bahwa Raja Ternate XII akrab dengan saudagar Arab. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Ambary (1998) mengemukakan bahwa kemungkinan lain Islam masuk melalui jalan Tiongkok Selatan dan tidak melalui Selat Malaka.

Merangkum berbagai pendapat tentang masuknya Islam di Maluku, Marasabessy (dalam Abdulrahman, dkk. 2001) mengemukakan bahwa Islam masuk ke Maluku Utara melalui beberapa tahap sebagai berikut.

- ✦ Periode Awal, dimulai dari masa berkembangnya Islam ke luar wilayah Arab pada abad ke-7 bersamaan dengan aktivitas perdagangan saudagar mencari rempah-rempah.
- ✦ Periode Pertengahan, dimulai pada abad ke-11; ditandai oleh munculnya nama-nama Arab yang merupakan indikator menetapnya komunitas Arab di Maluku dan pengaruh agama Islam, seperti nama Sultan Ternate, Mansyur Malamo (1257–77), yang bernama asli Cico Bunga.
- ✦ Periode Penerimaan Islam oleh institusi kesultanan; ditandai oleh Islam yang diterima oleh lingkungan kerajaan; sebutan *raja* diganti menjadi *sultan* menyusul perubahan 'kerajaan' menjadi 'kesultanan'; periode ini dimulai pada 1495 ketika Sultan Ternate, Zainal Abidin, memperdalam agama Islam ke Tanah Jawa.

Masuk dan berkembangnya Islam di Kepulauan Maluku dimulai dari kawasan Maluku Utara di Kerajaan Ternate dan Tidore; diperkirakan melalui jalur utara. Sementara itu, Islam di kawasan Maluku bagian tengah yang berpusat di Hitu, Pulau Ambon, datang melalui jalur selatan hampir bersamaan waktunya dengan masuknya ke Moloko Kie Raha. Dalam kaitan dengan masalah akidah Islam pada penganutnya, masih diragukan efektivitasnya karena penyebarannya “setengah hati” melalui aktivitas perdagangan yang dibarengi dengan politik perluasan wilayah dari kedua kerajaan tersebut. Jika hanya membonceng aktivitas perdagangan tidak demikian hasilnya. Akibatnya, secara umum masyarakat tidak atau belum sepenuhnya menerima dan mengimani Islam. Apalagi pada waktu itu masyarakat lokal masih menganut kepercayaan lokal dan Islam penuh dengan toleransi.

Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan di Moloko Kie Raha yang dapat direpresentasikan sebagai wilayah pusat kekuasaan Islam di utara kepulauan. Kerajaan Ternate meluaskan kekuasaannya ke wilayah selatan, meliputi Pulau Ambon, Haruku, Saparua, Buru, Seram bagian barat, dan Seram bagian tengah. Sementara itu, Kerajaan Tidore meluaskan wilayah kekuasaannya ke wilayah

pesisir utara Pulau Seram dan wilayah kepulauan di wilayah paling timur Pulau Seram, yaitu Gorom dan Seram Laut hingga ke kepulauan wilayah Raja Ampat (Leirissa dalam Abdurahman, dkk. 2001). Kedua wilayah kerajaan itu dapat dilihat saling bersaing melebarkan sayap kekuasaannya hingga keluar wilayah geografisnya di pulau-pulau di seberang lautan.

Latar belakang sejarah Islam di Kerajaan Hitu berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Maluku bagian tengah. Penyebaran dan perkembangan Islam di Hitu semasa dengan di Ternate. Raja Hitu bersama dengan Sultan Ternate Zainal Abidin belajar Islam pada waktu yang bersamaan di Gresik, Jawa Timur. Justru dari pertemuan tersebut keduanya membangun jalinan politis antara Hitu dan Ternate dalam suatu ikatan perjanjian yang mungkin sekali berbarengan dengan penyebaran Islam di wilayah masing-masing (Putuhena dalam Abdurahman, dkk. 2001).

Secara arkeologis, bukti-bukti keberadaan Islam dapat ditelusuri di wilayah bekas Kerajaan Hitu. Perkembangan agama dan budaya Islam di kerajaan itu merupakan yang paling kuat di wilayah bagian tengah Kepulauan Maluku. Selama itu, Hitu memang dianggap sebagai wilayah kerajaan Islam di Pulau Ambon yang kekuasaan dan keislamannya sejajar dengan Ternate. Di wilayah itu ditemukan bekas Masjid Kuno Tujuh Pangkat, yang dibangun di atas bukit bernama Amahitu. Selain bekas masjid kuno ditemukan juga naskah al-Quran kuno dan naskah kuno lainnya, pucuk mustaka (*momolo*) masjid kuno, mahkota raja, kompleks makam raja, penanggalan Islam kuno, dan timbangan zakat fitrah (Sahusilawae 1996; Handoko 2006).

Dari data arkeologi tersebut tergambarkan bahwa Hitu merupakan wilayah kerajaan dengan corak budaya Islam yang kuat. Sejauh ini, tidak ditemukan bukti-bukti baik secara arkeologis maupun budaya tak benda (*intangible*) yang menunjukkan budaya Islam bercampur baur dengan budaya non-Islami. Dengan kata lain, setidaknya budaya Islam yang berkembang di wilayah Hitu tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan daerah pusat penyebaran Islam lainnya. Budaya tak benda juga lazim ditemukan seperti di daerah lain, misalnya tradisi berziarah ke makam para Raja Hitu. Tradisi itu mirip ziarah ke makam "orang suci" seperti para wali di Jawa. Selain itu, di Desa Kaitetu, yang pada masa

kerajaan merupakan salah satu daerah kekuasaan Hitu, sampai sekarang masih berdiri kokoh Masjid Tua Keitetu yang konon dibangun pada 1414. Selain itu juga tersimpan naskah al-Quran kuno, kitab *barjanzi*, naskah penanggalan kuno, dan sebagainya.

Bukti-bukti arkeologis itu menunjukkan kemapanan Islam di wilayah Hitu. Tampak bahwa penyebaran Islam di wilayah itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti dalam hal dakwah. Di wilayah Kerajaan Hitu, misalnya, sangat mungkin naskah al-Quran kuno merupakan bukti atau untuk media sosialisasi Islam (Handoko 2006); begitu pula kitab *barjanzi*, naskah hukum Islam dan penanggalan Islam kuno. Data arkeologi itu dapat mewakili gambaran kebudayaan Islam di wilayah pusat-pusat peradaban Islam yang mapan keislamannya, seperti halnya di wilayah Maluku Utara yang diwakili terutama kerajaan Islam Ternate dan Tidore.

9.2 Masjid Wapauwe

Masjid Wapauwe berada di daerah yang memiliki banyak tinggalan budaya masa lampau, sekitar 40 kilometer dari Kota Ambon. Merupakan salah satu bangunan masjid tertua di Nusantara yang terletak di Negeri Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Pada jarak sekitar 150 meter ke arah utara dari masjid, di tepi jalan raya terdapat runtuhannya sebuah gereja tua peninggalan Portugis dan Belanda yang hancur semasa kerusuhan Ambon. Selain itu, 50 meter dari gereja ke arah utara, berdiri dengan kokoh sebuah benteng tua Nieuwe Amsterdam. Benteng tinggalan Belanda itu pada awalnya adalah sebuah loji Portugis yang kemudian diambil alih oleh Belanda setelah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng itu terletak di bibir pantai dan menjadi saksi sejarah perlawanan para pejuang Tanah Hitu melalui Perang Wawane (1634–43) dan Perang Kapahaha (1643–6).



Gambar 9.1 Masjid Wapauwe

Sumber: gpswisataindonesia.files.wordpress.com/2014/02/43000-masjid-wapauwe.jpg

Untuk mencapai lokasi Masjid Tua Wapauwe berada, dari pusat Kota Ambon bisa menggunakan transportasi darat dengan menempuh waktu satu jam perjalanan. Bertolak dari Kota Ambon ke arah timur menuju Negeri Passo. Di simpang tiga Passo membelok ke arah kiri melintasi jembatan, menuju arah utara dan melewati pegunungan hijau dengan jalan berbelok serta menanjak. Sepanjang perjalanan, orang yang hendak menuju Masjid Wapauwe bisa menikmati pemandangan alam pegunungan, dengan sisi jalan yang kadang-kadang memperlihatkan jurang, tebing, atau hamparan tanaman cengkih dan pala menyejukkan mata.

Awalnya, masjid tua itu bernama Masjid Wawane karena dibangun di lereng Gunung Wawane oleh Perdana Jamilu, keturunan Kesultanan Jailolo dari Maluku Utara. Kedatangan Perdana Jamilu ke Tanah Hitu pada 1400 untuk menyebarkan ajaran Islam pada lima negeri di sekitar Pegunungan Wawane yaitu Assen, Wawane, Atetu, Tehala, dan Nukuhaly, yang sebelumnya sudah dibawa

oleh mubalig dari negeri Arab. Masjid itu mengalami perpindahan lokasi akibat gangguan orang Belanda yang menginjakkan kakinya di Tanah Hitu pada 1580 setelah Portugis pada 1512. Sebelum pecah Perang Wawane (1634), Belanda sudah mengganggu kedamaian penduduk lima kampung yang telah menganut ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Merasa tidak aman dengan ulah Belanda, pada 1614 Masjid Wawane dipindahkan ke Kampung Tehala yang berjarak 6 kilometer sebelah timur Wawane. Tempat kedua masjid itu berada di suatu daratan yang banyak tumbuh pepohonan mangga hutan atau mangga berabu yang dalam bahasa Kaitetu disebut *wapa*. Itulah sebabnya masjid itu diganti namanya menjadi Masjid Wapauwe yang kira-kira berarti “masjid yang dibangun di bawah pohon mangga berabu” pada sebidang tanah yang disebut *teon samaiha*.

Dalam *Hikayat Tanah Hitu*, Al-Kisah XXVI, yang ditulis salah seorang penyiar Islam di Maluku, Imam Rijali, yang kemudian dikutip Rumphius, tahun 1700, dikisahkan pembangunan masjid Negeri Hila dilaksanakan dalam tiga fase dengan tiga bentuk atau arsitektur bangunan masjid yang berbeda. Bangunan Masjid pertama berdiri pada abad ke-12 berbentuk surau tergantung dengan empat pilar penyanggah. Bangunan masjid kedua pada abad ke-14 berbentuk piramid dan bangunan ketiga abad ke-18 yang masih bertahan hingga saat ini.

Pada 1646, Belanda akhirnya menguasai seluruh Tanah Hitu. Dalam rangka kebijakan politik ekonominya, Belanda melakukan proses pemindahan penduduk dari daerah pegunungan —tidak terkecuali penduduk kelima negeri tersebut— ke Negeri Hitu. Proses pemindahan lima negeri itu terjadi pada 1664—tahun ini kemudian ditetapkan sebagai tahun berdiri Negeri Kaitetu.

Di masjid tersebut juga tersimpan *mushaf* al-Quran yang konon termasuk tertua di Indonesia. Yang tertua adalah *mushaf* Imam Muhammad Arikulapessy, imam pertama Masjid Wapauwe, yang selesai ditulis tangan pada 1550 tanpa iluminasi atau hiasan pinggir. Lainnya adalah *mushaf* Nur Cahya, cucu imam Muhammad Arikulapessy, yang selesai ditulis pada 1590, juga tanpa iluminasi dan ditulis tangan pada kertas produk Eropa. Selain al-Quran, karya Nur Cahya lainnya adalah kitab *barzanji* atau syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, sekumpulan naskah khotbah seperti naskah khotbah Jumat pertama

Ramadhan 1661 Masehi, Kalender Islam tahun 1407 Masehi, sebuah *falaqiah* (peninggalan) serta manuskrip Islam lain yang berumur ratusan tahun. Seluruh peninggalan sejarah tersebut, saat ini merupakan pusaka Marga Hatuwe yang masih tersimpan dengan baik di rumah pusaka Hatuwe yang dirawat oleh Abdul Rachim Hatuwe, keturunan ke-12 Imam Muhammad Arikulapessy. Jarak antara rumah pusaka Hatuwe dengan Masjid Wapauwe hanya 50 meter.

Dalam cerita rakyat setempat dikisahkan ketika masyarakat Tehala, Atetu dan Nukuhaly turun ke pesisir pantai dan bergabung menjadi negeri Kaitetu, Masjid Wapauwe masih berada di dataran Tehala. Namun, pada suatu pagi, ketika masyarakat bangun dari tidurnya masjid itu telah berada di tengah-tengah permukiman penduduk dengan segala kelengkapannya. Menurut kepercayaan masyarakat Kaitetu, masjid itu berpindah secara gaib. Sementara itu, kondisi *mushaf* Nur Cahya beserta manuskrip tua lainnya tampak terawat meskipun sudah mengalami sedikit kerusakan seperti berlubang kecil, sebagian seratnya terbuka dan tinta yang pecah akibat udara lembab.

Masjid yang masih dipertahankan arsitektur aslinya itu berdiri di atas sebidang tanah yang oleh warga setempat disebut *teon samaiha*. Letaknya di antara pemukiman penduduk Kaitetu dalam bentuk yang sangat sederhana. Konstruksinya ber dinding *gaba-gaba* (pelepah sagu yang kering) dan beratapkan daun rumbia, masih berfungsi dengan baik sebagai tempat bersalat Jumat ataupun salat lima waktu meski sudah ada masjid baru di desa itu.

Bangunan Masjid Wapauwe berdenah bujursangkar dengan ukuran 10 x 10 meter, sedangkan bangunan tambahan yang merupakan serambi berukuran 6,35 x 4,75 meter. Bangunan asli pada saat pembangunan tidak memiliki serambi. Meski kecil dan sederhana, masjid ini mempunyai beberapa keunikan yang jarang dimiliki masjid lainn yaitu konstruksi bangunan induk dirancang tanpa memakai paku tetapi menggunakan pasak kayu. Pernah direnovasi pertama kali oleh pendirinya, Jamilu, pada 1464 tanpa mengubah bentuk aslinya. Meski pernah mengalami dua kali pemindahan, bangunan inti masjid tetap asli. Bangunan mengalami renovasi kedua kali pada 1895 dengan penambahan serambi di depan atau bagian timur masjid.

Secara spiritual, puncak atap masjid Negeri Hila memiliki makna simbolik.

Pemahaman masyarakat Negeri Hila terhadap tiang alif tidak menyebut *mamolo* seperti lazimnya masyarakat lain di Tanah Jawa. Masyarakat Hitu lebih menyebutnya sebagai “tiang alif” karena bentuknya seperti abjad pertama Arab, berdiri tegak lurus di puncak atap dengan memberi mahkota. Hiasan tiang alif memperindah seluruh fisik bangunan masjid itu dari berbagai sudut pandang. Apalagi ditambah dengan ornamen seni tangan mengukir mengelilingi ruang Masjid.

Terdapat hiasan berupa ukiran delapan sisi pada puncak atap masjid yang mengandung makna penjurur mata angin bagi aktivitas manusia secara ekonomi, pertanian, dan kelautan. Empat ventilasi di bagian perut tiang alif bermakna memberi perlindungan kepada masyarakat. Ukuran panjang/tinggi tiang mencapai lima meter melambangkan salat lima waktu, tetapi ada juga yang memberi makna lima rukun Islam.

9.3 Warisan Ternate

Imperium di timur Nusantara yang dipimpin Ternate memang telah runtuh sejak pertengahan abad ke-17, namun pengaruh Ternate sebagai kerajaan/kesultanan dengan sejarah yang panjang masih terus terasa hingga berabad kemudian. Ternate memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk peradaban yang bernuansa Islam di Nusantara bagian timur khususnya di Sulawesi bagian utara dan pesisir timur, dan Maluku. Pengaruh itu mencakup agama, adat-istiadat dan bahasa.

Ternate memiliki peran yang besar dalam upaya pengislaman dan pengenalan syariat Islam di wilayah timur Nusantara bahkan hingga bagian selatan Filipina, seperti di Pulau Mindanao dengan Kesultanan Sulu. Bentuk organisasi kesultanan serta penerapan syariat Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh Sultan Zainal Abidin pada abad ke-15 menjadi standar yang diikuti semua kerajaan di Maluku hampir tanpa perubahan yang berarti.

Kedudukan Ternate sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan (*lingua franca*) di berbagai wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Bahasa Ternate memiliki pengaruh besar terhadap bahasa Melayu yang digunakan masyarakat timur Nusantara.¹ Sebanyak 46 persen kosa kata bahasa Melayu di Manado diambil dari bahasa Ternate. Kini, bahasa Melayu-Ternate digunakan luas di Nusantara timur terutama Sulawesi Utara, pesisir timur Sulawesi Tengah dan Selatan, Maluku dan Papua pantai utara atau pesisir barat dengan dialek yang berbeda-beda. Dua naskah surat Sultan Ternate, dari Sultan Abu Hayat II kepada Raja Portugis 27 April dan 8 November 1521, diakui sebagai naskah Melayu tertua di dunia setelah naskah Melayu *Tanjung Tanah* dari Kerinci (Jambi). Kedua surat Sultan Abu Hayat tersebut saat ini masih tersimpan di Museum Lisbon, Portugis.

9.4 Masjid Sultan Ternate

Masjid Sultan Ternate sekarang terletak di kawasan Jalan Sultan Khairun, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Masjid itu menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Namun, hingga kini masjid itu telah mengalami beberapa kali penambahan. Pada bagian kiri dan kanannya terdapat bangunan lain yang dibangun tahun 2000-an.

Diperkirakan, Masjid Sultan telah dirintis sejak masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin (1486–1500); dugaan lain pembangunan Masjid Sultan baru dilakukan sekitar 1606 saat Sultan Saidi Barakati berkuasa (1583–1606). Sumber lain menyebutkan bahwa Masjid Sultan Ternate dibangun semasa pemerintahan Sultan Fatahillah pada 1610, dan tenaga ahlinya bernama Imam Kayoe Baba yang berasal dari luar Ternate.

1 Bahasa Melayu termasuk rumpun bahasa Austronesia yang telah berkembang jauh sebelum milenium pertama tarikh Masehi. Di Nusantara penuturnya cukup luas, meliputi lebih dari 75 persen penduduk Nusantara. Di Maluku, rumpun bahasa ini berkembang di daerah sebelah utara Maluku dan pantai utara Papua. Halmahera dan sekitarnya dapat menjadi kunci penetapan lokasi tanah asal dari penduduk yang berpenutur rumpun bahasa Austronesia. Keluarga bahasa Halmahera Utara terdiri atas rumpun bahasa Halmahera Utara bagian barat, Halmahera Utara bagian barat laut, Halmahera Utara bagian tengah, dan Halmahera Utara bagian selatan. Selain digunakan oleh orang Ternate, bahasa Ternate juga menjadi *lingua franca* di antara kelompok etnik di wilayah Maluku Utara (lihat Andili dalam Masinambow [ed.] 1980).



Gambar 9.2
Foto Masjid Sultan Ternate

Hingga kini belum ditemukan kepastian kapan Masjid Sultan Ternate dibangun. Akan tetapi, melihat kenyataan sejarah, sebelum Sultan Saidi Barakati naik tahta, Kesultanan Ternate telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang keagamaan, ekonomi, maupun angkatan perang. Perjuangan Sultan Khairun (1534–70) yang dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Sultan Baabullah (1570–83), mengusir pasukan Portugis, misalnya, menjadi salah satu fase kegemilangan Kesultanan Ternate sekitar setengah abad sebelum Sultan Saidi Barakati berkuasa. Dengan demikian, perkiraan bahwa Masjid Sultan Ternate baru dibangun pada awal abad ke-17 tidak memiliki alasan yang cukup kuat.

Sebagaimana Kesultanan Islam lainnya di Nusantara, Masjid Sultan Ternate dibangun di dekat Kedaton Sultan Ternate, sekitar 100 meter sebelah tenggara kedaton. Posisi masjid berkaitan dengan peran pentingnya dalam kehidupan beragama di Kesultanan Ternate. Tradisi atau ritual agama yang diselenggarakan kesultanan selalu berpusat di masjid itu. Masjid Sultan Ternate dibangun dengan

komposisi bahan yang terbuat dari batu dengan bahan perekat dari campuran kulit kayu pohon kalumpang.

Masjid Sultan Ternate berbentuk empat persegi dengan atap tumpang limas yang setiap tumpang dipenuhi terali berukir. Atapnya ditopang 313 batang tiang, terdiri dari empat tiang utama (sokoguru), 12 tiang penyangga dan pembantu. Denah bangunan yang empat persegi itu berukuran 22,40 x 39,30 meter. Pada bagian depan terdapat serambi dengan dinding di bagian utara dan selatan. Pada bagian timur, ketinggian dinding hanya sepertiga bagian tinggi dinding keseluruhan. Pada bagian atas dinding dipasang teralis. Gaya arsitektur tersebut tampaknya khas masjid-masjid awal di Nusantara, seperti halnya masjid pertama di Tanah Jawa yang atapnya tidak berbentuk kubah melainkan atap tumpang limasan bersusun lima. Pada beberapa bagian tampak arsitektur bergaya Romawi dan Persia.

Pada bagian kiri dan kanan serambi terdapat bagian yang menempel dengan dinding serambi yang berfungsi sebagai tempat wudu. Pada sisi selatan, di samping tempat wudu terdapat bak air berbentuk empat persegi panjang. Baik air itu diberi dinding setengah bagian dan atap yang disangga tiang. Pintu masuk menuju tempat berwudu terdapat di sisi selatan.

Atap serambi tidak bersatu dengan ruang utama tetapi bersambung dengan dinding timur ruang utama tersebut. Bangunan induk mempunyai atap tumpang bersusun lima. Atap tumpang ini aslinya dibuat dari jalinan rumbia, tetapi sekarang sudah diganti dengan seng. Pada tingkat teratas yang berbentuk kerucut pada keempat sisinya terdapat ventilasi yang berbentuk empat persegi panjang dengan besi tegak lurus, dan di bagian atasnya terdapat atap. Pada puncak atap terdapat tiang yang disebut 'tiang alif'.

Pada bagian depan masjid terdapat bangunan gapura bertingkat dua. Di lantai bagian atas gapura terdapat ruangan yang mungkin berfungsi sebagai tempat azan. Bentuk atapnya bersusun dua (atap tumpang) dengan puncak berbentuk kerucut tetapi tidak mempunyai tiang alif. Tangga naik terdapat di sisi utara. Secara keseluruhan bangunan ini berukuran 3 x 4,2 meter dengan tinggi 8 meter.

Secara keseluruhan bentuk arsitektur bangunan masjid Sultan Ternate menggambarkan campuran unsur budaya dari berbagai bangsa atau daerah, seperti dari Arab, Persia, dan Jawa. Meskipun demikian, bangunan masjid Maluku tetap menunjukkan ciri khasnya yaitu memiliki bentuk tiang alif pada bagian puncak atap.

9.5 Masjid Kesultanan Tidore

Pemandangan yang menarik dari Pulau Tidore, khususnya ibu kota Soasio, adalah bangunan masjid dan musala yang banyak ditemukan mulai dari daerah kota di pantai hingga di desa terpencil di lereng gunung. Sebut saja misalnya di Desa Gurabunga di lereng Gunung Kie Matubu ditemukan dua buah bangunan masjid. Banyaknya bangunan masjid di Tidore berkaitan dengan banyak tarekat yang berkembang di kalangan penduduk.

Masjid Kolano atau Masjid Besar, dibangun pada 1700 pada masa pemerintahan Sultan Djamaludin. Masjid yang dirancang oleh Bela Tudho itu menggunakan bahan kayu, batu, semen, dan ilalang, memakan waktu sekitar sepuluh tahun dan mulai digunakan pada 1710. Atap terbuat dari ilalang dan daun sagu sehingga juga dikenal dengan sebutan Masjid Sigi Palang. Letaknya di Kota Soasio, menghadap ke arah laut, sekitar 100 meter ke arah barat dari Kedaton Tidore.



Gambar 9.3
Masjid Sigi Kolano, Masjid Kesultanan Tidore

Pada 1884 dilakukan penggantian atap dengan bahan seng dan pada 1984 dilakukan penggantian serupa untuk kedua kalinya. Selain itu, lantai yang sejak awal berupa tanah liat dilapis ubin. Bangunan masjid berdenah bujur sangkar dengan ukuran 21 x 21 meter, dan berdiri di atas lahan berukuran 26 x 26 meter. Pada areal masjid terdapat bangunan yang disebut *stanyer* sebagai tempat beduk yang disebut tifa. Ketika tiba waktunya salat, tifa dibunyikan sebanyak 29 dan 30 yang melambangkan jumlah hari dalam sebulan tarikh Hijriah.

Menuju ruang salat terdapat teras atau serambi yang disebut *gandaria* yang melewati tujuh teratak tangga. Atap ruang salat disangga empat tiang utama setinggi tujuh meter. Di dalam ruang salat terdapat dua mimbar; satu sebagai panggung khotbah dan satu mimbar berhiaskan kelambu putih sebagai tempat salat sultan. Sebagai pengurus masjid ditetapkan seorang kadi yang dibantu enam imam yang biasa disebut 'imam soa'. Keenam imam melaksanakan tugas secara bergiliran.

Menjelang salat berjamaah—misalnya salat Jumat, salat tarawih, dan malam *lailatul qadar*—dikumandangkan azan oleh empat orang muazin secara bersamaan dengan nada yang sama. Mereka mampu melakukannya dengan langgam dan panjang-pendek lafal yang sama. Pola azan empat muazin tersebut berasal dari tradisi sejak zaman awal masuk Islam di Maluku (Setyarakhmadi 2015).

Pada pagar depan halaman masjid terdapat bangunan gapura yang pada bagian atasnya terdapat ruangan. Bentuk atapnya, Seperti terdapat pada bangunan masjid yang lain, bentuk atap Masjid Kolano berupa tumpang susun dua. Ruangan yang terdapat di bagian atas gapura dipakai sebagai tempat muazin mengumandangkan azan. Sekarang bagian itu tidak difungsikan lagi seperti pada awalnya.

9.6 Islam dan Arsitektur Masjid

Pada umumnya, pemandangan yang mencolok pada bangunan masjid di wilayah Maluku adalah bentuk atapnya yang berupa atap tumpang. Dari bentuk arsitektur atap masjid itu dapat diketahui perkembangan pengaruh Islam di Maluku karena masjid merupakan ikon utama perkembangan Islam itu sendiri. Pada umumnya bangunan masjid berbentuk bujur sangkar sama sisi dengan atap tumpang antara tiga hingga lima susun. Bentuk arsitektur demikian mengingatkan bangunan masjid di Jawa. Dari kesamaan bentuk itu dapat dimunculkan tesis bahwa masjid di Maluku berhubungan dengan Islam di Jawa. Hal itu dapat ditelusuri dari latar kesejarahan penyebaran Islam di Maluku melalui aktivitas perdagangan dengan Jawa. Para saudagar Maluku membawa rempah ke bandar-bandar di Jawa untuk dijual. Di Jawa mereka juga belajar Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Zainal Abidin pada 1480-an.

Sangat mungkin bentuk arsitektur masjid di Jawa, yang akhirnya menyebar di Maluku, mendapat pengaruh kebudayaan India, dalam hal ini pengaruh Hindu-Buddha (Tjandrasmita 2009: 239). Arsitektur bangunan masjid awal merujuk pada arsitektur masjid yang banyak dipengaruhi unsur kebudayaan Hindu-Jawa atau bahkan budaya Jawa. Sebuah penelitian tentang masjid-masjid di Maluku berhasil melihat perbedaan karakteristik bangunan masjid di Maluku yang

memiliki suatu kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki bangunan masjid lainnya di Nusantara. Ciri khas arsitektur masjid di Maluku antara lain memiliki tiang alif yang tidak ditemukan pada masjid-masjid di belahan Nusantara lain (Handoko 2013:). Tiang alif adalah sebatang tiang seperti penangkal petir yang ditempatkan di puncak atap masjid. Pada bagian pangkal tiang alif terdapat hiasan pada empat sudutnya.

Tiang Alif merupakan bagian atap yang paling tinggi dan kecil yang dihiasi dengan sebuah tombak berornamen sebuah bola atau kubus.² Hiasan tiang alif merupakan perwujudan paham tarekat sufi pada masyarakat di Maluku, khususnya di Maluku bagian tengah. Tiang alif dianggap sebagai simbol ketauhidan. Ia juga melambangkan tingkat ketauhidan seorang muslim yang telah melampaui tingkat-tingkat syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat sehingga mencapai kesempurnaan tertinggi yakni menuju Ketuhanan yang Tauhid. Pada bangunan masjid masa kini, tiang alif biasanya disulih dengan tulisan "Allah" dalam aksara Arab.

Bangunan masjid di Indonesia abad ke-16/17 memiliki bentuk kekhasan tersendiri yang pada dasarnya sama mulai dari Aceh di ujung barat hingga Maluku di ujung timur (Reid 1998). Bentuk denahnya bujur sangkar dengan sisi yang sama, di sebelah timur terdapat serambi, dan di bagian dalam terdapat empat buah tiang sokoguru untuk menopang atap dari jerami atau ijuk yang berlapis-lapis. Tidak dapat disangkal lagi bahwa bentuk atap yang berlapis-lapis menggambarkan bentuk Gunung Meru pada kepercayaan Hindu-Jawa. Di sekeliling halaman terdapat pagar tembok bata. Gambaran sebuah kompleks masjid seperti ini sudah umum ditemukan di seluruh Maluku.

Pada umumnya, bentuk atap masjid memiliki kesamaan, yaitu berupa atap tumpang tiga hingga lima, makin ke atas makin kecil (van Dijk dalam Nas dan Vletter [ed.] 2009: 52–8). Bentuk atap tumpang ini merupakaninggalan tradisi Nusantara sebelum kedatangan agama Islam (Ambary 1998: 48). Kadang-kadang di sekeliling serambi masjid terdapat parit, di bagian barat laut atau barat terdapat ruang yang menonjol yang disebut mihrab, dan di halaman samping atau belakang mihrab terdapat kompleks makam.

2 Deskripsi Pijper, dikutip van Dijk dalam Nas dan Vletter [ed.] (2009).

Budaya materi melalui data arkeologi dari Maluku dapat memberikan informasi tentang dari mana asal pengaruh Islam. Langsung atau tidak langsung, arsitektur bangunan masjid kuno di Maluku tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Islam dari Jawa atau India, misalnya pada bentuk atap tumpang. Bentuk atap tumpang pada masjid di Maluku menggambarkan persamaan dengan bangunan masjid kuno di Jawa; demikian pula konsepsi yang melatarinya. Jika suatu kompleks masjid di Jawa dikelilingi makam, maka kompleks masjid di Maluku juga dikelilingi oleh makam. Bangunan makam biasanya ditempatkan di bagian belakang mihrab, menjadikan jasad yang dikuburkan seolah-olah selalu disalatkan. Namun, bentuk nisan makam di Maluku menyerupai bentuk gada (*menhir*) dan tidak ditemukan tulisan tentang nama yang dimakamkan.

9.7 Jejak Persia di Maluku

Hubungan perdagangan antara Persia dan Nusantara (pada waktu itu dengan Sriwijaya) berlangsung pada sekitar abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu komoditi perdagangan dari Persia berupa barang-barang yang terbuat dari kaca atau gelas yang dikenal dengan sebutan *Persian glass*. Benda-benda itu berbentuk vas, *karaf*, piala, dan mangkuk. Dari Sriwijaya yang salah satu pelabuhannya adalah Barus (Fansur), para pedagang Persia dan Asia Barat membawa kapur barus, kemenyan, getah damar, dan rempah-rempah. Komoditi perdagangan itu sangat digemari di Asia Barat, Persia, dan India sebagai bahan wangi-wangian.

Persian glass ditemukan di situs-situs arkeologi yang diduga merupakan bekas pelabuhan kuno. Sebuah penelitian arkeologis di Situs Labo Tua, Barus, berhasil menemukan sejumlah besar barang-barang kaca Persia dalam bentuk pecahan dan utuhan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, benda-benda itu mungkin sekarang di tempat asalnya sudah tidak diproduksi lagi. Pelabuhan tempat barang tersebut dikapalkan antara lain Siraf yang terletak di pantai timur Teluk Persia.

Perkembangan Islam di Nusantara melahirkan kerajaan yang bercorak Islam. Salah satu di antaranya adalah Samudra Pasai yang lahir pada sekitar abad ke-13 dengan penguasa pertama adalah Sultan Malik as-Saleh (mangkat 1297). Jejak kerajaan itu dapat ditelusuri dari tinggalan budayanya yang berupa batu nisan

Sultan Malik as-Saleh. Ada dua hal yang dapat dicermati pada batu nisan itu dan merupakan petunjuk pengaruh Persia. Aksara yang dipahatkan pada batu nisan merupakan aksara *shulus* yang cirinya berbentuk segi tiga pada bagian ujung. Gaya aksara jenis ini berkembang di Persia sebagai suatu karya seni kaligrafi. Kalimat yang dipahatkan bernafaskan sufi semisal "Sesungguhnya dunia ini fana, dunia ini tidaklah kekal, sesungguhnya dunia ini ibarat sarang laba-laba."

Indikator Persia lain ditemukan pada batu nisan Na'ina Husam al-Din berupa kutipan syair yang ditulis penyair kenamaan Persia, Syaikh Muslih al-din Sa'di (1193–1292). Ditulis dalam bahasa Persia dengan aksara Arab, batu nisan itu merupakan satu-satunya yang ditemukan di Asia Tenggara. Bentuknya indah dengan hiasan pohon yang distilir atau disamarkan dan hiasan kaligrafi yang berisikan kutipan syair Persia dan kutipan al-Quran II: 256 ayat Kursi.

Di kawasan timur Nusantara, termasuk Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusatenggara Timur, pengaruh Persia dalam bentuk budaya materi, seperti batu nisan bertulisan aksara *kufik* hingga kini belum ditemukan. Beberapa upacara peringatan Islam masih ditemukan tetapi dalam bentuk lain, seperti di Jawa dikenal ziarah ke makam para wali (Wali Sanga), upacara tabot (peringatan wafatnya Hasan), dan naskah seperti *Hikayat Amir Hamzah* di Aceh. Meski demikian, di daerah Moloko Kie Raha dan kepulauan di sebelah selatannya masih tumbuh subur berbagai aliran tarekat. Kesemuanya merupakan indikator kehadiran pengaruh Persia yang berkembang sebagai akibat aktivitas perdagangan rempah pada masa lampau.

Meskipun di belahan barat Nusantara banyak ditemukan situs arkeologi yang memberi petunjuk hubungan perdagangan dengan Persia, India, dan Arab, namun hingga kini belum ditemukan hal serupa di wilayah timur. Padahal, faktanya komoditi perdagangan sejak awal tarikh Masehi, yaitu rempah-rempah, semuanya didatangkan dari kawasan timur Nusantara. Boleh jadi pada masa itu, bandar-bandar niaga yang terdapat di kawasan sebelah barat Nusantara merupakan bandar tempat penimbunan (*entrèport*). Komoditi rempah-rempah didatangkan dari Maluku, kemudian saudagar dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok mengambilnya di bandar-bandar penimbun tersebut. Para saudagar dari Maluku membawa langsung barang dagangannya ke bandar-bandar

penimbun tersebut sehingga saudagar Arab, Persia, dan India, tidak terlampau jauh mengambilnya. Menurut berita Cina, hanya saudagar Tionghoa yang mengambil langsung ke Maluku—itu pun tidak terlalu banyak dan tidak sering (Groeneveldt 1960). Bandar-bandar penimbun tersebut antara lain di Barus, Kota Cina (Medan), Lamuri, Kampe, Jambi, Palembang, Malaka, dan beberapa bandar di pantai utara Jawa.

9.8 Wali Sanga, Orang Suci dan Tasawuf

Di Tanah Jawa, Wali Sanga dikenal sebagai sembilan orang *Wali-Ullah* yang merupakan penyiur-penyiur terkemuka agama Islam. Dengan giat mereka menyebarkan dan mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam. Pada waktu penduduk Tanah Jawa masih berkepercayaan lama tentang hal-hal yang gaib, para wali tersebut dipercaya memiliki kekuatan gaib, atau mempunyai kekuatan batin yang berlebih, dan ilmu yang tinggi. Oleh karena itulah mereka dipercaya sebagai pembawa dan penyiur agama Islam ahli dalam tasawuf.

Sesuai dengan sebutannya Wali Sanga berjumlah sembilan orang, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Syekh Siti Jenar. Kebanyakan dari gelar-gelar itu diambil dari nama tempat mereka dimakamkan, misalnya Gunung Jati di dekat Cirebon, Drajat dekat Tuban, Muria di lereng Gunung Muria, Kudus di Kudus, dan sebagainya. Dalam masa hidupnya mereka menyebarkan agama Islam di daerah tempatnya bermukim. Di wilayahnya itu mereka juga membangun masjid sebagai tempat beribadah. Di daerah sekitar kaki selatan Gunung Muria, banyak ditemukan tinggalan makam para wali dan masjid tinggalannya, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Masjid yang dibangun adalah Masjid Demak dan Masjid Kudus.

Di Maluku tidak dikenal wali seperti di Tanah Jawa. Penganut Islam di Maluku hanya mengenal semacam orang suci yang menjadi tokoh masyarakat karena telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam di wilayahnya. Beberapa makam tokoh agama menjadi obyek ziarah. Pada hari-hari tertentu, seperti menjelang bulan Ramadhan, ramai diziarahi umat Islam dari daerah sekitarnya. *Petilasan* orang-orang suci di daerah Maluku terkesan sederhana, tidak ditemukan tulisan

apa pun pada batu nisannya—tidak seperti batu nisan pada makam wali di Jawa. Batu nisan orang suci di Maluku hanya berbentuk seperti gada bahkan beberapa di antaranya seperti batu menhir.

9.9 Tradisi

Walaupun di Indonesia dikenal mazhab Syafi'i dan menganut *sunnah wal jamaah*, namun di kalangan sebagian masyarakat di Nusantara masih ditemukan jejak-jejak Syi'ah yang dikenal berasal Persia (Iran). Di Asia Barat dan di Persia, penganut *sunnah wal jamaah* dan penganut Syi'ah tidak sepaham, terutama dalam hal sumber hukum Islam (*ijma*, kesepakatan para alim ulama). Dalam aliran ini sudah dimulai politisasi agama, terutama pada dasar hukum *ijma*. Kaum Syi'ah menganggap bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah yang masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya *ijma*, dimungkinkan yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dapat menjadi khalifah. Oleh karena itulah yang kaum Syi'ah menganggap al-Quran dan Hadis saja yang menjadi dasar hukum agama Islam, sedangkan *ijma* dan *qiyash* (perumpamaan) tidak perlu.

Runtuhnya kesultanan Syi'ah tidak menyurutkan ajaran yang "telanjur" berkembang di masyarakat. Berbagai ritual Syi'ah menjelma menjadi tradisi yang masih ditemukan di beberapa daerah di Nusantara. Jumlah penganut Syi'ah di Indonesia tidak banyak, sekitar 1 juta. Namun, di beberapa tempat tradisi yang biasa dilakukan umat Syi'ah masih ditemukan, dan secara kontinyu dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

Dapat dikemukakan contoh tentang tradisi Persia/Syiah, misalnya *Asyura* di Jawa. Dalam sistem pertanggalan Jawa berubah menjadi bulan Suro, sebutan untuk bulan Muharram (bulan wafatnya Husein). Peringatan *Asyura* belakangan dikenal dengan sebutan Kasan Kusen. Di Aceh, *Asyura* diistilahkan dengan Bulan Asan Usen. Di Makassar *Asyura* dimaknai sebagai perayaan kemenangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW sehingga masyarakat merayakannya dengan suka cita. Mereka membuat bubur tujuh warna dari warna dasar merah, putih, dan hitam.

Debus atau dabus adalah pertunjukan yang berhubungan erat dengan

tarekat Rifa'iyah. Tarekat ini didirikan oleh Ahmad al-Rifa'i yang wafat pada 1182. Pandangan tarekat ini lebih fanatik dengan ciri-ciri melakukan penyiksaan diri, unjuk mukjizat seperti makan beling, berjalan di atas bara api, menyiramkan air keras ke tubuh, dan menusuk-nusuk tubuh dengan benda tajam. Penganut Rifa'iyah dengan debusnya terdapat di Aceh, Kedah, Perak, Banten, Cirebon, dan Maluku, bahkan sampai masyarakat Melayu di Tanjung Harapan Afrika Selatan. Di Maluku, khususnya di Pulau Haruku, pertunjukan debus disebut ritual *mataénu* atau *cakalele*.

Di beberapa daerah di Nusantara seperti di Aceh dan Banten, tradisi debus masih dapat ditemukan. Di daerah Maluku, warga mengenalnya sebagai *dabus* atau *badabus* atau *taji besi*. Selain sarat makna keagamaan, ritual ini juga lekat dengan tradisi perang melawan penjajah. Tak mengherankan sebab ritual ini tak lepas dari penyebaran agama Islam awal. Tradisi *badabus* adalah elemen yang mengikuti perkembangan Islam awal, dibawa oleh para mubaligh dan saudagar dari Arab yang berada di Ternate dan beberapa daerah di Moloko Kie Raha pada waktu itu. Sebelum belajar Islam secara *kaffah*, para pemeluk Islam dikenalkan dengan kebudayaan terlebih dahulu. *Badabus* ini diajarkan oleh *joguru*, khalifah, atau guru mengaji.

Pelaksanaan ritual *dabus* dipimpin seorang ahli yang disebut syekh (semacam "dukun"). *Dabus* adalah ritual keagamaan yang mulanya berawal sebagai wirid sang syekh untuk mencapai tingkatan iman dan takwa kepada sang Pencipta. Masyarakat yang hendak menggelar *dabus* akan menghubungi seorang syekh. Sang syekh sendiri harus memiliki jamaah zikir yang mengiringinya ketika melakukan ritual *dabus*. Tiga hari sebelum digelar *dabus*, seorang syekh harus menjaga kalbu, pikiran, dan tindakannya agar selalu bersih dan positif. Bahkan ia disarankan untuk berpuasa dalam tiga hari tersebut. Pada malam hari ketika *dabus* digelar, syekh menjalankan salat sunah dua rakaat dan berdoa untuk memohon perlindungan sehingga pekerjaannya benar-benar sesuai dengan ritual keagamaan yang bernafaskan Islam.

Ritual *dabus* menggunakan benda tajam berupa bilah besi runcing yang ditusukkan ke dada. Diperlukan perlindungan yang benar untuk menghindari hal-hal yang membahayakan nyawa pelaku *dabus*. Perlindungan tersebut bukan

berupa alat-alat keselamatan namun berupa doa dari sang syekh. Gelaran dabus diiringi dengan pembacaan ayat-ayat al-Quran dan puji-pujian kepada Allah serta tabuhan rebana. Pemainnya bisa siapa saja, bahkan perempuan, asalkan seorang muslim dan dalam kondisi bersih lahir-batin. Tetapi dalam praktik jarang sekali dilakukan oleh perempuan apalagi jika yang bersangkutan sedang haid. Para pelakon wajib berwudu terlebih dulu dan menjaga kebersihan hati sebelum turun ke arena pertunjukan.

Salah satu fungsi dabus yang mungkin tak banyak diketahui adalah sebagai instrumen perang khususnya dalam mengusir penjajah di tanah Maluku Utara. Salah satu bentuk kehebatan berperang zaman silam adalah kemampuan melakukan dabus.

Tadisi lain adalah 'pukul sapu' yang diselenggarakan setiap tahun seusai bulan suci Ramadhan untuk mengawali bulan Syawal. Acara ritual pukul sapu mulai disemarakkan dengan atraksi-atraksi *sawat*, *hadrat*, dan seni *buju anak para tidor*. Kekayan peradaban Islam ini setiap bulan Syawal diberlakukan puasa sunat selama 6 hari menjelang pukul sapu mulai dari tanggal 2 hingga 6 Syawal. Setelah puasa, digelar tahlilan untuk mendoakan para leluhur. Sementara itu, ada yang bertugas mengambil lidi dari pohon enau. Setelah itu, membuat minyak *mamala* dengan menggunakan guci dan membaca ritual di rumah raja Mamala. Minyak mamala setelah ritual pembacaan mantra, minyak mamala didistribusikan dalam botol-botol kecil untuk persiapan masing-masing kelompok saat acara pukul sapu dimulai.

Sebelum acara pukul sapu (*uku ala maihate*) dimulai, dilakukan persiapan personel sebanyak seratus orang yang dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 50 orang berbaris dengan deretan yang teratur seperti saf pada saat salat. Setiap orang mendapat satu genggam sapu lidi yang siap dipakai untuk memukul lawan mainnya. Permainan ini menelusuri lorong dan menyanyikan lagu spiritual sebagai spirit membangkitkan semangat jihad. Disediakan jeda waktu sekitar 1-3 menit bagi peserta untuk saling berbalas cambukan dengan sapu lidi yang telah disiapkan.

Di daerah Kabupaten Maluku Tengah dikenal tradisi *abda'u* yang dilakukan pada setiap hari raya Idul Adha. Ritual *abda'u* dilakukan setelah selesai salat Idul

Adha. Sebelum ritual dilakukan, pelakunya berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Ritual ini semacam napak tilas sejarah Nabi Ibrahim dalam bentuk teater di tengah-tengah masyarakat Maluku Tengah. Beberapa teladan keluarga Nabi Ibrahim adalah pengalaman spiritual Ibrahim dalam usaha mencari Tuhan, ketakwaan Ibrahim menjalankan perintah Allah, kepatuhan Ismail sebagai anak dalam mematuhi orang tuanya, dan ketangguhan Sitti Hajar menghadapi cobaan hidup sambil bermunajad pada Allah.



DAFTAR PUSTAKA

- (1973), "Tiga Pengertian Istilah Maluku dalam Sejarah," dalam *Bunga Rampi Sejarah Maluku*, Jilid 1. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
- (1975), "Origin of South Celebes Historical Writing," dalam Soedjatmoko, dkk. (ed.), *An Introduction to Indonesian Historiography*. Ithaca dan London: Cornell University Press.
- (1976), "Dokumen-dokumen VOC dari Abad XVIII," *Buletin Yaperna*, III (17).
- (1978), "The Introduction of Islam and Growth of Moslem Cities in the Indonesian Archipel," dalam Haryati Soebadio dan Carine a du Marchie Sarvas (ed.), *Dinamics of Indonesian History*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
- (1983), "Sulawesi Selatan Sebelum Datangnya Islam Berdasarkan Kesaksian Bangsa Asing," dalam Marcel Bonneff, dkk., *Citra Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Archipel dan Sinar Harapan.
- (1984), "Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis," Disertasi Doktor. Jakarta: Universitas Indonesia.
- (1998), "The Malaka Malay Diaspora in Makassar c. 1500–1669," *JMBRAS*, 71 (1).

- (2002), *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara* (terj. Sori Siregar, Hasif Amini, Dahris Setiawan). Jakarta: LP3ES.
- (2006), "Melacak Jejak Nenek Moyang Orang Wotu, dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi*. Makassar: Jendela Dunia.
- (2007), *Trade and Society in the Straits of Malaka: Dutch Malaka and English Penang 1780–1830*. Singapura: National University of Singapore.
- (2009), "Islam in the Archipelago over the 10th Century AD as Reflected in Cultural Heritage," dalam Mokhtar Saidin dan Kamarudin Ab Razak (ed.), *Proceedings of the International Seminar on Sharing Our Archaeological Heritage*. Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor.
- (2009), "Pluralisme dan Kemajuan Makassar Abad Ke-17," dalam Roger Tol, Kees van Dijk, dan Greg Acciaoli (ed.), *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Makassar: Inninawa; Jakarta: KITLV.
- (2012), *Datuk ri Tiro Penyiar Islam di Bulukumba: Misi, Ajaran, dan Jati Diri*. Yogyakarta: Ombak.
- (2013), "Karakteristik Arsitektur Masjid Kuno dan Perkembangan Islam di Maluku," *Amerta*, Vol. 31 (1).
- (209), *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Abdoerahman, Paramita (1973), "Peninggalan-peninggalan yang Berciri Portugis di Ambon," dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku*, Jilid 1. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
- Ahmad, A. Samad (1979), *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Amal, M. Adnan (2016), *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ambary, Hasan Muarif (1998), *Menemukan Peradaban: Arkeologi dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Amin, Enci (2008), *Syair Perang Mengkasar*. Makassar: Inninawa; Jakarta: KITLV.
- Amir, Amrullah (2015), "Sejarah Masyarakat Melayu di Sulawesi Selatan 1600–1942: Identiti dan Kuasa," Disertasi Doktor. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Andaya, Leonard Y. (1981), *The Heritage of Arung Palakka: A History of South*

Sulawesi (Celebes) in Seventeenth Century. The Hague: Martinus Nijhoff.

- Andili, A. Bahar (1980), "Profil Daerah Maluku Utara," dalam E. K. M. Masinambow (ed.), *Halmahera dan Raja Ampat: Konsep dan Strategi Penelitian*. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Asba, A. Rasyid (2011), "Keserumpunan Melayu Bugis: Modal Politik Regionalitas ASEAN yang Terlu-pakan," Makalah Seminar Serumpun.
- Azra, Azyumardi (1994), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Azra, Azyumardi (2012), "Tradisi Sosial Budaya Islam," dalam Taufik Abdullah dan A. B. Lopian (ed.), *Indonesia dalam Arung Sejarah*, Jilid 3: Kedatangan dan Peradaban Islam. Jakarta: Ichtiar W. van Hoeve.
- Banerjee, Anjana (2005), *Lenski Theory of Evolutionary Sociology*. [Tanpa Kota]: Global Vision Publishing House.
- Bigalke, T. W. (1982), *A Social History of Tana Toraja 1870–1965*. Aan Arbor, Michigan.
- Blok, R. (1917), *History of the Island of Celebes*. Calcutta: Gazette Press.
- BMAW (2003), "Menelusuri Jejak Tomanurung di Bumi Wotu." Badan Musyawarah Adat Wotu.
- Boxer, C. R. (1973), *The Dutch Seaborne Empire 1600–1800*. Middlesex: Penguin Books.
- Bulbeck, David F. dan Bagyo Prasetyo (2006), "Two Millenia of Socio-Cultural Development in Luwu, South Sulawesi, Indonesia," dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi*. Makassar: Jendela Dunia.
- Bulbeck, David F. dan Ian Caldwell (2000), *Land of Iron: The Historical Archaeology of Luwu and the Cendrana Valley*. Hull: University of Hull; Canberra: Australian National University.
- Bulbeck, David F., Bagyo Prasetyo, dan Iwan Sumantri (2006), "Laporan Ringkas Penelitian Oxis Project 1988," dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi*. Makassar: Jendela Dunia.
- Caldwell, Ian (2005), "Kronologi Raja-raja Luwu Hingga 1611," dalam Kathryn

- Robinson dan Mukhlis PaEni (ed.), *Tapak-tapak Waktu: Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar: Inninawa.
- Chambert-Loir, Henri (1998), "Dato' ri Bandang: Legenda Pengislaman Daerah Sulawesi Selatan," dalam Daniel Perret dan Puteri Rashidah Megat Ramli (ed.), *Hubungan Budaya dalam Sejarah Dunia Melayu: Artikel Pilihan dari Majalah Archipel*. Kuala Lumpur: EFEO dan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Childe, V. Gordon (1979), "The Urban Revolution," dalam Gregory L. Possehl (ed.), *Ancient Cities of the Indus*. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.
- Coolhas, W. Ph. (1923), "Kroniek van het Rijk Batjan," *Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Kon. Bat. Genootschap van Kunsten en Wetenschap*, LXIII (2).
- Cortesaõ, Armando (ed.) (1967), *The Suma Oriental of Tomé Pires and the Book of Francisco Rodrigues*. Liechtenstein: Kraus Reprint, Ltd.
- Cummings, William (2007), *A Chain of Kings: Makassarese Chronicle of Gowa and Talloq*. Leiden: KITLV Press.
- Damste, H. T. (1942), "Nadere Siripoean-gegevens," *BKI*, 101.
- de Clerq, F. S. A. (1890), *Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate*. Leiden: E. J. Brill.
- de Graaf, H. J. dan Th. G. Pigeaud (1974), "De eerste Moslimse vorstendommen op Java," *BKI*, 69.
- Deinum, Hk. dan F. Wit (1949), "De kruidnagel," dalam C. J. J. van Hall dan C. van der Koppel (ed.), *Landbouw in de Indische Archipel*, Jilid IIB. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Drewes, G. W. J. (1983), "New Light on the Coming of Islam to Indonesia," dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddhique, dan Yasmin Hussain (ed.), *Reading on Islam in South-East Asia*. Singapura: Institute of South-East Asian Studies.
- Dum, Rose E. (2011), *Petualangan Ibnu Batuta, Seorang Musafir Muslim Abad Ke-14* (terj. Amir Sutaarga). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Effendy, Muslim A. R., *Monumen Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Balai Peninggalan dan Cagar Budaya.
- Ferrand, G. (1913/14), *Relations des voyages et textes geographiques arabes, persans et turks relatif-al Extrême-Orient du VIIIe au XVIIe siecles*, 2 volume. Paris.

- Frey, E. (1986), *The Kris: Mystical Weapon of the Malay World*. Singapura: Oxford University Press.
- Galvao, Antonio (1971), *Historia das Moluccas* (terj. Hubert th. M. Jacobs, S.J.). Roma: Jesuit Historical Institute.
- Gervaise, Nicolas (1710), *An Historical Description of the Kingdom of Macasar in the East Indies*. London: Tho, Leigh dan D. Midwinter.
- Gibson, Thomas (2009), *Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300–2000*. Makassar: Inninawa.
- Groeneveldt, W. P. (1960), *Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bhratara.
- Guillot, Claude (2002), *Lobu Tua: Sejarah Awal Barus* (terj). Jakarta: EFO, Association Archipel, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan Yayasan Obor.
- Hadidjaja, Tardjan (1951), *Sedjarah Melaju*. Jakarta: Firma Penerbitan Saptadarma.
- Hafid, Muhammad Yunus (2006), "Kerajaan Luwu Menurut Catatan D. F. van Braam Morris, 1888," dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi*. Makas-sar: Jendela Dunia.
- Hall, D. G. E. (1968), *A Short History of South-East Asia*. London: Macmillan.
- Hamid, Andi Mansur (1988), "Musu Selleng ri Tana Ugi: Awal Keberadaan Agama Islam di Wajo," *Bingkisan* No. 1.
- Hamonic, Gilbert (1983), "Pengantar Studi Perbandingan Kosmogoni Sulawesi Selatan: Tentang Naskah Asal-usul Dewata-dewata Bugis yang Belum Pernah Diterbitkan," dalam Marcel Bonneff, dkk., *Citra Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Archipel dan Sinar Harapan.
- Handoko, Wuri (2006), "Periode Awal Kerajaan Hitu Hingga Masa Surutnya: Retrospeksi Arkeologi Sejarah, *Kapata Arkeologi*, Vol. 2 (3).
- Hourani, George Fadlo (1951), *Arab Sea-Farring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hurgronje, Snouck C. (1996), "Arti Agama Islam bagi Penganutnya di Hindia Belanda," dalam *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje* (terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat). Jakarta: INIS.
- Hussin, Nordin (2001), *Perdagangan dan Peradaban di Laut Malayu*. Bangi: Penerbit Universiti Kebang-saan Malaysia.

- Idris, Soewardi (ed.) (1992), *Selayo*. Jakarta: Ikatan Keluarga Selayo.
- Ilyas, Husnul Fahimah (2011), *Lontaraq Suqkuna Wajo: Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo*. Tange-rang: Lembaga Studi Islam Progresif.
- Jacobs, Hubert M. (ed.) (1971), *A Treatise on the Moluccas*. Roma: Jesuit Historial Institute.
- Johns, A. H. (1987), "Tentang Kaum Mistik Islam dan Penulisan Sejarah," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat Islam: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indone-sia.
- Leirissa, R. Z. (1996), *Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan Sekitar Laut Seram Abad 19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lembaga Alkitab Indonesia (1999), *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Liaw Yock Fong (2011), *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahasnah, Muhammad Husain (2016), *Pengantar Studi Peradaban Islam*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Mahmud, M. Irfan (2003), *Kota Kuno Palopo: Dimensi Fisik, Sosial, dan Kosmologi*. Makassar: Masagena Press.
- Mahmud, M. Irfan, Tanwir L. Wolman, dan Iwan Sumantri (2006), "Re-interpretasi Arkeologi terhadap Dinamika Peradaban Luwu," dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi*. Makassar: Jendela Dunia.
- Manusama, Z. J. (1977), "Hikayat Tanah Hitu: Historie en sociale structuur van de Ambonse Weilanden in het algemeen en van Uli Hitu in het bijzonder tot het midden der zeventiende eeuw," Disertasi Doktor. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.
- Mappangara, Suriadi (ed.) (2004), *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Hingga Tahun 1905*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
- Mappangara, Suriadi dan Irwan Abbas (2003), *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca Press.
- Marassabessy, I. Rahman Abd. (2001), "Masuknya Islam di Ternate: Telaah atas Pemurnian Sejarah Islam di Ternate," dalam M. J. Abdulrahman, dkk., *Ternate Bandar Jalur Sutra*. Ternate: Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial.
- Masinambow, E. K. M. (1987), *Halmahera dan Raja Empat sebagai Kesatuan*

- Majemuk. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mattata, M. Sanusi Daeng (1967), *Luwu dalam Revolusi*. Makassar: Yayasan Pembangunan Asrama Ipmil.
- Matthes, B. F. (1885), "Boeginische en Makassaarsche legenden," *BKI*, 34.
- Mattulada (1976), *Islam di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mees, C. A. (1935), *De kroniek van Koetai: Tekstuitgave met toelichting*. Santport.
- Mollat, Michel (1980), "Historical Contacts of Africa and Madagascar with South and South-East Asia: The Role of Indian Ocean," dalam *Historical Relations Across the Indian Ocean*. Paris: UNESCO.
- Noorduyn, J. (1972), *Islamisasi Makassar*. Jakarta: Bhratara.
- Ohorella, G. A. (peny.) (1999), *Sejarah Kebudayaan Maluku*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pa'tunru, Abdul Razak Daeng (1993), *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Parmentier (1883), *Le discours de la navigation de Jean et Raoul Parmentier de Dieppe*. Paris: Ernest Lereoux.
- Pelras, Christian (2006), *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.
- Pigeaud, Th. G. Th. (1960/63), *Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History*, Vol. 3. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Poerbatjaraka, R. Ng. (1952), *Riwayat Indonesia*, Jilid I. Jakarta: Jajasan Pembangunan.
- Putuhena, Shaleh M. (2001), "Proses Perluasan Agama Islam di Maluku Utara," dalam M. J. Abdulrahman, dkk., *Ternate Bandar Jalur Sutra*. Ternate: Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial.
- Ras, J. J. (2014), *Masyarakat dan Kesusastaan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, Anthony (1988), *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, Vol. 1: The Lands Below the Winds. New Haven dan London: Yale University Press.

- Reid, Anthony (1992), *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*, Vol. 1: Tanah di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Resink, G. J. (t.t.), *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Depok: Komunitas Bambu.
- Rösster, Martin (1990), "Striving for Modesty: Fundamentals of the Religion and Social Organization of the Makassarese Patuntung," *BKI*, 146.
- Rouffaer, G. P. (1905), "Oudste ontdekkingsstochten," dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, Jilid IV. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Rumphius, G. E. (1983), *Ambonsche landbeschrijving* (ed. Z. J. Manusama). Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Sahusilawae (1996), "Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Islam di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah" (tidak diterbitkan). Ambon: Balai Arkeologi.
- Salombe, C. (1986), *Struktur Bahasa Wotu*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Schurhammer, Georg (1977), *Francis Xavier: His Life, His Time*, Vol. II. Roma: Jesuit Historical Institute.
- Selling, Eleanor (1981), "The Evolution of Trading States in Southeast Asia Before the 17th Century," Disertasi Ph.D. Columbia: Columbia University.
- Setyarakhmadi, Kardono (2015), *Melawat ke Timur: Menyusuri Semenanjung Rajaraja*. Yogyakarta: Buku Mojok.
- Sewang, Ahmad (2004), *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Spradley, James P. (1979), *Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Suryanegara, Ahmad Mansur (1999), *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Tahir Al-Haddad, Sayed Alwi bin (1957), *Sedjarah Perkembangan Islam di Timur Djauh* (terj. Dzija Shahab). Jakarta: Almaktab Addaini.
- Tibbets, G. R. (1957), "Early Muslim Traders in South-East Asia," *JMBRAS*, 30 (1).
- Tjandrasasmita, Uka (2000), *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia dari Abad Ke-13 sampai 18 Masehi*. Jakarta: Menara Kudus.

- Utomo, Bambang Budi (2007), "Kapal Asia Tenggara Mengangkut Komoditi dari Berbagai Bangsa," *Varuna*, Vol. 1.
- Valentijn, François (1726/1858), *Oud en nieuw Oost-Indiën*, Vol. Ib: Beschrijving van der Moluccas. Dordrecht, Amsterdam.
- van Braam Morris, D. F. (1888), "Het landschap Loehoe getrokken uit een rapport van gouverneur van Celebes den heer D. F. van Braam Morris," *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, V (XXXII).
- van der Crab (1878), "Geschiedenis van Ternate in Ternataanschen en Maleischen tekst: Beschreven door den Ternataan Naidah met vertaling en aantekeningen door P. A. van der Crab," *BKI*, Vol. 26 (2).
- van Dijk, Kees (2009), "Perubahan Kontur Masjid," dalam Peter J. M. Nas dan Martin de Vletter (ed.), *Masa Lalu dalam Masa Kini Arsitektur di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- van Leur, J. C. (1955), *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*. The Hague: Van Hoeve Bandung.
- Villiers, John (1990), "Makassar: The Rise and the Fall of an East Indonesian Maritime Trading State," dalam J. Kathiritamby-Wells dan J. Villiers (ed.), . . . Singapura: University of Singapore Press.
- Wessels, C. (1949), "De Katholieke Missie in Zuid-Celebes 1525–1668," *Het Missiewerk*, XXVIII.
- Wheatley, Paul (1961), *The Golden Chersonese*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Yamin, Muhammad (1986), *Gajah Mada Pahlawan Persatoean Noesantara*. Jakarta: Balai Pustaka.

BIODATA PENULIS

Amrullah Amir



Amrullah Amir Ph. D lahir di Ujung Pandang, 16 Oktober 1974. Selain menjadi dosen di Departemen Sejarah, Universitas Hasanuddin , Makassar beliau juga menjabat sebagai ketua dewan redaksi Jurnal "Lensa Budaya" Fakultas Ilmu Budaya UNHAS. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Sejarah Sosial Kawasan Timur Indonesia Divisi Humaniora Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin.

Berbagai penelitian dan artikel ilmiah pernah ditulis oleh beliau seperti "*Melacak Jejak Nenek Motang Orang Wotu*" Dalam Iwan Sumantri (Editor), "*Kedatuan Luwu: Dalam Perspektif Arkeologi, Sejarah, Dan Antropologi*", "*Identitas Masyarakat Melayu Di Sepanjang Pesisir Selatan Hingga Barat Daya Sulawesi Selatan*" hingga menjadi pembicara di Konferensi Sejarah Nasional ke-10 dengan tema "*Syahbandar, Kapitan Melayu, Dan Raja: Kisah Keluarga Ince Ali Asdullah Di Bandar Pelabuhan Makassar, 1739-1917*".

Bambang Budi Utomo

Penulis yang bernama lengkap Bambang Budi Utomo adalah seorang peneliti arkeologi yang bekerja pada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai bekerja di institusi penelitian tersebut sejak tahun 1982 dengan melakukan penelitian di situs-situs yang terdapat di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusatenggara Barat. Sebagai peneliti arkeologi, ia lebih memfokuskan penelitiannya pada kajian Śrīwijaya dan Mālayu dengan pendekatan kajian regional. Konsekuensi dari pendekatan regional adalah melakukan penelitian di berbagai tempat yang mendapat pengaruh Śrīwijaya di Sumatra, Kalimantan Barat, Semenanjung Tanah Melayu, dan Thailand Selatan. Meskipun demikian, perhatian terhadap tinggalan budaya yang sejaman dengan Śrīwijaya (abad ke-8-9 Masehi) di Jawa juga menjadi bahan kajiannya. Akhir-akhir ini ia lebih sering memfokuskan kajiannya pada arkeologi dan sejarah bahari. Ada dua alasan untuk kajian itu, yaitu 1) dalam mengkaji Śrīwijaya seharusnya mengkaji juga budaya bahari, 2) memperkenalkan dan menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia adalah bangsa bahari yang tinggal di sebuah Negara Kepulauan, Indonesia.



Seiring perkembangan zaman, Islam pun mengalami proses modernisasi. Aspek ini tak bisa diabaikan sebagai substansi pertumbuhan dan perkembangan sejarah kebudayaan di timur Indonesia. Tanda-tanda kemodernan Islam itu bisa dilihat antara lain pada berdirinya institusi pendidikan Islam, reformasi pesantren, tampilnya intelektual Islam, lahirnya pemikiran kemodernan, dan sebagainya. Patut dicatat bahwa proses modernisasi ini juga memakan waktu yang panjang, tidak jarang memunculkan konflik internal Islam. Hal itu menyiratkan bahwa terdapat keragaman mazhab atau sekadar pandangan dalam Islam yang masuk ke Kepulauan Nusantara.

Dengan rendah hati, buku ini mungkin belum memenuhi harapan "ideal" atas kerangka isi yang telah disebutkan. Masih ditemukan rumpang di sana-sini yang perlu dilengkapi. Kendala waktu penelitian yang terbatas serta kesulitan menemukan sumber baru belum memungkinkan terwujudnya hasil yang optimal. Namun, dengan tetap memberikan apresiasi terhadap upaya penulisnya, buku ini dapat dipandang sebagai rintisan untuk melanjutkan program penelitian dan penulisan sejarah peradaban serupa pada edisi mendatang. Selayaknya, ucapan terima kasih ditujukan kepada para penulis dan pihak-pihak lain yang, langsung ataupun tidak langsung, menyumbang peran penerbitan buku ini. Kritik dan saran pembaca sangat diharapkan sehingga dapat memacu kinerja yang lebih baik.



DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA
2016

